



Peraturan Wali Kota Pekalongan

Nomor : 17

Tanggal : 28 Mei 2025

PERUBAHAN RKPD

(RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH)
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025





SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar

dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 23), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Mei 2025

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, SH

Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 23
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D) KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	4
1.3.1. Perubahan RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	5
1.3.2. Perubahan RKPD dengan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2025-2030	7
1.3.3. Perubahan RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	10
1.3.4. Perubahan RKPD Kota Pekalongan dengan RKP Tahun 2025 / Asta Cita	11
1.3.5. Perubahan RKPD dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	12
1.3.6. Perubahan RKPD dengan Perubahan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	12
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	13
1.4.1. Maksud	13
1.4.2. Tujuan	13
1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN	13
1.6. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	13
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025	15
2.1. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	15
2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah	15
2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Program Kota Pekalongan Sampai Dengan Tahun 2025	30
2.1.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024	73
2.1.4. Hasil Evaluasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Tahun 2024	83
2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	106
2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	106
2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	114
2.3. ISU STRATEGIS	117
2.3.1. Tata Kelola Pemerintahan	118

2.3.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup _____	120
2.3.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman _____	122
2.3.4. Peningkatan Derajat Kesehatan _____	124
2.3.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran _____	126
2.3.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia _____	128
2.3.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal _____	130
2.3.8. Pelestarian Budaya Lokal _____	133
2.3.9. Kondusivitas Wilayah _____	133
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH _____	135
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH _____	135
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah _____	136
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah _____	141
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH _____	148
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan _____	148
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah _____	150
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH _____	157
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN _____	157
4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam Visi dan Misi Tahun 2021-2026 _____	157
4.1.2. Gambaran Kota Pekalongan dalam Visi dan Misi Tahun 2025-2029 _____	164
4.1.3. Tujuan Dan Sasaran _____	172
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 _____	186
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional _____	186
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 _____	188
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan _____	191
4.2.4. Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional _____	225
4.2.5. Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah _____	240
4.2.6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD _____	254
4.3. Inovasi Kebijakan Pembangunan _____	255
4.4. Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 Dengan Menerapkan Konsep Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas _____	257
4.4.1. Teknokratik _____	257
4.4.2. Partisipatif _____	261
4.4.3. Politis _____	262
4.4.4. Atas-bawah dan bawah-atas _____	269
4.5. Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 Dengan Menerapkan Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial _____	269

4.5.1. Holistik-tematik	269
4.5.2. Integratif	271
4.5.3. Spasial	277
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	279
5.1. Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Dengan Pagu Anggaran	279
5.2. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025	291
5.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	291
5.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	294
5.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	301
5.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	303
5.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	304
5.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	306
5.2.7. Unsur Kewilayahan	306
5.2.8. Unsur Pemerintahan Umum	307
5.2.9. Non Urusan	307
5.3 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025	483
BAB VI PENUTUP	485
DAFTAR PUSTAKA	487

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2021-2026	5
Tabel 1.2	Hubungan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2025-2030	8
Tabel 1.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	10
Tabel 1.4	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	11
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan sd Triwulan I Tahun 2025	16
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Program Kota Pekalongan Sampai Dengan Tahun 2025	30
Tabel 2.3	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	75
Tabel 2.4	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	77
Tabel 2.5	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	78
Tabel 2.6	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	79
Tabel 2.7	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	80
Tabel 2.8	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024	83
Tabel 2.9	Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2024	84
Tabel 2.10	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2024	94
Tabel 2.11	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2024	100
Tabel 2.12	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2024.....	105
Tabel 2.13	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	107
Tabel 2.14	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	114
Tabel 2.15	Isu Strategis	117
Tabel 3.1	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (persen)	138

Tabel 3.2	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2020 – 2024	139
Tabel 3.3	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	141
Tabel 3.4	Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan...	146
Tabel 3.5	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan	146
Tabel 3.6	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan	146
Tabel 3.7	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan	147
Tabel 3.8	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan	147
Tabel 3.9	Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan.....	147
Tabel 3.10	Perubahan Target Pendapatan Kota Pekalongan Tahun 2025	151
Tabel 3.11	Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2025	153
Tabel 3.12	Anggaran Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025	154
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	173
Tabel 4.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026 Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”	178
Tabel 4.3	Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	182
Tabel 4.4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	185
Tabel 4.5	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025.....	193
Tabel 4.6	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025	196
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025	203
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025	204
Tabel 4.9	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025	209
Tabel 4.10	Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional	226
Tabel 4.11	Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah	241
Tabel 4.12	Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025	257
Tabel 4.13	Penyusunan RKPD Melalui Pendekatan Partisipatif	261
Tabel 4.14	Penjabaran Visi dan Misi Wali Kota ke Dalam Program RKPD	262

Tabel 4.15 Konsep Holistik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan	270
Tabel 4.16 Konsep Integratif Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan	271
Tabel 5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran Tahun 2025	280
Tabel 5.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.....	309
Tabel 5.3 Perubahan Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.....	483

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen	5
Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	137
Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2020 – 2024.....	137
Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024.....	140
Gambar 3.4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2020 – 2024	140
Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi.....	164
Gambar 4.2 Visi, Misi dan Tema Pembangunan Kota Pekalongan	270

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025. Seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu, perubahan kebijakan juga disebabkan oleh perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; serta
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/Sj tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Di dalam Surat Edaran tersebut, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan langkah:

- a. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
- c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
- d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
- g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran

2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). Selanjutnya hasil efisiensi tersebut, dialihkan untuk: a. bidang pendidikan; b. bidang kesehatan; c. infrastruktur dan sanitasi; d. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi; e. stabilitas harga makanan dan minuman; f. penyediaan cadangan pangan; dan g. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain kedua mandat tersebut (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Nomor 900/833/Sj), Penyusunan Perubahan RKPD 2025 juga didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/Sj tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Di dalam Surat Edaran tersebut, diamanatkan Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut selanjutnya agar diarahkan untuk menjawab beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional seperti: Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; Pengendalian Inflasi di daerah; Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; Dukungan swasembada pangan; dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selanjutnya, secara normatif Perubahan RKPD Tahun 2025 ini disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan pertimbangan diatas, serta memperhatikan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dan kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

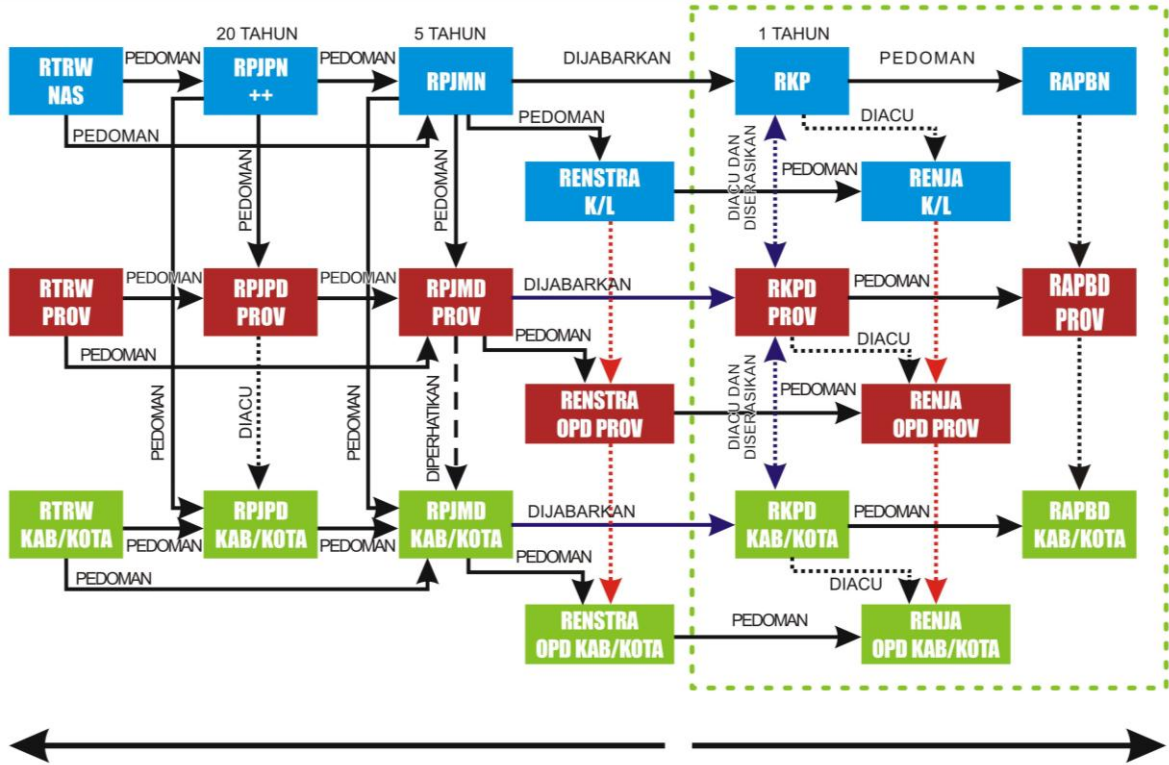
- Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
 24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
 25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
 32. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025.
 33. Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
 35. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Pebruari 2025 Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025,

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan

daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Bagan hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

1.3.1. Perubahan RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan penjabaran atas rencana pembangunan tahun kelima RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 yang dituangkan di dalam RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahun 2025.

Tabel 1.1 Hubungan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025
Tema	<i>Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-Nilai Religiusitas</i>	Tema	<i>Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-Nilai Religiusitas</i>
1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025
2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
4	Peningkatan <i>link and match</i> ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	4	Peningkatan <i>link and match</i> ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal
11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah
12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i>	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i>

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

1.3.2. Perubahan RKPD dengan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2025-2030

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900/833/Sj tahun 2025, dimana diamanatkan Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka hubungan antara Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 perlu diidentifikasi dengan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan masa jabatan Tahun 2025-2030, sebagai berikut.

Tabel 1.2 Hubungan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2025-2030

No.	Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2025-2030	No.	Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2025-2030	No.	Arah Kebijakan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025
1	Misi 3: Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	1	Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Pekalongan (berobat cukup bawa KTP)	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
2	Misi 5: Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	2	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) korban rob dan korban kebakaran/bencana	2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
3	Misi 2: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata	3	Bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan	3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
4	Misi 2: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata	4	- Beasiswa studi lanjut bagi guru sekolah dan madrasah. - Beasiswa studi lanjut bagi tenaga Kesehatan	4	Peningkatan <i>link and match</i> ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
5	Misi 5: Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	5	- Rumah Aman untuk anak dan perempuan korban bullying. - Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus	5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
6	Misi 4: Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	6	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) korban rob dan korban kebakaran/bencana	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Misi 4: Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	7	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) korban rob dan korban kebakaran/bencana	7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian dan

No.	Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2025-2030	No.	Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2025-2030	No.	Arah Kebijakan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025
8	Misi 9: Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan	8	Menumbuhkan kegiatan ekonomi sirkular (Pemanfaatan limbah, daur ulang dan lain-lain)		pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
9	Misi 4: Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	9	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) korban rob dan korban kebakaran/bencana	8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
10	Misi 6: Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal	10	Menumbuhkan kegiatan ekonomi sirkular (Pemanfaatan limbah, daur ulang dan lain-lain)	9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
11	Misi 7: Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal	11	Menambah ruang kreatif dan seni budaya	10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal
12	Misi 8: Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah	12	Peningkatan bantuan RT/RW	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah
13	Misi 1: Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945	13	- Beasiswa studi lanjut bagi guru sekolah dan madrasah. - Beasiswa studi lanjut bagi tenaga Kesehatan	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i>

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

1.3.3. Perubahan RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Sinergitas rencana pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan. Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 disinergikan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Namun demikian, dikarenakan periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah berakhir pada tahun 2023, maka prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	PRIORITAS	NO.	PRIORITAS
1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
		10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
		2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
		4	Peningkatan <i>link and match</i> ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing

PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	PRIORITAS	NO.	PRIORITAS
		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
3	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	11	Optimalisasi peran serta <i>stakeholder</i> dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i>

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

1.3.4. Perubahan RKPD Kota Pekalongan dengan RKP Tahun 2025 / Asta Cita

Sebagaimana sinergitas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah, sinergitas pembangunan dengan Pemerintah Pusat juga dilakukan. Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RKP tahun 2025, dilakukan dengan penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dan Nasional. Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Nasional disajikan dalam Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	PRIORITAS	NO.	PRIORITAS
1	PN1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	11	Optimalisasi peran serta <i>stakeholder</i> dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
2	PN2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
3	PN3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	PN4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	PRIORITAS	NO.	PRIORITAS
			formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
5	PN5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
6	PN6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
		4	Peningkatan <i>link and match</i> ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
7	PN7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i>
8	PN8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

1.3.5. Perubahan RKPD dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.6. Perubahan RKPD dengan Perubahan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

Perubahan RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota, menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD. Rancangan Perubahan KUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD. Berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah Perubahan RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. Rancangan peraturan tersebut akan dievaluasi dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah dengan memperhatikan:

- a. hasil evaluasi indikator kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025;
- b. kondisi perekonomian daerah;
- c. kebijakan yang bersifat *mandatory*.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Wali Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 serta Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.
- c. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- d. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- e. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- f. Sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan, meliputi:

- a. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer Pusat;
- b. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pergeseran anggaran, penghapusan dan penambahan kegiatan/sub kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

1.6. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi triwulan I RKPD Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan I tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, dan Perangkat Daerah penanggung jawab.
2. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2025 yang menjadi isu permasalahan daerah.
3. Isu Strategis berisi rumusan isu-isu berdasarkan data capaian pembangunan dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2025, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan tahun 2025, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perubahan rencana program dan kegiatan daerah tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan perubahan kerangka pendanaan pada tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 telah dilakukan upaya agar sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah

Berdasarkan Pasal 306 Ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017, bahwa hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 memperhatikan hasil evaluasi RKPD triwulan I tahun 2025. Evaluasi capaian indikator kinerja ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terdiri atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi terbagi dalam 4 kategori, yaitu tercapai, akan tercapai, tidak tercapai dan belum tersedia data. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 di tahun 2025 dari 101 indikator sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap penetapan RKPD tahun 2025
 - a. Tercapai: 23 indikator (22,77%)
 - b. Akan tercapai: 3 indikator (2,97%)
 - c. Belum tercapai: 30 indikator (29,70%)
 - d. Belum tersedia data: 45 indikator (44,56%)
2. Evaluasi terhadap target akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
 - a. Tercapai: 18 Indikator (17,82%)
 - b. Akan tercapai: 5 Indikator (4,95%)
 - c. Belum tercapai: 34 Indikator (33,66%)
 - d. Belum tersedia data: 44 Indikator (43,57%)

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan sd Triwulan I Tahun 2025

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.66	74.79	74.60	74.62	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Usia Harapan Hidup belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS (akhir bulan Februari 2026)												
2	Angka Kemiskinan	Persen	5.89	7.59	6.71	6.09	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Angka Kemiskinan belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS (akhir bulan Februari 2026)												
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.03	75.40	77.21	75.88	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS (akhir bulan Februari 2026)												
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.99	6.89	4.91	6.15	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS (akhir bulan Februari 2026)												
5	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	Persen	100.00	55.56	90.91	88.89	90.91	102.27	Tercapai	90.91	90.91	Belum Tercapai
6	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	Persen	12.17	37.27	8.17	17.02	8.17	208.32	Tercapai	8.17	148.96	Tercapai
7	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Persen	91.04	n/a	91.95	90.71	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase capaian layanan infrastruktur dasar belum tersedia data dikarenakan perhitungan data akan dilakukan di akhir tahun												
8	PDRB Perkapita	Rp. Juta/Jiwa/ Tahun	40.65	n/a	45.99	39.21	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator PDRB Perkapita belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS (akhir bulan Februari 2026)												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Jumlah konflik sosial	Kasus	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	< Target	Belum Tercapai	1.00	< Target	Belum Tercapai
10	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.50	n/a	0.38	0.40	0.38	95.00	Belum Tercapai	0.38	76.00	Belum Tercapai
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	80.01	188.23	129.70	92.08	230.15	40.01	Belum Tercapai	230.15	34.76	Belum Tercapai
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7.00	8.90	10.89	7.30	14.96	48.80	Belum Tercapai	14.96	46.79	Belum Tercapai
13	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	9.00	10.27	16.86	9.31	34.52	26.97	Belum Tercapai	34.52	26.07	Belum Tercapai
14	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	11.89	n/a	5.69	3.00	3.66	122.13	Tercapai	3.66	30.78	Belum Tercapai
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61.00	57.87	65.10	65.31	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS (akhir bulan Februari 2026)												
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71.34	75.77	76.06	74.49	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS (akhir bulan Februari 2026)												
17	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	100.00	n/a	94.12	98.44	94.12	95.61	Akan Tercapai	94.12	94.12	Akan Tercapai
18	Luas Genangan Banjir dan Rob	Hektar	565.00	1730.00	379.02	790.00	379.02	208.43	Tercapai	379.02	149.07	Tercapai
19	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
20	Persentase pelayanan sampah	Persen	73.12	73.75	71.85	72.12	72.24	100.17	Tercapai	72.24	98.80	Akan Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4.55	3.59	5.34	4.55	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Pertumbuhan ekonomi belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS (akhir bulan Februari 2026)												
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Pelayanan Umum												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
<i>Urusan Pendidikan</i>												
1	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	100.00	59.51	99.12	100.00	85.94	85.94	Belum Tercapai	85.94	85.94	Belum Tercapai
2	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
<i>Urusan Kesehatan</i>												
3	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100.00	n/a	97.52	100.00	29.21	29.21	Belum Tercapai	29.21	29.21	Belum Tercapai
<i>Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>												
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	Persen	99.40	n/a	74.13	87.70	95.82	109.26	Tercapai	95.82	96.40	Belum Tercapai
5	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	87.83	n/a	91.83	84.55	91.83	108.61	Tercapai	91.83	104.55	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	92.115	n/a	100.00	82.70	100.00	120.92	Tercapai	100.00	108.56	Tercapai
7	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Persen	1.09	n/a	2.85	1.09	0.00	< target	Belum Tercapai	0.00	< target	Belum Tercapai
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Regulasi	96.251	n/a	99.45	96.24	99.45	103.34	Tercapai	99.45	103.32	Tercapai
9	Pengembangan Sarana Persampahan	Persen	100.00	n/a	60.00	83.45	0.00	0.00	Belum Tercapai	60.00	60.00	Belum Tercapai
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman												
10	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	95.58	97.93	72.75	99.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	72.75	76.11	Belum Tercapai
Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum Dan Linmas												
12	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	100.00	n/a	90.74	90.00	87.99	97.77	Belum Tercapai	87.99	87.99	Belum Tercapai
13	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100.00	11.77	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
14	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Sosial												
15	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	3.82	n/a	16.68	5.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) belum tersedia data dikarenakan perhitungan data capaian akan dilakukan di akhir tahun.												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
<i>Urusan Tenaga Kerja</i>												
15	Persentase Tenaga Siap Pakai yang ditempatkan	Persen	52.36	68.00	56.82	52.33	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase Tenaga Siap Pakai yang ditempatkan belum tersedia data dikarenakan perhitungan data capaian akan dilakukan di akhir tahun												
<i>Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</i>												
16	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28.53	n/a	28.31	28.56	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS (akhir bulan Februari 2026)												
17	Skor Kota Layak Anak	Skor	636.00	602.00	769.80	769.90	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Skor Kota Layak Anak belum tersedia data dikarenakan Berdasarkan Surat Sekretaris Kemen PPPA, Nomor: B-26/D.PHA.2/TK.05/03/2025, Tanggal: 27 Maret 2025, Hal: Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA bahwa Kota Pekalongan masuk ke dalam daftar Kab/Kota yang akan dilakukan Verifikasi Lapangan oleh Kemen PPPA dengan jadwal yang akan dilaksanakan pada 12 Juni 2025												
<i>Urusan Pangan</i>												
18	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase penanganan daerah rawan pangan belum tersedia data dikarenakan hingga akhir triwulan I tahun 2025 tidak ada pengajuan untuk bantuan daerah rawan pangan.												
<i>Urusan Pertanahan</i>												
19	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister belum tersedia data dikarenakan pendataan akan dilakukan di triwulan IV.												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Lingkungan Hidup												
20	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60.00	n/a	54.29	42.86	54.29	78.95	Belum Tercapai	54.29	90.48	Akan Tercapai
21	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0.34	0.00	0.11	0.50	0.00	< target	Belum Tercapai	0.00	< target	Belum Tercapai
22	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	69.91	n/a	92.55	70.29	23.66	33.66	Belum Tercapai	23.66	33.84	Belum Tercapai
23	Tertib Hukum Lingkungan	Persen	60.10	20.00	43.51	45.00	15.09	33.53	Belum Tercapai	15.09	25.11	Belum Tercapai
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												
24	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	91.38	82.37	89.28	90.46	89.64	99.09	Akan Tercapai	89.64	98.10	Akan Tercapai
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												
25	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10.00	n/a	9.51	9.49	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat belum tersedia data dikarenakan kegiatan swadaya masyarakat dalam pembangunan (TMMD) baru akan dilaksanakan di triwulan II.												
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana												
26	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67.65	n/a	64.41	67.60	61.94	91.63	Akan Tercapai	61.94	91.56	Akan Tercapai
Urusan Perhubungan												
27	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persen	28.00	n/a	23.53	28.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Persentase kinerja Ruas Jalan dengan kategori A belum tersedia data dikarenakan pendataan kategori ruas jalan akan di lakukan di triwulan IV tahun 2025.												
<i>Urusan Komunikasi Dan Informatika</i>												
28	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.25	n/a	3.30	3.40	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Indeks domain tata kelola SPBE belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis nilai dari Kemenpan RB di triwulan IV tahun 2025.												
29	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88.31 – 100)	n/a	96.03	Sangat Baik (Nilai 88.31 – 100.00)	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Kinerja unit pelayanan informasi publik belum tersedia data dikarenakan penilaian kinerja pelayanan informasi publik akan dilaksanakan di triwulan IV tahun 2025.												
<i>Urusan Koperasi dan UKM</i>												
30	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	9.02	n/a	10.33	8.72	9.54	109.40	Tercapai	9.54	105.76	Tercapai
<i>Urusan Penanaman Modal</i>												
31	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	216.78	410.60	238.05	216.78	1,374.90	634.24	Tercapai	1,374.90	634.24	Tercapai
<i>Urusan Kebudayaan</i>												
32	Persentase Peningkatan Kelompok Budaya	Persen	1.46	47.20	2.75	1.39	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase peningkatan kelompok budaya belum tersedia data dikarenakan perhitungan data akan dilakukan di triwulan IV tahun 2025.												
<i>Urusan Perpustakaan</i>												
33	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	Indeks	20.73	n/a	50.90	20.52	3.80	18.52	Belum Tercapai	3.80	18.33	Belum Tercapai
<i>Urusan Kearsipan</i>												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	Indeks	74.40	87.59	91.39	92.00	91.39	100.38	Tercapai	91.39	122.84	Tercapai
<i>Urusan Kepemudaan Dan Olahraga</i>												
35	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1.37	n/a	1.39	1.39	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan belum tersedia data dikarenakan perhitungan data capaian akan dilakukan di triwulan IV tahun 2025.												
36	Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	15.00	4.00	14.00	15.00	0.00	0.00	Belum Tercapai	0.00	0.00	Belum Tercapai
<i>Urusan Statistik</i>												
37	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	80.00	n/a	97.87	98.50	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase ketersediaan data statistik sektoral belum tersedia data dikarenakan perhitungan data capaian akan dilakukan di triwulan IV tahun 2025.												
<i>Urusan Persandian</i>												
38	Indeks Tata Kelola KAMI	Tingkat	2	n/a	II	II	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Indeks Tata Kelola KAMI belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari Tim Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital pada triwulan IV tahun 2025.												
URUSAN PILIHAN												
<i>Urusan Kelautan dan Perikanan</i>												
39	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15,600.00	n/a	12,656.43	15,446.00	2,176.85	14.09	Belum Tercapai	2,176.85	13.95	Belum Tercapai
<i>Urusan Pariwisata</i>												
40	Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	625,000	316,440	1,130,104	1,200,000	100,569	8.38	Belum Tercapai	100,569	16.09	Belum Tercapai
<i>Urusan Pertanian</i>												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	259,492,900	n/a	334,022.55	255,445.13	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Nilai produksi tanaman pangan hortikultura dan peternakan belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS (akhir bulan Februari tahun 2026)												
Urusan Perindustrian												
42	Pertumbuhan Industri	Persen	0.07	2.38	0.79	2.30	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Pertumbuhan Industri belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS (akhir bulan Februari tahun 2026)												
Urusan Perdagangan												
43	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	27.51	n/a	14.50	27.24	1.17	4.30	Belum Tercapai	1.17	4.25	Belum Tercapai
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Sekretariat Daerah												
44	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	94.00	n/a	90.34	96.70	15.66	16.19	Belum Tercapai	15.66	16.66	Belum Tercapai
Sekretariat DPRD												
45	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Belum Tercapai	25.00	25.00	Belum Tercapai
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Perencanaan												
46	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100.00	97.33	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD belum tersedia data dikarenakan menunggu penetapan perwal penetapan RKPD tahun 2026.												
Keuangan												
47	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	33.33	33.33	Belum Tercapai	33.33	33.33	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Rasio PAD	Persen	2.06	n/a	1.84	2.05	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Rasio PAD belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data salah satu komponen perhitungan yaitu nilai ADHB dari BPS.												
Kepegawaian												
49	Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	90.00	n/a	99.97	100.00	100.00	111.11	Tercapai	100.00	111.11	Tercapai
Pendidikan dan Pelatihan												
50	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Persen	40.00	n/a	75.18	40.00	9.40	23.50	Belum Tercapai	9.40	23.50	Belum Tercapai
Penelitian dan Pengembangan												
51	Persentase Laporan Hasil Litbang	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase Laporan hasil litbang belum tersedia data dikarenakan perhtungan data laporan akan dilakukan di triwulan IV tahun 2025.												
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
Inspektorat Daerah												
52	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Persen	100.00	n/a	73.33	87.10	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi belum tersedia data dikarenakan pendataan baru akan dilaksanakan di triwulan IV tahun 2025.												
53	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	16.00	n/a	26.00	15.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM belum tersedia data dikarenakan hingga akhir triwulan I tahun 2025 belum ada juknis resmi dari Kemenpan RB terkait pengusulan WBK/WBBM.												
URUSAN KEWILAYAHAN												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kecamatan												
54	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec.Pekalongan Utara)	Persen	100.00	n/a	103.33	100.00	18.82	18.82	Belum Tercapai	18.82	18.82	Belum Tercapai
55	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100.00	n/a	100.05	100.00	19.62	19.62	Belum Tercapai	19.62	19.62	Belum Tercapai
56	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100.00	n/a	102.31	100.00	17.33	17.33	Belum Tercapai	17.33	17.33	Belum Tercapai
57	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100.00	n/a	113.13	100.00	25.08	25.08	Belum Tercapai	25.08	25.08	Belum Tercapai
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
Kesatuan Bangsa dan Politik												
58	Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	34.58	34.58	Belum Tercapai	34.58	34.58	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Daya Saing												
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50.90	54.31	59.15	64.14	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Indeks kualitas lingkungan hidup belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis nilai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.												
2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	Belum Tercapai	75.00	75.00	Belum Tercapai
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75.69	69.66	87.31	74.69	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis nilai dari Kemenpan RB.												
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.92	9.18	9.34	9.75	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis nilai dari BPS (akhir bulan Februari tahun 2026)												
5	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
6	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	n/a	Nindya	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Kategori Kota Layak Anak belum tersedia data dikarenakan Berdasarkan Surat Sekretaris Kemen PPPA, Nomor: B-26/D.PHA.2/TK.05/03/2025, Tanggal: 27 Maret 2025, Hal: Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA bahwa Kota Pekalongan masuk ke dalam daftar Kab/Kota yang akan dilakukan Verifikasi Lapangan oleh Kemen PPPA dengan jadwal yang akan dilaksanakan pada 12 Juni 2025												
7	Indeks Kualitas Air	Indeks	35.39	13.29	50.56	59.42	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Capaian indikator Indeks kualitas lingkungan air belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis nilai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	23.61	5.17	26.14	37.65	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Capaian indikator Indeks kualitas lingkungan air belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis nilai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.												
9	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Regulasi	7.00	n/a	3.00	7.00	0.00	0.00	Belum Tercapai	3.00	42.86	Belum Tercapai
10	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	C	B	B	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Capaian indikator Tingkat Pelayanan Jalan (<i>Level of Service</i>) belum tersedia data dikarenakan perhitungan data capaian akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2025.												
11	Persentase keterhubungan jalan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
12	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persen	100.00	n/a	146.67	100.00	148.89	148.89	Tercapai	148.89	148.89	Tercapai
13	Indeks SPBE	Indeks	3.25	n/a	3.76	3.34	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Capaian indikator Indeks SPBE belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis nilai dari Kemeterian Komunikasi dan Digital.												
14	IKM Kota	Persen	84.09	80.83	91.37	90.70	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator IKM Kota belum tersedia data dikarenakan menunggu pelaksanaan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat pada semester I tahun 2025.												
15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97.50	n/a	96.03	97.20	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Capaian indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat kota belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis nilai dari Komisi Informasi Kabupaten/Kota												
16	Indeks Merit System	Indeks	260.00	n/a	327.00	340.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Indeks Merit System belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis nilai dari KASN.												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Realisasi Capaian RPJMD sd 2025	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Thdp Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2025	Realisasi s.d TW I Th. 2025	Tingkat Capaian s.d TW. I Th. 2025	Status Ketercapaian thdp Target RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Nilai SAKIP Kota	Skor	76.07	73.16	73.02	75.57	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Nilai SAKIP Kota belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis nilai dari BPKP.												
18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Kategori	WTP	WTP	n/a	WTP	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan (IKK Outcome) belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis nilai dari BPK												
19	Maturitas SPIP	Nilai	4.00	3.00	3.01	3.80	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Maturitas SPIP belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis nilai dari BPKP.												
20	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	8.00	n/a	3.00	7.00	0.00	0.00	Belum Tercapai	3.00	37.50	Belum Tercapai

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah). 2025

2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Program Kota Pekalongan Sampai Dengan Tahun 2025

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Program Kota Pekalongan Sampai Dengan Tahun 2025

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
1.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	30.21	30.21	Sangat Tinggi	30.21	30.21	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.07	100.00	13.88	13.88	Rendah	13.88	13.88	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	106.75	100.00	1.23	1.23	Sangat Rendah	1.23	1.23	Belum Tercapai
1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan												
1	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	100.00	76.37	99.12	100.00	85.94	85.94	Sangat Tinggi	85.94	85.94	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase capaian SPM pendidikan tidak memenuhi target dikarenakan beberapa capaian indikator mutu pada SPM yang belum mencapai target, yaitu : APS 5-6, APS 7-12, APS 13-15, APS 7-18, indeks iklim keamanan, kebinekaan dan inklusivitas SD dan SMP, kemampuan numerasi SMP.												
1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum												
1	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
1.01.04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan												
1	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	Sangat Tinggi	60.00	60.00	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan tidak memenuhi target dikarenakan keterbatasan alokasi kuota peserta sertifikasi pendidik yang disediakan oleh pemerintah pusat.												
1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	8.89	8.89	Sangat Rendah	8.89	8.89	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	99.90	100.00	23.28	23.28	Sangat Tinggi	23.28	23.28	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	92.56	100.00	8.06	8.06	Sangat Rendah	8.06	8.06	Belum Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	36.25	36.25	Sangat Tinggi	36.25	36.25	Belum Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai
6	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	158.33	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
1	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	Persen	92.00	88.00	13.52	92.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota tidak memenuhi target dikarenakan Belum ada data rilis Jumlah penduduk Tahun 2025.												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	Persen	90.00	70.00	79.45	90.00	73.27	81.41	Sangat Tinggi	73.27	81.41	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar tidak memenuhi target dikarenakan Adanya penyesuaian target ASPAK dari Kemenkes (target lebih rendah) sehingga capaian di TW I = 73,27.												
4	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	72.50	60.00	100.00	100.00	86.55	86.55	Sangat Tinggi	86.55	119.38	Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar jauh melebihi target dikarenakan Pengembangan Pelayanan dan Inovasi di RSUD Bendan dalam pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar yang dipersyaratkan pada aplikasi ASPAK.												
1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan												
1	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	Persen	95.50	93.00	94.17	95.00	94.56	99.54	Sangat Tinggi	94.56	99.02	Akan Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek tidak memenuhi target dikarenakan: 1. Nakes punya STR tp tidak pelayanan 2. Nakes tidak mengurus SIP 3. Nakes sedang proses pengurusan/telat perpanjangan jd di sistem terbaca tidak punya SIP												
2	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	60.00	35.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	166.67	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan jauh melebihi target dikarenakan Adanya UU Nomor 17 tahun 2023 dimana diwajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR dan SIP, sehingga pada saat ini semua tenaga kesehatan RSUD yang masuk dan bekerja di RSUD telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan..												
1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman												
1	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	Persen	100.00	92.00	97.22	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
3	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	Persen	97.00	95.00	95.80	97.00	26.78	27.61	Sangat Tinggi	26.78	27.61	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat tidak memenuhi target dikarenakan Di TW I belum semua TPM dan DAM dilakukan inspeksi kembali.												
1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan												
1	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	95.00	90.00	97.22	94.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	36.56	36.56	Sangat Tinggi	36.56	36.56	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	98.21	100.00	17.65	17.65	Sedang	17.65	17.65	Belum Tercapai
3	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3.27	3.27	Sangat Rendah	3.27	3.27	Belum Tercapai
1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)												
1	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	Persen	93.10	82.76	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum												
1	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	Persen	92.11	85.77	53.15	90.90	50.50	55.56	Sangat Tinggi	50.50	54.83	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah tidak memenuhi target dikarenakan Adanya perubahan data dukung, yang semula menggunakan data Dinas Kesehatan berubah menggunakan data Omahe Dewe (Dinperkim). DPUPR sudah dan akan berupaya untuk mengusulkan fasilitasi terkait sarpras Air Minum Kepada Pemerintah Pusat. Rencana pekerjaan Tahun 2025 = 80 SR (20 SR sudah terlaksana, 60 SR belum terlaksana)												
1.03.04. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional												
1	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	100.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	60.00	60.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional tidak memenuhi target dikarenakan Realisasi sampai TW I sebesar 60%, sudah dilaksanakan 1 TPST dan akan dilaksanakan 1 lokasi lagi TPS3R yang akan dibangun di kelurahan Degayu, sampai saat ini masih proses pembetulan RKM (rencana kerja masyarakat)												
1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	12.87	9.87	17.96	12.27	0.05	0.41	Sangat Rendah	18.01	139.94	Tercapai
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan terdapat penambahan jumlah KK yang terlayani IPLT dikarenakan adanya tambahan pengadaan dari Organisasi Non Pemerintah (seperti kemitraan), pendanaannya di luar APBD untuk pembangunan MCK dan lain-lain.												
1.03.06. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase												
1	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	71.49	66.45	69.48	70.48	69.48	98.58	Sangat Tinggi	69.48	97.19	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase drainase dalam kondisi baik tidak memenuhi target dikarenakan Terkait drainase masih dalam proses penanganan hingga tahun 2026												
1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung												
1	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	18.74	17.24	17.38	18.44	17.43	94.52	Sangat Tinggi	17.43	93.01	Belum Tercapai
Capaian indikator Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota tidak memenuhi target dikarenakan Prosedur pengajuan PBG menggunakan aplikasi SIM-BG yang membutuhkan persyaratan lebih rumit sehingga banyak pemohon yang tidak dapat memenuhi persyaratan kelengkapannya												
1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan												
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	86.57	81.12	84.50	85.48	84.50	98.85	Sangat Tinggi	84.50	97.61	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Target tahun 2026, tingkat kemantapan jalan adalah sebesar 86,57% atau sepanjang 130,092 km. Sedangkan target tahun 2024 adalah sepanjang 126,98 km. Sehingga walaupun target tahun 2024 tercapai 100%, tapi tetap akan kurang 3,112 km dari target tahun 2026. Oleh karena itu, dalam mencapai target tahun 2026, Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPUPR pada tahun 2025 akan melakukan pekerjaan Rekonstruksi Jalan yang meliputi 10 paket pekerjaan												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dengan perkiraan output jalan mantap sepanjang 2,7 km dan Rehabilitasi Jalan meliputi 4 paket pekerjaan dengan perkiraan output jalan mantap sepanjang 0,25 km. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan pada tahun 2026 sedang dalam proses pengusulan penanganan												
1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi												
1	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	21.20	7.87	8.79	18.53	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi tidak memenuhi target dikarenakan rencana pelatihan bersertifikat sebanyak 40 org pada TW III.												
1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang												
1	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100.00	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	73.81	73.81	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota tidak memenuhi target dikarenakan pada tahun 2025 ada 3 peraturan: Perda Bangunan Gedung; Perwal Penataan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik 2024 dan Perwal Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; Perwal Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang saat ini masih dalam proses kajian, dan akan ditetapkan pada TW II dan TW IV tahun 2025.												
1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1.04.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	109.95	100.00	16.17	16.17	Sedang	16.17	16.17	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.93	25.93	Sangat Tinggi	25.93	25.93	Belum Tercapai
1.04.02. Program Pengembangan Perumahan												
1	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	92.35	0.00	68.78	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Indikator Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni belum tersedia data dikarenakan kegiatan masih dalam proses verifikasi calon penerima bantuan RTLH dan kegiatan akan dilaksanakan pada TW 3 dn TW 4.												
1.04.03. Program Kawasan Permukiman												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	0.00	498.47	126.32	121.39	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Indikator Luas kawasan permukiman kumuh belum tersedia data dikarenakan Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh masih pada tahapan pendekatan masyarakat untuk penyiapan tanah/ lahan warga untuk jalan dan drainase agar tanahnya clean and clear serta tahapan perencanaan teknis, sinkronisasi dengan ATR BPN terkait bidang tanah yang akan di Konsolidasi Tanah dan perencanaan penataan bangunan, juga persiapan survey, pengukuran dan penyusunan desain												
1.04.04. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh												
1	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	2147.88	1649.41	2,021.56	2,075.41	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Indikator Luas kawasan permukiman tidak kumuh belum tersedia data dikarenakan Belum adanya intervensi kegiatan fisik di lapangan untuk penataan Kawasan, dan Masih berproses untuk memantapkan Kegiatan perencanaan teknis.												
1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu)												
1	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	14.55	14.44	6.80	63.04	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Indikator Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) belum tersedia data dikarenakan masih dalam proses pengadaan KJSB untuk pengukuran PSU Perumahan dan Kegiatan akan dilaksanakan pada TW 3 dan TW 4.												
1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.17	100.00	16.43	16.43	Sedang	16.43	16.43	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	6.67	6.67	Sangat Rendah	6.67	6.67	Belum Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	14.62	14.62	Rendah	14.62	14.62	Belum Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	14.21	14.21	Rendah	14.21	14.21	Belum Tercapai
1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum												
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Persen	70.00	60.00	80.00	85.00	100.00	117.65	Sangat Tinggi	100.00	117.65	Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan dikarenakan dari hasil pelaksanaan penegakan perda Satpol P3KP sudah mencakup seluruh perda prioritas sebanyak 20, dari tahun sebelumnya hanya sebanyak 18 perda prioritas.												
1.05.03. Program Penanggulangan Bencana												
1	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran												
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
1.06.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	24.82	24.82	Sangat Tinggi	24.82	24.82	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	22.92	22.92	Tinggi	22.92	22.92	Belum Tercapai
1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial												
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75.00	42.00	100.00	75.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian Indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan belum tersedia data dikarenakan Belum dilaksanakan, rencana akan dilakukan di Triwulan II												
1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial												
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persen	100.00	100.00	126.14	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial												
1	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Persen	52.49	60.45	27.64	53.73	78.79	146.64	Sangat Tinggi	78.79	150.11	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial jauh melebihi target dikarenakan Sasaran Penerima Bantuan dari Pusat (136.900 orang) yang terdiri dari PBI 103.607, PKH 10.124, BPNT 23.169.												
1.06.06. Program Penanganan Bencana												
1	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan												
1	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	00.00	0.00	Sangat Rendah	100.00	100.00	Tercapai
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja												
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	persen	0.55	0.33	1.41	1.15	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan.												
2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja												
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	29.93	19.93	33.81	27.93	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan..												
2.07.05. Program Hubungan Industrial												
1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	49.02	45.33	50.93	52.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan												
2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan												
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	11.09	1.85	19.09	9.24	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender belum tersedia data dikarenakan Tahun 2025 = 62 sub kegiatan yang sudah responsif gender dengan perhitungan target berdasarkan jumlah sub kegiatan pada saat penetapan APBD, sedangkan target akhir adalah jumlah sub kegiatan saat perubahan APBD 2025.												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.03. Program Perlindungan Perempuan												
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	Persen	23.99	23.99	4.60	15.01	4.39	341.91	Sangat Tinggi	4.39	545.88	Tercapai
Capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Adanya faktor yang mendukung ketercapaian : (1). adanya sosialisasi, advokasi dan edukasi hukum terkait perlindungan perempuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melapor dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan; (2). terbentuknya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) tingkat kecamatan dan kelurahan dan kader SAPA (Sahabat Peduli Perempuan dan Anak) kecamatan dan kelurahan; (3). pendampingan dan advokasi langsung oleh PATBM dan SAPA tingkat kecamatan dan kelurahan; (4). bintek terhadap tim PATBM dan kelurahan, (4) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan.												
2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (pha)												
1	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	Persen	55.56	25.93	40.74	48.15	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) tidak memenuhi target dikarenakan Indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) belum tersedia data dikarenakan Sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan penilaian Dekela. Upaya yg dilakukan oleh DPMPPA untuk membuat seluruh kelurahan mjd kelurahan ramah anak atau peningkatan jumlah kelurahan ramah anak, yaitu melakukan evaluasi kelurahan ramah anak triwulanan												
2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak												
1	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat												
1	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4.80	3.80	45.33	4.70	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase cadangan pangan daerah tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan dilaksanakan mulai Tw.2												
2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan												
1	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan dilaksanakan di Tw.4												
2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	88.00	80.00	98.53	86.40	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan dilaksanakan di Tw.4.												
2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
2.10.05. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan												
1	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100.00	0.00	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Indikator Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani belum tersedia data dikarenakan Kegiatan masih tahapan perencanaan , pendataan dan Pada triwulan kesatu kegiatan dalam tahapan penyiapan lahan guna kelancaran pembangunan tersebut diantaranya yaitu pada tahap identifikasi bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya												
2.10.06. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee												
1	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	50.00	0.00	0.00	50.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Indikator Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee belum tersedia data dikarenakan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pekalongan Tahun 2025 telah tersusun dengan Surat Keputusan Walikota Pekalongan yang terdiri dari setiap SKPD yang terkait dengan kegiatan Reforma Agraria di Kota Pekalongan. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu rapat koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pekalongan, sedangkan pada triwulan kesatu ini berada pada tahap perencanaan, dikarenakan perlunya kehadiran setiap anggota Tim GTRA pada Rakor yang akan dilaksanakan.												
2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.76	100.00	18.09	18.09	Sedang	18.09	18.09	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	19.64	19.64	Tinggi	19.64	19.64	Belum Tercapai
2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												
1	Persentase limbah yang diolah	persen	49.01	33.37	108.23	45.97	27.06	58.86	Sangat Tinggi	27.06	55.21	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase limbah yang diolah tidak memenuhi target dikarenakan IPAL dari dana Padanan Unikal baru beroperasi di bulan April sehingga prosentase limbah terolah, belum ada peningkatan, masih tetap sesuai dengan kemampuan IPAL eksisting.												
2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)												
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2.95	2.89	2.37	2.94	2.37	80.61	Sangat Tinggi	2.37	80.40	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau tidak memenuhi target dikarenakan Belum ada penanaman pohon di triwulan 1 tahun 2025 sehingga prosentase RTH masih sama dengan capaian th 2024. Penanaman pohon yang telah terlaksana, menggunakan bibit dari penggantian pohon atas permohonan penebangan.												
2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)												
1	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	100.00	31.12	71.11	13.33	4.44	33.31	Sangat Tinggi	75.56	75.56	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2021 s.d 2026 dengan target 45 perusahaan. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah tercapai 75,56 persen (34 perusahaan).												
2.11.06. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)												
1	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	100.00	16.67	48.33	16.67	2.69	16.14	Sedang	2.69	51.02	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH tidak memenuhi target dikarenakan adanya Perubahan peraturan perundang-undangan yang melonggarkan kriteria jenis dokumen yang harus disusun oleh usaha dan atau kegiatan. Sehingga usaha dan/atau kegiatan yang semula berkewajiban menyusun dokumen AMDAL dapat turun menjadi UKL-UPL, dan yang semula berkewajiban menyusun dokumen UKL-UPL dapat turun menjadi SPPL. Peraturan baru tersebut adalah PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH												
2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat												
1	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang	persen	50.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mendapat edukasi Lingkungan Hidup											
Capaian indikator Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup tidak memenuhi target dikarenakan target kegiatan akan dilaksanakan pada TW II, III, dan IV												
2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat												
1	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	75.00	75.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0..00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase perolehan penghargaan bidang LH tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan saat ini masih dalam proses penilaian, dan pemberian penghargaan akan dilaksanakan bertahap di TW. II, III dan IV.												
2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup												
1	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan												
1	Persentase pengelolaan sampah	persen	0.31	2.19	0.30	0.30	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase pengelolaan sampah tidak memenuhi target dikarenakan data pengelolaan sampah akan diperhitungkan di triwulan IV.												
2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2.12.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	109.53	100.00	42.02	42.02	Sangat Tinggi	42.02	42.02	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	44.38	44.38	Sangat Tinggi	44.38	44.38	Belum Tercapai
2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	88.75	80.00	88.97	88.10	89.23	101.28	Sangat Tinggi	89.23	100.54	Tercapai
2.12.03. Program Pencatatan Sipil												
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	94.00	93.25	89.58	93.85	90.04	95.94	Sangat Tinggi	90.04	95.78	Akan Tercapai
2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	14.00	5.00	10.00	12.00	10.00	83.33	Sangat Tinggi	10.00	71.43	Belum Tercapai
Capaian indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Masih kurangnya kebermanfaatan data kependudukan oleh OPD dan adanya persyaratan sertifikasi ISO keamanan data bagi OPD yang akan mengakses data kependudukan. Target jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome) pada tahun 2025 sebanyak 12 OPD, sementara saat ini (sampai dengan tahun 2024) baru 10 OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan; Adapun target hingga akhir RPJMD (tahun 2026) sebanyak 14 OPD.												
2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
2.13.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	15.48	15.48	Rendah	15.48	15.48	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	10.42	10.42	Sangat Rendah	10.42	10.42	Belum Tercapai
2.13.03. Program Peningkatan Kerja Sama Desa												
1	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	Persen	100.00	16.67	72.22	83.33	77.78	93.34	Sangat Tinggi	77.78	77.78	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan TMMD dilaksanakan tiap tahun dengan target untuk memfasilitasi 3 Kelurahan tiap tahunnya hingga akhir tahun RPJMD, sampai dengan triwulan I tahun 2025 ada 14 kelurahan dari target 18 kelurahan yang difasilitasi												
2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa												
1	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	Persen	92.59	51.85	88.89	88.89	85.19	95.83	Sangat Tinggi	85.19	92.01	Akan Tercapai
2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat												
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	96.92	95.97	97.68	97.75	97.68	99.93	Sangat Tinggi	97.68	100.78	Tercapai
2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
2.14.02. Program Pengendalian Penduduk												
1	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100.00	100.00	82.60	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga belum tersedia data dikarenakan pada kegiatan pendataan dilaksanakan dengan cara pengambilan data secara sampling dari jumlah seluruh rumah tangga sekota Pekalongan dan updating data akan selesai proses perhitungannya di triwulan IV.												
2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)												
1	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7.20	8.20	11.28	12.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun belum tersedia data dikarenakan proses perhitungan data akan dilakukan pada triwulan IV.												
2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)												
1	Unmeet need KB	Persen	12.00	17.00	8.48	13.00	3.53	368.27	Sangat Tinggi	3.53	339.94	Tercapai
Capaian indikator Unmeet Need KB jauh melebihi target dikarenakan adanya upaya dari Pemerintah Kota Pekalongan dengan meningkatkan akses pelayanan KB disertai adanya peningkatan kesadaran ber – KB dari masyarakat.												
2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
2.15.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	15.28	15.28	Sangat Tinggi	15.28	15.28	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	5.10	5.10	Sangat Rendah	5.10	5.10	Belum Tercapai
2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Ilaj)												
1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	100.00	87.00	103.28	97.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	103.28	103.28	Tercapai
2	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0.44	0.35	0.44	0.44	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) belum tersedia data dikarenakan perhitungan data akan dilakukan pada triwulan IV												
3	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	0.74	17.94	-8.33	0.74	-75.14	-10,153.70	Sangat Rendah	-75.14	-10,153.70	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala tidak memenuhi target dikarenakan Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang untuk melakukan kewajiban uji berkala, untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan barang, Dinas Perhubungan melakukan upaya mengingatkan dengan via SMS Gateway k Sateway kepada pemilik kendaraan bermotor dan melaksanakan operasi laik jalan. Sejak tahun 2024 pelaksanaan uji berkala sudah tidak berbayar dengan adanya UJI KIR gratis diharapkan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji dapat meningkat dari tahun ke tahun												
2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2.16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	10.32	10.32	Sangat Rendah	10.32	10.32	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	103.17	100.00	13.56	13.56	Rendah	13.56	13.56	Belum Tercapai
2.16.02. Program Informasi Dan Komunikasi Publik												
1	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
2.16.03. Program Aplikasi Informatika												
1	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3.30	2.80	3.25	3.20	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum tersedia data dikarenakan belum dilakukan perhitungan data, perhitungan data akan dilakukan di triwulan IV. Walaupun pada tahun 2024 target belum tercapai, peningkatan nilai indeks yang konsisten setiap tahun mencerminkan upaya perbaikan yang terus dilakukan dan berkelanjutan. Penerapan SPBE, khususnya TIK sesuai kebijakan, tata kelola dan manajemen masih terus diupayakan peningkatan level maturitasnya, sehingga nilai indeks aspek ini dapat mencapai nilai 3,30 sesuai target akhir RPJMD. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki beberapa indikator, antara lain Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dan Sistem Penghubung Layanan. Untuk meningkatkan indeks aspek TIK sesuai dengan target RPJMD (3,30), perlu dilakukan upaya peningkatan tingkat kematangan pada setiap indikator tersebut sehingga indeks aspek TIK dapat mencapai target yang telah ditetapkan.												
2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
2.17.03. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi												
1	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	33.23	24.59	30.77	32.36	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Indikator Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) belum tersedia data dikarenakan Data untuk Koperasi yang Berkualitas belum dapat tersajikan karena masih dalam proses pengolahan												
2.17.05. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian												
1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	59.68	38.36	88.32	10.48	10.45	99.71	Sangat Tinggi	10.45	17.52	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota tidak memenuhi target dikarenakan Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota belum memenuhi target karena pada tahun 2025 ini Dindagkop UKM Kota Pekalongan tidak mendapatkan alokasi DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat (Kementerian). Sehingga, capaian untuk pelatihan koperasi (anggota koperasi) masih belum dapat memenuhi target mengingat banyaknya jumlah anggota koperasi yang ada di Kota Pekalongan yang mencapai mencapai 489.700 anggota koperasi pada TW I Tahun 2025												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.08. Program Pengembangan Umkm												
1	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	12.37	11.85	25.56	12.27	0.00	0.00	Sangat Rendah	25.56	206.63	Tercapai
Capaian indikator Meningkatkan usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Capaian indikator ini merupakan akumulasi dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian melebihi target didukung dengan Dana Alokasi Khusus (DAK - PK2UMK) yang dialokasikan untuk Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2024												
2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
2.18.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.87	100.00	17.77	17.77	Sedang	17.77	17.77	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	105.72	100.00	33.97	33.97	Sangat Tinggi	33.97	33.97	Belum Tercapai
2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal												
1	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6.00	1.00	6.00	6.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	6.00	100.00	Tercapai
2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal												
1	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target dikarenakan Pelaksanaan akan dilakukan pada TW III dan IV												
2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	2500.00	2500.00	5,038.00	3,025.00	1,649.00	54.51	Sangat Tinggi	1,649.00	65.96	Belum Tercapai
Capaian indikator Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal tidak memenuhi target dikarenakan Target merupakan target realisasi tahunan. Sehingga capaian pada triwulan I belum bisa mencerminkan capaian tahunan.												
2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal												
1	Nilai Invetasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	40.53,00	6.42	238.05	7.09	0.19	2.68	Sangat Rendah	0.19	0.48	Belum Tercapai
Capaian indikator Nilai Invetasi Baru pertahun tidak memenuhi target dikarenakan Capaian rendah dikarenakan pada LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman modal) masih dalam proses perhitungan. Perhitungan masih dari estimasi oleh DPMPTSP belum berdasarkan rilis resmi dari BKPM..												
2.18.06. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal												
1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan												
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	95.24	91.95	125.00	94.81	3.00	3.16	Sangat Rendah	3.00	3.15	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina tidak memenuhi target dikarenakan Baru dilaksanakan satu kali pelatihan dengan peserta 30 Orang												
2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan												
1	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	42.86	11.43	52.38	40.00	41.30	103.25	Sangat Tinggi	41.30	96.37	Akan Tercapai
2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral												
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	100.00	66.00	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral belum tersedia data dikarenakan pelaksanaan kegiatan penyediaan data statistik sektoral oleh Perangkat Daerah pada triwulan IV												
2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi												
1	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	Persen	3.74	0.93	2.80	3.74	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan tidak memenuhi target dikarenakan Pengujian sistem elektronik ditargetkan akan dilaksanakan pada triwulan III.												
2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan												
1	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	8.33	8.33	Sangat Rendah	8.33	8.33	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan tidak memenuhi target dikarenakan event kesenian kebudayaan lainnya akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya.												
2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional												
1	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi tidak memenuhi target dikarenakan komunitas/sanggar kesenian akan difasilitasi di triwulan selanjutnya												
2.22.04. Program Pembinaan Sejarah												
1	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
2.22.05. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya												
1	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	Persen	97.52	88.65	111.67	95.74	100.00	104.45	Sangat Tinggi	100.00	102.54	Tercapai
2.22.06. Program Pengelolaan Permuseuman												
1	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4.80	4.55	3.96	8.29	1.91	23.04	Sangat Tinggi	1.91	39.74	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Persentase pengunjung museum batik tidak memenuhi target dikarenakan banyaknya hari libur sekolah sehingga kunjungan dari sekolah berkurang												
2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan												
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5-60 tahun)	Indeks	16.58	15.77	30.96	28.00	4.68	16.71	Sedang	4.68	28.23	Belum Tercapai
Capaian indikator Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) tidak memenuhi target dikarenakan bulan puasa tidak ada mobilisasi sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan.												
2.23.03. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno												
2	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	Regulasi	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	1.00	100.00	Tercapai
2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
2.24.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	109.25	100.00	14.47	14.47	Rendah	14.47	14.47	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.86	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai
2.24.02. Program Pengelolaan Arsip												
1	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	Persen	66.67	33.33	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik tidak memenuhi target dikarenakan Capaian belum bisa dihitung karena data rilis pada TW IV. Saat ini kegiatan masih dalam tahap persiapan dan sosialisasi kepada seluruh OPD.												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	52.50	40.00	87.69	80.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome) belum tersedia data dikarenakan Capaian belum bisa dihitung karena merupakan data tahunan. Menunggu rilis nilai dari ANRI pada triwulan IV.												
2.24.03. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip												
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	66.67	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome) belum tersedia data dikarenakan Capaian belum bisa dihitung karena merupakan data tahunan												
2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip												
1	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK tidak memenuhi target dikarenakan Belum Tercapai dikarenakan tidak adanya pengajuan permohonan penggunaan arsip yang bersifat tertutup												
C.	Urusan Pemerintahan Pilihan											
3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
3.25.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi	persen	100.00	100.00	100.38	100.00	15.10	15.10	Rendah	15.10	15.10	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah											
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	131.38	100.00	16.84	16.84	Sedang	16.84	16.84	Belum Tercapai
3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap												
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	6.07	1.00	26.51	1.00	-83.48	-8,343.00	Sangat Rendah	-83.48	-1,375.36	Belum Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI tidak memenuhi target dikarenakan Produksi perikanan tangkap berumber dari TPI memiliki kecenderungan mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2024 mengalami kenaikan drastis, akan tetapi Jika produksi saat ini dibandingkan dengan produksi TW 1 Tahun sebelumnya produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI mengalami penurunan diKarenakan nelayan enggan labuh di Kota Pekalongan disebabkan 1. Hambatan kapal nelayan tidak bisa labuh akibat iklim angin musom barat yg membawa arus tinggi. 2. Penerapan perundangan yg tidak pro rakyat sehingga nelayan lebih memilih pelabuhan yg lebih kooperatif, 3. Harga acuan ikan yg lebih tinggi dibanding kab/ kota lainnya.												
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	6.15	1.00	-2.04	1.00	-84.18	-8,418.00	Sangat Rendah	-84.18	-1,368.74	Belum Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI tidak memenuhi target dikarenakan Pendapatan daerah bersumber dari TPI memiiki kecenderungan mengalami penurunan dari tahun ketahun. hal ini disebabkan oleh kurangnya kapal yang merapat ke pelabuhan pekalongan dikarenakan 1. Hambatan kapal nelayan tidak bisa labuh akibat iklim angin musom barat yg membawa arus tinggi. 2. Penerapan perundangan yg tidak pro rakyat sehingga nelayan lebih memilih pelabuhan yg lebih kooperatif 3. Harga acuan ikan yg lebih tinggi dibanding kab/ kota lainnya												
3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya												
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	6.15	1.00	-0.32	3.00	-68.59	-2,286.33	Sangat Rendah	-68.59	-1,115.31	Belum Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tidak memenuhi target dikarenakan Produksi perikanan budidaya mengalami kecenderungan penurunan, seperti ikan nila,mujaer dan lele yang mengalami penurunan di TW I dikarenakan masih pada tahap penebaran sehingga belum maksimal produksinya di TW I. meski demikian, terdapat peningkatan produksi (panen raya) udang vaname di TW 1 dan adanya penambahan komoditas rumput laut pada tahun 2025 di kelurahan kandang panjang.												
3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan												
1	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12.20	12.20	37.75	12.20	2.57	21.07	Tinggi	2.57	21.08	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tidak memenuhi target dikarenakan Produksi perikanan budidaya mengalami kecenderungan penurunan, seperti ikan nila, mujaer dan lele yang mengalami penurunan di TW I dikarenakan masih pada tahap penebaran sehingga belum maksimal produksinya di TW I. meski demikian, terdapat peningkatan produksi (panen raya) udang vaname di TW 1 dan adanya penambahan komoditas rumput laut pada tahun 2025 di kelurahan kandang panjang.												
2	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	12.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) tidak memenuhi target dikarenakan Realisasi pada Triwulan IV, merupakan pelaku usaha yang mengikuti inkubasi selama 12 bulan												
3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
3.26.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	15.23	15.23	Rendah	15.23	15.23	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	43.14	43.14	Sangat Tinggi	43.14	43.14	Belum Tercapai
3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata												
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	Persen	12.50	10.00	12.24	12.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome) belum tersedia data dikarenakan perhitungan data akan dilakukan di triwulan IV.												
3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata												
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	Persen	46.98	21.98	70.89	41.98	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome) belum tersedia data dikarenakan perhitungan data akan dilakukan di triwulan IV.												
3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	persen	59.52	0.00	73.83	51.28	21.70	42.32	Sangat Tinggi	95.53	160.50	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi jauh melebihi target dikarenakan Masifnya informasi yang disampaikan terkait acara ekraf yang berlangsung membuat animo masyarakat untuk ikut serta meningkat.												
3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif												
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	100.00	0.00	306.73	80.00	21.70	27.13	Sangat Tinggi	328.43	328.43	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar jauh melebihi target dikarenakan Masifnya informasi yang disampaikan terkait acara ekraf yang berlangsung membuat animo masyarakat untuk ikut serta meningkat												
3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
3.27.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	21.29	21.29	Tinggi	21.29	21.29	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	10.90	10.90	Sangat Rendah	10.90	10.90	Belum Tercapai
3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian												
1	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55.84	55.56	60.27	55.78	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Nilai Produksi Pertanian Per Tahun belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS.												
2	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	203.65	184.46	273.75	199.66	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Nilai Produksi Peternakan Per Tahun belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data dari BPS.												
3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian												
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan belum dilaksanakan. masih proses konsultasi perencanaan.												
3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner												
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	5.00	5.00	32.26	5.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular tidak memenuhi target dikarenakan belum ditemukan adanya kasus penyakit hewan menular.												
3.27.05. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian												
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota tidak memenuhi target dikarenakan belum ada pelaksanaan kegiatan terkait pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.												
3.27.06. Program Perizinan Usaha Pertanian												
1	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin tidak memenuhi target dikarenakan pendataan akan dilakukan pada triwulan IV.												
3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian												
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	5.00	5.00	4.76	5.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan penilaian kenaikan kelas dilaksanakan mulai Tw.3.												
3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
3.30.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	16.10	16.10	Rendah	16.10	16.10	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	93.19	100.00	23.08	23.08	Sangat Tinggi	23.08	23.08	Belum Tercapai
3.30.02. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan												
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	77.70	73.93	86.86	76.93	45.44	59.07	Sangat Tinggi	45.44	58.48	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Pelaku Usaha mengenai perizinan berusaha. Usaha yang telah dilakukan Dindagkop UKM terkait hal tersebut adalah pada saat pelatihan, monev UMKM atau saat pelaku usaha ada yg konsultasi ke Dindagkop UKM disampaikan dan diingatkan mengenai pentingnya perizinan.												
3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan												
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	100.00	75.00	75.00	100.00	68.75	68.75	Sangat Tinggi	68.75	68.75	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya tidak memenuhi target dikarenakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan tidak dapat mencapai target karena pada tahun 2024 dan tahun 2025 tidak terdapat pembangunan sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat) di wilayah kota pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan berfokus dalam menyelesaikan pembangunan pasar banjarsari agar dapat segera beroperasi.												
3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting												
1	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.30.05. Program Pengembangan Ekspor												
1	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	8.19	7.24	7.50	7.99	0.86	10.76	Sangat Rendah	0.86	10.50	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase peningkatan volume ekspor tidak memenuhi target dikarenakan adanya beberapa kebijakan global atau makro yang berdampak pada pelaku usaha berorientasi ekspor di Kota Pekalongan. Pelaku usaha mengalami kesulitan karena adanya perubahan tarif dan kebijakan yang berimbas pada beberapa pelaku usaha menunggu untuk melakukan kegiatan ekspor. Dilain sisi, beberapa regulasi pada custom clearence dan juga adanya perubahan tarif perpajakan turut berpengaruh terhadap capaian realisasi ekspor												
3.30.06. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen												
1	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	83.99	73.99	87.20	81.99	14.91	18.19	Sedang	14.91	17.75	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Realisasi capaian Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku pada TW I belum memenuhi target karena masih sedikitnya objek UTTP yang dapat dilakukan tera dan terbatasnya petugas SDM dalam melakukan pelaksanaan tera dan tera ulang. Disamping itu, masih kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan tera dan tera ulang dalam proses perdagangan.												
3.30.07. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri												
1	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	7.50	2.09	2.05	6.42	0.01	0.16	Sangat Rendah	0.01	0.13	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) tidak memenuhi target dikarenakan masih sedikitnya pameran atau kegiatan yang diikuti dalam rangka pemberian dukungan fasilitasi pemasaran kepada UMKM. Fasilitasi Pemasaran akan dilaksanakan pada Triwulan selanjutnya												
3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
3.31.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	99.25	100.00	15.75	15.75	Rendah	15.75	15.75	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	118.77	100.00	18.73	18.73	Sedang	18.73	18.73	Belum Tercapai
3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	21.04	20.59	82.71	75.34	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan. Sehingga belum bisa menggambarkan capaian akhir												
3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota												
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	26.00	23.00	25.03	25.00	4.92	19.68	Tinggi	4.92	18.92	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan. Sehingga belum bisa menggambarkan capaian akhir												
3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional												
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan.												
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan												
4.01. SEKRETARIAT DAERAH												
4.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan	persen	100.00	100.00	166.67	100.00	18.52	18.52	Sedang	18.52	18.52	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi											
2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.28	25.28	Sangat Tinggi	25.28	25.28	Belum Tercapai
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100.00	100.00	99.86	100.00	31.95	31.95	Sangat Tinggi	31.95	31.95	Belum Tercapai
4	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	97.62	100.00	9.92	9.92	Sangat Rendah	9.92	9.92	Belum Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persen	100.00	100.00	70.84	100.00	12.50	12.50	Sangat Rendah	12.50	12.50	Belum Tercapai
6	Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
4.01.02. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat												
1	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100.00	100.00	122.22	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda yang ditetapkan tidak memenuhi target dikarenakan Proses saat ini masih pembahasan 3 raperda Raperda yang dibahas / Target perda pertahun $\ast 100 = (3/14) \ast 100\%$ Pembahasan 3 Raperda telah dilaksanakan Bulan Januari, Februari dan Maret Pansus 1, perubahan perda pajak daerah dan retribusi daerah Pansus 2, bangunan gedung Pansus 3, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan Tahapan masih pembahasan pansus tinggal finalisasi pansus bulan april												
3	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Tercapai
Capaian indikator Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat tidak memenuhi target dikarenakan merupakan data tahunan, sehingga akan diperhitungkan di triwulan IV												
4.01.03. Program Perekonomian Dan Pembangunan												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	24.14	24.14	Sangat Tinggi	24.14	24.14	Belum Tercapai
2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	6.00	7.00	9.60	6.00	84.34	7.11	Sangat Rendah	84.34	7.11	Belum Tercapai
Capaian indikator Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan perhitungan baru dilakukan untuk data realisasi belanja triwulan I, sehingga capaian belum bisa mencerminkan data capaian keseluruhan.												
3	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	100.00	100	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa tidak memenuhi target dikarenakan Pekerjaan Tender masih dalam tahap persiapan pengadaan barang/jasa												
4.02. SEKRETARIAT DPRD												
4.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.84	100.00	17.13	17.13	Sedang	17.13	17.13	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	13.72	13.72	Rendah	13.72	13.72	Belum Tercapai
4	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	28.22	28.22	Sangat Tinggi	28.22	28.22	Belum Tercapai
4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD												
1	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100.00	100.00	64.71	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Persentase Perda yang ditetapkan tidak memenuhi target dikarenakan Proses saat ini masih pembahasan 3 raperda Raperda yang dibahas / Target perda pertahun *100 = (3/14)*100% Pembahasan 3 Raperda telah dilaksanakan Bulan Januari, Februari dan Maret Pansus 1, perubahan perda pajak daerah dan retribusi daerah Pansus 2, bangunan gedung Pansus 3, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan Tahapan masih pembahasan pansus tinggal finalisasi pansus bulan april												
2	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu tidak memenuhi target dikarenakan Pembahasan Dokumen penganggaran akan mulai dilaksanakan pada TW II Tahun 2025												
E.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
5.01. PERENCANAAN												
5.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.08	100.00	18.98	18.98	Sedang	18.98	18.98	Belum Tercapai
3	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	32.84	32.84	Sangat Tinggi	32.84	32.84	Belum Tercapai
5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah												
1	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	33.33	33.33	Sangat Tinggi	33.33	33.33	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan dilakukan berkala setiap triwulan.												
2	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan penyusunan dokumen Penetapan RKPD 2026 dan Dokumen Perubahan RKPD 2025												
3	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan penyusunan dokumen Penetapan RKPD 2026 dan Dokumen Perubahan RKPD 2025.												
5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah												
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud tidak memenuhi target dikarenakan Penyusunan dokumen di Triwulan IV												
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian tidak memenuhi target dikarenakan Penyusunan dokumen di Triwulan IV												
3	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah tidak memenuhi target dikarenakan Penyusunan dokumen di Triwulan IV												
5.02. KEUANGAN												
5.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.68	100.00	15.48	15.48	Rendah	15.48	15.48	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	102.39	100.00	7.22	7.22	Sangat Rendah	7.22	7.22	Belum Tercapai
5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah												
1	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	7.26	11.91	5.06	7.50	6.18	82.40	Sangat Tinggi	6.18	117.40	Tercapai
Capaian indikator Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan adanya efisiensi belanja daerah sebesar Rp3,42 miliar yang diperoleh melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, pengetatan pengeluaran yang tidak prioritas, serta pemanfaatan anggaran secara efektif dan tepat sasaran. Efisiensi ini dilakukan tanpa mengurangi capaian target kinerja yang telah ditetapkan, Selain itu adanya pelampauan pendapatan daerah sebesar Rp1,02 miliar yang diperoleh dari optimalisasi potensi penerimaan dalam pengelolaan pendapatan daerah												
5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah												
1	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	66.67	Sangat Tinggi	66.67	66.67	Belum Tercapai
Capaian indikator Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan jadwal pelaksanaan proses inventarisasi aset tahunan dijadwalkan selesai pada triwulan IV												
5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah												
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	5.00	5.00	2.40	5.00	81.00	6.17	Sangat Rendah	81.00	6.17	Belum Tercapai
Capaian indikator Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan karena adanya pola target pendapatan yang sebagian besar baru direncanakan untuk direalisasikan pada Triwulan III dan IV (PBB, BPHTB, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, dll), sehingga capaian di Triwulan I masih rendah dan belum menggambarkan realisasi secara proporsional terhadap target tahunan. Selain itu, perhitungan deviasi ini secara keseluruhan baru dapat dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga capaian sementara memang belum memenuhi target. Di sisi lain, adanya efisiensi anggaran APBD juga berkontribusi terhadap deviasi ini, karena beberapa program dan kegiatan yang berpotensi menghasilkan PAD ditunda atau dilakukan dengan skala lebih kecil, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan perolehan pendapatan di awal tahun anggaran.												
5.03. KEPEGAWAIAN												
5.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.13	100.00	14.84	14.84	Rendah	14.84	14.84	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	22.82	22.82	Tinggi	22.82	22.82	Belum Tercapai
5.03.02. Program Kepegawaian Daerah												
1	Persentase PNS berkembang karier	persen	50.00	50.00	106.67	80.00	45.00	56.25	Sangat Tinggi	45.00	90.00	Akan Tercapai
2	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100.00	100.00	99.97	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90.00	90.00	95.61	90.00	96.13	106.81	Sangat Tinggi	96.13	106.82	Tercapai
4	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	80.00	80.00	48.14	80.00	48.56	60.70	Sangat Tinggi	48.56	60.70	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Keterpenuhan Formasi ASN tidak memenuhi target dikarenakan 1. Tingginya gelombang pensiun ASN ditambah dengan ketidakpastian kebijakan perencanaan pengadaan ASN mengakibatkan keterbatasan jumlah ASN 2. Adanya moratorium pengadaan PNS dari tahun 2016-2019												
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia												
1	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100.00	100.00	107.99	100.00	18.75	18.75	Sedang	18.75	18.75	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase PNS berkembang kompetensinya tidak memenuhi target dikarenakan 1. Usulan kebutuhan pengembangan kompetensi melalui mekanisme biaya instansi pengirim menunggu proses pemanggilan dari penyelenggara pendidikan sesuai ketersediaan kuota peserta 2. Sebagian besar dari total target pengembangan kompetensi difokuskan pada kegiatan Latsar dan orientasi bagi PPPK, yang direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025												
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
5.05.02. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah												
1	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPd	Ketercapaian Thd Target RKPd 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD tidak memenuhi target dikarenakan merupakan data tahunan. sehingga, perhitungan capaian akan diperhitungkan pada triwulan IV												
2	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	76.00	70.93	0.00	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) tidak memenuhi target dikarenakan Indikator kinerja skor capaian nilai RiDA (SiDA) data tidak tersedia, dikarenakan tidak dilakukan pengukuran RiDA Kota Pekalongan oleh BRIN. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pengukuran Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDA) saat ini telah bertransformasi menjadi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fasilitas Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah Tahun 2023-2025 (R-SIDA) akan dilakukan dengan penyeselarasan pengukuran IDSD.												
3	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan tidak memenuhi target dikarenakan merupakan data tahunan. sehingga, perhitungan capaian akan diperhitungkan pada triwulan IV												
F.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan											
6.01. INSPEKTORAT DAERAH												
6.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	107.60	100.00	27.32	27.32	Sangat Tinggi	27.32	27.32	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	112.00	100.00	3.84	3.84	Sangat Rendah	3.84	3.84	Belum Tercapai
6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan												
1	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85.00	85.00	87.04	85.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan audit kinerja rencana baru akan mulai di laksanakan pada triwulan II, sehingga belum ada temuan hasil pemeriksaan.												
6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Level Kapabilitas APIP	Persen	3.00	3.00	3.00	3.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Indikator Level Kapabilitas APIP belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data nilai kapabilitas APIP dari BPKP pada triwulan IV												
G.	Unsur Kewilayahan											
7.01. KECAMATAN												
7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	101.99	100.00	14.19	14.19	Rendah	14.19	14.19	Belum Tercapai
3	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	13.67	13.67	Rendah	13.67	13.67	Belum Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	16.10	16.10	Rendah	16.10	16.10	Belum Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	6.57	6.57	Sangat Rendah	6.57	6.57	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
8	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	18.53	18.53	Sedang	18.53	18.53	Belum Tercapai
9	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	15.21	15.21	Rendah	15.21	15.21	Belum Tercapai
10	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
11	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	16.94	16.94	Sedang	16.94	16.94	Belum Tercapai
12	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	6.64	6.64	Sangat Rendah	6.64	6.64	Belum Tercapai
7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik												
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dilaksanakan bertahap hingga triwulan IV.												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	12.50	12.50	Sangat rendah	12.50	12.50	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dilaksanakan bertahap hingga triwulan IV.												
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dilaksanakan bertahap hingga triwulan IV.												
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dilaksanakan bertahap hingga triwulan IV.												
7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan												
1	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara tidak memenuhi target dikarenakan pencatatan atas capaian total besaran keterlibatan komponen LKK pada kegiatan pemberdayaan masyarakat akan di lakukan di triwulan IV.												
2	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan tidak memenuhi target dikarenakan pencatatan atas capaian total besaran keterlibatan komponen LKK pada kegiatan pemberdayaan masyarakat akan di lakukan di triwulan IV.												
3	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPd	Ketercapaian Thd Target RKPd 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat tidak memenuhi target dikarenakan pencatatan atas capaian total besaran keterlibatan komponen LKK pada kegiatan pemberdayaan masyarakat akan di lakukan di triwulan IV.												
4	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur tidak memenuhi target dikarenakan pencatatan atas capaian total besaran keterlibatan komponen LKK pada kegiatan pemberdayaan masyarakat akan di lakukan di triwulan IV.												
7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum												
1	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara tidak memenuhi target dikarenakan merupakan kegiatan rutin. Sehingga pencatatan capaian akan dilakukan di triwulan IV.												
2	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan tidak memenuhi target dikarenakan merupakan kegiatan rutin. Sehingga pencatatan capaian akan dilakukan di triwulan IV.												
3	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat tidak memenuhi target dikarenakan merupakan kegiatan rutin. Sehingga pencatatan capaian akan dilakukan di triwulan IV.												
4	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	Sangat Tinggi	25.00	25.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur tidak memenuhi target dikarenakan merupakan kegiatan rutin. Sehingga pencatatan capaian akan dilakukan di triwulan IV.												
7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum												
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan baru akan mulai dilaksanakan pada Triwulan II.												
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capaian indikator Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan baru akan mulai dilaksanakan pada Triwulan II.												
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan baru akan mulai dilaksanakan pada Triwulan III.												
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan baru akan mulai dilaksanakan pada Triwulan III.												
H.	Unsur Pemerintahan Umum											
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
8.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.45	29.45	Sangat Tinggi	29.45	29.45	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.95	100.00	16.90	16.90	Sedang	16.90	16.90	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	15.10	15.10	Rendah	15.10	15.10	Belum Tercapai
8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan												
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.91	29.91	Sangat Tinggi	29.91	29.91	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan pembinaan baru dilaksanakan untuk 32 etnis/suku/agama/ormas dan LSM dari 107 etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang menjadi sasaran.												

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD	Ketercapaian Thd Target RKPD 2025	Realisasi RPJMD s.d. 2025	Tingkat Capaian RPJMD	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik												
1	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16.00	0.00	16.00	16.00	10.00	62.50	Sangat Tinggi	10.00	62.50	Belum Tercapai
Capaian indikator Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan pendidikan baru dilaksanakan pada 9 parpol dan 1 lembaga pendidikan dari 16 parpol dan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran.												
8.01.04. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												
1	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan Pembinaan / Hibah Ormas direncanakan dilaksanakan Pada triwulan II dan IV Tahun 2025												
8.01.05. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya												
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan direncanakan pada Triwulan II, III dan IV Tahun 2025												
8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial												
1	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

2.1.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada tahapan pengumpulan data, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan; dan
2. Mengidentifikasi jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana, dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Ketersediaan tersebut dapat diperoleh dari pihak BUMN, BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya.
4. Perangkat Daerah menghitung jumlah warga negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu, dikarenakan:
 - miskin atau tidak mampu;
 - sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - kondisi bencana; dan/atau
 - kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima Pelayanan dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD,
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan dasar diimut dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
4. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
5. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
3. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
 - memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya

Pada tahun 2022 Kota Pekalongan telah menerapkan seluruh tahapan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengalokasikan anggaran atas penerapan Standar Pelayanan Minimal sejak proses perencanaan, yang dimulai dari RPJMD sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2025.

2.1.3.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan kedua aturan tersebut, capaian atas Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan raport Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia perlu kami sampaikan bahwa raport Pendidikan tahun 2024 sampai dengan saat ini belum terbit, sehingga data yang digunakan adalah raport Pendidikan tahun 2023. Sedangkan untuk pelaporan terkait anggaran menggunakan dasar pelaksanaan anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024 Capaian SPM Pendidikan secara keseluruhan adalah 99,12% atau termasuk kategori **TUNTAS UTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar usia dini dengan capaian sebesar 98,69%;
2. Pendidikan dasar dengan capaian sebesar 99,87%;
3. Pendidikan kesetaraan dengan capaian sebesar 98,81%;

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2024**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Pengumpulan data dari Sekolah yang lambat disebabkan adanya permasalahan administrasi perpindahan data maupun kendala sistem sebagai akibat banyaknya operator sekolah yang mengakses aplikasi dapodik maupun emis dalam waktu yang bersamaan, sehingga waktu proses menjadi lebih lambat	1. Proses update data pada aplikasi Dapodik maupun EMIS oleh Operator sekolah dilaksanakan di awal waktu sehingga terhindar dari permasalahan sistem akibat over kapasitas pengakses aplikasi menjelang <i>cut off</i> 2. Mengintensifkan penguatan kelembagaan disatuan pendidikan terutama disiplin dalam menjalankan administrasi sekolah.
	Kesulitan dalam memperoleh data siswa pendidikan menengah, yang kewenangannya berada di Provinsi	Meningkatkan koordinasi dengan Operator Sistem Dinas Pendidikan Provinsi dan admin Dapodik di tingkat pusat agar kebutuhan data terpenuhi.
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Tim yang bertugas melakukan perhitungan kebutuhan perlu waktu untuk verifikasi dan validasi siswa miskin calon penerima bantuan perlengkapan belajar maupun biaya personil	Meningkatkan koordinasi dengan tim verifikator dari sekolah terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi siswa miskin sehingga dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu.
	Tidak tersedianya data BNBA pada data penduduk, sehingga kesulitan dalam menentukan kebutuhan jumlah penerima layanan SPM berdasarkan asal siswa.	Melakukan koordinasi dengan Dindukcapil agar mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Keterbatasan anggaran yang tersedia menghambat pemenuhan kebutuhan dalam rangka pencapaian SPM	1. Membuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan agar hasilnya lebih optimal dan tepat sasaran. 2. Melakukan advokasi penganggaran pemenuhan SPM di Badan Anggaran agar penetapannya sesuai dengan yang telah direncanakan.
4.	Pelaksanaan	
	Tidak ada	-
5.	Lain-lain	
	Rapor pendidikan yang dirilis terlambat sehingga menyulitkan dalam Menyusun pelaporan tahun N karena data yang disandingkan tidak padan	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.
	Rapor pendidikan hanya menyajikan hasil akhir tanpa menyertakan nilai variable perhitungannya, sehingga menyulitkan pada saat pengisian form tahapan penerapan SPM	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

2.1.3.2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Pada tahun 2024 Capaian SPM Kesehatan secara keseluruhan adalah 97,97% atau kategori **TUNTAS UTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 100,00%;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian 99,92%;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 99,59%;
4. Pelayanan kesehatan balita dengan capaian 100,00%;
5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar dengan capaian 100,00%;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 92,18%;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian 98,89%;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian 85,04%;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dengan capaian 100,00%;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 100%;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan capaian 100%;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) dengan capaian 100%

Kendala yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.4 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2024**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Tidak ada	-
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Tidak ada	-
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Tidak ada	-
4.	Pelaksanaan	
	1. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut: a. Belum semua lansia mengakses pelayanan kesehatan, akses ke faskes maupun posyandu terkendala tidak ada yang mengantar karena satu rumah keluarga bekerja atau dengan alasan lainnya. b. Kurangnya dukungan keluarga dalam pendampingan lansia. Kurangnya dukungan anggaran kegiatan kunjungan rumah pada sasaran lansia. c. Perlu peningkatan kapasitas petugas dan penggalangan komitmen pelayanan lansia sesuai dengan standart terkait Skrining kesehatan. Usia Produktif Belum semua usia produktif melakukan pemeriksaan skrining PTM minimal 1 tahun sekali. 2. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Belum semua penderita hipertensi melakukan pemeriksaaan 12 kali dalam setahun	Akan meningkatkan kegiatan sosialisasi / kampanye terkait upaya promosi kesehatan terhadap masyarakat
5.	Lain-lain	
	Tidak ada	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan *Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025*

2.1.3.3. Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar Pekerjaan Umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Pada tahun 2024 Capaian SPM Pekerjaan Umum secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian 100%;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 100%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Pengumpulan data memerlukan support dan dukungan dengan pihak eksternal OPD, yang terkadang sulit dikendalikan kesiapan dan keberadaan datanya	Koordinasi dengan pihak eksternal OPD terkait pengumpulan data yang dibutuhkan
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Untuk penyediaan air bersih penghitungan kebutuhan membutuhkan koordinasi dengan pihak eksternal OPD (PDAM)	Koordinasi dengan pihak eksternal OPD (PDAM) terkait penghitungan kebutuhan
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Membutuhkan kerjasama secara aktif dengan CSR agar dapat meningkatkan mutu SPM	Inventarisasi dan koordinasi dengan badan usaha yang memiliki potensi meningkatkan mutu SPM melalui CSR
4.	Pelaksanaan	
	Kurang tersedianya lahan yang strategis untuk pembangunan SPALDT, SPALDS dan IPLT	Pertimbangkan Pembangunan infrastruktur secara regional
5.	Lain-lain	
	Pada mutu layanan penyediaan pengolahan limbah domestik hanya ada untuk kawasan pedesaan yang tidak bisa dilakukan tutup mutu, karena OPD kami berada di kawasan perkotaan, sehingga menurunkan capaian SPM kami	Dilakukan pengisian akses layak limbah domestik wilayah perkotaan

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

2.1.3.4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Perumahan dan Permukiman secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 100%;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%.

Kendala yang dihadapi daerah dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

**Tabel 2.6 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Kesulitan dalam melengkapi BNBA secara detail sesuai dengan isian form, baik itu RT/RW, NIK, jumlah anggota keluarga, luas bangunan, luas tanah. Serta pemetaan lokasi rawan bencana di Kota Pekalongan.	Melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan pemangku wilayah (RT/RW) setempat agar mendapat data yang valid Pemetaan daerah rawan bencana harus berkoordinasi dengan BPBD.
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Kesulitan dalam menghitung kebutuhan Pembangunan rumah bagi korban bencana dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana karena kegiatan kebencanaan dan lokasi yang terjadi bencana alam sifatnya insidental.	Penganggaran berdasarkan kebutuhan penghitungan rata-rata standar pembangunan rumah untuk korban bencana
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Tidak ada	-
4.	PELAKSANAAN	
	Tidak ada	-
5.	LAIN-LAIN	
	Tidak ada	-

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

2.1.3.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pada tahun 2024 Capaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS UTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian 100,00%;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian 100,00%;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian 100,00%;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 99,94%;

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Belum adanya data penduduk yang memuat nama dan alamat sehingga kesulitan untuk melakukan pengumpulan data secara detail	Adanya koordinasi di tingkat Pusat, sehingga aturan terkait data penduduk yang memuat nama dan alamat dapat diperoleh dengan mudah oleh daerah.
	Belum terintegrasinya data pilah kependudukan dengan data geospasial sehingga tidak bisa melakukan pengumpulan data secara akurat	Dilakukan integrasi data pilah kependudukan dengan data geospasial.
	Pengumpulan data kurang detail seperti data NIK, No.KK, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir warga negara yang berada dalam radius 0-50 Meter dilokasi Penegakan Perda dan Perkada, saat dilokasi penegakan perda dan perkada, petugas kesulitan mendapatkan data tersebut karena merupakan data pribadi yang bisa saja disalahgunakan ketika data itu diinput.	Perlu adanya pembinaan lebih lanjut kepada masyarakat dalam data yang dikumpulkan saat penegakan Perda serta kurangnya kepercayaan masyarakat dalam keamanan privasi data yang diberikan, sehingga perlu adanya penjaminan keamanan data yang diberikan oleh Kemendagri.
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Pengumpulan data yang kurang detail berdampak pada penghitungan kebutuhan yang mungkin berbeda dengan kebutuhan faktual	Pengumpulan data dilakukan lebih detail.
	Perubahan cuaca yang sulit diprediksi secara akurat mengakibatkan prediksi kejadian bencana berbeda dengan kejadian sesungguhnya. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan pelayanan akan berbeda dengan kebutuhan dilapangan.	Lebih cermat dalam memprediksi perubahan cuaca yang terjadi.
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Ketersediaan data yang minim membuat perencanaan dan penganggaran tidak bisa dilakukan dengan akurat sesuai dengan kebutuhan real	Penyediaan data yang lebih baik.
4.	PELAKSANAAN	
	Prediksi cuaca yang tidak akurat menyebabkan peningkatan kejadian bencana pada waktu yang tidak biasanya. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan penanganan secara optimal.	Lebih cermat dan akurat dalam memprediksi cuaca yang terjadi.

No.	Permasalahan	Solusi
	Sepanjang Tahun 2024 dari total 56 kejadian kebakaran, 55 diantaranya dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal waktu tanggap 15 menit, waktu tanggap tersebut dihitung sejak diterimanya laporan hingga Pemadam Kebakaran tiba di lokasi kejadian dan siap melakukan pemadaman api. Terdapat 1 kejadian yang dicapai dalam waktu 17 menit sehingga tidak dapat memenuhi SPM yang dipersyaratkan, hal tersebut dikarenakan pada saat kejadian tersebut terjadi kebakaran yang cukup besar di waktu yang hampir bersamaan dan armada truk Damkar sedang mengisi ulang tangki air serta kemudian terdapat Kereta Api yang melintas sehingga menghambat perjalanan menuju ke lokasi kejadian kebakaran yang akan ditangani. Dengan melihat data dan fakta diatas dapat dikatakan permasalahan utama pemenuhan SPM sub Urusan Kebakaran di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lokasi Mako/Pos Damkar yang hanya 1 terletak di sisi utara rel Kereta Api (Jl. Tentara Pelajar No.1) sehingga sewaktu-waktu apabila terjadi kebakaran di sisi selatan rel Kereta Api dapat terhambat penanganannya, ditambah lokasi sumber air yang hanya terdapat di Kantor PDAM juga terletak di sisi utara rel Kereta Api sehingga apabila hendak mengisi ulang tangki air armada Truk Damkar juga cukup jauh jaraknya ditambah kendala yang sama apabila terdapat kereta api yang melintas akan menghambat untuk kembali menuju lokasi kejadian kebakaran. Dengan demikian perlu adanya tambahan minimal 1 Mako/Pos Damkar untuk menjangkau/menangani kejadian kebakaran yang terjadi di sisi selatan rel Kereta Api.	Perlu adanya penambahan pos Damkar di sisi selatan rel Kereta Api agar tidak terkendala oleh Kereta Api yang melintas pada saat terjadi kebakaran karena kondisi saat ini Mako Damkar Kota Pekalongan berada di Jl. Tentara Pelajar No.1 yang berada di sisi utara rel Kereta Api, disamping itu berdasarkan data yang kami miliki intensitas kejadian kebakaran yang terjadi mayoritas berada di sisi selatan rel Kereta Api mengingat di wilayah Kota Pekalongan bagian selatan banyak ditemui industri rumahan seperti produksi batik, tempe, tahu, mebel, dll yang memiliki potensi bahaya kebakaran cukup tinggi ditambah dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan akses jalan yang sempit. Perlu adanya penambahan pos Damkar di sisi selatan rel Kereta Api agar tidak terkendala oleh Kereta Api yang melintas pada saat terjadi kebakaran karena kondisi saat ini Mako Damkar Kota Pekalongan berada di Jl. Tentara Pelajar No.1 yang berada di sisi utara rel Kereta Api, disamping itu berdasarkan data yang kami miliki intensitas kejadian kebakaran yang terjadi mayoritas berada di sisi selatan rel Kereta Api mengingat di wilayah Kota Pekalongan bagian selatan banyak ditemui industri rumahan seperti produksi batik, tempe, tahu, mebel, dll yang memiliki potensi bahaya kebakaran cukup tinggi ditambah dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan akses jalan yang sempit.
5.	LAIN-LAIN Permasalahan lain terkait penerapan SPM sub Urusan Kebakaran di Kota Pekalongan adalah jumlah kerugian material yang masih cukup tinggi meskipun bila melihat waktu tanggap sebagian besar telah dapat dicapai maksimal dalam 15 menit, hal tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya sarpras yang tersedia baik selang, nozzle, APD petugas, dan peralatan lain yang diperlukan untuk menangani kejadian kebakaran dengan maksimal sehingga dapat menekan jumlah kerugian aset maupun kemungkinan adanya korban jiwa	Perlu peningkatan kualitas/peremajaan sarana prasarana pemadaman kebakaran yang ada agar dapat lebih maksimal dalam melakukan kegiatan pemadaman, hal tersebut dikarenakan peralatan yang ada telah cukup berumur sehingga kurang maksimal untuk digunakan dalam memadamkan api seperti selang yang bocor, nozzle yang macet, armada yang telah cukup berumur. Hal tersebut menyebabkan kerugian material masih tinggi atau tidak maksimal untuk menyelamatkan aset yang ada pada saat terjadi kebakaran. Dapat dikatakan meskipun dapat cepat sampai di lokasi pada saat terjadi kebakaran namun untuk proses pemadaman belum maksimal karena permasalahan tersebut.

2.1.3.6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Pada tahun 2024 Capaian SPM urusan Sosial secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA**.

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan capaian 100%;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan capaian 100%;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan capaian 100%;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan capaian 100%;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap & paska bencana bagi korban bencana daerah kota dengan capaian 100%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.8 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Sosial Tahun 2024**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Biodata dari kelayan yang tidak mempunyai identitas lengkap seperti KTP	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya dapat dibantu perekaman identitas penerima manfaat
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Kesulitan dalam memprediksi kebutuhan dalam korban bencana	Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab Lokasi pengungsi agar dilakukan asesmen kebutuhan kepada pengungsi
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Perencanaan kebutuhan dasar yang masih belum tercapai	Merencanakan dengan baik kebutuhan anggaran yang diperlukan kemudian mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4.	PELAKSANAAN	
	Ada beberapa kecil penerima manfaat berasal dari luar daerah kota pekalongan	Melakukan asesmen kepada penerima manfaat terkait asal usul, kemudian menghubungkan dengan Dinas Sosial sesuai asal daerah Merujuk penerima manfaat ke panti milik pemerintah
5.	LAIN-LAIN	
	Kapasitas tempat yang belum memadai	Merencanakan kebutuhan untuk tempat hunian sementara penerima manfaat kemudian mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar dapat melakukan rehab tempat

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

2.1.4. Hasil Evaluasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2024

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (The 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Sejak tahun 2023, dokumen capaian TPB/SDGs mengacu pada metadata edisi II.

2.2.4.1. Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 39 target dan 85 indikator tercapai, 16 indikator tidak tercapai dan 30 indikator dengan data tidak tersedia. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

**Tabel 2.9 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial
di Kota Pekalongan Tahun 2024**

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN							
12 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional							
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	persen	6,29	6,71	Tidak tercapai
13 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	DINKES	persen	98	98,32	Tercapai
3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	DINPERINAKEK	persen	PM	95,46	Tercapai
4	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	DINSOS P2KB	persen	PM	33,62	Tercapai
5	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	DINSOS P2KB	KPM	PM	14378	Tercapai
14 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
6	1.4.1.(a)	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
7	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	DINKES	persen	100	82,36	Tidak tercapai
8	1.4.1.(c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINSOS P2KB	persen	67,55	64,41	Tidak tercapai
9	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	DPU-PR	persen	100	100	Tercapai
10	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	DPU-PR	persen	100	100	Tercapai
11	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	DINPERKIM	persen	60,24	60,24	Tercapai
12	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	DINDIK	persen	PM	96,65	Tercapai
13	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	DINDIK	persen	PM	77,76	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	BPS	persen	PM	64,96	Tercapai
15	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	DINDUKCAPIL	persen	PM	99,35	Tercapai
16	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	BPS	persen	PM	100	Tercapai
15 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana							
17	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100000 orang	BPBD	orang	PM	455,97	Tercapai
18	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	BPBD	Kelurahan	PM	26	Tercapai
19	1.5.1.(b)	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu)	DINSOS P2KB	jiwa	577	577	Tercapai
20	1.5.1.(c)	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial	DINSOS P2KB	jiwa	577	577	Tercapai
21	1.5.1.(d)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100)	BPBD		PM	0	Tercapai
22	1.5.1.(e)	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD	%	PM	0,96	Tercapai
23	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Rupiah	PM	#####	Tercapai
24	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	BPBD	Dokumen	PM	28	Tercapai
1a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi							
25	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	BAPPEDA, BPKAD	persen	PM	21,13	Tercapai
26	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	DINDIK, DINKES, DINSOS		PM	NA	Data tidak tersedia

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN							
21 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun							
27	2.1.1*	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	DINPERPA	ton	10	10	Tercapai
28	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	DINKES	persen	12	14,59	Tidak tercapai
29	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	DINPERPA	persen	100	100	Tercapai
30	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	DINKES	persen	2,1	4,12	Tidak Tercapai
22 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula							
31	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINKES	persen	<14%	7,34	Tercapai
32	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DINKES	persen	PM	5,5	Tercapai
33	2.2.2*	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	DINKES	persen	7	8,43	Tidak tercapai
34	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	DINKES	kasus	PM	11,59	Tercapai
35	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	DINKES	persen	80	72,07	Tidak tercapai
36	2.2.2.(c)	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERPA	skor	81	92,12	Tercapai
23 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian							
37	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA							
31 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100000 kelahiran hidup							

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	DINKES	Per 100000 KH	104,14	129,7	Tidak tercapai
39	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	DINKES	persen	100	100	Tercapai
40	3.1.2.(a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
32 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000							
41	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1000 KH	9,61	16,86	Tidak tercapai
42	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1000 KH	PM	4,67	Tercapai
43	3.2.2.(a)	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1000 KH	7,6	10,89	Tidak tercapai
44	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	DINKES	persen	100	96,3	Tidak tercapai
45	3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	DINKES	orang	PM	0,67	Tercapai
46	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100000 penduduk	DINKES	per 100000 penduduk	PM	321,47	Tercapai
47	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	DINKES		PM	0	Tercapai
33 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
48	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria	DINKES	per 1000 penduduk beresiko	PM	0	Tercapai
49	3.3.4.(a)	Jumlah Kasus Hepatitis B	DINKES	kasus	PM	22	Tercapai
50	3.3.5*	Jumlah kasus baru penyakit tropis yang diobati a(foliarisis dan b) kusta	DINKES	per 100000 penduduk	PM	43	Tercapai
51	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	DINKES		PM	N/A	Data tidak tersedia
52	3.3.5.(b)	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (NCDR) per 100000 penduduk	DINKES	per 100000 penduduk	PM	N/A	Data tidak tersedia
34 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan							
53	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
54	3.4.1 (b)	Presentase kasus hipertensi yang mendapat pelayanan pengobatan	DINKES	persen	100	81,68	Tidak tercapai
55	3.4.1.(c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	DINKES	persen	100	2,49	Tidak tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
56	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	POLRES		PM	N/A	Data tidak tersedia
57	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	DINKES	persen	100	100	Tercapai
35 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan							
58	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	KESBANGPOL	orang	PM	2	Tercapai
59	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	KESBANGPOL	orang	PM	2	Tercapai
60	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	KESBANGPOL	orang	PM	0	Tercapai
61	3.5.1.(d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	KESBANGPOL	Rumah sakit	PM	0	Tercapai
62	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	KESBANGPOL	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
63	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
37 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional							
64	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	DINSOS P2KB	persen	PM	72,67	Tercapai
65	3.7.1.(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINSOS P2KB	persen	67,55	64,41	Tidak tercapai
66	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	DINSOS P2KB	persen	20,4	23,1	Tercapai
67	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DINSOS P2KB	persen	8,73	0,34	Tercapai
68	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	DINSOS P2KB	persen	2,16	2,19	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang							
69	3.8.1(a)	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
70	3.8.2*	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINKES	persen	98	98,32	Tercapai
71	3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINKES	persen	98	98,32	Tercapai
39 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah							
72	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan	DINKES		PM	N/A	Data tidak tersedia
3a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat							
73	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	persen	PM	25,04	Tercapai
3b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas AspekAspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua							
74	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	DINKES	persen	80	100	Tercapai
3c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil							
75	3c1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	DINKES	persen	PM	12,38	Tercapai
TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT							
41 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif							
76	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	DINDIK		NA	N/A	Data tidak tersedia
77	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi A (2020) 2021: Persentase SD/MI berakreditasi B	DINDIK	persen	PM	98,64	Tercapai
78	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi B	DINDIK	persen	PM	95,24	Tercapai
79	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	DINDIK	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
80	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	DINDIK	persen	PM	105,75	Tercapai
81	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	DINDIK	persen	PM	103, 7	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
82	4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	persen	PM	84,08	Tercapai
83	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	DINDIK	Tahun	9,59	9,34	Tidak tercapai
42 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar							
84	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINDIK	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
43 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas							
85	4.3.1.(a)	Persentase APK SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	persen	PM	84,08	Tercapai
86	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
44 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan							
87	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
45 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan							
88	4.5.1*	Rasio APM pada tingkat:	DINDIK	persen	PM	(1) 0,971	Tercapai
					PM	(2) 0,90	
		1) APM SD/MI/ sederajat					
		2) APM SMP/MTs/ Sederajat					
46 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi							
89	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	persen	PM	97,31	Tercapai
90	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	BPS	persen	PM	umur 15-24 tahun = 100%	Tercapai
						umur 15-59 tahun = 99,45%	
4a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua							
91	4.a.1*	Persentase Ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan	DINDIK	persen	PM	97,23	Tercapai
4c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil							
92	4.c.1*	Persentase pendidik TK-SD-SMP bersertifikat pendidik	Dindik	persen	PM	53,47	Tercapai
TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
51 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun							

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
93	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DPMPPA		PM	2 (SK Wali Kota Pokja PUG, SK Pelaksana Tim PPRG)	Tercapai
52 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya							
94	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	DPMPPA	persen	PM	0,01	Tercapai
95	5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	DPMPPA	persen	PM	0,09	Tercapai
96	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DPMPPA		PM	0,01	Tercapai
97	5.2.2.(a)	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melaporkan terlayani	DPMPPA	persen	PM	100	Tercapai
53 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan							
96	5.3.1*	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	DINSOS P2KB	persen	PM	13,99	Tercapai
97	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	DINSOS P2KB	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
98	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DINSOS P2KB	persen	8,73	0,34	Tercapai
99	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	BPS	persen	PM	84,08	Tercapai
55 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat							
100	5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Setwan	persen	PM	14,29	Tercapai
101	5.5.2*	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	BKPSDM	Persen	PM	58,14	Tercapai
56 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumendokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut							
102	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan	DINSOS P2KB	Persen	67,55	64,41	Tidak tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi					
103	5.6.1 (a)	Unmet need KB	DINSOS P2KB	persen	14	8,48	Tercapai
104	5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	DINSOS P2KB		100	100	Tercapai
5b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan							
105	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	BPS	persen	PM	81,67	Tercapai
TUJUAN 6: MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA							
61 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua							
106	6.1.1.(a)	Cakupan Pelayanan air minum:	DPU-PR	Persen	100	100	Tercapai
		- Perdesaan					
		- Perkotaan					
107	6.1.1.(b)	Kapasitas Prasarana air baku	DPU-PR	m3	PM	N/A	Data tidak tersedia
108	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	DINKES	Persen	PM	37,14	Tercapai
62 Pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan							
109	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	DINKES	Persen	75	86,12	Tercapai
110	6.2.1.(b)	Cakupan pelayanan sanitasi	DPU-PR	Persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
111	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINKES	Kelurahan	27	27	Tercapai
112	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES	Kelurahan	27	27	Tercapai
113	6.2.1.(e)	Jumlah IPAL yang terbangun dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	DLH	Persen	PM	4	Tercapai
114	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	CIPTA KARYA	NA	PM	N/A	Data tidak tersedia
115	6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi	DLH		PM	1	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					
63 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global							
116	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DLH		PM	0	Tercapai
117	6.3.2.(a)	Kualitas air danau	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
118	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
64 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air							
119	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	DLH	Perusahaan	NA	N/A	Data tidak tersedia
120	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	DINPERPA		PM	N/A	Data tidak tersedia
65 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepentingan							
121	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	BAPPEDA PSDAIW		PM	N/A	Data tidak tersedia
122	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	BPBD		PM	N/A	Data tidak tersedia
123	6.5.1.(C)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
124	6.5.1.(e)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	DKP		PM	2	Tercapai
125	6.5.1.(f)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	DKP		PM	2	Tercapai
126	6.5.1.(g)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
127	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penahan skala kecil dan menengah					
66 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau							
128	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
129	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

Keterangan:

NA: data tidak tersedia

PM: tidak ada target pada dokumen perencanaan OPD

2.2.4.2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 tujuan 27 target 30 indikator tercapai, indikator tidak tercapai dan 36 indikator dengan data tidak tersedia. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TUJUAN 7: MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA							
71 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern							
130	7.1.1*	Rasio elektrifikasi	BPS	persen	PM	100	Tercapai
131	7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	BPS	Kwh/ Kapita	PM	N/A	Data tidak tersedia
132	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	BPS		PM	0	Tercapai
133	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
72 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global							
134	7.2.1*	Bauran energi terbarukan	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
73 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat							
135	7.3.1*	Intensitas energi primer	ESDM		PM	N/A	Data tidak tersedia
TUJUAN 8: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA							
81 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
136	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
136	8.1.1.(a)	PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	PM	N/A	Data tidak tersedia
82 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya							
137	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun					
83 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan							
138	8.3.1*	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
139	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
140	8.3.1.(c)	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
85 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
141	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rupiah	PM	N/A	Data tidak tersedia
142	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	persen	PM	4,91	Tercapai
143	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
86 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan							
144	8.6.1*	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	DINPERINAKER/BPS	orang	69	69	Tercapai
89 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal							
145	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinparbudpora	persen	11,5	12,24	Tercapai
146	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinparbudpora	orang	PM	499	Tercapai
147	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinparbudpora	orang	1.000.000	1.130.104	Tercapai
148	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Dinparbudpora	orang	11,5	12,24	Tercapai
149	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Dinparbudpora	orang	PM	N/A	Data tidak tersedia
810 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua							
150	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100000 penduduk dewasa	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
151	8.10.1. (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
152	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	DINDAGKOP UKM	%	PM	N/A	Data tidak tersedia
TUJUAN 9: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI							
91 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua							
153	9.1.1.(a)	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	DPU-PR	%	84,39	84,5	Tercapai
154	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	DPU-PR		PM	N/A	Data tidak tersedia
155	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	DPU-PR		PM	N/A	Data tidak tersedia
156	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	DINHUB		PM	N/A	Data tidak tersedia
157	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	DKP		PM	1	Tercapai
92 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang							
158	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
159	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
160	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
93 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar							
161	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
162	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
94 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing							
163	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
95 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan							
164	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	BAPPEDA	persen	PM	0,069	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
165	9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	BPS	Persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
166	9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS	Persen	PM	81,67	Tercapai
167	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS	Persen	PM	77,3	Tercapai
TUJUAN 10: MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA							
101 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
168	10.1.1*	Koefisien Gini	BPS, BAPPEDA	-	PM	0,379	Tercapai
169	10.1.1.(a)	Angka kemiskinan	BPS	persen	6,29	6,71	Tercapai
170	10.A.1	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	DPMPPA		PM	N/A	Data tidak tersedia
171	10.A.2	Jumlah Desa Tertinggal	DPMPPA		PM	N/A	Data tidak tersedia
172	10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMPPA		PM	N/A	Data tidak tersedia
102 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya							
173	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	DINSOS P2KB		PM	N/A	Data tidak tersedia
103 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut							
174	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
175	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	DPMPPA/ POLRES		PM	Total 1 tahun: 38 orang Gender = 21 (Lk: 0, Pr: 21) Anak = 18 (Lk: 7, Pr: 11)	Tercapai
176	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA		PM	21 Perempuan	Tercapai
177	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	BAGIAN HUKUM	-	PM	N/A	Data tidak tersedia
104 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar							

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
178	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	DINPERINAKER	Persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
107 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik							
179	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	DINPERINAKER	kegiatan	247 Orang	283 Orang	Tercapai
TUJUAN 17: MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
171 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
231	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BPKAD	persen	PM	PAD 204 Semester I: Rp 271.121.330.933,- Hibah 2024 Semester II: Rp0 PDRB 2024: menunggu rilis dari BPS	Tercapai
232	17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPKAD	persen	PM	Realisasi Pajak 2024 semester II: Rp111866942211,- PDRB 2024 menunggu rilis dari BPS Kota Pekalongan	Tercapai
172 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 07 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang							
233	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	BPKAD	persen	9,98	11,04	Tercapai
176 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global							
234	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	BPS/ DINKOMINFO		PM	N/A	Data tidak tersedia
235	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
178 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi							
236	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS		PM	77,3	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1717 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama							
237	17.17.1 (a)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	PBJ DAN MINBANG		NA	N/A	Data tidak tersedia
238	17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	BAPPEDA		PM	#####	Tercapai
1718 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional							
239	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	BPS	persen	PM	100	Tercapai
240	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	BPS	persen	PM	100	Tercapai
241	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	BPS		PM	47	Tercapai
242	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	BAPPEDA	indikator	PM	145	Tercapai
1719 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang							
243	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DINDUKAPIL	orang	PM	8602	Tercapai
244	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	BPS	persen	PM	9,315	Tercapai
245	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data	BPS	persen	PM	100	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Badan Pusat Statistik (BPS)					

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

Keterangan:

NA: data tidak tersedia

PM: tidak ada target pada dokumen perencanaan OPD

2.2.4.3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 5 tujuan 25 target dengan 25 indikator tercapai, 1 indikator tidak tercapai dan 26 indikator data tidak tersedia. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TUJUAN 6: MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA							
61 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua							
106	6.1.1.(a)	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DPU-PR	Persen	100	100	Tercapai
107	6.1.1.(b)	Kapasitas Prasarana air baku	DPU-PR	m3	PM	N/A	Data tidak tersedia
108	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	DINKES	Persen	PM	37,14	Tercapai
62 Pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan							
109	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	DINKES	Persen	75	86,12	Tercapai
110	6.2.1.(b)	Cakupan pelayanan sanitasi	DPU-PR	Persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
111	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINKES	Kelurahan	27	27	Tercapai
112	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES	Kelurahan	27	27	Tercapai
113	6.2.1.(e)	Jumlah IPAL yang terbangun dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	DLH	Persen	PM	4	Tercapai
114	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	CIPTA KARYA	NA	PM	N/A	Data tidak tersedia

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
115	6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DLH		PM	1	Tercapai
63 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global							
116	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DLH		PM	0	Tercapai
117	6.3.2.(a)	Kualitas air danau	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
118	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
64 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air							
119	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	DLH	Perusahaan	NA	N/A	Data tidak tersedia
120	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	DINPERPA		PM	N/A	Data tidak tersedia
65 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan							
121	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	BAPPEDA PSDAIW		PM	N/A	Data tidak tersedia
122	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	BPBD		PM	N/A	Data tidak tersedia
123	6.5.1.(C)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
124	6.5.1.(e)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	DKP		PM	2	Tercapai
125	6.5.1.(f)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	DKP		PM	2	Tercapai
126	6.5.1.(g)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
127	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
66 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau							
128	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
129	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN							
111 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh							
180	11.1.1.(a)	Rasio rumah layak huni	DINPERKIM	Persen	62,17%	62,17%	Tercapai
112 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua							
182	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	DINHUB		PM	548,755	Tercapai
115 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
183	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100000 orang	BPBD	Orang	PM	455,97	Tercapai
184	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD		PM	N/A	Data tidak tersedia
185	11.5.1.(b)	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	BPBD		PM	0,96	Tercapai
186	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD		PM	N/A	Data tidak tersedia
187	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD		PM	#####	Tercapai
116 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota							
188	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	Persen	70,68	92,55	Tercapai
189	11.6.1.(b)	Jumlah bank sampah skala kota dan kelurahan	DLH		PM	29	Tercapai
117 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas							
190	11.7.1.(a)	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Persen	2,919	2,37	Tidak tercapai
11b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan							

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 20152030							
191	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD	dokumen	PM	28	Tercapai
200	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	BPBD	dokumen	PM	28	Tercapai
TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKENAJUTAN							
124 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan							
201	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	DLH	buah	PM	2	Tercapai
202	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	DLH	Ton/tahun	PM	236,72	Tercapai
125 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali							
203	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	%	PM	N/A	Data tidak tersedia
126 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktekpraktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka							
204	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
127 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional							
128 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam							
205	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	BAGIAN ORGANISASI	OPD	3	3	Tercapai
TUJUAN 13: MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA							
131 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara							
206	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	BPBD	Dokumen	PM	28	Tercapai
207	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100000 orang	BPBD	orang	PM	455,97	Tercapai
132 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional							
208	13.2.1.(a)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
TUJUAN 14: MELAKUKAN KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDERA DAN MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN							
145 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia							

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
209	14.5.1*	Cakupan kawasan konservasi laut	DKP		PM	N/A	Data tidak tersedia
146 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)							
210	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	DPMPTSP	Persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
14b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar							
211	14.b.1.(b)	jumlah nelayan yang terlindungi (asuransi)	DKP		PM	N/A	Data tidak tersedia
TUJUAN 15: PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN							
151 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional							
212	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	DLH		109,67	110,02	Tercapai
152 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global							
213	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
214	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
215	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
153 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi							
216	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

Keterangan:

NA: data tidak tersedia

PM: tidak ada target pada dokumen perencanaan OPD

2.2.4.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 tujuan 8 target dan 16 indikator tercapai, 2 indikator tidak tercapai dan 6 indikator dengan data tidak tersedia. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.12 berikut.

**Tabel 2.12 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
di Kota Pekalongan Tahun 2024**

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH							
161 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun							
217	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	KESBANGPOL		PM	0	Tercapai
218	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100000 penduduk	POLRES		PM	0	Tercapai
219	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	KESBANGPOL		PM	0,02	Tercapai
220	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
162 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak							
211	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	DPMPPA		PM	N/A	Data tidak tersedia
212	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	DPMPPA	Anak	PM	0,02	Tercapai
213	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	DPMPPA	persen	PM	0	Tercapai
163 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua							
214	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	POLRES	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
215	16.3.1.(b)	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Bagian Hukum	Perkara	3	3	Tercapai
165 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya							
216	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	INSPEKTORAT		PM	N/A	Data tidak tersedia
166 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat							
217	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	BPKAD	persen	PM	94,30% APBD Rp1074231528000,- Realisasi Rp1012991724934,-	Tercapai
218	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	BPKAD	Persen	100	N/A	Data tidak tersedia
219	16.6.1.(b)	Nilai SAKIP Kota Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI	Indeks	75,07 (BB)	73,02 (BB)	Tidak tercapai
220	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (SIRUP)	BAGIAN PBJ dan Minbang	%	100	94,63	Tidak tercapai
221	16.6.1.(d)	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI	Indeks	73,69 (BB)	n/a	Data tidak tersedia

No	Kode Indikator	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(Nilai muncul di triwulan I tahun 2025)	
222	16.6.2.(a)	Nilai Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik	BAGIAN ORGANISASI	Indeks (Zona Merah/ Kuning/ Hijau)	97,74 (Kategori A, Kualitas Tertinggi)	97,74 (Kategori A, Kualitas Tertinggi)	Tercapai
167 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan							
223	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	SETWAN	Persen	PM	14,29	Tercapai
224	16.7.1.(b)	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II	BKPSDM	Persen	PM	14,29	Tercapai
169 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
225	16.9.1.*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DINDUKCAPIL	persen	PM	99,95	Tercapai
226	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	DINDUKCAPIL DAN DINSOS	persen	PM	57,9439	Tercapai
227	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DINDUKCAPIL	Persen	PM	99,35	Tercapai
1610 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional							
228	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA	kasus	PM	21 orang perempuan	Tercapai
229	16.10.2*	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	DINKOMINFO	Persen	100	100	Tercapai
230	16.10.2.(a)	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	DINKOMINFO	Persen	27,58	27,58	Tercapai

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2024

Keterangan:

NA: data tidak tersedia

PM: tidak ada target pada dokumen perencanaan OPD

2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan daerah didasarkan pada sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya dikaitkan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan daerah juga mempertimbangkan permasalahan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13 Permasalahan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan pada RKPDP 2025	Permasalahan pada Ranc. RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029	Asta Cita	Permasalahan pada Rancangan RPJMD Provinsi Jateng 2025-2029	Permasalahan pada Perubahan RKPDP 2025
Angka Kematian Ibu (AKI)	Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)		Masih tingginya Angka kematian Ibu		Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Bayi (AKB)					
Angka Kematian Balita (AKABA)					
Indeks Keluarga Sehat		Belum optimalnya peyediaan sarpras kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Masih adanya Rumah Sakit Daerah kelas C yang belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang	Masih kurang optimalnya mutu pelayanan kesehatan primer dan lanjutan.	
			Masih belum optimalnya rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi paripurna	Masih adanya beban ganda masalah kelebihan dan kekurangan gizi, pengetahuan dan perilaku pemenuhan kebutuhan gizi pada level keluarga	
		Belum optimalnya kompetensi tenaga kesehatan yang sesuai persyaratan	Masih adanya puskesmas yang belum memiliki 9 jenis nakes sesuai standar	Belum efisiennya pengelolaan fiskal dan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif serta distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas digitalisasi industri pengolahan	
		Belum optimalnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang baik.			
		Belum optimalnya validitas data penerima jaminan kesehatan nasional		Masih rendahnya literasi kesehatan yang berdampak pada pemahaman terkait pentingnya kegiatan promotif dan preventif.	
		Belum optimalnya upaya penanganan kasus tuberkulosis	Tingginya kasus baru tuberkulosis (peringkat ke 2 dunia)	Masih adanya beban penyakit menular terabaikan dan penyakit menular baru serta zoonosis.	
				Meningkatnya kasus tidak menular pada usia produktif	
			Masih tingginya angka stunting		
			Meningkatnya Prevalensi obesitas		
			Tingginya kasus baru kusta (masuk peringkat ke 3 dunia)		

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan pada RKPD 2025	Permasalahan pada Ranc. RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029	Asta Cita	Permasalahan pada Rancangan RPJMD Provinsi Jateng 2025-2029	Permasalahan pada Perubahan RKPD 2025
Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Masih tingginya penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Belum optimalnya upaya rehabilitasi sosial bagi PPKS	Rendahnya akurasi sasaran program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat	Tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin	Masih tingginya penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
		Belum optimalnya upaya perlindungan sosial bagi korban bencana	Program perlindungan sosial sosial yang belum komprehensif dan belum menjawab sepebuhnya kebutuhan seluruh masyarakat miskin dan rentan	Masih rendahnya kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.	
		Belum optimalnya upaya jaminan sosial bagi PPKS	Program pemberdayaan yang belum terintegrasi dan terstandar untuk peningkatan kemandirian masyarakat	Tersebar wilayah kantong kemiskinan	
		Belum optimalnya upaya pengendalian jumlah penduduk	Jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum mencakup seluruh pekerja, terutama pekerja informal		
			Akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan infrastruktur dasar masih perlu ditingkatkan		
Rata-Rata Lama Sekolah	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan	Belum optimalnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan.	Belum Meratanya layanan pendidikan terutama jenjang PAUD	Masih tingginya anak tidak sekolah	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan
		Belum optimalnya pemenuhan SPM khususnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Masih terbatasnya akses terhadap listrik dan internet	Belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan	
		Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana meningkatkan tingkat literasi masyarakat	Masih tingginya jumlah ruang kelas rusak	Masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan	
			Masih rendahnya kualitas pendidikan	Masih adanya kesenjangan layanan pendidikan dan kurnanya mutu pendidikan	
			Masih terbatasnya kuantitas, kualitas dan distribusi guru		
			Belum optimalnya Pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan		
			Masih rendahnya partisipasi pendidikan tinggi		

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan pada RKPD 2025	Permasalahan pada Ranc. RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029	Asta Cita	Permasalahan pada Rancangan RPJMD Provinsi Jateng 2025-2029	Permasalahan pada Perubahan RKPD 2025
			Masih rendahnya kualitas lulusan pendidikan tinggi		
			Masih rendahnya penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi		
			Belum optimalnya daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global		
			Masih rendahnya budaya literasi, kreativitas, dan inovasi		
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan	Belum optimalnya implementasi kurikulum mulok yang mengembangkan pendidikan karakter dan keagamaan	Belum optimalnya nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat	Belum optimalnya penguatan internalisasi nilai budaya, keagamaan, dan kearifan lokal dengan pendidikan, keluarga maupun masyarakat	Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan
			Rendahnya kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, dan pencegahan perilaku beresiko		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	Belum optimalnya upaya advokasi kepada lembaga Kemasyarakatan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) cenderung stagnan		Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)
		Belum optimalnya pelayanan pengaduan kasus perempuan dan permasalahan keluarga	Masih tingginya Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
			Masih tingginya kasus perempuan 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan/atau selain pasangan		
			Masih tingginya kasus anak perempuan 15-49 tahun mengalami P2GP (sunat perempuan)		
Kategori Kota Layak Anak	Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Belum optimalnya penanganan dan pelayanan kasus anak	Masih rendahnya Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
			Masih tingginya anak laki-laki/perempuan 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan		

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan pada RKPD 2025	Permasalahan pada Ranc. RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029	Asta Cita	Permasalahan pada Rancangan RPJMD Provinsi Jateng 2025-2029	Permasalahan pada Perubahan RKPD 2025
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja yang akan bekerja	Masih tingginya lulusan menengah-tinggi yang bekerja pada bidang keahlian rendah		Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja
		Belum optimalnya upaya penempatan calon tenaga kerja kepada pemberi kerja	Belum optimalnya pelaku usaha yang masih berskala mikro		
		Belum optimalnya upaya mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dsb)	Masih didominasi nya Tenaga Kerja yang unskilled labor dibandingkan lulusan pendidikan tinggi STEAM		
Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi warga	Belum optimalnya intervensi perumahan eksisting yang menjangkau seluruh segmentasi masyarakat		Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh
		Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan	Belum optimalnya eterhunian dan pengelolaan rumah sehingga berpotensi pada menurunnya kualitas bangunan		
		Belum penanganan kawasan kumuh	Belum optimalnya integrasi antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru		
Luas Genangan Banjir dan Rob	Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya kualitas sarpras pengendali banjir dan drainase kota	Menurunnya kualitas dan kuantitas mata air		Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air			Meningkatnya potensi dampak dan resiko bencana akibat perubahan iklim dengan kenaikan muak air laut, jumlah pesisir rentan, gelombang ekstrem dan perubahan curah hujan		
Indeks Kualitas Lahan					

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan pada RKPD 2025	Permasalahan pada Ranc. RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029	Asta Cita	Permasalahan pada Rancangan RPJMD Provinsi Jateng 2025-2029	Permasalahan pada Perubahan RKPD 2025
Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau	Belum optimalnya penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban, dan penegakan hukum lingkungan hidup serta keehatan dan penataan ruang		Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan	Belum optimalnya penyediaan air minum, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas	Rendahnya kinerja BUMD air minum		Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan
Persentase pelayanan sampah		Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sanitasi domestik	Tingginya kebutuhan air yang diproyeksikan meningkat 31%		
		Belum optimalnya penanganan limbah cair	Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman		
		Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana persampahan	Masih tingginya jumlah kabupaten/kota yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik (IPLT atau IPAL)		
		Belum optimalnya upaya pengurangan sampah dari hulu	Tingginya proyeksi produksi sampah domestik nasional		
Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)		Belum optimalnya kualitas dan kondisi jalan kota	Rendahnya kemampuan daya tampung dan daya dukung TPA Nasional yang diproyeksikan akan penuh		
Persentase keterhubungan jalan		Belum optimalnya kondisi sarpras transportasi dan penanganan kemacetan	Masih Rendahnya penuntasan layanan dasar wajib sampah (pengumpulan sampah baru)		
			Transformasi pengelolaan TPA dari open dumping ke sanitary landfill		
			Belum optimalnya tata kelola jalan daerah		
Pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya upaya promosi pariwisata daerah	Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkotaan yang belum efisien dan pengendalian ruang yang kurang efektif		Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas obyek wisata daerah	Belum meratanya pembangunan dan penyediaan infrastruktur khusus serta tidak terintegrasi secara kewilayahan		
		Terbatasnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif			

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan pada RKPD 2025	Permasalahan pada Ranc. RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029	Asta Cita	Permasalahan pada Rancangan RPJMD Provinsi Jateng 2025-2029	Permasalahan pada Perubahan RKPD 2025
Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Belum optimalnya pembinaan stakeholder budaya dalam sinergi pelestarian budaya lokal	Belum optimalnya kebudayaan yang belum sepenuhnya dipertimbangkan		Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya
		Belum optimalnya upaya pelestarian cagar budaya			
Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Masih adanya konflik sosial	Masih adanya konflik di masyarakat	belum optimalnya kemampuan penanganan konflik sosial dan pengamanan objek vital		Masih adanya konflik sosial
		Masih adanya pelanggaran perda di masyarakat	Belum optimalnya efektivitas penyelesaian tindak pidana		
Indeks SPBE	Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya implementasi SPBE pada domain tata kelola			Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
IKM Kota		Belum optimalnya tata kelola keamanan informasi			
Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota		Belum optimalnya pemenuhan permohonan informasi publik			
Indeks Merit System		Belum optimalnya pengembangan pola karir, peningkatan profesionalisme, dan interoperabilitas sistem database kepegawaian			
Nilai SAKIP Kota		Belum optimalnya tingkat pendidikan ASN			
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)		Belum optimalnya keterisian jabatan ASN			
Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM		Belum optimalnya pelaporan kinerja ASN			
		Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional ASN			
		Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral perangkat daerah			

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan pada RKPD 2025	Permasalahan pada Ranc. RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029	Asta Cita	Permasalahan pada Rancangan RPJMD Provinsi Jateng 2025-2029	Permasalahan pada Perubahan RKPD 2025
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan dengan tujuan tertentu			
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, dan pemeriksaan BPK dan APIP			
		Belum optimalnya pemenuhan kebijakan teknis pengawasan			
Maturitas SPIP	Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan dengan tujuan tertentu			Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, dan pemeriksaan BPK dan APIP			
		Belum optimalnya pemenuhan kebijakan teknis pengawasan			

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.14 berikut.

**Tabel 2.14 Permasalahan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah**

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>	Masih rendahnya capaian SPM pendidikan
	Masih rendahnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i>	Masih rendahnya jumlah penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar
	Masih rendahnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>	Masih rendahnya cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah
	Masih rendahnya ketersediaan sarana persampahan regional
	Masih rendahnya persentase drainase dalam kondisi baik
	Masih rendahnya rasio kepatuhan PBG Kab/Kota
	Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan
	Masih rendahnya rasio tenaga bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i>	Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh
	Masih rendahnya kawasan permukiman tidak kumuh
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</i>	Belum optimalnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</i>	Belum optimalnya potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</i>	Belum optimalnya tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i>	Belum optimalnya kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender
	Masih rendahnya persentase kelurahan layak anak
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</i>	Masih rendahnya persentase cadangan pangan daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</i>	Belum optimalnya tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</i>	Masih rendahnya luasan ruang terbuka hijau Masih rendahnya jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan perundangan
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</i>	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk Masih rendahnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil Masih rendahnya jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i>	Masih rendahnya ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</i>	Belum optimalnya rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga Masih tingginya angka perkawinan di bawah 21 tahun Masih tingginya unmet need KB
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</i>	Masih rendahnya jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>	Belum tercapainya Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</i>	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas Masih rendahnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</i>	Belum optimalnya peraturan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</i>	Belum optimalnya pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</i>	Belum optimalnya penyediaan data statistik
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</i>	Belum optimalnya layanan sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</i>	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</i>	Belum optimalnya layanan perpustakaan
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</i>	Masih rendahnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Masih rendahnya kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</i>	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI
	Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI
	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya
	Belum optimalnya peningkatan jumlah pengusaha perikanan
	Masih rendahnya jumlah pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</i>	Belum optimalnya layanan dibidang pariwisata
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i>	Masih rendahnya usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</i>	Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
	Belum optimalnya peningkatan volume ekspor
	Masih rendahnya persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</i>	Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Belum optimalnya ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<i>SEKRETARIAT DAERAH</i>	Masih rendahnya persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif
	Masih rendahnya persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa
<i>SEKRETARIAT DPRD</i>	Belum optimalnya jumlah Perda yang ditetapkan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
<i>PERENCANAAN</i>	Belum optimalnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
<i>KEUANGAN</i>	Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
<i>KEPEGAWAIAN</i>	Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN
	Belum optimalnya keterpenuhan formasi ASN
<i>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</i>	Belum optimalnya profesionalitas ASN
<i>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i>	Belum optimalnya layanan kelitbangan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
<i>INSPEKTORAT DAERAH</i>	Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
UNSUR KEWILAYAHAN	

URUSAN	PERMASALAHAN
KECAMATAN	Belum optimalnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik
	Belum optimalnya tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan
	Belum optimalnya tingkat pemberdayaan masyarakat di kelurahan
	Belum optimalnya tingkat kinerja trantibum
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan ormas
	Belum optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial
Non Urusan	Belum optimalnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD
	Belum optimalnya kualitas laporan capaian kinerja
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan BLUD

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

2.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian prioritas karena berdampak signifikan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.2, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15 Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan
Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	
Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	

Permasalahan	Isu Strategis
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan	
Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)	Peningkatan Derajat Kesehatan
Masih tingginya penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja	
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan	
Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	
Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Selanjutnya, rumusan masing-masing isu strategis dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1. Tata Kelola Pemerintahan

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pentingnya isu strategis tata kelola pemerintahan adalah upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria pokok yaitu: transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif.

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah telah menetapkan indikator berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 87,31. Upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan terus dilakukan. Beberapa aspek terkait yang masih menjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 3,76. Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat, serta peningkatan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE dan perkuatan pelayanan pusat data Pemerintah Daerah; b) Layanan publik telah dikelola dengan baik dan perlu dioptimalkan, berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024, Kota Pekalongan mendapat nilai 91,37 dengan kategori Sangat Baik, persentase OPD dengan IKM Sangat

Baik sebesar 67,09 persen; c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dikarenakan Indeks Profesionalitas ASN masih sebesar 86,97; d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 73,02 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun, namun masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal; e) Akuntabilitas keuangan tetap perlu ditingkatkan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3,022; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya merit system secara penuh, walaupun dari tahun ketahun terdapat peningkatan nilai dan pada tahun 2024 nilai merit system Kota Pekalongan sebesar 327; h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3,09; i) Belum optimalnya nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu sebesar 96,62, masih perlu ditingkatkan; dan j) Masih minimnya jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM, sehingga perlu didorong lagi agar terus bertambah.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan tiap tahunnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Beberapa upaya perubahan yang dilakukan yaitu: Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD; Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO; Penataan sistem manajemen SDM aparatur; Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD; Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penataan peraturan perundang-undangan dan Perubahan Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan).

Dalam aspek pengawasan, yang dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih maka pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala. Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan bertujuan untuk menyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota; Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP; dan Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Selain itu, peran perguruan tinggi juga diperlukan. Perguruan tinggi di Kota Pekalongan lebih menguasai permasalahan dan isu strategis tetapi belum optimal dalam memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

2.3.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah banjir dan rob serta kualitas lingkungan hidup yang belum optimal. Banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan atau pendatang. Isu strategisnya adalah banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Dalam arti luas, banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup yang tidak optimal sangat berdampak bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, banjir dan rob harus dikendalikan serta kualitas lingkungan hidup dioptimalkan agar berdampak bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan.

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Laut Jawa dan memiliki ketinggian 0-6 m dpl. Beberapa kawasan di Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Fenomena ketinggian di bawah permukaan laut tersebut, tidak terlepas dari kondisi permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan yang mengalami penurunan (*land subsidence*). Secara morfologi, wilayah Kota Pekalongan pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Oleh karena itu, secara alamiah, wilayah Kota Pekalongan sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir dan/atau rob. Tantangan penanganan banjir dan rob semakin besar karena adanya fenomena pemanasan global yang berdampak peningkatan permukaan air laut. Banjir dan rob sangat berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu, banjir dan rob harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang.

Upaya penanganan banjir dan rob telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terakhir telah dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir dan peninggian tanggul yang dilakukan setiap tahun. Sampai dengan tahun 2024, luas genangan di Kota Pekalongan seluas 379,02 hektar atau 8,17 persen dari luas wilayah kota, kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2022. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya luasan kawasan banjir dan rob, meliputi: a) Drainase perkotaan belum optimal, dimana persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 68,58 persen; b) Tingginya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), sekitar 8-13 cm per tahun; c) Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, yaitu persentase luasan kawasan kumuh masih sekitar 4,90 persen; d) Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa; e) Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga; dan f) Pendangkalan sungai di wilayah hilir.

Kendala utama pengembangan drainase adalah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang relatif sangat datar, dengan ketinggian 0 – 6 meter dpl dan di beberapa kawasan justru telah memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, penataan drainase secara bertahap perlu diarahkan pada sistem polder dengan penambahan secara terus menerus atas penyediaan kolam-kolam retensi (ruang air) ataupun water storage guna memaksimalkan upaya pengurangan genangan di lingkungan permukiman.

Kendala penataan sistem drainase semakin bertambah dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi yaitu penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Penelitian sedang memastikan apakah penurunan tanah disebabkan oleh eksploitasi air tanah dalam yang melebihi daya dukungnya atau karena fenomena alamiah karena wilayah Kota Pekalongan terbentuk karena proses sedimentasi sehingga terjadi proses pemampatan lapisan tanah. Namun kebijakan yang paling tepat dilakukan adalah membatasi eksploitasi air tanah tanpa melebihi daya dukungnya.

Isu yang lain adalah isu kualitas lingkungan hidup, khususnya terkait kualitas tutupan lahan. Dengan menggunakan alat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, seseorang dapat mengidentifikasi bahwa Kota Pekalongan memiliki kualitas tutupan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik, dengan mengamati kondisi di wilayah Kota Pekalongan pun seseorang dapat mengidentifikasi bahwa wilayah Kota Pekalongan terkesan panas karena masih minimnya tutupan lahan atau vegetasi. Melalui pengukuran di lapangan pun, sudah diidentifikasi bahwa beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Pekalongan telah tercemar, yaitu telah terlampauinya beberapa indikator pencemar terhadap baku mutu yang ditentukan.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan pada tahun 2024 sebesar 59,15, kondisi ini sudah lebih baik dibandingkan tahun 2023 sebesar 56,24. IKLH yang belum optimal tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kota Pekalongan.

Salah satu komponen dalam IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan, yang sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau dan tutupan lahan/vegetasi tutupan lahan. Kondisi RTH di Kota Pekalongan masih sangat terbatas dan belum dapat memenuhi persyaratan pemenuhan RTH sesuai dengan Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya dalam pengembangan RTH untuk dapat memenuhi kebutuhan RTH yang disyaratkan, yaitu 30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Namun upaya ini masih belum dapat dilaksanakan secara kontinyu dan kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air, belum terbangun. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan, kongruen dengan masih terbatasnya RTH. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan harus dilakukan secara kontinyu, melalui peningkatan kesadaran bahwa vegetasi sangat dibutuhkan dan pemanfaatan kawasan sempadan dan kawasan lindung untuk pengembangan vegetasi, penegakan hukum serta melanjutkan pembangunan RTH. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan pun sangat identik dengan sungai kotor dan tercemar. Tingginya pencemaran air disebabkan buangan limbah industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup, agar pencemaran air dapat dikendalikan. Selain itu, penanganan terhadap pengelolaan limbah B3 juga perlu mendapat perhatian, terutama dalam persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan. Perlu upaya pembinaan dan pengawasan terhadap

para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan limbah B3.

Isu penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Isu ini juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi khususnya terkait lingkungan hidup dan bencana serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, yang dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan yaitu penanganan banjir/rob.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, antara lain: Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN), Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), serta penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).

2.3.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman

Kota Pekalongan memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, sesuai dengan RTRWN, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah, Kota Pekalongan juga berperan sebagai pusat dari kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

Oleh karena itu, Kota Pekalongan selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (built up area), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah air bersih dan persampahan perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal, serta sanitasi yang cakupannya harus mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Infrastruktur dasar perkotaan yang cakupannya optimal akan mendukung perkembangan perkotaan yang optimal, dalam rangka menuju kota yang berketahanan (*resilience city*), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persentase penduduk yang terlayani jaringan perpipaan tahun 2023 sebesar 67,42 persen. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Cakupan layanan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena

terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan, belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum. Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Persentase pelayanan sampah pun juga belum optimal, dimana pada tahun 2023 sebesar 71,45 persen dan tahun 2024 menurun menjadi 72,24 persen. Cakupan pelayanan persampahan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama kapasitas TPA Degayu yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

Kondisi jalan kota pun juga harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian kota. Hingga tahun 2024, jalan kota kondisi mantap sebesar 84,5 persen. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman. Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul wilayah di Jawa Tengah dan Kawasan Petanglong, sehingga masih bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal. Pada tahun 2024 VC Ratio adalah 0,40, hal ini disebabkan arus lalu lintas yang semakin meningkat pada seluruh ruas jalan di seluruh jalan kota sehingga menyebabkan nilai VC Ratio meningkat. Meskipun V/C Ratio secara rata-rata atas jalan kota masih rendah (0,40), namun untuk Jalan Pantura ruas Kota Pekalongan, khususnya pada persimpangan sebidang kereta api masih sering terjadi kemacetan. Penyediaan titik dan kantong-kantong parkir juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Pemerintah Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 381 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan (pengendara maupun para pejalan kaki). Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan.

Penyediaan infrastruktur dasar tersebut, karena peran Kota Pekalongan terhadap daerah sekitarnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata, tetapi harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah. Salah satu sumber air baku untuk air minum, merupakan hasil dari pengelolaan SPAM Petanglong. Diharapkan debit yang diberikan untuk Kota Pekalongan dapat segera meningkat sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih yang lebih optimal. Di bidang persampahan pun, TPA Regional Petanglong diharapkan dapat segera diwujudkan karena

keterbatasan lahan di wilayah Kota Pekalongan dan ketentuan teknis yang tidak memungkinkan pengembangan TPA di wilayah Kota Pekalongan.

Kualitas infrastruktur lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Wilayah Kota Pekalongan sangat rentan terjadinya bencana banjir dan rob, sehingga sangat berdampak terhadap kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Beberapa perumahan dan kawasan permukiman yang telah terendam rob dalam beberapa tahun terakhir, menjadi kawasan yang ditinggalkan penghuninya. Sementara kawasan lainnya pun juga selalu terendam banjir dan rob, tetapi masih tetap ditinggali pemiliknya karena tidak adanya pilihan tempat tinggal. Kawasan rentan tersebut merupakan kawasan yang akan menurun infrastruktur lingkungan permukimannya.

Hingga tahun 2023, berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan terbaru, luas kawasan kumuh mencapai 4,90 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Luasan ini mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya. Persentase tersebut merupakan luasan yang masih cukup signifikan, terutama kawasan tersebut berada pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi.

Kondisi infrastruktur lingkungan permukiman yang rendah sangat memengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan maupun kenyamanan warganya. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan Pemerintah Kota Pekalongan adalah peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman. Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman harus didukung dengan keberhasilan pengendalian banjir dan rob.

2.3.4. Peningkatan Derajat Kesehatan

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Di sisi lain muncul kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya upaya promotif dan preventif serta kurangnya optimalisasi penanganan pada penderita penyakit kronis baik penderita penyakit menular/penyakit tidak menular yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan di berbagai tempat, derajat kesehatan memiliki korelasi yang signifikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan salah satu komponen yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator makro atau indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, derajat kesehatan masyarakat memiliki korelasi dengan pencapaian kinerja pembangunan lainnya, sehingga derajat kesehatan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan Kota Pekalongan. Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat berdampak sistemik terhadap aspek-aspek pembangunan lainnya.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif dan promotif. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya tersebut namun peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal. Upaya preventif dan promotif yang telah dilakukan diantaranya pemberian makanan tambahan terutama kepada bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun penerapan pola hidup bersih dan sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan ini, ditunjukkan dengan: a) Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2024 AKI masih bernilai 129,70 per 100.000 kelahiran hidup; b) Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2024 AKB masih

bernilai 10,89 per 1.000 kelahiran hidup; c). Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2024 AKABA masih bernilai 16,86 per 1.000 KH; d). Tingginya angka kesakitan dan nilainya masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan nilai 15,29 persen di tahun 2024; e) masih ditemukan Balita Gizi Buruk sebesar 0,17 persen dan Balita Stunting sebanyak 7,30 persen pada tahun 2024; f) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang meningkat dan pada tahun 2024 memiliki skor sebesar 92,12 persen; serta g) Tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2024 mencapai sebesar 8,48 persen.

Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2024 sebesar 74,60, masih sama dibandingkan tahun 2023. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kota-kota setara di Jawa Tengah maupun UHH Provinsi Jawa Tengah, capaian UHH Kota Pekalongan masih berada pada posisi terbawah. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan adalah bagaimana terus meningkatkan UHH secara optimal sehingga tidak tertinggal dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun kota-kota setara lainnya di Jawa Tengah. Upaya tersebut adalah melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif promotif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Masih tingginya AKI Kota Pekalongan disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB dan AKABA menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Selain hal tersebut, perlu dilakukan penguatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui akar masalah penyebab kematian sebagai dasar perumusan rencana intervensi, sinkronisasi program penurunan AKI, AKB dan AKABA antara RSUD dan Puskesmas, pemberdayaan kader dan optimalisasi kepesertaan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak ideal. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.

Selain permasalahan AKI, AKB dan AKABA, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah masalah stunting, dimana masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting bisa terjadi dan terus meningkat, bahkan pada saat teknologi dan ketersediaan fasilitas kesehatan sudah “dekat” dan “mudah” diakses masyarakat. Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi berisiko stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Penyebabnya multidimensi, tidak hanya faktor kesehatan, melainkan juga faktor keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk di dalamnya adalah kurangnya asupan gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, faktor keluarga, mulai dari ketidaktauan praktik pemberian makan, praktik pemberian ASI, infeksi penyakit serta pola pengasuhan anak. Faktor eksternal yang turut berpengaruh yaitu akses air bersih dan sanitasi lingkungan.

Pemerintah terus mendorong penurunan stunting melalui strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi, sehingga memerlukan upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang

dilaksanakan secara konvergen, holistik dan integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor KEP. 101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023, Kota Pekalongan menjadi salah satu kota yang perlu mendapat penanganan dengan skema percepatan khusus. Hal ini ditunjukkan dengan angka prevalensi stunting tahun 2023 berdasarkan SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) sebesar 20,6 persen dan berdasarkan E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebesar 7,43 persen. Target prevalensi stunting Kota Pekalongan ditargetkan turun setiap tahun, sehingga diperlukan upaya percepatan diantaranya: penguatan cakupan intervensi spesifik kunci, pendampingan bagi keluarga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan keluarga berisiko stunting, pendampingan bagi pemerintah daerah, pemenuhan intervensi sensitif kunci, termasuk air minum dan sanitasi, penguatan intervensi dukungan, terutama cakupan surveilans, koordinasi tim percepatan penurunan stunting daerah, dan pelaksanaan aksi konvergensi oleh pemerintah daerah.

Masih berfluktuasinya skor PPH menunjukkan bahwa konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan skor PPH melalui pelatihan olahan pangan dan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat. Pembangunan pertanian serta kelautan dan perikanan di Kota Pekalongan juga harus diarahkan untuk diversifikasi produk-produk bahan makanan maupun kerjasama dengan daerah lain, sehingga tersedia beragam pilihan bahan makanan di wilayah Kota Pekalongan.

Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak dengan Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU (Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

2.3.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Beberapa indikator perkembangan kesejahteraan tersebut adalah dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita maupun semakin menurunnya angka kemiskinan Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.

Dari data tahun jamak, angka kemiskinan Kota Pekalongan hingga tahun 2019, menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Namun demikian, sebagai dampak pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 7,17 persen pada tahun 2020 dan semakin meningkat menjadi 7,59 persen pada tahun 2021. Upaya pemulihan kondisi sosia dan ekonomi, sebagai dampak pandemi Covid-19 menunjukkan hasil, yaitu dengan capaian angka kemiskinan tahun 2022 adalah 7,00 persen, tahun 2023 adalah sebesar 6,81 persen dan tahun 2024 sebesar 6,71 persen sehingga sudah menunjukkan pola kembali menurun.

Dengan perkembangan indikator tersebut, maka masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan belum optimal. Penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan masih menjadi isu strategis karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah maupun secara

nasional bahwa ketika angka kemiskinan semakin rendah maka akan dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila dicermati lebih detail berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin di Kota Pekalongan pun masih sangat tinggi. Apalagi, sejak awal tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga hampir seluruh sektor kehidupan, yang pada akhirnya berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, akibat terjadinya kontraksi ekonomi. Jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan DTKS tahun 2021 sebanyak 184.247 jiwa dari semula 108.436 jiwa pada tahun 2020, atau kenaikan sebanyak 75.811 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) kembali meningkat yaitu menjadi 188.445 jiwa dan berangsur turun pada dua tahun terakhir. Pada Tahun 2024 jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah 173.513 jiwa. Penurunan jumlah anggota RTS ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara bertahap, yang kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya efektivitas program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta perluasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, jumlah RTS yang masih cukup besar menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Penurunan angka kemiskinan yang optimal harus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sumber daya yang dimiliki baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat harus didayagunakan secara terpadu dan sinergis, guna menurunkan angka kemiskinan ini. Masing-masing elemen dapat memiliki peran sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjadi tujuan dalam Sustainable Development Goals (SGD's) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Oleh karena itu penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus Pemerintah sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2020 yang menginstruksikan kemiskinan ekstrem agar diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Terdapat tiga strategi kebijakan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran yaitu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong - kantong kemiskinan. Secara khusus kepada Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk: melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kab/Kota; menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan Berita Acara; menyusun rencana program/kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kab/Kota termasuk pemutakhiran data penerima *by name by address*; fasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap tiga 3) bulan sekali.

Tantangan pembangunan Kota Pekalongan lainnya adalah bagaimana menurunkan angka pengangguran secara optimal. Angka pengangguran di Kota Pekalongan belum menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih berfluktuasi. Hal ini menjadi isu strategis karena pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan pemerintahan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penurunan angka pengangguran menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan analisis korelasi, dengan menggunakan data tahun jamak, antara pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan angka pengangguran, ketiga indikator tersebut tidak memiliki korelasi yang signifikan antar indikator. Temuan ini dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan belum berimplikasi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan maupun penurunan angka pengangguran. Angka kemiskinan dan angka pengangguran pun juga tidak memiliki korelasi yang signifikan. Jika angka kemiskinan menurun, juga tidak ditandai dengan penurunan angka pengangguran.

Angka pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan masih cukup tinggi. TPT masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 sebesar 6,89 persen, pada tahun 2022 menurun menjadi 4,98 persen, pada tahun 2023 menjadi 5,02 persen dan menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 4,91 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa TPT masih menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Upaya sistemik dan sinergis harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, link and match dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri, penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha serta peningkatan investasi, sehingga pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Pekalongan.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus diintegrasikan dengan pembangunan perekonomian, yaitu pertumbuhan ekonomi yang didorong harus pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan target-target pembangunan tersebut.

2.3.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Mayoritas usia produktif merupakan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah kemiskinan dan pengangguran karena kualitas sumber daya manusia yang tidak optimal. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan belum optimal, sehingga harus ditingkatkan secara kontinyu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 75,40, tahun 2022 meningkat menjadi 75,90, tahun 2023 meningkat menjadi 76,71 persen dan tahun 2024 meningkat menjadi 77,21 persen. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Harapan lama sekolah yang belum optimal. Pada tahun 2024, harapan lama sekolah sebesar 12,89 tahun. Artinya harapan lama sekolah penduduk adalah 12,89 tahun atau penduduk diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA/SMK (12 tahun) dan kuliah sampai semester 1 atau 10 bulan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal.

- b. Rata-rata lama sekolah belum optimal. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 adalah 9,34 tahun. Artinya penduduk Kota Pekalongan memiliki rata-rata lama sekolah 9,34 tahun atau rata-rata penduduk telah menamatkan pendidikan jenjang SMP, dan masuk kelas 10 SMA namun tidak sampai lulus. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pekalongan tersebut diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah rata-rata lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan harus terus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan kebijakan membuka dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan.
- c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024 sebesar 65,10. Pada dasarnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi kehidupan sehari-hari sangat tinggi, tetapi seringkali hal ini belum diperhitungkan secara baik dan terbuka sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya IDG. Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya pengarusutamaan gender secara optimal. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pemberdayaan gender pun juga telah berlangsung lama, namun peran aktif perempuan belum dapat optimal, baik dalam ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga dapat lebih optimal.

Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dilakukan, salah satunya pada tahun 2022 disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan IPM. RAD ini akan menjadi dasar rencana aksi pada tahun berikutnya. Urgensi RAD Peningkatan IPM tersebut adalah sebagai upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi agar IPM Kota Pekalongan dapat meningkat secara optimal. Selama ini, IPM Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, bahkan dengan beberapa kabupaten pun, IPM Kota Pekalongan capaiannya masih tertinggal.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Upaya peningkatan sumber daya manusia juga harus didukung dengan peningkatan *soft skill* masyarakat. *Soft skill* adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan, baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan sebagainya. Dalam hal ini, *soft skill* adalah karakter *bawaan* individu. *Soft skill* bisa saja dipelajari, akan tetapi tidak dengan cara belajar formal layaknya di bangku sekolah atau perkuliahan. Hal itu dapat dipelajari dengan lebih banyak melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, serta dengan melatih kepekaan sosial. Dengan begitu, individu itu dapat menerapkannya pada perilaku yang nantinya akan berpengaruh pada kemampuan *soft skill*. Seiring berkembangnya zaman, di samping individu memiliki kemampuan *hard skill*, ia juga dituntut untuk harus memiliki *soft skill*. Hal itu karena dalam suatu organisasi dan lingkungan sosial lainnya, banyak dijumpai kasus kekerasan yang disebabkan ketidakmampuan individu dalam mengendalikan emosi, pikiran, tindakan, juga tuntutan organisasi atau lingkungan sosial yang semakin pelik. Maka dari itu, kemampuan *soft skill* dinilai sangat penting karena bisa dikatakan seorang individu itu akan terlihat lebih menonjol dan kompeten dibandingkan dengan individu lain.

Penanganan anak tidak sekolah (ATS) Kota Pekalongan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran lintas sektor dalam melaksanakan pendataan dan pendampingan ATS sangat diperlukan karena penyebab dan penanganan ATS memerlukan sinergitas semua pihak baik pemerintah kota, masyarakat maupun lembaga non pemerintah. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanganan ATS antara lain pembangunan Sanggar Kelompok Belajar (SKB). SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal. Sampai tahun 2023 ada lima belas PKBM di Kota Pekalongan yang memberikan layanan pendidikan non formal. Keberadaan SKB diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan non formal.

2.3.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT (tekstil produk tekstil), khususnya batik dan industri kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen, pada tahun 2021 tumbuh menjadi 3,59 persen, pada tahun 2022 menjadi 5,76 persen, pada tahun 2023 menjadi 5,44 persen dan pada tahun 2024 menjadi 5,34 persen; b) Pendapatan perkapita belum optimal, dimana PDRB perkapita tahun 2021 sebesar Rp.37,07 juta per tahun, pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.40,68 juta per tahun, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 43,29 juta per tahun, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 45,99 juta per tahun namun belum menunjukkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang optimal; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisata pada tahun 2022 sebanyak 1.038.424 orang, meningkat menjadi 1.258.597 orang tahun 2023, dan meningkat menjadi 1.130.104 pada tahun 2024. Walaupun meningkat, namun masih perlu dioptimalkan; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi Tahun 2023 sebesar Rp 1616,28 Milyar dan Investasi Tahun 2024 sebesar Rp 863 Milyar; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2023 dan 2024 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2023 sebesar 2,30 persen dan tahun 2024 sebesar 0,79 persen; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2023 sebesar 5,13 dan 3,74 persen pada tahun 2024; dan f) Masih terbatasnya intensitas event budaya yang

diselenggarakan, penyelenggaraan event budaya tahun 2023 dan tahun 2024 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru sebagai bagian dari TOD (*Transit Oriented Development*). Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, dan Di sisi lain kapasitas jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahnya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal.

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri yang belum meningkat signifikan akibat masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Pekalongan, dari ke-14 sub sektor dalam ekonomi kreatif, hanya 8 (delapan) sub sektor yang masuk dalam *roadmap* Kota Pekalongan, yaitu: 1) Kerajinan; 2) Desain; 3) Fashion; 4) Film, video dan fotografi; 5) Musik; 6) Seni pertunjukan; 7) Radio dan televisi; dan 8) Kuliner. Dari kedelapan sub sektor yang ada maka dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 (tiga) kluster yaitu: Kuliner, Seni Kriya dan Seni Pertunjukan. Kondisi Ekraf saat ini secara umum masih sangat minim, dapat dilihat dengan tidak dimilikinya daftar kebutuhan, pasar yang tidak terpetakan, permodalan yang tidak tersalurkan dengan baik. Dengan kata lain dapat dikatakan kondisi ekraf di Kota Pekalongan masih belum didukung data yang baik. Dalam ekosistem lama ekraf dilaksanakan dengan model '*single fighter*' atau perorangan, masih terlalu terikat dengan tradisi/tradisional, masih berupa pelayanan dasar dan merupakan sambilan. Sehingga perlu adanya perubahan cara pandang atau 'Re-Branding' dengan mulai menjalankan Ekraf melalui/berbasis komunitas, memberikan nilai tambah pada karyanya, ada pelayanan tambahan dan bersifat profesional.

Selain perubahan dengan me-re-branding ekosistem Ekraf juga perlu adanya pembuatan Database Dinamis yang dapat menjawab kebutuhan pengembangan, pemetaan dan akses pasar serta penyaluran modal. Dalam kebutuhan pengembangan perlu didasari oleh regulasi/peraturan, adanya kelembagaan dan didukung infrastruktur. Sedangkan pemetaan dan akses pasar dibedakan menjadi event dan segmentasi. Untuk permodalan dapat dibagi menjadi profit, non profit dan stimulan.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Daya saing ekonomi juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, khususnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, investasi dan perdagangan. Program Nasional dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis provinsi, sehingga program prioritas pembangunan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu pengembangan Minabatik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

Dalam Pariwisata terdapat 5 (lima) hal penting yang saling terkait, yang biasa dikenal dengan 3A dan 2P, yaitu: Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Promosi dan Pelaku Usaha. Kelima hal tersebut harus ada dan mendukung satu dengan lainnya untuk menciptakan pariwisata yang unggul. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Tahun 2017-2027, Kota Pekalongan termasuk dalam salah satu Destinasi Pariwisata Provinsi / DPP yaitu DPP Tegal – Pekalongan dan sekitarnya. DPP ini merupakan destinasi pariwisata berskala Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 6 DPP. DPP dibagi lagi menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi / KSPP dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi/ KPPP. Untuk DPP Tegal-Pekalongan dan sekitarnya, terdiri dari 2 KSPP dan 4 KPPP yaitu: a) KSPP Tegal dan sekitarnya; b) KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya; c) KPPP Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya; d) KPPP Batang dan sekitarnya; e) KPPP Pemalang dan sekitarnya; dan f) KPPP Kaligua-Malahayu dan sekitarnya. Sedangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPP) Kota Pekalongan Tahun 2013-2028, telah ditentukan 4 DPD dan 9 KSPP serta 14 KPPP, dengan kriteria: a) Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah daerah yang didalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata seperti KSPD dan KPPD; b) Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas serta membentuk jejaring produk dan pola kunjungan wisata; c) Memiliki tema yang mendukung penguatan daya saing; d) Memiliki dukungan aksesibilitas dan infrastruktur mendukung pariwisata; dan e) Keterpaduan rencana sektor terkait.

Peningkatan daya tarik pariwisata menjadi fokus program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan yaitu pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023). Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, pengembangan atraksi wisata, peningkatan kualitas amenitas, perkuatan promosi wisata, dan penyusunan standar prosedur manajemen pariwisata, termasuk dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan sektor pariwisata di Kota Pekalongan.

2.3.8. Pelestarian Budaya Lokal

Pemerintah Kota Pekalongan akan terus memperkuat dan mengembangkan budaya lokal menjadi salah satu kekayaan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman yang belum optimal, menjadi isu strategis dalam pelestarian budaya lokal.

Urgensi pelestarian budaya lokal adalah Kota Pekalongan harus memperkuat jati dirinya karena budaya yang berkembang selama ini telah memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan. Batik sebagai salah satu warisan dunia, telah memperkuat budaya Kota Pekalongan dan telah menghantarkan Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan terkait dengan rantai ekonomi industri batik, sehingga pelestarian budaya menjadi salah satu kunci penting bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan. Di sektor lainnya, budaya yang telah berkembang di Kota Pekalongan menjadi salah satu atraksi wisata, yang mampu menarik wisatawan. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi hal yang sangat penting, harus diintegrasikan dengan pembangunan kepariwisataan, sehingga dapat berkembang pariwisata budaya. Pengembangan pariwisata budaya dapat menjadi potensi tersendiri bagi pariwisata tersebut karena masing-masing daerah pasti memiliki kearifan budaya lokal yang khas dan unik bagi wisatawan. Strategi pengembangan pariwisata budaya dapat dilakukan antara lain dengan cara pengembangan atraksi budaya yang tetap mempertahankan jati diri kawasan, pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah menjadi bangunan cagar budaya, peningkatan infrastruktur, peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Pekalongan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.9. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah yang baik, menjadi isu strategis, merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dengan kondusivitas yang terjaga maka rantai ekonomi dan kondisi perikehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Dengan kondusivitas yang baik tersebut maka perekonomian dapat berkembang optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah akan sangat tergantung kondisi kondusivitas wilayah ini.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2020 berjumlah satu kasus, tahun 2021 bertambah menjadi dua kasus, pada tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak terjadi kasus konflik sosial. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dimana pada tahun 2023 sebesar 4,91 (per 10.000 penduduk) dan menurun menjadi 2,92 (per 10.000 penduduk) di tahun 2024. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan tren meningkat dimana pada tahun 2022 sebanyak 39 kasus, tahun 2023 meningkat menjadi 49 kasus dan tahun 2024 meningkat menjadi 56 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat, menjadi tanggung jawab bersama, seluruh pemangku kepentingan, bukan menjadi kewenangan pemerintah semata. Dengan kondusivitas wilayah yang baik maka akan menjamin perwujudan penanaman modal yang semakin meningkat sehingga perekonomian akan semakin berkembang, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Kota Pekalongan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian global yang masih bersifat dinamis diperkirakan akan menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja ekonomi di masa mendatang. Menurut *Global Economic Outlook* yang dirilis oleh Bank Dunia pada Januari 2025, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tetap stagnan di angka 2,7 persen pada tahun 2025. Stabilitas ini seiring dengan inflasi global yang mulai mendekati target dan pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara maju maupun negara berkembang dan pasar berkembang (*Emerging Markets and Developing Economies/EMDEs*), yang turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan dinamika perekonomian global, ekonomi Indonesia triwulan III-2024 mampu tumbuh sebesar 4,95 persen (y-on-y). Pertumbuhan tersebut lebih rendah jika dibandingkan pada triwulan III-2023 sebesar 5,04 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 11,69 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen; Komponen PMTB sebesar 5,15 persen; Komponen PK-RT sebesar 4,91 persen; dan Komponen PK-P sebesar 4,62 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 11,47 persen. Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 mencatat kelompok provinsi di Pulau Jawa masih dominan dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 56,84 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,30 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen, Pulau Sulawesi sebesar 7,23 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,82 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,66 persen.

Kinerja ekonomi yang solid hingga triwulan III-2024 ditandai dengan pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% dengan kontribusi 53,08% PDB. Konsumsi masih tumbuh kuat seiring implementasi bauran kebijakan untuk menjaga daya beli. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5,15% dengan kontribusi sebesar 29,75%, didorong investasi pemerintah dan swasta khususnya lewat pembangunan infrastruktur. Beberapa sektor usaha tumbuh pesat seperti sektor transportasi dan perdagangan yang mencapai 8,64% sejalan peningkatan jumlah penumpang dan pengiriman barang, serta sektor makanan dan minuman 8,33% seiring meningkatnya aktivitas wisata dan bisnis. Pertumbuhan ekonomi juga diiringi dengan berkurangnya tingkat pengangguran. Tercatat jumlah penduduk yang bekerja bertambah 4,79 juta menjadi 144,64 juta orang dibandingkan Agustus tahun 2023. Sementara angka pengangguran berkurang 0,39 juta orang menjadi 7,47 juta orang.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju, diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Untuk itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diarahkan agar semakin sehat dan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, arah kebijakan nasional mengacu pada Asta Cita Pembangunan sebagai prioritas pembangunan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelaksanaan pemanfaatan anggaran pemerintah diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong inovasi dan terobosan teknologi, memperkuat swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan produktivitas nasional secara keseluruhan.

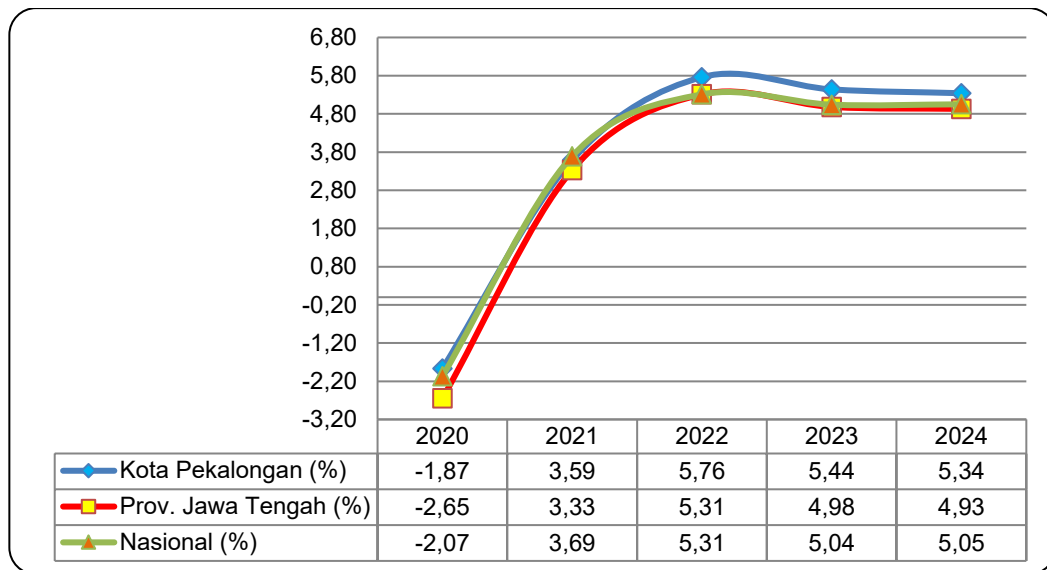
Situasi ekonomi global juga memengaruhi ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen, pertumbuhan ini sama dengan capaian triwulan III-2023 yang juga tumbuh sebesar 4,93 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,23 persen; Jasa Pendidikan sebesar 8,97 persen; Konstruksi sebesar 8,81 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 8,63 persen. Selanjutnya, lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 2,72 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 2,06 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,30 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif relatif besar diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,49 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,17 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,02 persen; Jasa Lainnya sebesar 7,36 persen.

Kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut memengaruhi kondisi ekonomi Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

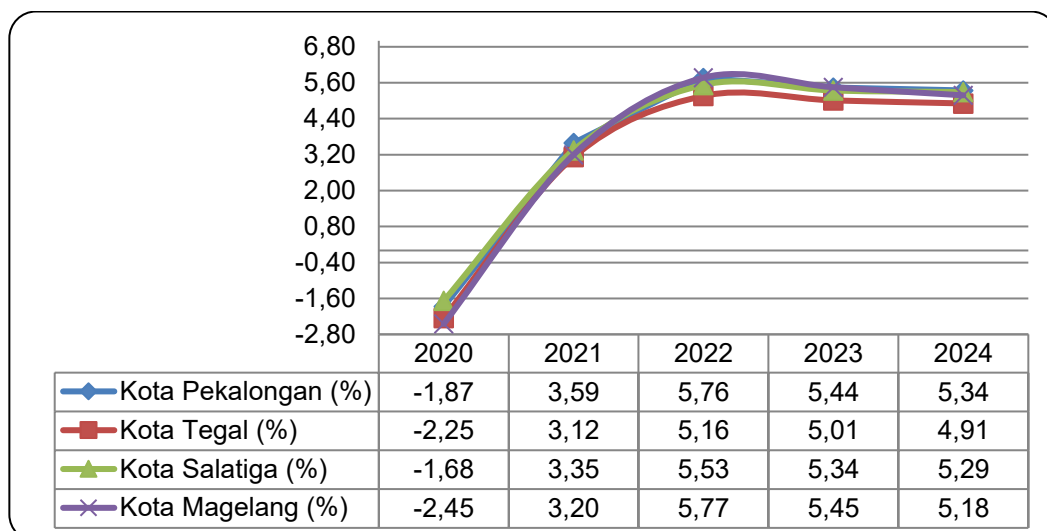
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *COVID-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami perlambatan sehingga menjadi 5,44 persen dan menjadi 5,34 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh.



Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2025

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan Kota Tegal dan Kota Salatiga, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang. Sementara pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan dengan kota setara. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2020 – 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2019-2023. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2024, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,76 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,86 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,84 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,09	4,79	4,71	4,48	4,57
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,34	21,15	20,83	20,44	19,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi	14,54	15,46	15,12	15,64	15,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,38	21,59	21,10	21,05	20,76
H	Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,06	7,28	7,79	7,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,31	5,36	5,57	5,84	6,38
J	Informasi dan Komunikasi	5,13	5,07	4,75	4,74	4,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,21	6,22	6,15	5,93	5,69
L	Real Estat	2,73	2,66	2,58	2,54	2,55
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,42	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,49	4,17	3,94	3,72	3,66
P	Jasa Pendidikan	4,72	4,54	4,16	4,06	4,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,44	1,40	1,33	1,30	1,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,90	1,83	1,82	1,80	1,88
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2025

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar

kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2020 hingga 2024 cenderung meningkat. Pada Tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,32 juta rupiah. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 37,17 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 40,65 juta rupiah pada tahun 2022, 43,29 juta rupiah pada tahun 2023 dan 45,99 juta rupiah di tahun 2024. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2020 – 2024

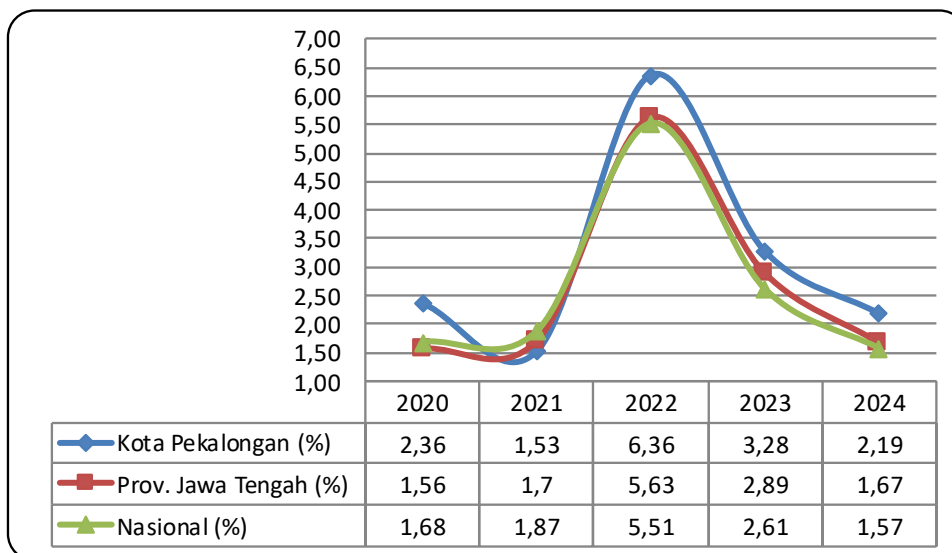
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,05	14.766,95
- ADHK (Miliar Rp)	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55	8.928,80
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	35,32	37,17	40,65	43,29	45,99
- ADHK (Juta Rp)	23,89	24,66	25,96	26,70	27,81
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	-0,25	5,24	9,43	6,48	6,25
- ADHK (persen)	-1,88	3,20	5,27	2,85	4,16

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2025

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2020 – 2024, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

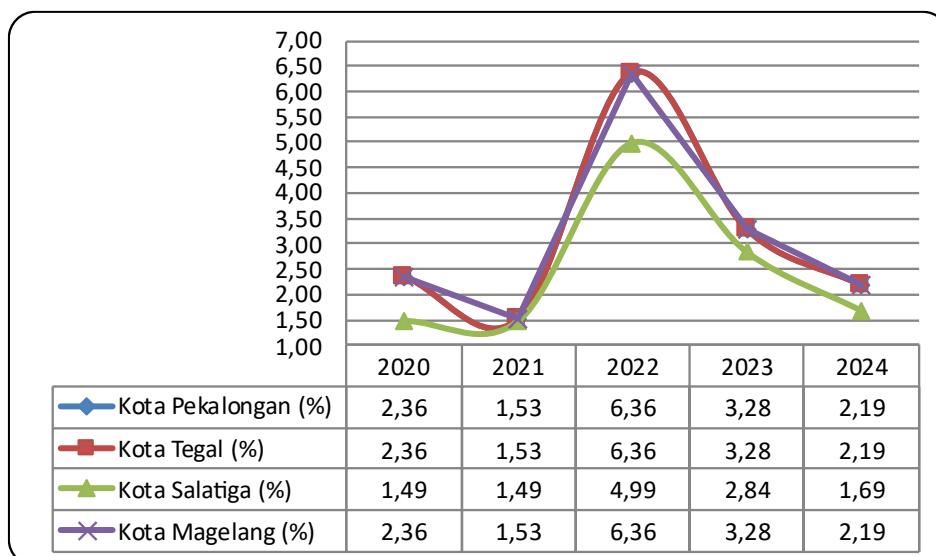
Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Sumber: www.bps.go.id, 2024

Mulai tahun 2019 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



Gambar 3.4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2020 – 2024

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, laju inflasi Kota Pekalongan menunjukkan pola yang sejalan dengan daerah setara lainnya. Pada tahun 2022, seluruh kota mengalami lonjakan inflasi yang signifikan, dengan Pekalongan, Tegal, dan Magelang mencatat angka inflasi tertinggi sebesar 6,36%. Ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor nasional seperti pemulihan pasca pandemi dan gejolak harga energi dan pangan.

Namun, setelah puncak inflasi di tahun 2022, Kota Pekalongan berhasil menurunkan inflasinya menjadi 3,28% di tahun 2023 dan lebih lanjut menjadi 2,19% di tahun 2024. Angka

ini menunjukkan pengendalian inflasi yang cukup efektif, bahkan berada di bawah target nasional $3\pm 1\%$ pada tahun 2024. Capaian ini juga serupa dengan Kota Magelang dan Kota Tegal, yang menunjukkan angka inflasi serendah 2,19%. Sebaliknya, Kota Salatiga secara konsisten mencatat inflasi yang sedikit lebih rendah dibandingkan kota-kota lainnya, dengan angka terendah pada tahun 2024 sebesar 1,69%.

Berdasarkan data inflasi menurut kelompok pengeluaran di Kota Pekalongan selama periode 2020–2024, terdapat variasi signifikan dalam tekanan harga antar sektor. kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau secara konsisten muncul sebagai sektor dengan inflasi tertinggi dalam lima tahun terakhir, menandakan adanya tekanan harga yang kuat pada kebutuhan pokok. Pada 2022, lonjakan besar terjadi pada kelompok Transportasi dengan inflasi hingga 16,42%, yang kemungkinan dipicu oleh kenaikan harga energi dan pemulihan pascapandemi.

Menurut kelompok pengeluaran, Inflasi tahun 2024 di Kota Pekalongan memperlihatkan tekanan terbesar pada sektor jasa makanan, kelompok pengeluaran umum, dan sandang. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran mencatat inflasi tertinggi pada 2024, melonjak dari 1,01% pada 2023 menjadi 5,46%. Fenomena ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi turut mendorong permintaan di sektor ini, namun juga menjadi perhatian karena dapat menambah beban pengeluaran masyarakat kelas menengah dan bawah. Kelompok pengeluaran umum mengalami kenaikan yang sangat mencolok dari 3,04% pada 2023 menjadi 5,51% pada 2024, hal ini mengindikasikan adanya kenaikan harga pada berbagai kebutuhan dasar dan jasa yang tidak termasuk dalam kategori spesifik lain. Selengkapnya Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96	7,89	2,19
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45	0,51	2,99
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47	1,30	0,34
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89	0,40	1,45
Kesehatan	2,87	0,55	2,50	2,78	0,60
Transportasi	1,36	1,01	16,42	-0,69	1,18
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74	0,03	1,18
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50	0,74	-0,90
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21	5,50	0,28
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81	1,01	5,46
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64	3,39	0,27
Umum	2,32	1,53	6,31	3,04	5,51

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekalongan Tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Sementara kondisi

lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

- 1) Ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 4,95 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2024, diantaranya ditopang oleh inflasi dan tingkat suku bunga yang tetap terkendali. Kinerja ekonomi yang solid hingga triwulan III-2024 ditandai dengan pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% dengan kontribusi 53,08% PDB. Konsumsi masih tumbuh kuat seiring implementasi bauran kebijakan untuk menjaga daya beli. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5,15% dengan kontribusi sebesar 29,75%, didorong investasi pemerintah dan swasta khususnya lewat pembangunan infrastruktur.
- 2) Kinerja APBN 2024 menunjukkan stabilitas makro–Kinerja APBN 2024 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di 5 persen, defisit APBN yang terjaga dan pendapatan negara yang mencapai target. Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 mencapai 5% (YoY) atau lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi 2024 terdiri dari: pada kuartal I /2024 mencapai 5,11%, kuartal II/2024 mencapai 5,05%, kuartal III mencapai 4,95%, dan kuartal IV diestimasikan ada di sekitar 5%. Sehingga untuk keseluruhan tahun, pertumbuhan Indonesia diperkirakan masih di 5%. Defisit APBN sepanjang 2024 mencapai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari capaian tahun sebelumnya atau 2023 yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB. Sejak awal, defisit APBN 2024 memang didesain 2,29% terhadap PDB. Defisit APBN masih sesuai target dan di bawah batas maksimal 3%. Sempat terdapat risiko pelebaran defisit mendekati batas maksimal, tetapi risikonya mereda pada paruh kedua tahun 2024. Pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun selama 2024. Realisasi tersebut setara 101,4% dari asumsi APBN 2024 dan outlook Laporan Semester I/2024 yaitu sebesar Rp2.802,5 triliun. Jika dibandingkan dengan pendapatan negara 2023 sebesar Rp2.783,9 triliun maka realisasi 2024 tumbuh sebesar 2,1%. Pendapatan negara tersebut berasal dari tiga sumber. Pertama, penerimaan perpajakan yang terdiri dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Untuk realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun atau hanya mencapai 97,2% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun. Realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,2 triliun atau hanya mencapai 93,5% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp321 triliun. Kedua, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp579,5 triliun atau setara 117,8% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp492 triliun. Ketiga, realisasi hibah yang mencapai Rp34,9 triliun atau setara 7.033,5% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp 0,4 triliun. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara bisa mencapai asumsi APBN 2024 karena realisasi PNBP dan hibah yang melebihi target. Sementara itu, meski penerimaan perpajakan memberi kontribusi terbesar, tetapi tidak mencapai target asumsi APBN 2024.
- 3) Pada awal 2025 ini, Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) ke level 5,75%. Keputusan menurunkan BI rate 5,75% ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Sasaran lainnya adalah terjaganya nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental untuk pengendalian inflasi dengan sasarnya dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. BI akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarnya, serta menstabilkan nilai tukar sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi baik global maupun nasional. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, melalui penguatan strategi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

- 4) Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 berada di rentang 4,7-5,5 persen, sedikit di bawah proyeksi sebelumnya 4,8–5,6 persen, namun tetap menggambarkan prospek yang cerah bagi ekonomi nasional. Perkiraan ini didasarkan pertimbangan bahwa ekspor juga diprediksi lebih rendah sehubungan dengan permintaan negara-negara mitra dagang utama yang melambat, kecuali Amerika Serikat (AS). Selain itu, konsumsi rumah tangga juga masih lemah, terutama golongan menengah ke bawah, karena ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja belum kuat. Pada saat yang sama, dorongan investasi swasta turut belum kuat mengingat masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan domestik maupun ekspor. Dalam kaitan ini, BI, katanya, terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah. Bank Indonesia mendukung penuh implementasi program-program pemerintah dalam Astacita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.
- 5) BI akan terus menambah likuiditas perbankan mengingat proyeksi pertumbuhan kredit yang masih tinggi. BI akan terus menyediakan kebijakan insentif likuiditas, terutama bagi bank yang menyalurkan kredit di sektor-sektor prioritas. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) pada Desember 2024 juga masih tinggi, yaitu mencapai 25,59%, menunjukkan bahwa perbankan mampu menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit yang sehat.
- 6) Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2024 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi IHK Desember 2024 sebesar 0,44% (mtm) sehingga secara tahunan inflasi IHK 2024 menjadi 1,57% (yoy). Inflasi domestik menunjukkan tren penurunan dan masih berada pada rentang target inflasi nasional 2024. Pada tahun 2025, inflasi dipatok dan optimis masih pada rentang $2,5\% \pm 1\%$.
- 7) Perjalanan internasional global terus menunjukkan kinerja yang positif, didorong oleh pemulihan perjalanan yang kuat di sebagian besar wilayah di dunia. Indonesia menerima kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 11,67 juta orang sepanjang tahun 2023. Ini merupakan peningkatan 98,2% dari tahun 2022, tetapi masih lebih rendah dari total kunjungan sebelum pandemi pada tahun 2019, yang mencapai 16,11 juta kunjungan. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbarunya mencatat, pada November 2024 jumlah kunjungan wisman mencapai 1,09 juta kunjungan. Jika ditotal sepanjang Januari hingga November 2024, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 12,66 juta kunjungan atau naik 20,17 persen dibanding periode yang sama pada 2023. Laporan yang dimuat laman *Euronews* terdapat beberapa perilaku baru yang diyakini akan menjadi tren para pelancong di tahun mendatang. Salah satunya adalah soal gender pelaku perjalanan. Diprediksi, jumlah solo pelancong pria akan meningkat hingga 30%. Jumlah tersebut lebih tinggi ketimbang pelaku perjalanan tunggu wanita yang diprediksi sekitar 23%. Sementara itu terkait dengan perilaku dan tujuan wisata, kalau selama ini wisatawan lebih cenderung pelesir karena FOMO (*fear of missing out*) ke tempat-tempat yang viral, tahun depan diprediksi sebaliknya. Mereka akan lebih memilih untuk mengunjungi destinasi yang lebih sepi dan menawarkan ketenangan, atau JOMO (*joy of missing out*). Selain dari sisi wisatawan, para pelaku usaha juga diperkirakan akan berubah, khususnya hotel dan restoran. Wisatawan tak lagi sekadar memesan kamar, namun mencicip pengalaman menyantap makanan di restoran yang tersedia di hotel.

- 8) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan setidaknya terdapat tiga tren ekonomi kreatif pada 2025 yang mencerminkan dinamika inovasi dengan menggabungkan nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri. Tren tersebut diharapkan dapat memenuhi target-target yang akan dicapai. PDB Ekraf pada 2029 sebesar 8,37 persen sesuai yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional). Dengan indikator pertumbuhan ekspor ekraf sebesar 5,96 persen, penyerapan tenaga kerja ekraf sebanyak 27.66 juta orang, dan pertumbuhan investasi ekraf sebesar 8,08 persen. Salah satu tren yang diprediksi akan mengemuka adalah konsep "Local is the New Luxury", yang menonjolkan kebanggaan terhadap produk dan budaya nusantara dengan standar kualitas dunia. Konsep itu tidak hanya menekankan pada nilai estetika, tetapi juga pada kualitas produk lokal yang memenuhi kebutuhan pasar global, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional. Kami percaya bahwa produk dan budaya Indonesia, dengan kualitas yang terus ditingkatkan, akan menjadi daya tarik global di pasar internasional. Tren kedua adalah "*Experiential Experience Kuliner*", yang menawarkan sensasi baru dalam menjelajahi cita rasa kuliner khas nusantara. Pengalaman kuliner yang tak hanya melibatkan rasa, tetapi juga mencakup pengalaman budaya, cerita, dan cara penyajian yang unik akan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Konsep ini bertujuan untuk memadukan kuliner tradisional dengan konsep modern yang memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi konsumen. Tren ketiga adalah "Revolusi Mode", yang menekankan pada keberlanjutan dan visi masa depan industri mode yang ramah lingkungan. Tren ini mencakup penggunaan bahan-bahan dari serat alami yang lebih ramah lingkungan, serta penerapan desain yang mendukung keberlanjutan dalam produksi. Industri mode di Indonesia diproyeksikan akan semakin mengedepankan prinsip-prinsip eco-fashion sebagai bagian dari strategi global menuju keberlanjutan. Industri mode Indonesia akan semakin berfokus pada keberlanjutan, dengan memanfaatkan bahan-bahan alami dan proses produksi yang ramah lingkungan. Sejumlah tren tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pencapaian target yang telah ditetapkan Kemenekraf dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tren-tren ekonomi kreatif ini tidak hanya akan memacu inovasi di dalam negeri, tetapi juga memperluas jangkauan Indonesia di pasar internasional, dengan membawa produk lokal yang memiliki daya saing global. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri untuk mempercepat perkembangan sektor ekonomi kreatif Indonesia.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

- a. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 adalah 3,2% atau lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,1%. Pertumbuhan tersebut dikerek naik meski di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia yang melebar dan ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2025 diperkirakan lebih tinggi menjadi 3,2% karena sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan AS, sementara negara lain mengalami perlambatan. Negara-negara di dunia masih akan mengalami risiko perlambatan.
- b. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Ketidakpastian ekonomi dan politik diperkirakan akan semakin kencang menghantui dunia dan Indonesia tahun 2025. Dari dalam negeri, banyak kekhawatiran juga belum reda. Pelemahan daya beli, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta melemahnya harga komoditas menjadi alasan pesimisme.
- c. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi

produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.

- d. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan *Inflation Reduction Act* (IRA) di Amerika Serikat dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) di Uni Eropa.
- e. Tantangan terakhir yaitu pandemi *COVID-19* yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan. Kasus *COVID-19* di Indonesia kembali mengalami kenaikan beberapa minggu terakhir, dimana per tanggal 21 Desember 2023 terdapat 453 kasus baru, dengan kasus aktif sebanyak 2.761 kasus. Jumlah kasus aktif *COVID-19* di Indonesia ini masih di bawah level satu pandemi virus corona yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO). Level satu pandemi menurut WHO yakni 56.000 kasus aktif per minggu. Kenaikan kasus *COVID-19* di Indonesia disebabkan karena masuknya subvarian baru virus corona bernama JN.1, subvarian XBB 1.16, dan subvarian XBB 1.9.1. Kendati peningkatan kasus tak terlalu tinggi, masyarakat dihimbau tetap waspada. Jika berada di keramaian atau transportasi umum, masyarakat yang sakit diimbau memakai masker.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* diarahkan untuk mengoptimalkan sektor perdagangan dan jasa, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pengembangan ekonomi kreatif serta pembangunan pariwisata.
- b. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dapat terselenggara dengan baik.
- d. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- e. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui peningkatan keterampilan (pelatihan) dan kewirausahaan dalam masyarakat dalam menghadapi kecepatan perkembangan teknologi digital.
- f. Mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni kawasan permukiman kumuh Krapyak, Pemkot Pekalongan menggandeng TJSLBU/CSR PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang membantu secara komprehensif berupa dana hibah kepada 16 (enam belas) warga terdampak program relokasi untuk penyediaan hunian cluster yang layak.
- g. Penguatan SDM aparatur pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- h. Peningkatan kerjasama antar daerah, khususnya dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang dalam rangka peningkatan investasi daerah.
- i. Terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif karena peluang dari perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dan global, didasarkan atas potensi lokal Kota Pekalongan.
- j. Mendorong riset dan inovasi dalam rangka menuju pengembangan ekonomi sirkuler bagi industri dan UMKM.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Upaya peningkatan ekonomi terus didorong dengan menggerakkan berbagai sektor usaha dan melibatkan berbagai pihak termasuk investor.

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,04 persen. Namun demikian, di tingkat daerah, Kota Pekalongan mengalami sedikit perlambatan dalam laju pertumbuhan ekonominya. Setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,44 persen pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,34 persen

Dengan asumsi optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4 Realisasi, Target dan Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2023	Tahun 2024		Target 2025	Proyeksi RPJMD 2026
		Target	Realisasi		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,44	5,4 – 5,8	5,34	5,44-6,0	4,55

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2024

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2024 bergerak naik dari 76,71 di tahun 2023, menjadi 77,21 di tahun 2024. Capaian di tahun 2024 telah melebihi angka yang ditargetkan yaitu 76,70. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IPM sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2023	Tahun 2024		Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
		Target	Realisasi		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,71	76,70	77,21	77,39	76,03

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2024

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 65,31 di tahun 2023 dan meningkat menjadi 65,10 di tahun 2024. Angka tersebut sudah melampaui target yang diharapkan yaitu 59,59. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IDG sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31	59,59	65,10	65,31	61,00

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2024

d. Tingkat Kemiskinan

Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 terus didorong dengan berbagai upaya. Tren menurunnya angka kemiskinan sejak pandemi sampai dengan data terakhir tahun 2024 tidak lain karena sokongan bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin. Sebut saja di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Gaji, dan subsidi listrik.

Tingkat kemiskinan tahun 2024 mencapai 6,71 persen, jauh dari target yang diharapkan yaitu 6,29 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Tingkat kemiskinan (persen)	6,81	6,3 - 5,93	6,71	6,70-6,23	5,89

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi di Kota Pekalongan, penyerapan tenaga kerja juga turut membaik, namun hal ini belum berlangsung secara konsisten. Hal ini terlihat dari meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 5,02 persen di tahun 2023 menjadi 4,91 persen di tahun 2024 atau menurun sebesar 0,11 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,02	4,5 – 4,7	4,91	5,05-4,47	5,99

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2024

f. Inflasi

Inflasi, atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan, masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan target inflasi sebesar 3 ± 1 persen, yaitu dalam kisaran 2 hingga 4 persen. Pada tahun 2023, inflasi berhasil dikendalikan dengan capaian sebesar 3,28 persen, yang masih berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2024, inflasi tercatat sebesar 2,19 persen, bahkan berada di bawah rentang target yang ditentukan, menunjukkan pengendalian harga yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Inflasi (persen)	3,28	3 ± 1	2,19	3 ± 1	3 ± 1

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2024

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Struktur belanja daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer. Belanja operasi sebagaimana dimaksud, dirinci atas jenis: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja bunga; d) belanja subsidi; e) belanja hibah; dan f) belanja bantuan sosial. Belanja modal meliputi: a) belanja modal tanah; b) belanja modal peralatan dan mesin; c) belanja modal bangunan dan Gedung; d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; e) belanja modal aset tetap lainnya; dan f) belanja modal aset lainnya. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Dan untuk belanja transfer dirinci atas jenis: a) belanja bagi hasil; dan b) belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan (indeks kemandirian fiskal menuju mandiri). Namun demikian jika kontribusi PAD lebih rendah dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah dihitung berdasarkan:
 - a. perkiraan potensi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku
 - b. memperhatikan realisasi pendapatan Pajak Daerah sampai dengan bulan April tahun 2025
2. Proyeksi Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan:

- a. perkiraan potensi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku
- b. memperhatikan realisasi pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan bulan April tahun 2025.
3. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dihitung berdasarkan estimasi perolehan laba dari BUMD tahun 2024
4. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan:
 - a. dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan bulan April tahun 2025
 - b. perkiraan suku Bunga Bank Indonesia
 - c. potensi aset yang disewakan
 - d. estimasi perhitungan aset yang akan dilelang
 - e. estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima
5. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dihitung berdasarkan:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025
6. Pendapatan Transfer Antar Daerah disesuaikan dengan alokasi Belanja Transfer berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/398/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
7. Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah disesuaikan dengan Perjanjian Hibah antara PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan Nomor: 002/HT.01.04/007/2025 dan Nomor: 900.1.1/812/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Kota Pekalongan Untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Pasar Banjarsari Kota Pekalongan

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Memberikan insentif pajak secara selektif dan terukur untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan evaluasi dampak yang jelas terhadap pendapatan daerah
5. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini didasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bertujuan untuk

memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, penyesuaian ini juga mempertimbangkan usulan-usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

1. Sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah
2. Evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Sinergisitas antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang teknis pungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025;
6. Penyusunan buku Potensi PAD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (*tapping box* dan sejenisnya);
8. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD;
9. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
10. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
11. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
12. Pelayanan PBB *Online* dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah;
13. Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data Simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
15. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
16. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
17. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
18. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
19. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID;
20. Menyusun Rencana Aksi untuk peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah

- dalam rangka peningkatan Dana Insentif;
21. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Dalam perjalanan waktu di tahun 2025, terdapat kebijakan yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Kebijakan Gubernur Jawa Tengah melalui Keputusan Nomor 973.1/42 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan sejak tanggal 5 Januari s/d 31 Maret 2025, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan relaksasi pajak kepada masyarakat berupa stimulus PKB dan BBNKB. Stimulus ini diberikan dalam bentuk pengurangan pokok pajak, dengan persentase tertentu selama periode yang telah ditetapkan. Pengurangan pajak ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, tetapi disisi lain juga berdampak pada penerimaan opsen.
2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), dimana PLN memberikan diskon 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025.
3. Kebijakan efisiensi anggaran pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berdampak pada:
 - a. efisiensi anggaran pensertipikatan tanah PT. KAI yang berdampak pada penurunan pendapatan pajak BPHTB.
 - b. efisiensi belanja perjalanan dinas yang berdampak pada penurunan tingkat okupansi hotel.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025

Adapun perubahan target pendapatan Kota Pekalongan Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.10 berikut.

**Tabel 3.10 Perubahan Target Pendapatan
Kota Pekalongan Tahun 2025**

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
PENDAPATAN	1.005.379.456.000	1.042.817.436.000	1.033.940.712.000	28.561.256.000	(8.876.724.000)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	297.670.934.000	304.505.199.000	298.449.591.000	778.657.000	- 6.055.608.000
Pendapatan Pajak Daerah	141.900.000.000	148.200.000.000	140.250.255.000	- 1.649.745.000	- 7.949.745.000
Hasil Retribusi Daerah	145.000.000.000	144.355.743.000	142.179.512.000	- 2.820.488.000	- 2.176.231.000
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.226.934.000	7.226.934.000	7.400.295.000	173.361.000	173.361.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.544.000.000	4.722.522.000	8.619.529.000	5.075.529.000	3.897.007.000
PENDAPATAN TRANSFER	707.708.522.000	738.312.237.000	734.676.749.000	26.968.227.000	- 3.635.488.000
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	656.741.652.000	687.345.367.000	680.037.879.000	23.296.227.000	(7.307.488.000)

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
Bagi Hasil	27.266.333.000	43.618.577.000	43.618.577.000	16.352.244.000	-
Dana Alokasi Umum	478.357.629.000	488.347.066.000	485.041.025.000	6.683.396.000	- 3.306.041.000
Dana Alokasi Khusus	147.117.690.000	148.163.226.000	144.161.779.000	- 2.955.911.000	- 4.001.447.000
Dana Insentif Fiskal	4.000.000.000	7.216.498.000	7.216.498.000	3.216.498.000	-
Transfer Antar Daerah	50.966.870.000	50.966.870.000	54.638.870.000	3.672.000.000	3.672.000.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	50.966.870.000	50.966.870.000	50.966.870.000	-	-
Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	3.672.000.000	3.672.000.000	3.672.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	814.372.000	814.372.000	814.372.000
Pendapatan Hibah	-	-	814.372.000	814.372.000	814.372.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp.6.055.608.000,00 dibandingkan dengan Penetapan APBD TA 2025. Penurunan ini berasal dari komponen pajak daerah, yang memberikan dampak signifikan terhadap total PAD. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam optimalisasi PAD guna menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Pendapatan Transfer secara total mengalami penurunan sebesar Rp3.635.488.000,00 yang terdiri atas penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp7.307.488.000,00. Penurunan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp3.306.041.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1.599.369.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat juga karena adanya penyesuaian atas SILPA atas TKD Tahun 2024 yaitu:

- DBHCHT sebesar Rp466.265.421,00
- DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp548.406.611,00
- DAK sebesar Rp6.479.769.709,00
- Dana Insentif Fiskal sebesar Rp171.548.840,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan dengan adanya penyesuaian atas alokasi Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp3.672.000.000,00. Perubahan ini mencerminkan dinamika dalam transfer dana antar tingkat pemerintahan, yang berpotensi mempengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp814.372.000,00, yang berasal dari hibah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan. Hibah tersebut dialokasikan untuk mendukung pembangunan Jembatan Penghubung Pasar Banjarsari Kota Pekalongan, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan pasar. Peningkatan pendapatan ini mencerminkan adanya dukungan pihak eksternal dalam pengembangan infrastruktur daerah, yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2025 mengacu pada pagu indikatif tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi serta percepatan pencapaian target pembangunan, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian belanja pegawai yang terdiri dari:
 - a. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK
 - b. Penyesuaian penggunaan rincian rekening belanja pegawai.
2. Penyesuaian belanja atas perubahan pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Penyesuaian belanja atas tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 11 Februari 2025
4. Penyesuaian belanja atas tindak lanjut Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 7 tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
5. Penyesuaian belanja atas tindak lanjut Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 12 tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
6. Tindak lanjut Efisiensi Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan inflasi, serta prioritas lainnya.
7. Pemenuhan belanja kebutuhan rutin operasional perangkat daerah yang belum dialokasikan selama 12 bulan.
8. Rasionalisasi atas belanja yang tidak mendesak dan urgen.
9. Pergeseran anggaran antar organisasi/unit organisasi/program/kegiatan/sub kegiatan/kelompok dan jenis belanja.

Adapun perubahan belanja daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2025

Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5 (4-2)	6 (4-3)
BELANJA	1.013.929.456.000	1.051.367.436.000	1.093.925.560.000	79.996.104.000	42.558.124.000
BELANJA OPERASI	917.759.098.383	941.824.019.000	955.801.796.000	38.042.697.617	13.977.777.000
Belanja Pegawai	437.583.646.500	436.968.612.000	445.994.388.000	8.410.741.500	9.025.776.000
Belanja Barang dan Jasa	451.848.793.633	460.104.668.000	474.314.308.000	22.465.514.367	14.209.640.000
Belanja Hibah	27.100.804.250	43.286.089.000	33.894.200.000	6.793.395.750	-9.391.889.000
Belanja Bantuan Sosial	1.225.854.000	1.464.650.000	1.598.900.000	373.046.000	134.250.000
BELANJA MODAL	93.686.357.617	107.059.417.000	127.323.764.000	33.637.406.383	20.264.347.000
Belanja Modal Tanah	240.000.000	518.740.000	556.340.000	316.340.000	37.600.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.363.653.050	23.675.679.000	40.444.464.000	27.080.810.950	16.768.785.000
Belanja Modal Gedung dan	32.893.233.567	31.290.646.000	30.996.629.000	-1.896.604.567	-294.017.000

Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5 (4-2)	6 (4-3)
Bangunan					
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.011.631.000	51.327.557.000	53.927.198.000	6.915.567.000	2.599.641.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.340.000	104.295.000	1.331.167.000	1.250.827.000	1.226.872.000
Belanja Aset Lainnya	97.500.000	142.500.000	67.966.000	-29.534.000	-74.534.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.484.000.000	2.484.000.000	10.800.000.000	8.316.000.000	8.316.000.000
Belanja Tidak Terduga	2.484.000.000	2.484.000.000	10.800.000.000	8.316.000.000	8.316.000.000
BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0
Belanja bantuan Keuangan	0	0	0	0	0

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari SiLPA. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2025 di Kota Pekalongan antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian.

Pada perubahan RKPD Tahun 2025, kebijakan pembiayaan daerah meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan terdapat penyesuaian SiLPA berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebesar Rp66.431.393.447,00 atau bertambah sebesar Rp51.431.393.447,00 dari Penetapan APBD 2025 dan dari Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah sebesar Rp3.454.553,00.
2. Pengeluaran Pembiayaan tetap sebesar Rp6.450.000.000,00
3. Pembiayaan Netto menjadi sebesar Rp59.984.848.000,00. Surplus dari Pembiayaan Netto selanjutnya digunakan lagi untuk penyesuaian kebijakan anggaran pendapatan dan anggaran belanja dalam RKPD Perubahan Tahun 2025.

**Tabel 3.12 Anggaran Pembiayaan Pada Perubahan RKPD
Kota Pekalongan Tahun 2025**

Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
PEMBIAYAAN	8.550.000.000	8.550.000.000	59.984.848.000	51.434.848.000	51.434.848.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	15.000.000.000	66.434.848.000	51.434.848.000	51.434.848.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	15.000.000.000	15.000.000.000	66.431.393.447	51.431.393.447	51.431.393.447
Pencairan Dana Cadangan	0	0	-	-	-
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0	0	3.454.553	3.454.553	3.454.553
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.450.000.000	6.450.000.000	6.450.000.000	0	0

Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
Penyertaan Modal Daerah	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000	0	0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan diatas, pembiayaan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp51.434.848.000,00, yang bersumber dari penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 dan Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Penyesuaian ini mencerminkan optimalisasi penggunaan surplus anggaran sebelumnya, yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dalam mendukung program dan kebijakan pembangunan pada tahun anggaran 2025. Dengan adanya peningkatan ini, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih dalam mengalokasikan dana untuk prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam Visi dan Misi Tahun 2021-2026

4.1.1.1. Visi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan ***Tahta Untuk Rakyat*** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan. Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2016–2021 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu *brand image* yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Di samping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat memengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk mengeksploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang ada di

permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan *Onshore*. Komunikasi dan koordinasi akan dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan juga listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan akan terwujud menjelang akhir periode tahun 2025, yang artinya akan sejalan dengan perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan berkurang secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan. Gambaran tentang permasalahan banjir dan rob yang diprediksikan pada saat penyusunan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 diatas, saat ini telah menunjukkan progres yang positif dengan ditunjukkan adanya pengurangan genangan yang sangat signifikan. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah penanganan banjir dan rob pada sistem sungai Brengi dan Meduri yang diharapkan akan dapat terbangun pada periode RPJMD 2025-2029.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi *Transit Oriented Development* (TOD). Dengan selesainya konstruksi Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana di akhir tahun 2021, Kota Pekalongan mempunyai wahana wisata baru yang menjadi magnet bagi wisatawan. Hal ini menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner. Namun demikian, kondisi saat

ini Taman Wisata Laut Pasir Kencana belum memberikan kontribusi yang sesuai dengan harapan. Permasalahan utama lebih disebabkan karena faktor alam berupa hujan yang disertai angin yang merusak panggung utama. Pemerintah Kota Pekalongan sendiri tetap berusaha untuk memaksimalkan pemanfaatan obyek wisata tersebut dengan berbagai event hiburan. Sehingga diharapkan akan tetap dapat menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya-upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapan-tahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Hal ini didasari atas pemikiran bahwa misi kedelapan, yaitu Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat, pada hakikatnya merupakan roh metode yang menjadi pengikat dan sekaligus menjiwai dalam menjalankan tujuh misi lainnya. Selanjutnya, dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam struktur program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

1. Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Oleh karena itu, makna sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan

akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta penargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

2. Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta penargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

3. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJPD yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan pemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. Penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

4.1.1.2. Misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026 yaitu ***“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”***, dirumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian ibu, bayi dan balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan ketercukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan aktif dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasarannya adalah Meningkatkan Indeks Keluarga sehat dan Meningkatkan Penanganan Kemiskinan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, meningkatnya akses pendidikan, optimalnya pengarusutamaan gender, optimalnya pengarusutamaan hak anak, dan meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadai.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau *land subsidence*. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat. Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju penurunan tanah oleh

Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi: menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya kualitas lahan, dan terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, dengan sasaran meliputi: optimalnya layanan air minum, optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan, dan meningkatnya layanan transportasi perkotaan.

5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya'banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi sedekah laut (nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

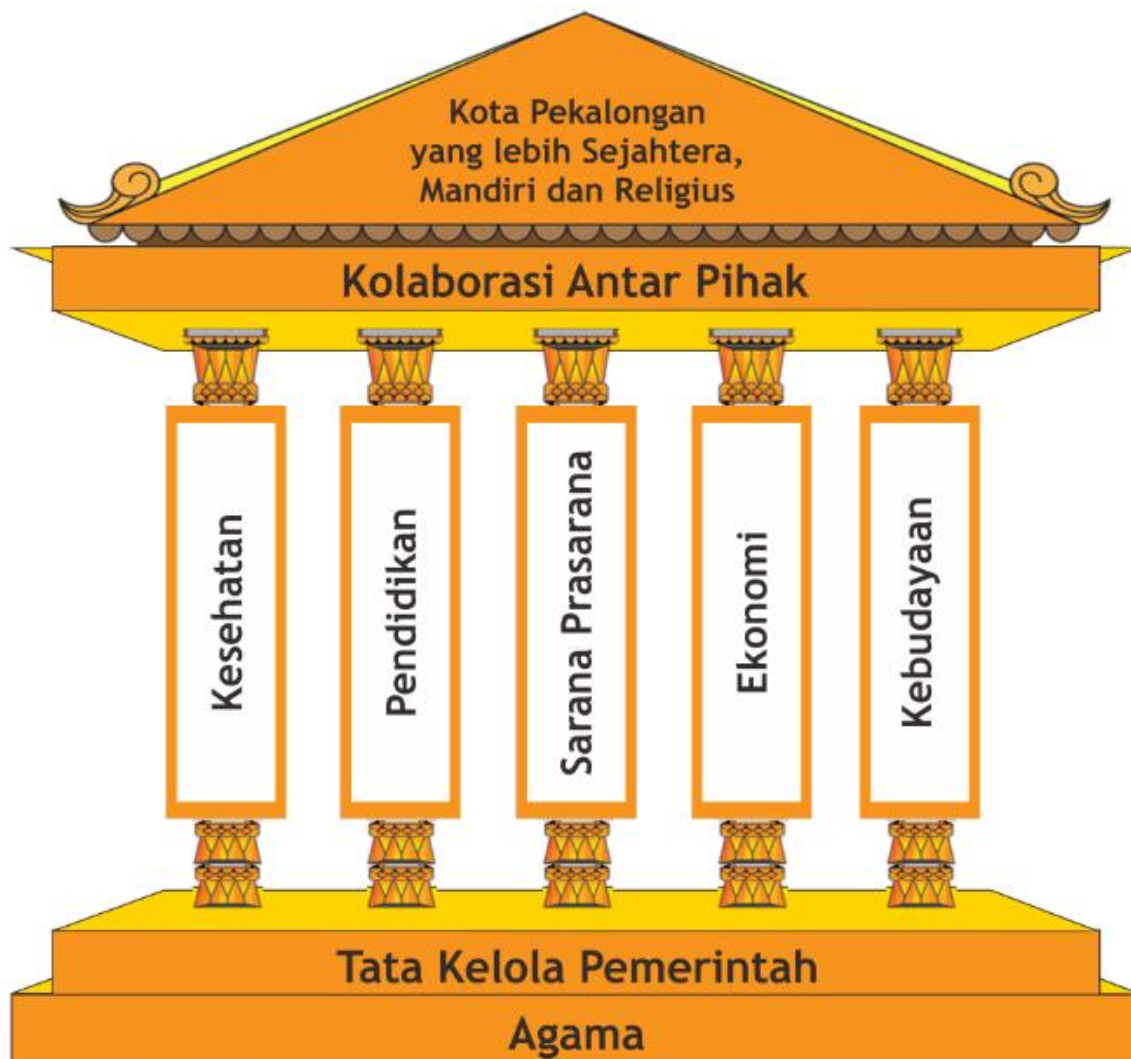
Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujudkan melalui upaya mendorong peningkatan intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.



Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.1.2. Gambaran Kota Pekalongan dalam Visi dan Misi Tahun 2025-2029

4.1.2.1. Visi Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Sebagaimana amanat surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita kedalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 maka dalam perubahan RKPD Tahun 2025 akan menampung visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2025-2030, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah:

**“Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
Berlandaskan Akhlaqul Karimah”**

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

1. Lebih Maju

Beroperasinya Pasar Banjarsari akan menjadi momentum baru dalam menumbuhkan perdagangan konvensional dan menyasar langsung ke UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian juga dengan Taman Sorogenen yang semula menjadi lokasi pasar darurat pasca terbakarnya Pasar Banjarsari, akan dibangun menjadi fasilitas olahraga, taman, kuliner, dan pasar burung malam, juga akan menjadi pendukung majunya aktivitas perdagangan di Kota Pekalongan.

Selain perdagangan konvensional, masyarakat Kota Pekalongan, terutama yang berada dalam link value perdagangan produk batik, juga terus meningkatkan aktivitasnya melalui format “*e-market place*”.

Pada sektor lain, yaitu perikanan, juga diharapkan akan mendapatkan momentum baru dalam bertumbuh kembang di waktu yang akan datang. Rencana pembangunan pelabuhan perikanan on shore melalui *Project Sector Loan for Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase I* yang bersumber dari pembiayaan JICA, diharapkan akan menjadi pendorong yang cukup kuat bagi upaya memajukan perikanan di Kota Pekalongan. Momentum ini juga akan menjadi bangkitan ekonomi baru pada titik dan jalur distribusi perikanan dari dan ke pelabuhan perikanan tersebut.

Kemajuan lain yang nantinya akan terwujud adalah penataan ruang-ruang terbuka publik, jalan kota, air bersih, sanitasi dan persampahan, serta pengembangan infrastruktur pengendali banjir dan rob yang merata di kawasan rawan bencana banjir dan rob. Penataan Taman Sorogenen setelah berpindahnya aktivitas pasar darurat akan memecahkan keramaian di alun-alun yang sudah sangat padat dan sangat mengurangi kenyamanan pengunjung. Penataan alun-alun juga nantinya akan didukung dengan adanya pembangunan pusat kuliner di eks pendopo oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Peningkatan kualitas jalan kota juga secara bertahap dan berkelanjutan terus dilakukan dalam mendukung layanan mobilitas penduduk. Hal yang mungkin akan menjadi tantangan ke depan adalah penanganan terintegrasi atas persimpangan sebidang dengan rel kereta api. Dengan semangat Pemerintah Pusat untuk mendorong kolaborasi dan sinergi antar level pemerintahan ataupun antar pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi peluang bagi penataan persimpangan sebidang tersebut.

Infrastruktur pelayanan publik lain yang diharapkan akan dapat diwujudkan adalah peningkatan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan. Dorongan untuk terus mengembangkan SPAMREG PETANGLONG, serta adanya berbagai rekayasa ilmu pengetahuan khususnya dalam pengelolaan air payau menjadi air bersih akan dapat mendukung percepatan pemenuhan layanan air bersih dari sumber air baku permukaan. Sementara itu, untuk layanan sanitasi dan persampahan, Pemerintah Kota Pekalongan akan terus mendorong peran serta masyarakat secara aktif mengingat kedua hal tersebut

dirasakan akan sangat bergantung pada peran masyarakat. Disamping itu, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan Pembangunan TPST Regional Pekalongan-Batang ke dalam Program Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2024-2029. Tentu saja, kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan persampahan di Kota Pekalongan.

Dan yang terakhir adalah infrastruktur pengendali banjir dan rob, dimana kebijakan ini akan bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah menetapkan Peningkatan Ketahanan Banjir Perkotaan Pekalongan dan Pembangunan Pengaman Pantai Pesisir Pekalongan - Batang dalam Program Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2024-2029.

Kemajuan lain yang akan diwujudkan adalah kualitas layanan publik dengan akan terus meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Layanan tersebut, tidak hanya bersifat operasionalisasi internal birokrasi pemerintahan, tetapi juga layanan untuk aktivitas bisnis, ataupun layanan kesejahteraan masyarakat.

2. Lebih Sejahtera

Berbagai upaya pembangunan yang akan dilakukan, mulai dari infrastruktur (pengendalian banjir dan rob beserta sistem drainase perkotaannya, jaringan jalan, listrik, layanan telekomunikasi, air bersih, sanitasi dan persampahan), sarana dan prasarana produksi batik dan perikanan beserta jaringan distribusi perdagangannya, serta penataan taman kota untuk menjadikan kondisi kota yang nyaman, diharapkan akan sejalan dengan penyerapan tenaga kerja di Kota Pekalongan. Disamping itu, perkembangan lingkungan eksternal Kota Pekalongan, baik di regional Jawa Tengah ataupun lingkungan nasional dan global, diharapkan akan semakin mampu memberikan pengaruh positif dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Berkurangnya pengangguran, baik karena bekerja ataupun melakukan wirausaha sebagai dampak banyaknya aktivitas pembangunan yang akan membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Kondisi tersebut juga diharapkan akan terdukung oleh dampak positif dari program strategis nasional, berupa Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah. Mekanisme Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan UMKM, baik di sisi produksi ataupun pasokan bahan makanan, setidaknya akan memberikan dampak berupa terdistribusikannya aliran uang UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Jika ini berjalan, maka bukan tidak mungkin selain akan meningkatkan pendapatan per kapita, juga akan menurunkan kesenjangan pendapatan (Gini Ratio).

Saat ini, gini ratio Kota Pekalongan berada di angka 0,330. Dengan adanya distribusi pendapatan melalui kebijakan pemerintah yang mendorong peran UMKM seperti halnya Makan Bergizi Gratis, maka gini ratio Kota Pekalongan diharapkan akan berada di bawah angka 0,3 di akhir RPJMD tahun 2030.

Dampak ikutan lain sebagai akibat kondisi di atas adalah menurunnya angka kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di Kota Pekalongan masih di angka 6,71. Berbagai alokasi anggaran telah diluncurkan secara kolaboratif oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota Pekalongan, dan juga peran dunia usaha melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya (TJSL) atau CSR. Alokasi anggaran tersebut dikemas dengan berbagai program, seperti program menurunkan beban pengeluaran penduduk miskin, program peningkatan ketrampilan bekerja dan berusaha, ataupun juga program stimulan modal usaha. Gayung bersambut dengan berbagai implementasi program tersebut adalah upaya Pemerintah Pusat yang telah menyatukan data sasaran program penanggulangan kemiskinan, yaitu DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional). Dengan adanya integrasi data-data tersebut, diharapkan berbagai program yang dilaksanakan akan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, angka kemiskinan di Kota Pekalongan diharapkan akan turun di bawah 5,02 - 6,27 % pada tahun 2030.

Rangkaian dari menurunnya angka kemiskinan ini nantinya adalah semakin baiknya kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat Kota Pekalongan. Kondisi Pendidikan yang akan mencerminkan membatiknya pendidikan masyarakat dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Saat ini, rata-rata lama sekolah Kota Pekalongan adalah 9,34 tahun, sedangkan harapan lama sekolah adalah 12,89 tahun. Pada tahun 2030, kondisi ini diharapkan akan mencapai angka di atas 11 tahun untuk rata-rata lama sekolah, dan mencapai angka di atas 14 tahun untuk harapan lama sekolah. Sedangkan untuk Kesehatan yang akan diukur dengan Indeks Keluarga Sehat, dimana saat ini telah mencapai 0,38 maka di tahun 2030 akan dapat mencapai angka 0,42.

3. Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam konteks Kota Pekalongan, pembangunan berkelanjutan setidaknya mencakup aspek Sumber Daya Manusia yang dilihat dari kesejahteraan (kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan juga pangan), kemudian aspek lingkungan seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah dan sampah, serta tidak kalahnya aspek ekonomi dimana Kota Pekalongan sangat bertumpu pada industri pengolahan dan sektor perdagangan dengan produk unggulan berupa batik, perikanan, dan wisata (belanja dan religi).

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dari aspek Sumber Daya Manusia, pada tahun 2030 nanti diharapkan Kota Pekalongan akan memiliki penduduk dengan tingkat kemiskinan 5,02 - 6,27 %, rata-rata lama pendidikan 9,87 tahun, indeks kesehatan 0.42 (indeks keluarga sehat) dan Pola Pangan Harapan 95,12 Dengan kondisi ini, maka keberlanjutan pembangunan menuju pada kondisi yang lebih maju dan sejahtera akan dapat terus dilakukan di masa-masa yang akan datang.

Sementara itu, jika dilihat dari aspek lingkungan, kondisi Kota Pekalongan pada tahun 2030 diharapkan akan dapat terwujudkan pemenuhan cakupan layanan air bersih dari sumber air baku permukaan sebanyak 34,58 %, cakupan layanan sanitasi mencapai 12 %, layanan persampahan 92,59%, dan pengelolaan limbah dapat mencapai 1,35 % terselesaikan dari sisi hulu. Kondisi seperti ini diharapkan akan dapat memberikan jaminan ketersediaan daya dukung lingkungan yang akan dapat digunakan sebagai sumber daya pembangunan oleh generasi yang akan datang.

4. Berlandaskan Akhlaqul Karimah

Pembangunan Kota Pekalongan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan harus berpijak pada nilai-nilai moral yang kuat. "Berlandaskan Akhlaqul Karimah" menegaskan bahwa setiap kebijakan, program, dan interaksi sosial dalam pemerintahan serta masyarakat harus mencerminkan akhlak yang mulia. Akhlaqul Karimah bukan sekadar aspek spiritual, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun etos kerja yang jujur, amanah, dan profesional di segala bidang kehidupan. Dengan nilai ini, Pekalongan tidak hanya berkembang dalam aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dalam karakter masyarakatnya yang beradab dan harmonis.

Dalam tata kelola pemerintahan, Akhlaqul Karimah menjadi prinsip utama dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap pemimpin dan aparatur pemerintah diharapkan menjunjung tinggi integritas, mengedepankan keadilan, dan menghindari praktik korupsi. Dengan kepemimpinan yang berakhlak, masyarakat akan semakin percaya pada pemerintahan, yang pada akhirnya memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan kota.

Pada aspek sosial dan budaya, penerapan Akhlaqul Karimah berarti membangun masyarakat yang saling menghormati, peduli, dan memiliki semangat gotong royong. Kota Pekalongan harus menjadi tempat di mana keberagaman budaya dan agama dapat hidup berdampingan dengan harmonis, serta nilai-nilai luhur seperti tolong-menolong, kejujuran, dan rasa tanggung jawab ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial.

Dalam bidang ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, prinsip Akhlaqul Karimah menuntun dunia usaha dan industri agar beroperasi secara etis, adil, dan berwawasan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan sosial atau merusak lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan usaha berbasis syariah, bisnis yang bertanggung jawab, serta praktik industri yang ramah lingkungan harus terus diperkuat agar kemajuan Pekalongan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Berlandaskan Akhlaqul Karimah" bukan hanya semboyan, tetapi menjadi pedoman dalam membangun Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam setiap aspek kehidupan, Pekalongan dapat tumbuh menjadi kota yang tidak hanya unggul dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam kualitas moral dan kebahagiaan warganya.

4.1.2.2. Misi Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi tersebut, RPJMD ini merumuskan 9 (sembilan) misi yang menjawab isu strategis daerah. Misi ini akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat.

1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Fondasi utama dalam mencapai Kota Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan Akhlaqul Karimah adalah pemerintahan yang berlandaskan hukum yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan menjunjung tinggi hukum, pemerintah Kota Pekalongan dapat membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan rasa aman, serta menegakkan keadilan sosial di semua aspek kehidupan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam menciptakan sistem birokrasi yang bersih dan responsif. Setiap kebijakan harus dibuat secara terbuka, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dapat ditekan, sehingga pembangunan berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Prinsip kolaborasi dan sinergi dalam pemerintahan juga sangat penting untuk mewujudkan Pekalongan yang lebih maju dan berkelanjutan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun kota, tetapi harus menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media, guna menciptakan solusi yang inovatif dan tepat sasaran. Melalui pendekatan sinergis, setiap kebijakan yang dibuat dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mengatasi berbagai tantangan pembangunan secara efektif.

Dengan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Pekalongan dapat mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan serta pembangunan yang inklusif bagi seluruh warganya. Hal ini juga sejalan

dengan prinsip Akhlaqul Karimah, di mana nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, misi ini menjadi landasan kokoh dalam mencapai visi Kota Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan dalam bingkai nilai-nilai luhur dan hukum yang berkeadilan.

2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata

Misi ini menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan, tanpa terkecuali. Pendidikan yang baik adalah kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan memiliki karakter berlandaskan Akhlaqul Karimah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Peningkatan kualitas pendidikan mencakup penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain itu, sinergi antara sekolah, dunia usaha, dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar pendidikan di Pekalongan tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan industri.

Pemerintah juga harus mendorong inovasi dalam sistem pendidikan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses belajar. Pendidikan berbasis karakter dan kearifan lokal juga harus dikembangkan untuk memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Akhlaqul Karimah.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan kota. Pendidikan yang merata dan berkualitas akan menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kualitas kesehatan mencakup penguatan layanan di puskesmas, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan lainnya agar lebih responsif dan efisien dalam menangani kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, seperti rekam medis elektronik dan layanan telemedicine, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses dan efektivitas layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah dengan akses terbatas.

Selain itu, aspek preventif harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan. Program edukasi mengenai pola hidup sehat, peningkatan gizi, pencegahan penyakit menular, serta promosi kesehatan mental harus diperluas agar masyarakat lebih sadar dan proaktif dalam menjaga kesehatannya. Pemerintah juga perlu memperkuat jaminan kesehatan bagi seluruh warga, baik melalui optimalisasi BPJS maupun program subsidi bagi masyarakat kurang mampu, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan hak kesehatan mereka.

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Pekalongan dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan. Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga dan menjadi faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif serta sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan, memperbaiki sistem layanan, serta memastikan tersedianya tenaga medis yang profesional dan merata di seluruh wilayah kota. Dengan misi ini, Kota Pekalongan akan menjadi kota yang lebih sehat, di mana setiap

warganya memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Peningkatan kualitas kesehatan dan jaminan layanan yang merata akan mendukung pencapaian visi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan, berlandaskan nilai-nilai Akhlaqul Karimah.

4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Misi ini menegaskan komitmen Kota Pekalongan dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya mempertimbangkan fungsi, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Infrastruktur yang baik menjadi pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan kota yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karena itu, setiap pembangunan harus dirancang dengan prinsip efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta pemanfaatan teknologi hijau agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Pembangunan yang berkelanjutan berarti memastikan bahwa infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dibangun dengan perencanaan yang matang dan tahan terhadap tantangan lingkungan. Salah satu prioritas utama adalah mengatasi permasalahan banjir rob yang sering terjadi di Pekalongan dengan membangun sistem pengendalian air yang lebih baik, termasuk peningkatan kapasitas drainase, serta pengelolaan tata air yang berbasis ekosistem.

Melalui misi ini, Kota Pekalongan tidak hanya berfokus pada kemajuan infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa setiap pembangunan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, kota ini akan menjadi lebih layak huni, lebih tangguh menghadapi perubahan iklim, serta selaras dengan visi untuk menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berlandaskan Akhlaqul Karimah.

5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh warga, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu, mendapatkan akses terhadap layanan sosial yang memadai. Hal ini mencakup penyediaan bantuan sosial, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas untuk menciptakan kemandirian dan mengurangi kesenjangan sosial.

Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan menjadi prioritas dalam menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan sejahtera. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang melindungi hak-hak anak, termasuk mencegah eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan anak. Selain itu, perempuan harus diberikan kesempatan yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, dengan menyediakan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program kewirausahaan yang mendorong kemandirian.

Peningkatan keswadayaan masyarakat juga menjadi strategi utama dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Dengan membangun sistem layanan yang partisipatif dan berbasis komunitas, masyarakat akan semakin aktif dalam merancang dan menjalankan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas layanan publik, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan gotong royong di antara warga Kota Pekalongan.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem layanan sosial yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai Akhlaqul Karimah. Dengan pelayanan yang lebih baik, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pembangunan, sehingga kesejahteraan yang diidamkan dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan.

6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

Misi ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi Kota Pekalongan dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya lokal, terutama sektor unggulan seperti batik dan perikanan. Sebagai kota yang dikenal sebagai pusat batik nasional, Pekalongan memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing industri kreatifnya melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, serta perluasan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Dukungan terhadap para pengrajin dan pelaku usaha batik perlu diperkuat melalui pelatihan, fasilitasi permodalan, serta pengembangan teknologi yang ramah lingkungan agar industri ini tetap berkelanjutan dan semakin berkembang.

Di sektor perikanan, Kota Pekalongan memiliki potensi besar dalam perikanan tangkap maupun budidaya. Penguatan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas pengolahan hasil laut akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Selain itu, penerapan teknologi modern dalam budidaya perikanan serta diversifikasi produk olahan perikanan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan lokal.

Selain batik dan perikanan, sektor ekonomi kreatif, UMKM, serta pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal juga harus dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan kebijakan yang mendukung kewirausahaan, akses pasar, serta digitalisasi usaha agar pelaku ekonomi lokal mampu bersaing di era globalisasi.

Dengan membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi daerah, Kota Pekalongan akan semakin maju dan sejahtera. Keberlanjutan ekonomi ini harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan nilai-nilai Akhlaqul Karimah agar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan generasi mendatang.

7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal

Pelestarian dan pengembangan budaya lokal menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Pekalongan serta menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kota Pekalongan memiliki kekayaan budaya yang khas, baik dari seni, tradisi, maupun warisan sejarah, yang harus dijaga agar tidak hilang oleh arus modernisasi. Upaya pelestarian budaya dilakukan secara sistematis melalui edukasi, dokumentasi, serta pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda agar tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.

Salah satu strategi utama dalam pelestarian budaya adalah dengan mengembangkan program pagelaran dan festival budaya tahunan. Acara ini tidak hanya menjadi ajang ekspresi seni dan budaya lokal, tetapi juga menjadi sarana promosi wisata budaya yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Festival-festival ini dapat mencakup pertunjukan seni tradisional, pameran batik, kuliner khas, serta berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya yang menjadi kebanggaan masyarakat Pekalongan. Dokumentasi dan inventarisasi seni budaya daerah dilakukan agar kekayaan budaya daerah tercatat dengan baik dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Upaya ini juga harus diiringi dengan mendorong pengakuan budaya daerah sebagai warisan budaya tak benda, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga semakin memperkuat posisi Pekalongan sebagai kota yang kaya akan budaya.

Penyediaan ruang publik yang dapat menjadi wadah bagi komunitas seni dan budaya juga merupakan langkah penting dalam mendukung kreativitas masyarakat. Ruang-ruang ini harus didesain sebagai tempat interaksi, pembelajaran, dan pengembangan bakat seni, sehingga budaya lokal dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya.

Misi ini tidak hanya berusaha melestarikan budaya warisan leluhur, tetapi juga mengembangkannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Budaya yang

terjaga dengan baik akan menjadi bagian dari identitas masyarakat serta berkontribusi dalam menciptakan kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan, berlandaskan nilai-nilai Akhlaqul Karimah.

8. Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah.

Keamanan dan ketertiban adalah kunci pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan warga. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan stabilitas sosial. Kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang keamanan diperkuat melalui koordinasi intensif dan pemanfaatan teknologi. Peran tokoh agama dan masyarakat juga penting dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ketertiban serta memperkuat nilai kebersamaan.

Selain itu, menjaga kerukunan umat beragama dan semangat gotong royong menjadi prioritas dalam menciptakan harmoni sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam keamanan lingkungan akan didorong agar ketertiban semakin terjaga. Dengan misi ini, Kota Pekalongan berkomitmen mewujudkan keamanan wilayah yang didukung oleh kebersamaan, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan visi kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan Akhlaqul Karimah.

9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi kunci dalam menghadapi tantangan seperti pencemaran, perubahan iklim, dan pengelolaan sampah yang efektif. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kota melalui program edukasi, kampanye lingkungan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan pengurangan limbah plastik juga menjadi prioritas untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain itu, Kota Pekalongan akan mendorong penggunaan energi terbarukan, pelestarian ruang hijau, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak agar pembangunan berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan komunitas lingkungan, akan diperkuat untuk menciptakan inovasi dalam menjaga kelestarian alam. Dengan misi ini, Kota Pekalongan bertekad menjadi kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan, selaras dengan visi pembangunan yang maju, sejahtera, dan berlandaskan Akhlaqul Karimah.

4.1.3. Tujuan Dan Sasaran

Sejalan dengan penyampaian amanat untuk menyampaikan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2030, maka untuk tujuan dan sasaran juga mengakomodir tujuan dan sasaran pada periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut: Keselarasan tujuan dan sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

ASTA CITA	Visi Misi RPJMD Prov.Jawa Tengah Tahun 2025-2029	RKPD 2025		Visi Misi Kepala Daerah		Perubahan RKPD 2025	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
2	3	4	5	6	7	8	9
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Layanan Dasar yang inklusif Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya penanganan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	- Optimalnya pengarusutamaan gender - Optimalnya pengarusutamaan anak - Menurunnya tingkat kemiskinan - Menurunnya angka pengangguran	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya penanganan kemiskinan
		Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompetitif dan produktif	- Meningkatnya akses pendidikan - Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan - Optimalnya pengarusutamaan gender - Optimalnya pengarusutamaan hak anak - Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan akhlakul karimah	- Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter - Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompetitif dan produktif	- Meningkatnya akses pendidikan - Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan - Optimalnya pengarusutamaan gender - Optimalnya pengarusutamaan hak anak - Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya indeks keluarga sehat			Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya indeks keluarga sehat
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri Dan berkelanjutan.	Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan	- Meningkatnya ekspor dan menurunnya ketergantungan import - Meningkatnya belanja pemerintah - Meningkatnya investasi daerah yang didukung kondusivitas	Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

ASTA CITA	Visi Misi RPJMD Prov.Jawa Tengah Tahun 2025-2029	RKPD 2025		Visi Misi Kepala Daerah		Perubahan RKPD 2025	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
2	3	4	5	6	7	8	9
Memantapkan sistem Pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.				wilayah, penyediaan sarpras yang berkelanjutan - Meningkatnya konsumsi rumah tangga		
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan						
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, Mendorong kewirausahaan, mengembangkan	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh			Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh
		Menurunkan luas genangan banjir dan rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob			Menurunkan luas genangan banjir dan rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air

ASTA CITA	Visi Misi RPJMD Prov.Jawa Tengah Tahun 2025-2029	RKPD 2025		Visi Misi Kepala Daerah		Perubahan RKPD 2025	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
2	3	4	5	6	7	8	9
industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar	- Optimalnya kualitas lahan - Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang - Optimalnya layanan air minum - Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan - Meningkatnya layanan transportasi perkotaan			Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar	- Optimalnya kualitas lahan - Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang - Optimalnya layanan air minum - Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan - Meningkatnya layanan transportasi perkotaan
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	- Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance) - Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance) - Meningkatnya kualitas manajemen ASN - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan - Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan - Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945	- Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital - Terwujudnya ASN yang berkualitas - Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital - Terwujudnya birokrasi yang kolaboratif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	- Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance) - Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance) - Meningkatnya kualitas manajemen ASN - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan - Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan - Meningkatnya Kualitas Pengawasan

4.1.3.1. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

- a. Meningkatnya indeks keluarga sehat
- b. Meningkatnya penanganan kemiskinan

4.1.3.2. Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

TUJUAN

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompetitif dan produktif

SASARAN

- a. Meningkatnya akses pendidikan
- b. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan
- c. Optimalnya pengarusutamaan gender
- d. Optimalnya pengarusutamaan hak anak
- e. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif

4.1.3.3. Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman

TUJUAN

- a. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman

SASARAN

- a. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

4.1.3.4. Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

TUJUAN

- a. Menurunkan luas genangan banjir dan rob
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- c. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar

SASARAN

- a. Optimalnya penanganan banjir dan rob
- b. Menurunnya tingkat pencemaran air
- c. Optimalnya kualitas lahan
- d. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
- e. Optimalnya layanan air minum
- f. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan

g. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan

4.1.3.5. Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

TUJUAN

a. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat

SASARAN

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

4.1.3.6. Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

TUJUAN

a. Melestarikan Seni Budaya

b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan

SASARAN

a. Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan

b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

4.1.3.7. Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

TUJUAN

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

SASARAN

a. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)

b. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)

c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN

d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

e. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Penjabaran visi misi Wali Kota Pekalongan, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2025-2029, dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.

**Tabel 4.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi
RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026
Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat												
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			Tahun	74,38	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	74,66
		1. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
			Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
			Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan			persen	7,17	6,94	6,71	6,50	6,29	6,09	5,89	5,89
		2. Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan												
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia			indeks	74,98	75,10	75,32	75,52	75,71	75,88	76,03	76,03
		1. Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
		2. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3. Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		4. Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
	Tingkat Pengangguran Terbuka			persen	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31	6,15	5,99	5,99
		1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman												
1. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen			persen	55,56	55,56	62,96	74,07	77,78	88,89	100,00	100,00
		1. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan												
1. Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob			persen	37,27	33,11	26,50	22,12	19,58	17,02	12,17	12,17
		1. Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	1027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			indeks	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,90
		1. Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
		2. Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61
		3. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar			persen	88,11	88,44	88,77	89,11	90,37	90,71	91,04	91,04

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar		1. Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
		3. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (<i>Level Of Service</i>)	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
			Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal												
1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita			Rp. Juta/ jiwa/tahun	35,22	35,47 - 35,51	35,97 - 36,21	36,56 - 36,92	37,16 - 37,82	39,21	40,65	40,65
		1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah												
1. Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial			kasus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government												
	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	n/a	70,69	71,69	72,69	73,69	74,69	75,69	75,69

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien		1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25
		2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50
		3. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07
		5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK <i>Outcome</i>)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
			Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja ‘*impact*’ yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Wali Kota Pekalongan pada tahun 2026. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Pekalongan.

Tabel 4.3 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat					
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. Indeks Keluarga Sehat 2. AKI 3. AKB 4. AKABA	Persentase capaian SPM Kesehatan	Kesehatan
				Skor PPH konsumsi	Pangan
				Total Fertility Rate	Keluarga Berencana
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan					
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan
		Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Pendidikan
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Perpustakaan
		Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Tenaga Kerja
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman					
Meningkatkan perumahan dan	Persentase kelurahan dengan	Meningkatnya kawasan perumahan dan	Persentase kawasan perumahan dan	Persentase jumlah rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
permukiman yang nyaman	kawasan kumuh kurang dari 10 persen	permukiman yang tidak kumuh	permukiman yang tidak kumuh	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan					
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Persentase tingkat pencemaran air	Lingkungan Hidup
		Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Lingkungan Hidup
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pertanahan
Menjamin layanan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup
				Pengembangan Sarana Persampahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kapasitas Jalan Perkotaan	Perhubungan
			Persentase keterhubungan jalan	Persentase jalan kota dalam keadaan Mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal					
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Penanaman Modal
				Pertumbuhan Industri	Perindustrian
				Nilai ekspor perdagangan	Perdagangan
				Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Koperasi-UMKM
				Nilai produksi tanaman pangan, holtikultura dan peternakan	Pertanian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (IKK Outcome)	Kelautan dan Perikanan
				Tingkat Kunjungan Wisata	Pariwisata
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah					
Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persentase peningkatan kelompok budaya	Kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase etnis/suku/agama/or mas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Kesbangpol
				Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Kesbangpol
				Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Trantibum
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Komunikasi dan Informatika
				Tingkat kematangan layanan data terbuka pada satu data terpadu daerah	Statistik
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persandian
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	IKM Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat OPD	Semua Urusan
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks Profesionalitas ASN	Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Perencanaan
		Persentase capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Keuangan
				Rasio PAD	Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Pengawasan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	Pengawasan

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2025

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

**Tabel 4.4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kualitas keluarga sehat
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan		
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Meningkatnya akses pendidikan	Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	
	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	
Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman		
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan
Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan		
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	
	Optimalnya kualitas lahan	

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Terwujudnya rumusan dan pelasaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	
Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	optimalnya layanan air minum	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
	optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	
Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah		
Melestarikan Seni Budaya	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan

pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 bertemakan "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan;

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 yaitu 'Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045'. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Pembangunan nasional jangka menengah tahun 2025-2029 yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju
 - ✓ Penumbuhan ekonomi dan 5.05 (2024) menjadi 5.3 (2025) dan menuju 8% (2029).
 - ✓ GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5,410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029).
 - ✓ Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7.9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029).
 - ✓ Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,57f (2023) menjadi 20.8* (m25) dan 21,9% (2029).
- b. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat
 - ✓ Global Power Indeks meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029).
- c. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
 - ✓ Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8,0% (2025) dan 4,5-5,0% (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5% (2026)
 - ✓ Rasio gini turun dari 0,379 (Mar 2024) menjadi 0,378 - 0,382 (2025) dan 0,372 - 0,375 (2029).
 - ✓ Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029).
- d. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
 - ✓ Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029).
- e. Intensitas Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*
 - ✓ Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029).
 - ✓ Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029).

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Berdasarkan RPD Jawa Tengah Tahun 2024-2026, tema pembangunan daerah adalah “**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**”. Adapun tema pembangunan tahun 2025 sesuai Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah “**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

1. PD 1: a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:

- a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
 - b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
 - c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
2. PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada upaya:
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatan kualitas pembelajaran berbasis softskill dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
 - b. Meningkatkan pelayanan Kesehatan sesuai standart melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi serta kecerdasan buatan; Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan melalui kampanye perubahan perilaku, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi); Peningkatan kapasitas SDMK melalui pelatihan/seminar/ workshop/ magang / yang lainnya yang mendukung program prioritas; Peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan Surveilans berbasis laboratorium; Penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; Peningkatan dukungan kab/kota dalam penyediaan layanan program prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; Revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; Pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas.
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet.
 - d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
 - e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
 - f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta

- peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai platform termasuk platform digital;
- g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
 - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. PD 3: Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada upaya:
- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
 - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
 - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

4. PD 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada upaya:
 - a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
 - b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui co-creator.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. PDRB per Kapita sebesar 48,53-48,66 juta rupiah;
2. Angka kemiskinan sebesar 9,66 - 9,00 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,362;
4. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90-5,60 persen;
5. Inflasi sebesar $2,5 \pm 1$ persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,81-4,42 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,52 persen;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 59,92;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,68;
13. Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 ditujukan untuk “**Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-Nilai Religiusitas**”, dengan prioritas dan fokus pembangunan meliputi:

1. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan fokus pada:
 - a. Mendorong upaya percepatan penurunan stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi;
 - b. Optimalisasi layanan dan fasilitas kesehatan serta peran masyarakat dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular;
 - c. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, termasuk mendorong sinergitas RS swasta.
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada:
 - a. Pengendalian inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID;

- b. Penguatan dan optimalisasi peran TKPK dalam rangka mendorong kerja sama multi-sektoral;
 - c. Peningkatan upaya kolaborasi konstruktif dengan masyarakat;
 - d. Penguatan pemanfaatan data kemiskinan sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan, dengan fokus pada:
- a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang disertai peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan secara berkelanjutan;
 - b. Perluasan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan/atau pendidikan inklusi;
 - c. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan;
 - d. Pemenuhan Wajar 13 tahun terutama pada 1 tahun usia pra sekolah dan pendidikan kesetaraan.
4. Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing, dengan fokus pada:
- a. Integrasi dan perluasan pelatihan, sertifikasi, penempatan tenaga kerja terpadu dalam rangka mengurangi kesenjangan pasar kerja serta menangkap peluang perkembangan di Kawasan Petanglong dan sekitarnya;
 - b. Pelatihan kerja secara inklusif dan berperspektif gender.
5. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan fokus pada:
- a. Mendorong keterlibatan dan kontribusi perempuan, baik secara individu maupun melalui kelompok/organisasi dalam memainkan peranan aktif di kehidupan ekonomi dan politik;
 - b. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka menuju kesejahteraan dan kemandirian.
7. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada:
- a. Optimalisasi sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, LSM dan masyarakat dalam penanganan banjir/rob;
 - b. Mendorong pelaku usaha yang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan;
 - c. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang kota secara berkelanjutan.
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:
- a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta mendorong optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;

- b. Mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dari sumbernya dan optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS 3R;
 - c. Peningkatan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan fokus pada:
- a. Mendorong kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dan mensukseskan pembangunan pariwisata;
 - b. Peningkatan sarana prasarana pendukung pariwisata dalam rangka penguatan ekonomi lokal;
 - c. Penguatan sub sektor perdagangan dan jasa sebagai kelanjutan dari dampak positif pembangunan Pasar Banjar Sari;
 - d. Penguatan ekonomi kreatif berbasis pada industri batik dengan seluruh rantai nilainya.
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal, dengan fokus pada mendorong SDM budaya untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengayaan penyelenggaraan event budaya.
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada peningkatan pelibatan stakeholder dan kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan dengan pondasi agama.
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi penerapan SPBE, penguatan keterbukaan informasi publik, sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan perluasan digitalisasi daerah dan profesionalisme ASN;
 - b. Mendorong optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2025 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 - 6,00 persen;
- b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
- c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,70 - 6,23 persen;
- d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,39;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,05 - 4,47 persen.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2025. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2025	
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2025	
Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah			penguatan implementasi <i>reward and punishment</i>
Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan			
Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)	Peningkatan Derajat Kesehatan	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
Masih tingginya penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja		4	Peningkatan <i>link and match</i> ketenagakerjaan untuk menyiapkan kualitas tenaga kerja berdaya saing
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan			

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2025	
Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)			
Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal	10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2025 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025		
1	2	3	4	5	6
1. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan fokus pada:					
a. Mendorong upaya percepatan penurunan stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi; b. Optimalisasi layanan dan fasilitas kesehatan serta peran masyarakat dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular; c. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, termasuk mendorong sinergitas RS swasta.	1. AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,31 per 1.000 KH	1. 9,31 per 1.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,30 per 1.000 KH	2. 7,30 per 1.000 KH	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 92,08 per 100.000 KH	3. 92,08 per 100.000 KH	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	4. Indeks Keluarga Sehat			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinperpa
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada:					
a. Pengendalian inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID; b. Penguatan dan optimalisasi peran TKPK dalam rangka mendorong kerja sama multi-sektoral; c. Peningkatan upaya kolaborasi konstruktif dengan masyarakat; d. Penguatan pemanfaatan data kemiskinan sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	3,00 persen	3,00 persen	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
				Program Pemberdayaan Sosial	
				Program Rehabilitasi Sosial	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan, dengan fokus pada:					
a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang disertai peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,75 tahun	9,75 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025		
1	2	3	4	5	6
serta peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan secara berkelanjutan; b. Perluasan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan /atau pendidikan inklusi; c. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.					
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00 persen	100,00 persen	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Peningkatan <i>link and match</i> ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing, dengan fokus pada:					
a. Integrasi dan perluasan pelatihan, sertifikasi, penempatan tenaga kerja terpadu dalam rangka mengurangi kesenjangan pasar kerja serta menangkap peluang perkembangan di Kawasan Petanglong dan sekitarnya; b. Pelatihan kerja secara inklusif dan berperspektif gender.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,49 persen	74,49 persen	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
				Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Program Hubungan Industrial	
5. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi, terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan fokus pada:					
a. Mendorong keterlibatan dan kontribusi perempuan, baik secara individu maupun melalui kelompok/organisasi dalam memainkan peranan aktif di kehidupan ekonomi dan politik; b. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31	65,31	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan	DPMPPA
				2. Kategori Kota Layak Anak	
	6. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada:				
Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka menuju kesejahteraan dan kemandirian.	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	98,44 persen	98,44 persen	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
				Program Kawasan Permukiman	
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025		
1	2	3	4	5	6
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada:					
a. Optimalisasi sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, LSM dan masyarakat dalam penanganan banjir/rob; b. Mendorong pelaku usaha yang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan; c. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang kota secara berkelanjutan.	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	790,00 Ha	790,00 Ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
	2. Indeks Kualitas Air	59,42	59,42	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DLH
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	3. Indeks Kualitas Lahan	37,65	37,65	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	DLH
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	7 regulasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
				Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	DPUPR
				Program Penataan Bangunan Gedung	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:					
a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta mendorong optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum; b. Mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dari sumbernya dan optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R; c. Peningkatan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00 persen	100,00 persen	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	2. Persentase pelayanan sampah	72,12 persen	72,12 persen	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
	3. Tingkat pelayanan jalan (<i>Level Of Service</i>)	B	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
4. Persentase keterhubungan jalan	100 persen	100 persen	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR	
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan fokus pada:					

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025		
1	2	3	4	5	6
a. Mendorong kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dan mensukseskan pembangunan pariwisata; b. Peningkatan sarana prasarana pendukung pariwisata dalam rangka penguatan ekonomi lokal; c. Penguatan sub sektor perdagangan dan jasa sebagai kelanjutan dari dampak positif pembangunan Pasar Banjar Sari; d. Penguatan ekonomi kreatif berbasis pada industri batik dengan seluruh rantai nilainya.	Pertumbuhan ekonomi	5,44 - 6,0 persen	5,44 - 6,0 persen	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinperinaker
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				Program Pengembangan Ekspor	
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
				Program Pengembangan UMKM	DKP
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
				Program Pemasaran Pariwisata	
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025		
1	2	3	4	5	6
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinperpa
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Program Perizinan Usaha Pertanian	
				Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal, dengan fokus pada:					
Mendorong SDM budaya untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengayaan penyelenggaraan event budaya.	Persentase Penyelenggaraan <i>Event</i> Budaya	122,00 persen	100,00 persen	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
				Program Pembinaan Sejarah	
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta <i>stakeholder</i> dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:					
Peningkatan pelibatan stakeholder dan kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan dengan pondasi agama.	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00 persen	100,00 persen	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i> , dengan fokus pada:					

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025		
1	2	3	4	5	6
a. Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi penerapan SPBE, penguatan keterbukaan informasi publik, sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan perluasan digitalisasi daerah dan profesionalisme ASN; b. Mendorong optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas menuju WBK/WBBM.	1. Indeks SPBE	3,34	3,34	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinkominfo
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	2. IKM Kota	90,70 persen	90,70 persen	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dindukcapil
				Program Pendaftaran Penduduk	
				Program Pencatatan Sipil	
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sekretariat DPRD
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMPPA
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025		
1	2	3	4	5	6
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol P3KP
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	3. Nilai KIP Tingkat Kota	97,20 Skor	97,20 Skor	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	4. Nilai SAKIP Kota	75,57 Skor	75,57 Skor	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapperida
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
				Program Perekonomian dan Pembangunan	
	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	WTP	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	6. Indeks Merit System	340,00	340,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	7. Maturitas SPIP	3,80	3,80	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	
8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	7,00	7,00			

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, maka target indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja daerah (IKD) dan indikator program pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut.

**Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan
Pada Perubahan RKPD Tahun 2025**

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,40	0,40	Tetap
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	92,08	92,08	Tetap
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,30	7,30	Tetap
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,31	9,31	Tetap
5	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	3,00	3,00	Tetap
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,75	9,75	Tetap
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	65,31	65,31	Tetap
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	Tetap
9	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Tetap
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	74,49	74,49	Tetap
11	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	98,44	98,44	Tetap
12	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	790,00	790,00	Tetap
13	Indeks Kualitas Air	indeks	59,42	59,42	Tetap
14	Indeks Kualitas Lahan	indeks	37,65	37,65	Tetap
15	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	7,00	Tetap
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	Tetap
17	Persentase pelayanan sampah	persen	72,12	72,12	Tetap
18	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B	Tetap
19	Persentase keterhubungan jalan	persen	100,00	100,00	Tetap
20	Pertumbuhan ekonomi	persen	4,55	4,55	Tetap
21	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	122,00	100,00	disesuaikan
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	Tetap
23	Indeks SPBE	indeks	3,34	3,34	Tetap
24	IKM Kota	persen	90,70	90,70	Tetap
25	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	97,20	97,20	Tetap
26	Indeks Merit System	indeks	340,00	340,00	Tetap
27	Nilai SAKIP Kota	skor	75,57	75,57	Tetap
28	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	WTP	Tetap
29	Maturitas SPIP	nilai	3,80	3,80	Tetap
30	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	7,00	7,00	Tetap

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2025

**Tabel 4.8 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025**

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7
ASPEK KESEJAHTERAAN						
A. MASYARAKAT						
- Usia Harapan Hidup	Tahun	74,62	74,62	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Angka Kemiskinan	persen	6,70 - 6,23	6,70 - 6,23	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Indeks Pembangunan Manusia	indeks	77,39	77,39	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,05 – 4,47	5,05 – 4,47	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	88,89	88,89	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	persen	17,02	17,02	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	90,71	90,71	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- PDRB Perkapita	Rp. Juta/jiwa/ tahun	46,43	46,43	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Jumlah konflik sosial	kasus	0	0	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,40	0,40	Tetap	IKU Kota	Kota
- Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	92,08	92,08	Tetap	IKU Kota	Kota
Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,30	7,30	Tetap	IKU Kota	Kota
Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,31	9,31	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	3,00	3,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	65,31	65,31	Tetap	IKU Kota	Kota
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	74,49	74,49	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	98,44	98,44	Tetap	IKU Kota	Kota
- Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	790	790	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase pelayanan sampah	persen	72,12	72,12	Tetap	IKU Kota	Kota
- Pertumbuhan ekonomi	persen	5,44 - 6,00	5,44 - 6,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100	100	Tetap	IKU Kota	Kota
B. ASPEK PELAYANAN UMUM						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PENDIDIKAN						
- Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
- Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
URUSAN KESEHATAN						
- Persentase capaian SPM Kesehatan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kesehatan

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	persen	82,98	82,98	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	persen	1,60	1,60	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	regulasi	99,89	99,89	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Pengembangan Sarana Persampahan	persen	80,00	80,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
- Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	persen	99,00	99,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS						
- Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	persen	90,00	90,00	Tetap	IKU Renstra	Satpol PP
- Persentase korban bencana yang ditangani	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	BPBD
- Persentase penanganan bencana kebakaran	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Satpol PP
URUSAN SOSIAL						
- Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	5,00	5,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN TENAGA KERJA						
- Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,33	52,33	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
- Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	65,31	65,31	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Skor Kota Layak Anak	Skor	769,90	769,90	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PANGAN						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7
- Persentase penanganan daerah rawan pangan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pangan
URUSAN PERTANAHAN						
- Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
- Persentase tingkat pencemaran air	Persen	42,86	42,86	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0,50	0,50	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	70,29	70,29	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Tertib Hukum Lingkungan	Persen	45,00	45,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	90,46	90,46	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
- Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	9,49	9,49	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
- Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67,60	67,60	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PERHUBUNGAN						
- Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	persen	28,00	28,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
- Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3,40	3,40	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
- Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88,31 - 100)	Sangat Baik (Nilai 88,31 - 100)	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
URUSAN KOPERASI DAN UKM						
- Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	8,72	8,72	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
URUSAN PENANAMAN MODAL						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7
- Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	216,78	216,78	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
URUSAN KEBUDAYAAN						
- Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	1,48	1,48	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
URUSAN PERPUSTAKAAN						
- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	indeks	20,52	20,52	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
URUSAN KEARSIPAN						
- Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	indeks	92,00	92,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1,39	1,39	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	15,00	15,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
URUSAN STATISTIK						
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	98,50	98,50	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Statistik
URUSAN PERSANDIAN						
- Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	II	II	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Persandian
URUSAN PILIHAN						
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN						
- Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	ton	15.446	15.446	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
URUSAN PARIWISATA						
- Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	1.200.000	1.200.000	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
URUSAN PERTANIAN						
- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Miliar	255,45	255,45	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanian
URUSAN PERINDUSTRIAN						
- Pertumbuhan Industri	persen	2,30	2,30	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
URUSAN PERDAGANGAN						
- Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	27,24	27,24	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
- Persentase capaian kinerja pembangunan	persen	96,70	96,70	Tetap	IKU Renstra	Setda

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7
SEKRETARIAT DPRD						
- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Set DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PERENCANAAN						
- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Perencanaan
KEUANGAN						
- Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
- Rasio PAD	persen	2,05	2,05	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
KEPEGAWAIAN						
- Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	90,00	90,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Kepegawaian
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
- Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	persen	40.00	40.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pendidikan dan Pelatihan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
- Persentase laporan hasil litbang	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Litbang
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
INSPEKTORAT DAERAH						
- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	persen	87,10	87,10	Tetap	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
- Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	15,00	15,00	Tetap	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN						
- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Utara
- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Selatan
- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Barat
- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Timur
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
- Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
- Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
C. ASPEK DAYA SAING						
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50,89	50,89	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	100,00	Tetap	Tujuan Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025			
1	2	3	4	5	6	7
- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	74,69	74,69	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,75	9,75	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Tetap	IKU Kota	Kota
- Indeks Kualitas Air	indeks	59,42	59,42	Tetap	IKU Kota	Kota
- Indeks Kualitas Lahan	indeks	37,65	37,65	Tetap	IKU Kota	Kota
- Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7	7	Tetap	IKU Kota	Kota
- Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase keterhubungan jalan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	122,00	100,00	disesuaikan	IKU Kota	Kota
- Indeks SPBE	indeks	3,34	3,34	Tetap	IKU Kota	Kota
- IKM Kota	persen	90,70	90,70	Tetap	IKU Kota	Kota
- Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	97,20	97,20	Tetap	IKU Kota	Kota
- Indeks Merit System	indeks	340,00	340,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Nilai SAKIP Kota	skor	75,57	75,57	Tetap	IKU Kota	Kota
- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	WTP	Tetap	IKU Kota	Kota
- Maturitas SPIP	nilai	3,80	3,80	Tetap	IKU Kota	Kota
- Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	7	7	Tetap	IKU Kota	Kota

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2025

Tabel 4.9 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Kesehatan					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	92,00	92,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	persen	90,00	90,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	persen	95,00	95,00	Tetap
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	persen	97,00	97,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	persen	94,00	94,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100.00	100.00	Tetap
RSUD BENDAN					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	persen	90,90	90,90	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	80,00	80,00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	12,27	17,23	Disesuaikan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	70,48	70,48	Tetap
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	18,44	18,44	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	85,48	85,48	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	18,53	18,53	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	50,00	50,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	121,39	72,47	Disesuaikan
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	2.075,41	2.075,41	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	63,04	63,04	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	persen	85,00	85,00	Tetap
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	persen	75,00	75,00	Tetap
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	persen	53,73	53,73	Tetap
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	persen	12,00	12,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	persen	13,00	13,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Lingkungan Hidup					
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	0.00	0.00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase limbah yang diolah	persen	45,97	45,97	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2,39	2,39	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	13.33	13.33	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	16.67	16.67	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	50.00	50.00	Tetap
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	persen	0,30	0,30	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	88,10	88,10	Tetap
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	93,85	93,85	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	12,00	12,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak					
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	persen	9,24	9,24	Tetap
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	persen	15,01	15,01	Tetap
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	persen	48,15	48,15	Tetap
	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	persen	83,33	83,33	Tetap
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	persen	88,89	88,89	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	persen	97,75	97,75	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Perhubungan					

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	97,00	97,00	Tetap
	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0.44	0.44	Tetap
	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	0,74	0,74	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Komunikasi dan Informatika					
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3,20	3,20	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen	3,74	3,74	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1.00	1.00	Tetap
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	3.025,00	3.025,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	7,09	7,09	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Indeks	25,00	28,00	Disesuaikan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	persen	100,00	100,00	Tetap
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	80,00	80,00	Tetap
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Kelautan dan Perikanan					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	1.00	1.00	Tetap
	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	1.00	1.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	3,00	3,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12.20	12.20	Tetap
	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	2.00	2.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	persen	94,81	94,81	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	40,00	40,00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	persen	95,74	95,74	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum batik	persen	8,29	8,29	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	persen	12,00	12,00	Tetap
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	persen	41,98	41,98	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk bereksprei, berpromosi dan berinteraksi	persen	51,28	51,28	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	80,00	80,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Pertanian dan Pangan					
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4,70	20,00	Disesuaikan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	86,40	86,40	Tetap
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55,78	55,78	Tetap
	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	199,66	199,66	Tetap
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	5.00	5.00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	5.00	5.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	32,36	32,36	Tetap
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	10,48	10,48	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	12,27	12,27	Tetap
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	76,93	76,93	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	7,79	7,79	Tetap
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	81,99	81,99	Tetap
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	6,42	6,42	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja					
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	persen	1,15	1,15	Tetap
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	27,93	27,93	Tetap
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	52,00	52,00	Tetap
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	75,34	75,34	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	25.00	25.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Sekretariat Daerah					
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	persen	100.00	100.00	Tetap
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	6.00	6.00	Tetap
	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100.00	100.00	Tetap
Sekretariat DPRD					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
	dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100.00	100.00	Tetap
	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	75,00	75,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah					
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	persen	7,50	7,50	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	persen	5.00	5.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS berkembang karier	persen	80,00	80,00	Tetap
	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90.00	90.00	Tetap
	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	80.00	80.00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Inspektorat Daerah					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85.00	85.00	Tetap
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	nilai	3.00	3.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Utara					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Selatan					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Barat					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Timur					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16.00	16.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2025

4.2.4. Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional

Dukungan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terhadap prioritas pembangunan nasional dilakukan melalui penyelarasan sebagaimana disajikan pada sub bab 1.3.4. Selanjutnya, dukungan tersebut dijabarkan lebih detil melalui program-program yang mendukung prioritas nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen	100 persen	1.946.743.000	2.006.743.000	1.984.808.000	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga	16 lembaga	1.052.090.000	1.717.090.000	1.699.290.000	Bakesbangpol
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 01						2.998.833.000	3.723.833.000	3.684.098.000	
02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen	100 persen	220.900.000	440.900.000	570.913.000	Bakesbangpol
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 persen	100 persen	97.837.000	97.837.000	67.527.000	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 persen	100 persen	288.930.000	288.930.000	257.087.000	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	85 persen	85 persen	4.968.603.000	5.236.802.000	5.119.892.000	Satpol P3KP
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 02						5.576.270.000	6.064.469.000	6.015.419.000	
03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 persen	100 persen	1.352.512.000	1.702.512.000	1.728.749.000	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	121,39 hektar	72,47 hektar	24.022.630.000	25.896.835.000	29.017.925.000	Dinperkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2075,41 hektar	2075,41 hektar	10.730.514.000	6.840.514.000	6.815.714.000	Dinperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	63,04 persen	63,04 persen	12.049.520.000	7.823.356.000	5.800.485.000	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen	50 persen	6.540.000	99.800.000	59.300.000	Dinperkim

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Melalui Peran Aktif Koperasi	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	12,27 persen	17,23 persen	2.549.260.000	2.173.514.000	2.517.114.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	8.455.948.000	8.441.918.000	8.367.918.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	70,48 persen	70,48 persen	4.755.600.000	4.402.600.000	3.672.655.000	DPU-PR
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45,97 persen	45,97 persen	1.167.896.000	1.167.896.000	1.152.446.000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	13,33 persen	1.640.000	1.640.000	1.115.000	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,939 persen	2,939 persen	3.635.404.500	3.489.103.000	3.449.336.000	DLH
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen	100 persen	438.000.000	644.720.000	688.828.000	Dinperkim
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,44 persen	18,44 persen	1.305.880.000	1.775.544.000	1.875.369.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	18,53 persen	18,53 persen	108.640.000	108.640.000	112.300.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100 persen	100 persen	301.404.000	301.404.000	293.004.000	DPU-PR
	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan regional yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,3 persen	0,3 persen	11.688.874.000	12.410.054.000	32.111.774.000	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	80 persen	80 persen	5.092.114.000	2.411.000.000	3.951.000.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	90,90 persen	90,90 persen	2.692.452.000	2.608.052.000	1.596.588.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 persen	0,44 persen	5.747.810.000	19.995.052.000	20.263.055.000	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	97,00 persen	97,00 persen				
			Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,74 persen	0,74 persen				

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Provinsi Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	85,48 persen	85,48 persen	16.084.720.000	18.747.730.000	16.292.644.000	DPU-PR
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 03						112.187.358.500	121.041.884.000	139.767.319.000	
04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	90 persen	90 persen	53.973.800.000	75.973.115.000	76.220.885.000	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92 persen	92 persen				Dinas Kesehatan
			Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100 persen	100 persen				Dinas Kesehatan
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100 persen	100 persen				Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	95 persen	95 persen	758.562.000	575.600.000	575.600.000	Dinas Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 persen	100 persen				
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	97 persen	97 persen	120.784.000	491.125.000	483.625.000	Dinas Kesehatan
			Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100 persen	100 persen				Dinas Kesehatan
			Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100 persen	100 persen				Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	94 persen	94 persen	1.611.130.000	2.617.080.000	2.517.080.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,70 persen	20,00 persen	296.439.000	416.439.000	378.373.000	Dinperpa

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen	100 persen	35.881.000	35.881.000	24.361.000	Dinperpa
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	86,4 persen	86,4 persen	27.450.000	27.450.000	26.500.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	100 persen	247.600.000	205.380.000	205.380.000	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	12 persen	12 persen	1.859.294.000	1.746.610.000	1.742.610.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	13 persen	13 persen	1.955.520.000	1.617.120.000	1.614.420.000	Dinsos P2KB
	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen	100 persen	56.788.452.000	55.336.333.000	57.799.333.000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	100 persen	15.485.800.000	15.722.300.000	14.795.323.000	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	25,00 persen	28,00 persen	741.097.000	741.097.000	705.041.000	Dinarpus
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen	100 persen	83.800.000	83.800.000	81.800.000	Dinas Pendidikan
	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9,24 persen	9,24 persen	150.940.000	165.940.000	190.845.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15,01 persen	15,01 persen	78.062.000	73.612.000	64.459.000	DPMPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	48,15 persen	48,15 persen	215.615.000	215.615.000	161.820.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100 persen	100 persen	69.644.000	58.895.000	50.211.000	DPMPPA
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 04						134.499.870.000	156.103.392.000	157.637.666.000	
05. Melanjutkan Hilirisasi dan	09. Peningkatan peran masyarakat dalam	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang	1 dokumen	1 dokumen	51,180,000	32.854.000	42.854.000	DPMPTSP

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan		Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	28.930.000	28.930.000	28.930.000	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3025 dokumen	3025 dokumen	739.790.000	765.794.000	733.874.000	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	7,09 milyar	7,09 milyar	638.003.000	168.510.000	168.340.000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	98.368.000	98.368.000	103.368.000	DPMPTSP
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	75,34 persen	389.560.000	269.560.000	233.577.000	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25 persen	25 persen	7.470.000	7.470.000	4.470.000	Dinperinaker
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	33.940.000	33.940.000	29.690.000	Dinperinaker
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen	100 persen	8.682.729.000	10.482.729.000	12.692.721.000	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 persen	100 persen	102.960.000	102.960.000	94.801.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen	7,99 persen	98.970.000	98.970.000	93.970.000	Dindagkop UKM

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 persen	81,99 persen	279.022.000	279.022.000	244.352.000	Dindagkop UKM
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 persen	6,42 persen	969.080.000	969.080.000	972.588.000	Dindagkop UKM
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93 persen	76,93 persen	6.330.000	6.330.000	5.571.000	Dindagkop UKM
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen	32,36 persen	47.180.000	97.180.000	237.765.000	Dindagkop UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	10,48 persen	10,48 persen	14.600.000	14.600.000	105.485.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 persen	12,27 persen	323.520.000	898.520.000	865.910.000	Dindagkop UKM
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1 persen	1 persen	2.227.388.000	3.319.967.000	3.131.896.000	DKP
			Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1 persen	1 persen				
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3 persen	3 persen	181.988.000	287.188.000	226.838.000	DKP
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	421.938.000	421.938.000	362.933.000	DKP
			Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12, 20 persen	12, 20 persen				
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12 persen	12 persen	3.292.957.000	3.237.957.000	3.173.863.000	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	41,98 persen	41,98 persen	678.342.000	778.342.000	643.534.500	Dinparbudpora

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	51,28 persen	51,28 persen	165.000.000	260.000.000	210.118.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	80 persen	80 persen	712.500.000	1.095.518.000	800.018.000	Dinparbudpora
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,78 miliar rupiah	55,78 miliar rupiah	1.421.483.000	406.483.000	430.828.000	Dinperpa
			Nilai produksi peternakan pertahun	199,66 miliar rupiah	199,66 miliar rupiah				
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen	100 persen	16.466.000	116.466.000	116.466.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5 persen	5 persen	305.194.000	305.194.000	283.232.000	Dinperpa
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	100 persen	13.300.000	13.300.000	12.300.000	Dinperpa
		Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100 persen	100 persen	24.927.000	24.927.000	15.137.000	Dinperpa
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5 persen	5 persen	35.707.000	35.707.000	85.132.000	Dinperpa
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 05					22.008.822.000	24.657.804.000	26.150.561.500		
06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	100 persen	704.500.000	345.250.000	345.092.000	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen	100 persen	191.020.000	102.910.000	103.054.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	75 persen	386.432.000	390.512.000	381.396.000	Dinsos P2KB
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar	100 persen	100 persen	1.720.232.000	1.760.492.000	1.729.610.000	Dinsos P2KB

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing		dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)						
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen	53,73 persen	1.328.740.000	1.492.520.000	1.385.700.000	Dinsos P2KB
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen	1,15 persen	3.355.717.000	5.028.594.000	5.084.795.000	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen	27,93 persen	350.444.000	350.444.000	306.283.000	Dinperinaker
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen	52,00 persen	376.100.000	538.324.000	594.959.000	Dinperinaker
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 06						8.413.185.000	10.009.046.000	9.930.889.000	
07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,20 Indeks	3,20 Indeks	2.318.428.000	2.350.428.000	2.227.292.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 persen	100 persen	86.960.000	86.960.000	86.960.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen	3,74 persen	105.050.000	105.050.000	96.858.000	Dinkominfo
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100 persen	100 persen	1.481.640.000	1.386.790.000	1.358.204.000	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	100 persen	100 persen	328.042.600	328.042.000	318.749.000	Dinarpus
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	80 persen	80 persen				
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan	100 persen	100 persen	149.153.800	149.154.000	138.944.000	Dinarpus

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)						
		Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,10 persen	88,10 persen	313.670.000	316.270.000	307.272.000	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,85 persen	93,85 persen	341.730.000	341.730.000	329.193.000	Dindukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	12 OPD	12 OPD	71.790.000	122.690.000	118.640.000	Dindukcapil
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen	100 persen	27.207.112.000	26.237.346.000	27.706.240.000	Sekretariat DPRD
			Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100 persen	100 persen				
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,81 persen	94,81 persen	1.081.970.000	2.021.970.000	2.241.775.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	40 persen	40 persen	5.477.660.000	7.457.160.000	7.559.270.000	Dinparbudpora
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	83,33 persen	83,33 persen	557.400.000	557.400.000	1.162.250.000	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	88,89 persen	88,89 persen	32.528.000	32.528.000	31.178.000	DPMPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,75 persen	97,75 persen	696.116.000	746.116.000	705.545.000	DPMPPA
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	16,67 persen	29.590.000	129.590.000	374.190.000	DLH

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50 persen	50 persen	244.480.000	603.330.000	659.452.000	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	100 persen	100 persen	44.350.000	44.350.000	42.350.000	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	10.630.000	10.630.000	8.305.000	DLH
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100 persen	100 persen	873.290.000	1.034.290.000	1.022.523.000	Satpol P3KP
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen	100 persen	53.350.000	53.354.000	36.714.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen	100 persen	13.208.391.000	14.579.789.000	15.040.721.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Timur

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen	100 persen	913.464.000	909.662.000	857.142.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen	100 persen	19.980.000	19.980.000	17.455.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen	100 persen	4.542.566.000	5.163.566.000	4.955.756.000	Dinkominfo
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	100 persen	518.436.000	868.436.000	555.818.000	Bapperida
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen	100 persen				
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	75 persen	75 persen				
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 persen	100 persen	437.964.000	437.964.000	592.661.000	Bapperida
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	100 persen				
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 persen	100 persen				

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen	100 persen	501.142.000	501.142.000	516.127.000	Bapperida
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen	100 persen				
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen	100 persen				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	100 persen	633.448.168.100	630.611.151.000	641.526.332.000	Semua OPD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen				
			persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen				
			Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen				Dinkes
			Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen	100 persen				Setda
			Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen	100 persen				
			Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen	100 persen				
			Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen	100 persen				Sekretariat DPRD
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen	18.908.386.000	17.532.386.000	17.518.117.000	Setda
			Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen	100 persen				

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100 persen	100 persen				
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100 persen	100 persen	818.390.000	1.292.110.000	1.053.444.000	Setda
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen	6,00 persen				
			Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100 persen	100 persen				
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,5 persen	7,5 persen	4.000.978.000	4.163.278.000	12.351.721.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	934.850.000	1.011.850.000	950.642.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5 persen	5 persen	1.857.001.000	1.981.951.000	1.804.951.000	BPKAD
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90 persen	90 persen	1.187.200.000	1.187.200.000	1.123.289.000	BKPSDM
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80 persen	80 persen				
			Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	100 persen	100 persen				
			Persentase PNS berkembang karier	80 persen	80 persen				
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100 persen	100 persen	1.534.866.000	1.534.866.000	1.311.025.000	BKPSDM
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3 nilai	3 nilai	380.937.000	380.937.000	498.070.000	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85 persen	85 persen	437.038.000	437.038.000	333.488.000	Inspektorat
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 07						725.154.697.500	726.728.484.000	747.538.663.000	
08. Memperkuat Penyelarasan	10. Peningkatan SDM budaya yang	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	100 persen	1.259.890.000	1.184.740.000	1.339.733.000	Dinparbudpora

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen	100 persen	155.480.000	155.630.000	155.630.000	Dinparbudpora
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	100 persen	31.250.000	31.250.000	31.250.000	Dinparbudpora
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	95,74 persen	95,74 persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Dinparbudpora
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	8,29 persen	8,29 persen	1.623.800.000	1.646.904.000	1.654.331.500	Dinparbudpora
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 08						3.090.420.000	3.038.524.000	3.200.944.500	
Total Dukungan Anggaran						1.013.929.456.000	1.051.367.436.000	1.093.925.560.000	

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.2.5. Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Dukungan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui penyelarasan sebagaimana disajikan pada sub bab 1.3.3. Selanjutnya, dukungan tersebut dijabarkan lebih detil melalui program-program yang mendukung prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	12,27 persen	17,23 persen	2.549.260.000	2.173.514.000	2.517.114.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 persen	100 persen	1.352.512.000	1.702.512.000	1.728.749.000	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	121,39 hektar	72,47 hektar	24.022.630.000	25.896.835.000	29.017.925.000	Dinperkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2075,41 hektar	2075,41 hektar	10.730.514.000	6.840.514.000	6.815.714.000	Dinperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	63,04 persen	63,04 persen	12.049.520.000	7.823.356.000	5.800.485.000	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen	50 persen	6.540.000	99.800.000	59.300.000	Dinperkim
	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,3 persen	0,3 persen	11.688.874.000	12.410.054.000	32.111.774.000	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	80 persen	80 persen	5.092.114.000	2.411.000.000	3.951.000.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	90,90 persen	90,90 persen	2.692.452.000	2.608.052.000	1.596.588.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 persen	0,44 persen	5.747.810.000	19.995.052.000	20.263.055.000	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	97,00 persen	97,00 persen				
			Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,74 persen	0,74 persen				
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	85,48 persen	85,48 persen	16.084.720.000	18.747.730.000	16.292.644.000	DPU-PR

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	51.180.000	32.854.000	42.854.000	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	28.930.000	28.930.000	28.930.000	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3025 dokumen	3025 dokumen	739.790.000	765.794.000	733.874.000	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	7,09 milyar	7,09 milyar	638.003.000	168.510.000	168.340.000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	98.368.000	98.368.000	103.368.000	DPMPTSP
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	75,34 persen	389.560.000	269.560.000	233.577.000	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25 persen	25 persen	7.470.000	7.470.000	4.470.000	Dinperinaker
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	33.940.000	33.940.000	29.690.000	Dinperinaker
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen	100 persen	8.682.729.000	10.482.729.000	12.692.721.000	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 persen	100 persen	102.960.000	102.960.000	94.801.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen	7,99 persen	98.970.000	98.970.000	93.970.000	Dindagkop UKM

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 persen	81,99 persen	279.022.000	279.022.000	244.352.000	Dindagkop UKM
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 persen	6,42 persen	969.080.000	969.080.000	972.588.000	Dindagkop UKM
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93 persen	76,93 persen	6.330.000	6.330.000	5.571.000	Dindagkop UKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen	32,36 persen	47.180.000	97.180.000	237.765.000	Dindagkop UKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	10,48 persen	10,48 persen	14.600.000	14.600.000	105.485.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 persen	12,27 persen	323.520.000	898.520.000	865.910.000	Dindagkop UKM
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1 persen	1 persen	2.227.388.000	3.319.967.000	3.131.896.000	DKP
			Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1 persen	1 persen				
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3 persen	3 persen	181.988.000	287.188.000	226.838.000	DKP
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	421.938.000	421.938.000	362.933.000	DKP
			Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen	12,20 persen				
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12 persen	12 persen	3.292.957.000	3.237.957.000	3.173.863.000	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	41,98 persen	41,98 persen	678.342.000	778.342.000	643.534.500	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	51,28 persen	51,28 persen	165.000.000	260.000.000	210.118.000	Dinparbudpora

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	80 persen	80 persen	712.500.000	1.095.518.000	800.018.000	Dinparbudpora
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,78 miliar rupiah	55,78 miliar rupiah	1.421.483.000	406.483.000	430.828.000	Dinperpa
			Nilai produksi peternakan pertahun	199,66 miliar rupiah	199,66 miliar rupiah				
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen	100 persen	16.466.000	116.466.000	116.466.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5 persen	5 persen	305.194.000	305.194.000	283.232.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	100 persen	13.300.000	13.300.000	12.300.000	Dinperpa
		Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100 persen	100 persen	24.927.000	24.927.000	15.137.000	Dinperpa
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	100 persen	100 persen	35.707.000	35.707.000	85.132.000	Dinperpa
	10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	100 persen	1.259.890.000	1.184.740.000	1.339.733.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen	100 persen	155.480.000	155.630.000	155.630.000	Dinparbudpora
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	100 persen	31.250.000	31.250.000	31.250.000	Dinparbudpora
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	95,74 persen	95,74 persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Dinparbudpora
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	8,29 persen	8,29 persen	1.623.800.000	1.646.904.000	1.654.331.500	Dinparbudpora
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah 01						117.116.188.000	128.404.747.000	149.505.854.000	
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar,	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	90 persen	90 persen	53.973.800.000	75.973.115.000	76.220.885.000	

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92 persen	92 persen				Dinas Kesehatan
			Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100 persen	100 persen				
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100 persen	100 persen				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	95 persen	95 persen	758.562.000	575.600.000	575.600.000	Dinas Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 persen	100 persen				
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	100 persen	100 persen	120.784.000	491.125.000	483.625.000	Dinas Kesehatan
			Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100 persen	100 persen				
			Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100 persen	100 persen				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	94 persen	94 persen	1.611.130.000	2.617.080.000	2.517.080.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,70 persen	20,00 persen	296.439.000	416.439.000	378.373.000	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen	100 persen	35.881.000	35.881.000	24.361.000	Dinperpa
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	86,4 persen	86,4 persen	27.450.000	27.450.000	26.500.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	100 persen	247.600.000	205.380.000	205.380.000	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	12 persen	12 persen	1.859.294.000	1.746.610.000	1.742.610.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	13 persen	13 persen	1.955.520.000	1.617.120.000	1.614.420.000	Dinsos P2KB

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	100 persen	704.500.000	345.250.000	345.092.000	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen	100 persen	191.020.000	102.910.000	103.054.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	75 persen	386.432.000	390.512.000	381.396.000	Dinsos P2KB
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	100 persen	1.720.232.000	1.760.492.000	1.729.610.000	Dinsos P2KB
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen	53,73 persen	1.328.740.000	1.492.520.000	1.385.700.000	Dinsos P2KB
	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen	100 persen	56.788.452.000	55.336.333.000	57.799.333.000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	100 persen	15.485.800.000	15.722.300.000	14.795.323.000	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	25,00 persen	28,00 persen	741.097.000	741.097.000	705.041.000	Dinarpus
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen	100 persen	83.800.000	83.800.000	81.800.000	Dinas Pendidikan
	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen	1,15 persen	3.355.717.000	5.028.594.000	5.084.795.000	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen	27,93 persen	350.444.000	350.444.000	306.283.000	Dinperinaker

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen	52,00 persen	376.100.000	538.324.000	594.959.000	Dinperinaker
	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9,24 persen	9,24 persen	150.940.000	165.940.000	190.845.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15,01 persen	15,01 persen	78.062.000	73.612.000	64.459.000	DPMPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	48,15 persen	48,15 persen	215.615.000	215.615.000	161.820.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100 persen	100 persen	69.644.000	58.895.000	50.211.000	DPMPPA
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah 02						142.913.055.000	166.112.438.000	167.568.555.000	
03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	8.455.948.000	8.441.918.000	8.367.918.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	70,48 persen	70,48 persen	4.755.600.000	4.402.600.000	3.672.655.000	DPU-PR
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45,97 persen	45,97 persen	1.167.896.000	1.167.896.000	1.152.446.000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	13,33 persen	1.640.000	1.640.000	1.115.000	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,939 persen	2,939 persen	3.635.404.500	3.489.103.000	3.449.336.000	DLH
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen	100 persen	438.000.000	644.720.000	688.828.000	Dinperkim

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,44 persen	18,44 persen	1.305.880.000	1.775.544.000	1.875.369.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	18,53 persen	18,53 persen	108.640.000	108.640.000	112.300.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100 persen	100 persen	301.404.000	301.404.000	293.004.000	DPU-PR
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah 03						20.170.412.500	20.333.465.000	19.612.971.000	
04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen	100 persen	1.946.743.000	2.006.743.000	1.984.808.000	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga	16 lembaga	1.052.090.000	1.717.090.000	1.699.290.000	Bakesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen	100 persen	220.900.000	440.900.000	570.913.000	Bakesbangpol
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 persen	100 persen	97.837.000	97.837.000	67.527.000	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 persen	100 persen	288.930.000	288.930.000	257.087.000	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	85 persen	85 persen	4.968.603.000	5.236.802.000	5.119.892.000	Satpol P3KP
		12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment							
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,20 indeks	3,20 indeks	2.318.428.000	2.350.428.000	2.227.292.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 persen	100 persen	86.960.000	86.960.000	86.960.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen	3,74 persen	105.050.000	105.050.000	96.858.000	Dinkominfo

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persandian Untuk Pengamanan Informasi							
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100 persen	100 persen	1.481.640.000	1.386.790.000	1.358.204.000	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	100 persen	100 persen	328.042.600	328.042.000	318.749.000	Dinarpus
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	80 persen	80 persen				
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	149.153.800	149.154.000	138.944.000	Dinarpus
		Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,10 persen	88,10 persen	313.670.000	316.270.000	307.272.000	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,85 persen	93,85 persen	341.730.000	341.730.000	329.193.000	Dindukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	12 OPD	12 OPD	71.790.000	122.690.000	118.640.000	Dindukcapil
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen	100 persen	27.207.112.000	26.237.346.000	27.706.240.000	Sekretariat DPRD
			Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100 persen	100 persen				
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,81 persen	94,81 persen	1.081.970.000	2.021.970.000	2.241.775.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	40 persen	40 persen	5.477.660.000	7.457.160.000	7.559.270.000	Dinparbudpora
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	83,33 persen	83,33 persen	557.400.000	557.400.000	1.162.250.000	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	88,89 persen	88,89 persen	32.528.000	32.528.000	31.178.000	DPMPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,75 persen	97,75 persen	696.116.000	746.116.000	705.545.000	DPMPPA

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat							
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	16,67 persen	29.590.000	129.590.000	374.190.000	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50 persen	50 persen	244.480.000	603.330.000	659.452.000	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	100 persen	100 persen	44.350.000	44.350.000	42.350.000	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	10.630.000	10.630.000	8.305.000	DLH
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100 persen	100 persen	873.290.000	1.034.290.000	1.022.523.000	Satpol P3KP
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen	100 persen	53.350.000	53.354.000	36.714.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen	100 persen	13.208.391.000	14.579.789.000	15.040.721.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Selatan

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen	100 persen	913.464.000	909.662.000	857.142.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen	100 persen	19.980.000	19.980.000	17.455.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen	100 persen	4.542.566.000	5.163.566.000	4.955.756.000	Dinkominfo
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	100 persen	518.436.000	868.436.000	555.818.000	Bapperida
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen	100 persen				
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	75 persen	75 persen				
		Program Perencanaan, Pengendalian dan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	100 persen	437.964.000	437.964.000	592.661.000	Bapperida

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 persen	100 persen				
			Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 persen	100 persen				
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen	100 persen	501.142.000	501.142.000	516.127.000	Bapperida
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen	100 persen				
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen	100 persen				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	100 persen	633.448.168.100	630.611.151.000	641.526.332.000	Semua OPD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen				
			persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen				
			Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen				Dinas Kesehatan
			Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen	100 persen				Setda
			Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen	100 persen				
			Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen	100 persen				
			Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen	100 persen				Sekretariat DPRD
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen	18.908.386.000	17.532.386.000	17.518.117.000	Setda
			Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen	100 persen				
			Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100 persen	100 persen				

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100 persen	100 persen	818.390.000	1.292.110.000	1.053.444.000	Setda
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen	6,00 persen				
			Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100 persen	100 persen				
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,5 persen	7,5 persen	4.000.978.000	4.163.278.000	12.351.721.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	934.850.000	1.011.850.000	950.642.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5 persen	5 persen	1.857.001.000	1.981.951.000	1.804.951.000	BPKAD
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90 persen	90 persen	1.187.200.000	1.187.200.000	1.123.289.000	BKPSDM
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80 persen	80 persen				
			Persentase PNS berkembang karier	80 persen	80 persen				
			Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	100 persen	100 persen				
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100 persen	100 persen	1.534.866.000	1.534.866.000	1.311.025.000	BKPSDM
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3 nilai	3 nilai	380.937.000	380.937.000	498.070.000	Inspektorat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85 persen	85 persen	437.038.000	437.038.000	333.488.000	Inspektorat Daerah
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah 04						733.729.800.500	736.516.786.000	757.238.180.000	
Total Dukungan Anggaran						1.013.929.456.000	1.051.367.436.000	1.093.925.560.000	

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.2.6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan pada Musrenbang Kota Pekalongan Tahun 2024 menggarisbawahi tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu: (1) Banjir Rob dan Sungai, (2) Persampahan dan Lingkungan Hidup, (3) Pemulihan Ekonomi.

Salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan adalah permasalahan sampah. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan penambahan volume, jenis dan ragam sampah. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Permasalahan sampah dapat menjadi akar masalah dan memperburuk kondisi lingkungan antara lain mengakibatkan banjir dan genangan saat rob. Timbulan sampah yang terjadi baik di tepi jalan maupun saluran juga mengakibatkan jangka waktu surut banjir dan genangan di beberapa wilayah menjadi lebih lama. Kinerja pompa sebagai salah satu upaya untuk mengatasi banjir dan rob menjadi tidak optimal dengan adanya sampah ini. Tuntutan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tertumpu pada Pemerintah, sedangkan perlu adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah maka pengelolaan persampahan di Kota Pekalongan dapat terselesaikan dan anggaran yang dialokasikan dapat optimal.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekalongan sekitar 300 ribu orang dan hitungan jumlah sampah yang dihasilkan perorang adalah 500 gram/orang/hari maka sampah yang dihasilkan sebanyak 150 ton perhari. Dari jumlah tersebut sebanyak 120 ton diangkut dan masuk ke TPA dan sisanya sebanyak 30 ton diolah kembali. Keberadaan TPS 3R dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, yang berfungsi sebagai pengolah sampah, masih perlu ditingkatkan fungsinya. Perlu adanya solusi dalam penanganan sampah apabila keberadaan TPS 3R tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Alokasi anggaran sebesar 200 Miliar yang diprioritaskan untuk penanganan sampah, banjir dan rob serta perbaikan pasar Patiunus atau taman Sorogenen harus terfokus untuk penanganan jangka waktu pendek. Selain itu, peningkatan pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat perlu dituangkan dalam program sehingga dapat teralokasikan dalam anggaran sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu kondisi TPA saat ini sudah tidak direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan sampah sehingga harus dipikirkan adanya solusi lain. Oleh karena itu, perlu dirumuskan arah kebijakan terkait penanganan sampah yang diangkut, di luar perbaikan TPA. Selain itu perlu adanya inovasi agar masyarakat dapat diberikan pemahaman terkait permasalahan sampah di tingkat RT/RW sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dicapai melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menunjukkan

kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah dan akan membantu dalam pembangunan daerah sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca *Covid-19*, maka salah satu yang harus difokuskan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah menaikkan nilai IPM. Apabila ingin menaikkan nilai IPM Kota Pekalongan, dimana wilayah kota secara demografi merupakan sentral ekonomi, jumlah penduduk yang padat dan infrastrukturnya lebih maju dibandingkan kabupaten, maka harus membandingkan standar IPM dengan kota lain yang terdapat di Jawa Tengah dan jumlah penduduknya kurang lebih sama.

Dari berbagai permasalahan utama Kota Pekalongan diatas, maka beberapa langkah berikut dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan:

a. Kesehatan

Untuk meningkatkan IPM maka masyarakat diajarkan untuk menerapkan pola makan sehat di dalam kehidupan sehari-hari antara lain dengan cara bagaimana kita dapat mengontrol penggunaan minyak dan lain sebagainya. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilakukan program atau kampanye oleh Dinas Kesehatan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan merawat kesehatan tubuh.

b. Pendidikan

Peningkatan IPM di bidang pendidikan yakni dengan mendorong generasi muda agar dapat memberikan manfaat untuk Kota Pekalongan serta mendorong agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kesadaran masyarakat terutama orang tua juga mempunyai peran penting agar anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, generasi muda Kota Pekalongan dituntut untuk mempunyai rasa cinta terhadap daerahnya sendiri sehingga hal tersebut dapat meningkatkan IPM.

c. Standar Hidup Layak

Salah satu proyek strategis nasional yaitu pembangunan kembali Pasar Banjarsari yang diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Dengan dibangunnya kembali pasar banjarsari, diharapkan dapat membuat wajah Kota Pekalongan menjadi lebih tertata, sehingga tidak ada lagi pedagang yang berjualan di sepanjang tepi sungai loji.

d. Sarana Prasarana Persampahan

Perlunya upaya dalam pengelolaan sampah di Kota Pekalongan, yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat dasar (dari sumbernya) serta peningkatan sarana prasarana persampahan yang ada (sarana angkutan, TPS, dan lainnya) termasuk SDM pengelolanya.

4.3. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah secara kontinyu. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, dan salah satu kategori kinerja dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Peraturan Wali

Kota tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang Perencanaan, Kelembagaan, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Sanksi Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Peraturan Wali Kota tersebut akan mendorong inovasi kebijakan Pembangunan dengan merumuskan ruang lingkup Sistem Inovasi Daerah yang lebih terarah. Dalam hal perencanaan, Pemerintah Kota Pekalongan telah merumuskan *Road Map* SIDA yang melingkupi Kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang SIDA, Kondisi SIDA yang akan dicapai, Strategi dan Arah Kebijakan SIDA dan Rencana aksi penguatan SIDA.

Selanjutnya, telah dirumuskan juga kelembagaan SIDA yang mengatur pembentukan Tim Penguatan SIDA, dengan ruang lingkup tugas antara lain, mengintegrasikan program inovatif SIDA dengan RPJMD, melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA, mempersiapkan rumusan kebijakan penyelenggaraan SIDA, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan SIDA, melakukan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan SIDA.

Dalam hal penyelenggaraan SIDA, Peraturan Wali Kota memperkuat munculnya inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Adanya kebijakan tersebut akan mendorong munculnya inovasi kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah dan keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat.

Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan) dan pengelolaan fungsi manajemen (sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja).

Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi. Inovasi ini dimaksud untuk mendorong tumbuh kembang iklim inovasi masyarakat dan ekosistem inovasi daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Lebih lanjut, seluruh rangkaian inovasi ini akan dilakukan proses evaluasi penyelenggaraan SIDA secara rutin. Evaluasi Penyelenggaraan SIDA dilakukan melalui penilaian kapasitas inovatif daerah. Penilaian kapasitas inovatif dilaksanakan guna mengetahui capaian implementasi program inovatif SIDA dan sebagai tolok ukur kemajuan SIDA. Pelaksanaan penilaian kapasitas inovatif daerah tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan mengikutsertakan perguruan tinggi, industri/UMKM, dan masyarakat.

Disisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan juga fokus menyelenggarakan fungsi kelitbangan pada tema-tema strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan kota. Penyelenggaraan fungsi litbang ini dilakukan melalui tema yang dikompertisikan dalam Riset Unggulan Daerah dengan mengambil isu strategis pada tahun perencanaan N+1.

Inovasi Kebijakan Pembangunan juga sedang dirintis melalui kegiatan riset bersama, yang melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi. Tidak hanya melalui riset unggulan dan riset bersama, dorongan inovasi kebijakan pembangunan juga dilakukan dalam perwujudan program unggulan atau program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021-2026.

4.4. Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 Dengan Menerapkan Konsep Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Sebagai bagian dari rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 menerapkan konsep teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Konsep tersebut merupakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses yang diuraikan sebagai berikut.

4.4.1. Teknokratik

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses awal dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan teknokratik oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Hasil dari proses ini yaitu Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 secara teknokratik mempedomani arah kebijakan dan sasaran tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang selaras dengan program perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 4.12 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 Dengan Pendekatan Teknokratik

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
1. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	1. AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,31 per 1.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,30 per 1.000 KH	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 92,08 per 100.000 KH	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	4. Indeks Keluarga Sehat	4. 0,40	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	3,00 persen	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Program Pemberdayaan Sosial	
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal,	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,75 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan	100,00 persen	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
maupun lembaga pendidikan keagamaan	karakter dan pendidikan keagamaan			
4. Peningkatan <i>link and match</i> ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,49 persen	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial	Dinperinaker
5. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan	DPMPPA
	2. Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak	DPMPPA
6. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	98,44 persen	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinperkim
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DLH
7. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	790,00 Ha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	DLH
	2. Indeks Kualitas Air	59,42	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
	3. Indeks Kualitas Lahan	37,65	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Dinperkim
	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	Program Penataan Bangunan Gedung Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00 persen	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	2. Persentase pelayanan sampah	72,12 persen	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DLH DPUPR
	3. Tingkat pelayanan jalan (<i>Level Of Service</i>)	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
	4. Persentase keterhubungan jalan	100 persen	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan	Pertumbuhan ekonomi	5,44 - 6,0 persen	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPPTSP

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
daya dukung dan daya tampung lingkungan			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pengembangan UMKM	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Persentase Penyelenggaraan <i>Event</i> Budaya	122,00 persen	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00 persen	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i>	1. Indeks SPBE	3,34	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Satpol PP
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinkominfo
	2. IKM Kota	90,70 persen	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Program Pendaftaran Penduduk	Dindikcapil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sekretariat DPRD
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMPPA
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	DLH
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol P3KP
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	3. Nilai KIP Tingkat Kota	97,20 skor	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	4. Nilai SAKIP Kota	75,57 skor	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapperida
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Program Perekonomian dan Pembangunan	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD
	6. Indeks Merit System	340,00	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
	7. Maturitas SPIP	3,8	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah
	8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.4.2. Partisipatif

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melalui tahapan dari tingkat basis sampai dengan tingkat kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.13 Penyusunan RKPD Melalui Pendekatan Partisipatif

No.	Tahapan Penyusunan RKPD	Keterlibatan Stakeholder
1	Konsultasi publik rancangan awal RKPD	OPD, Forkopimda, perwakilan organisasi profesi, forum anak, perempuan, media, seni, komunitas, kelompok difabel, organisasi masyarakat, keagamaan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kota Pekalongan.
2	Pra musrenbang (penjaringan usulan masyarakat di tingkat RT)	Warga masyarakat
3	Musrenbang kelurahan	Melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti: unsur perempuan (TP-PKK); unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unsur Pemuda (Karang Taruna); unsur anak; unsur difabel; unsur partai politik; unsur pendidikan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan kelurahan
4	Musrenbang tingkat kecamatan	Melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti: unsur perempuan (TP-PKK); unsur pemuda (Karang Taruna); unsur anak; unsur difabel; unsur partai politik; unsur pendidikan, unsur kesehatan dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan kecamatan
5	Forum Perangkat Daerah	OPD dan stakeholder yang terkait dengan tema forum perangkat daerah
6	Musrenbang tingkat kota	OPD, Forkopimda, perwakilan organisasi profesi, forum anak, perempuan, media, seni, komunitas, kelompok difabel, organisasi masyarakat, keagamaan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kota Pekalongan.

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.4.3. Politis

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Visi dan misi Wali Kota Pekalongan pada RPJMD 2021-2026 dijabarkan ke dalam RKPD melalui penyelarasan program sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.14 Penjabaran Visi dan Misi Wali Kota ke Dalam Program RKPD

Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Misi / Program	Indikator Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Unmeet need KB	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	OPD Pengampu Urusan Sosial
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan		

Misi / Program	Indikator Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman		
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	OPD Pengampu Urusan PU-PR

Misi / Program	Indikator Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal

Misi / Program	Indikator Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	OPD Pengampu Urusan Pariwisata

Misi / Program	Indikator Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah		
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Satpol PP
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government		
Program Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	OPD Pengampu Urusan Kominfo
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	OPD Pengampu Urusan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	OPD Pengampu Urusan Persandian

Misi / Program	Indikator Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
Program Penanggulangan Bencana	persentase korban bencana alam yang ditangani	BPBD
Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	OPD Pengampu Urusan Admuduk dan Capil
Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	OPD Pengampu Urusan Admuduk dan Capil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Admuduk dan Capil
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Perda yang ditetapkan	Set DPRD
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Satpol P3KP
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara

Misi / Program	Indikator Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	OPD Pengampu Urusan Kominfo
Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS berkembang karier	OPD Pengampu Kepegawaian
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	OPD Pendidikan dan Pelatihan
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	OPD Pengampu Litbang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	Bag. Organisasi
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	OPD Pengampu Perencanaan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	OPD Pengampu Perencanaan
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	Bag. Pemerintahan

Misi / Program	Indikator Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Bag. Perekonomian dan SDA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Inspektorat Daerah

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Pendekatan secara politis juga dilakukan melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025..

4.4.4. Atas-bawah dan bawah-atas

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Bentuk penyelarasan dalam proses perencanaan sebagai berikut.

1. Sinkronisasi usulan rencana pembangunan pada tahapan forum perangkat daerah, yaitu menyelaraskan antara usulan musrenbang kelurahan/kecamatan, rencana kerja perangkat daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan berpedoman pada prioritas dan fokus pembangunan Kota Pekalongan.
2. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.
3. Penyelarasan kebijakan Pusat dengan kondisi Kota Pekalongan dalam rapat TAPD.

4.5. Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 Dengan Menerapkan Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial

Pendekatan lain sebagai satu kesatuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 yaitu berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

4.5.1. Holistik-tematik

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Konsep tematik yang diterapkan dalam kebijakan pembangunan Kota

Pekalongan dapat dilihat melalui tema pembangunan setiap tahunnya sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.2 Visi, Misi dan Tema Pembangunan Kota Pekalongan

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Selanjutnya, tema kebijakan pembangunan dijabarkan ke dalam prioritas dan fokus pembangunan sebagaimana diuraikan pada sub bab 4.2.3, yang secara holistik telah mencakup aspek pembangunan sebagai berikut.

Tabel 4.15 Konsep Holistik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

Prioritas Kota 2025	Aspek Pembangunan
1. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Kesehatan
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Kesejahteraan sosial
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Sumber daya manusia
4. Peningkatan <i>link and match</i> ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Pengarusutamaan gender
5. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Perlindungan perempuan dan anak
6. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Infrastruktur perumahan dan permukiman
7. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Lingkungan hidup
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan	Infrastruktur perkotaan

Prioritas Kota 2025	Aspek Pembangunan
memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Ekonomi
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Kebudayaan
11. Optimalisasi peran serta <i>stakeholder</i> dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Kondusivitas wilayah
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i>	Tata kelola pemerintahan

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.5.2. Integratif

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini diterapkan melalui pencapaian sasaran kinerja pembangunan tingkat kota yang didukung oleh kinerja lintas OPD sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.16 Konsep Integratif
Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
1	2	3	4
1. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan fokus pada:			
a. Mendorong upaya percepatan penurunan stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi; b. Optimalisasi layanan dan fasilitas kesehatan serta peran masyarakat dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular; c. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, termasuk mendorong sinergitas RS swasta.	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada:			
a. Pengendalian inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID;	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
1	2	3	4
b. Penguatan dan optimalisasi peran TKPK dalam rangka mendorong kerja sama multi-sektoral; c. Peningkatan upaya kolaborasi konstruktif dengan masyarakat; d. Penguatan pemanfaatan data kemiskinan sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.		Program Pemberdayaan Sosial	
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan, dengan fokus pada:			
a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang disertai peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan secara berkelanjutan; b. Perluasan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan /atau pendidikan inklusi; c. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.	Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinarpus
		Program Pembinaan Perpustakaan	
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Peningkatan <i>link and match</i> ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing, dengan fokus pada:			
a. Integrasi dan perluasan pelatihan, sertifikasi, penempatan tenaga kerja terpadu dalam rangka mengurangi kesenjangan pasar kerja serta menangkap peluang perkembangan di Kawasan Petanglong dan sekitarnya; b. Pelatihan kerja secara inklusif dan berperspektif gender.	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program Hubungan Industrial	
5. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi, terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan fokus pada:			
a. Mendorong keterlibatan dan kontribusi perempuan, baik secara individu maupun melalui kelompok/organisasi dalam memainkan peranan aktif di kehidupan ekonomi dan politik; b. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
	Program Perlindungan Khusus Anak		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana	
1	2	3	4	
secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.				
6. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada:				
Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka menuju kesejahteraan dan kemandirian.	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim	
		Program Kawasan Permukiman		
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR	
7. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada:				
a. Optimalisasi sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, LSM dan masyarakat dalam penanganan banjir/rob; b. Mendorong pelaku usaha yang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan; c. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang kota secara berkelanjutan.	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		
	Menurunnya tingkat pencemaran air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		
	Optimalnya kualitas lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinperkim	
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee			
	Program Penataan Bangunan Gedung			DPUPR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi			
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:				
a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta mendorong optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum; b. Mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dari sumbernya dan optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS 3R; c. Peningkatan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.	Optimalnya layanan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR	
		Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
		Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
			Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
1	2	3	4
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan fokus pada:			
a. Mendorong kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dan mensukseskan pembangunan pariwisata; b. Peningkatan sarana prasarana pendukung pariwisata dalam rangka penguatan ekonomi lokal; c. Penguatan sub sektor perdagangan dan jasa sebagai kelanjutan dari dampak positif pembangunan Pasar Banjar Sari; d. Penguatan ekonomi kreatif berbasis pada industri batik dengan seluruh rantai nilainya.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinperinaker
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dindagkop UKM
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		Program Pengembangan Ekspor	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
		Program Pengembangan UMKM	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinparbudpo ra
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
1	2	3	4
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal, dengan fokus pada:			
Mendorong SDM budaya untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengayaan penyelenggaraan event budaya.	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		Program Pembinaan Sejarah	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
		Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta <i>stakeholder</i> dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:			
Peningkatan pelibatan stakeholder dan kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan dengan pondasi agama.	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i> , dengan fokus pada:			
a. Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi penerapan SPBE, penguatan keterbukaan informasi publik, sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan perluasan digitalisasi daerah dan profesionalisme ASN;	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
b. Mendorong optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas menuju WBK/WBBM.	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
		Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMPPA		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
1	2	3	4
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	DLH
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
		Program Perekonomian dan Pembangunan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.5.3. Spasial

Pendekatan spasial diwujudkan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan, termasuk aspek geografis, dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan ini diterapkan dengan mempedomani rencana tata ruang (yaitu RTRW dan RDTR Kota Pekalongan).

Kota Pekalongan memiliki kondisi yang berbeda setiap kawasan, baik dari aspek geografis, aspek ekonomi dan sosial budaya maupun aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu, pendekatan spasial merupakan salah satu pendekatan yang konsisten dilaksanakan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Dengan Pagu Anggaran

Indikasi rencana program tahun 2025 didasarkan pada prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025, RPJMD Tahun 2021-2026, dan mempertimbangkan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung pembangunan secara menyeluruh, dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan. Konsistensi antara prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan pagu anggaran disajikan pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran Tahun 2025

Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	90 persen	90 persen	53.973.800.000	75.973.115.000	76.220.885.000	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92 persen	92 persen				
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100 persen	100 persen				
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100 persen	100 persen				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	95 persen	95 persen	758.562.000	575.600.000	575.600.000	Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 persen	100 persen				
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	100 persen	100 persen	120.784.000	491.125.000	483.625.000	Dinas Kesehatan
		Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100 persen	100 persen				
		Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100 persen	100 persen				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	94 persen	94 persen	1.611.130.000	2.617.080.000	2.517.080.000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,70 persen	20,00 persen	296.439.000	416.439.000	378.373.000	Dinperpa
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen	100 persen	35.881.000	35.881.000	24.361.000	Dinperpa
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	86,4 persen	86,4 persen	27.450.000	27.450.000	26.500.000	Dinperpa
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	100 persen	247.600.000	205.380.000	205.380.000	Dinsos P2KB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	12 persen	12 persen	1.859.294.000	1.746.610.000	1.742.610.000	Dinsos P2KB
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	13 persen	13 persen	1.955.520.000	1.617.120.000	1.614.420.000	Dinsos P2KB
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 01					60.886.460.000	83.705.800.000	83.788.834.000	
02. Sinkronisasi pelaksanaan	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang	100 persen	100 persen	704.500.000	345.250.000	345.092.000	Dinsos P2KB

Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan		mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)						
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen	100 persen	191.020.000	102.910.000	103.054.000	Dinsos P2KB
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	75 persen	386.432.000	390.512.000	381.396.000	Dinsos P2KB
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	100 persen	1.720.232.000	1.760.492.000	1.729.610.000	Dinsos P2KB
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen	53,73 persen	1.328.740.000	1.492.520.000	1.385.700.000	Dinsos P2KB
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 02					4.330.924.000	4.091.684.000	3.944.852.000	
03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen	100 persen	56.788.452.000	55.336.333.000	57.799.333.000	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	100 persen	15.485.800.000	15.722.300.000	14.795.323.000	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	25,00 persen	28,00 persen	741.097.000	741.097.000	705.041.000	Dinarpus
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen	100 persen	83.800.000	83.800.000	81.800.000	Dinas Pendidikan
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 03					73.099.149.000	71.883.530.000	73.381.497.000	
04. Peningkatan <i>link and match</i> ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen	1,15 persen	3.355.717.000	5.028.594.000	5.084.795.000	Dinperinaker
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen	27,93 persen	350.444.000	350.444.000	306.283.000	Dinperinaker
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen	52,00 persen	376.100.000	538.324.000	594.959.000	Dinperinaker
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 04					4.082.261.000	5.917.362.000	5.986.037.000	
05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9,24 persen	9,24 persen	150.940.000	165.940.000	190.845.000	DPMPPA
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15,01 persen	15,01 persen	78.062.000	73.612.000	64.459.000	DPMPPA

Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	48,15 persen	48,15 persen	215.615.000	215.615.000	161.820.000	DPMPPA
	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100 persen	100 persen	69.644.000	58.895.000	50.211.000	DPMPPA
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 05					514.261.000	514.062.000	467.335.000	
06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	12,27 persen	17,23 persen	2.549.260.000	2.173.514.000	2.517.114.000	DPU-PR
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 persen	100 persen	1.352.512.000	1.702.512.000	1.728.749.000	Dinperkim
	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	121,39 hektar	72,47 hektar	24.022.630.000	25.896.835.000	29.017.925.000	Dinperkim
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2075,41 hektar	2075,41 hektar	10.730.514.000	6.840.514.000	6.815.714.000	Dinperkim
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	63,04 persen	63,04 persen	12.049.520.000	7.823.356.000	5.800.485.000	Dinperkim
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen	100 persen	438.000.000	644.720.000	688.828.000	Dinperkim
	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen	50 persen	6.540.000	99.800.000	59.300.000	Dinperkim
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 06					51.148.976.000	45.181.251.000	46.628.115.000	
07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	8.455.948.000	8.441.918.000	8.367.918.000	DPU-PR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	70,48 persen	70,48 persen	4.755.600.000	4.402.600.000	3.672.655.000	DPU-PR
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45,97 persen	45,97 persen	1.167.896.000	1.167.896.000	1.152.446.000	DLH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	13,33 persen	1.640.000	1.640.000	1.115.000	DLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,939 persen	2,939 persen	3.635.404.500	3.489.103.000	3.449.336.000	DLH

Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,44 persen	18,44 persen	1.305.880.000	1.775.544.000	1.875.369.000	DPU-PR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	18,53 persen	18,53 persen	108.640.000	108.640.000	112.300.000	DPU-PR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100 persen	100 persen	301.404.000	301.404.000	293.004.000	DPU-PR
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 07					19.732.412.500	19.688.745.000	18.924.143.000	
08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,3 persen	0,3 persen	11.688.874.000	12.410.054.000	32.111.774.000	DLH
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	80 persen	80 persen	5.092.114.000	2.411.000.000	3.951.000.000	DPU-PR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	90,90 persen	90,90 persen	2.692.452.000	2.608.052.000	1.596.588.000	DPU-PR
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 persen	0,44 persen	5.747.810.000	19.995.052.000	20.263.055.000	Dinas Perhubungan
		Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	97,00 persen	97,00 persen				
		Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,74 persen	0,74 persen				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	85,48 persen	85,48 persen	16.084.720.000	18.747.730.000	16.292.644.000	DPU-PR
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 08					41.305.970.000	56.171.888.000	74.215.061.000	
09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	51.180.000	32.854.000	42.854.000	DPMPSTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	28.930.000	28.930.000	28.930.000	DPMPSTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3025 dokumen	3025 dokumen	739.790.000	765.794.000	733.874.000	DPMPSTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	7,09 milyar	7,09 milyar	638.003.000	168.510.000	168.340.000	DPMPSTSP
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	98.368.000	98.368.000	103.368.000	DPMPSTSP

Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	75,34 persen	389.560.000	269.560.000	233.577.000	Dinperinaker
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25 persen	25 persen	7.470.000	7.470.000	4.470.000	Dinperinaker
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	33.940.000	33.940.000	29.690.000	Dinperinaker
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen	100 persen	8.682.729.000	10.482.729.000	12.692.721.000	Dindagkop UKM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 persen	100 persen	102.960.000	102.960.000	94.801.000	Dindagkop UKM
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen	7,99 persen	98.970.000	98.970.000	93.970.000	Dindagkop UKM
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 persen	81,99 persen	279.022.000	279.022.000	244.352.000	Dindagkop UKM
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 persen	6,42 persen	969.080.000	969.080.000	972.588.000	Dindagkop UKM
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93 persen	76,93 persen	6.330.000	6.330.000	5.571.000	Dindagkop UKM
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen	32,36 persen	47.180.000	97.180.000	237.765.000	Dindagkop UKM
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	10,48 persen	10,48 persen	14.600.000	14.600.000	105.485.000	Dindagkop UKM
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 persen	12,27 persen	323.520.000	898.520.000	865.910.000	Dindagkop UKM
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1 persen	1 persen	2.227.388.000	3.319.967.000	3.131.896.000	DKP
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1 persen	1 persen				
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3 persen	3 persen	181.988.000	287.188.000	226.838.000	DKP
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	421.938.000	421.938.000	362.933.000	DKP

Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12, 20 persen	12, 20 persen				
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12 persen	12 persen	3.292.957.000	3.237.957.000	3.173.863.000	Dinparbudpora
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	41,98 persen	41,98 persen	678.342.000	778.342.000	643.534.500	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	51,28 persen	51,28 persen	165.000.000	260.000.000	210.118.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	80 persen	80 persen	712.500.000	1.095.518.000	800.018.000	Dinparbudpora
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,78 miliar rupiah	55,78 miliar rupiah	1.421.483.000	406.483.000	430.828.000	Dinperpa
		Nilai produksi peternakan pertahun	199,66 miliar rupiah	199,66 miliar rupiah				
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen	100 persen	16.466.000	116.466.000	116.466.000	Dinperpa
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5 persen	5 persen	305.194.000	305.194.000	283.232.000	Dinperpa
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	100 persen	13.300.000	13.300.000	12.300.000	Dinperpa
	Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100 persen	100 persen	24.927.000	24.927.000	15.137.000	Dinperpa
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5 persen	5 persen	35.707.000	35.707.000	85.132.000	Dinperpa
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 09					22.008.822.000	24.657.804.000	26.150.561.500	
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	100 persen	1.259.890.000	1.184.740.000	1.339.733.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen	100 persen	155.480.000	155.630.000	155.630.000	Dinparbudpora
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	100 persen	31.250.000	31.250.000	31.250.000	Dinparbudpora
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	95,74 persen	95,74 persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Dinparbudpora

Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	8,29 persen	8,29 persen	1.623.800.000	1.646.904.000	1.654.331.500	Dinparbudpora
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 10					3.090.420.000	3.038.524.000	3.200.944.500	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen	100 persen	1.946.743.000	2.006.743.000	1.984.808.000	Bakesbangpol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga	16 lembaga	1.052.090.000	1.717.090.000	1.699.290.000	Bakesbangpol
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen	100 persen	220.900.000	440.900.000	570.913.000	Bakesbangpol
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 persen	100 persen	97.837.000	97.837.000	67.527.000	Bakesbangpol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 persen	100 persen	288.930.000	288.930.000	257.087.000	Bakesbangpol
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	85 persen	85 persen	4.968.603.000	5.236.802.000	5.119.892.000	Satpol P3KP
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 11					8.575.103.000	9.788.302.000	9.699.517.000	
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i>	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,20 indeks	3,20 indeks	2.318.428.000	2.350.428.000	2.227.292.000	Dinkominfo
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 persen	100 persen	86.960.000	86.960.000	86.960.000	Dinkominfo
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen	3,74 persen	105.050.000	105.050.000	96.858.000	Dinkominfo
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100 persen	100 persen	1.481.640.000	1.386.790.000	1.358.204.000	BPBD
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	100 persen	100 persen	328.042.600	328.042.000	318.749.000	Dinarpus
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	80 persen	80 persen				
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek	100 persen	100 persen	149.153.800	149.154.000	138.944.000	Dinarpus

Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)						
	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,10 persen	88,10 persen	313.670.000	316.270.000	307.272.000	Dindukcapil
	Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,85 persen	93,85 persen	341.730.000	341.730.000	329.193.000	Dindukcapil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	12 OPD	12 OPD	71.790.000	122.690.000	118.640.000	Dindukcapil
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen	100 persen	27.207.112.000	26.237.346.000	27.706.240.000	Sekretariat DPRD
		Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100 persen	100 persen				
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,81 persen	94,81 persen	1.081.970.000	2.021.970.000	2.241.775.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	40 persen	40 persen	5.477.660.000	7.457.160.000	7.559.270.000	Dinparbudpora
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	83,33 persen	83,33 persen	557.400.000	557.400.000	1.162.250.000	DPMPPA
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	88,89 persen	88,89 persen	32.528.000	32.528.000	31.178.000	DPMPPA
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,75 persen	97,75 persen	696.116.000	746.116.000	705.545.000	DPMPPA
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	16,67 persen	29.590.000	129.590.000	374.190.000	DLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50 persen	50 persen	244.480.000	603.330.000	659.452.000	DLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	100 persen	100 persen	44.350.000	44.350.000	42.350.000	DLH
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	10.630.000	10.630.000	8.305.000	DLH

Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100 persen	100 persen	873.290.000	1.034.290.000	1.022.523.000	Satpol P3KP
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen	100 persen	53.350.000	53.354.000	36.714.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Selatan
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Barat
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Timur
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen	100 persen	13.208.391.000	14.579.789.000	15.040.721.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Selatan
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Barat
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Timur
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen	100 persen	913.464.000	909.662.000	857.142.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Selatan
		Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Barat
		Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Timur
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen	100 persen	19.980.000	19.980.000	17.455.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Selatan
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Barat
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100 persen	100 persen				Kecamatan Pekalongan Timur

Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen	100 persen	4.542.566.000	5.163.566.000	4.955.756.000	Dinkominfo
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	100 persen	518.436.000	868.436.000	555.818.000	Bapperida
		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen	100 persen				
		Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	75 persen	75 persen				
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	100 persen	437.964.000	437.964.000	592.661.000	Bapperida
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 persen	100 persen				
		Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 persen	100 persen				
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen	100 persen	501.142.000	501.142.000	516.127.000	Bapperida
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen	100 persen				
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen	100 persen				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	100 persen	633.448.168.100	630.611.151.000	641.526.332.000	Semua OPD
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen				
		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen				
		Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen				Dinas Kesehatan
		Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen	100 persen				Setda
		Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen	100 persen				
		Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen	100 persen				
		Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen	100 persen				Sekretariat DPRD

Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen	18.908.386.000	17.532.386.000	17.518.117.000	Setda
		Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen	100 persen				
		Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100 persen	100 persen				
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100 persen	100 persen	818.390.000	1.292.110.000	1.053.444.000	Setda
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen	6,00 persen				
		Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100 persen	100 persen				
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,5 persen	7,5 persen	4.000.978.000	4.163.278.000	12.351.721.000	BPKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	934.850.000	1.011.850.000	950.642.000	BPKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5 persen	5 persen	1.857.001.000	1.981.951.000	1.804.951.000	BPKAD
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90 persen	90 persen	1.187.200.000	1.187.200.000	1.123.289.000	BKPSDM
		Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80 persen	80 persen				
		Persentase PNS berkembang karier	80 persen	80 persen				
		Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	100 persen	100 persen				
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100 persen	100 persen	1.534.866.000	1.534.866.000	1.311.025.000	BKPSDM
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3 nilai	3 nilai	380.937.000	380.937.000	498.070.000	Inspektorat Daerah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85 persen	85 persen	437.038.000	437.038.000	333.488.000	Inspektorat Daerah
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 12					725.154.697.500	726.728.484.000	747.538.663.000	
Total Dukungan Anggaran					1.013.929.456.000	1.051.367.436.000	1.093.925.560.000	

Sumber: Bapperda Kota Pekalongan, 2025

5.2. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, serta peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi layanan pendidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase capaian SPM pendidikan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas sebesar 100 persen.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 100 persen.

5.2.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, dan peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 92 Persen, Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen, dan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar sebesar 90 Persen, Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 100 Persen, Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota sebesar 92 persen.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 95 Persen dan Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 100 persen.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah Pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar sebesar 100 Persen, Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran sebesar 100 Persen, dan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 97 Persen.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Rumah Tangga Sehat sebesar 94 Persen.

5.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam rangka pengendalian banjir dan rob, serta pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 100 persen.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah penguatan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 90,90 Persen.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah Penyediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota, dan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional sebesar 80 persen.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah Pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*) sebesar 12,27 persen.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 70,48 persen.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus program adalah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota sebesar 18,44 persen.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus program adalah rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK *Outcome*) sebesar 85,48 persen.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota, serta penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 18,53 persen.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Fokus program adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota dan pembangunan aplikasi sistem informasi penataan ruang. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota sebesar 100 persen.

5.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagi warga, pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana, dan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 100 persen.

2. Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas rt/rlh dan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman kumuh sebesar 121,39 hektar.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 2075,41 hektar.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah Penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK *Outcome*) sebesar 63,04 persen.

5.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK *Outcome*) sebesar 85 persen.

2. Program Penanggulangan Bencana

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100 persen.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

5.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Indikator yang akan dicapai Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan sebesar 75 Persen.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah Peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial sebesar 53,73 Persen.

4. Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) sebesar 100 Persen.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Fokus program adalah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100 Persen.

5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah peningkatan pelatihan kerja bagi buruh rokok dan penganggur dan perawatan alat-alat pelatihan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK *Outcome*) sebesar 1,15 persen.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah perluasan kesempatan kerja dan pengelolaan informasi pasar kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 27,93 persen.

3. Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK *Outcome*) sebesar 52 persen.

5.2.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, serta penguatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sebesar 9,24 Persen.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK *Outcome*) sebesar 15,01 Persen.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) sebesar 48,15 Persen.

4. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 Persen.

5.2.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dan penyediaan cadangan pangan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase cadangan pangan daerah sebesar 4,70 Persen.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 86,40 persen.

5.2.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100 Persen.

2. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Fokus program adalah koordinasi dan tindak lanjut ganti kerugian program tanah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee sebesar 50 persen.

5.2.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah limbah yang diolah sebesar 45,97 persen.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 2,939 persen.

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Fokus program adalah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan sebesar 13,33 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Fokus program adalah Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan penerapan sanksi terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH sebesar 16,67 persen.

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup sebesar 50 persen.

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase perolehan penghargaan bidang LH sebesar 100 persen.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen.

8. Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengelolaan sampah sebesar 0,30 persen.

5.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP elektronik dan Kartu Keluarga). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 87,07 persen.

2. Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 93,85 persen.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*) sebanyak 12 OPD.

5.2.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Fokus program adalah peningkatan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 83,33 Persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang) sebesar 88,89 Persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemanfaatan teknologi tepat guna di kelurahan, peningkatan kapasitas fasilitator, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat dan tim penggerak PKK. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 97,75 Persen.

5.2.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk

Fokus program adalah penyediaan data dan informasi keluarga, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga sebesar 100 Persen.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dan juga penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. Indikator yang akan dicapai yaitu Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun sebesar 12 Persen.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya. Indikator yang akan dicapai yaitu *Unmeet Need* KB sebesar 13 Persen.

5.2.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah penyediaan fasilitas LLAJ, pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin), pelaksanaan pelayanan uji berkala, pengelolaan terminal penumpang tipe c, dan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ sebesar 97 persen, Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK *Outcome*) dengan ratio sebesar 0,44, Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala sebesar 0,74 persen.

5.2.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan pengaduan, serta penyelenggaraan hubungan media dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100 Persen.

2. Program Aplikasi Informatika

Fokus program adalah implementasi SPBE, penguatan sistem jaringan intra pemerintahan, pengelolaan aplikasi dan pusat data. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indeks sebesar 3,20.

5.2.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus program adalah pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi juga keanggotaannya yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang berkualitas (IKK *Outcome*) sebesar 32,36 persen.

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 10,48 persen.

3. Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan umkm yang naik kelas dengan cara kemudahan izin, fasilitasi penguatan modal, pengembangan rantai pasokan usaha mikro serta skema jaringan pemasaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK *Outcome*) sebesar 12,27 persen.

5.2.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta penyusunan rencana umum penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1 Dokumen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebesar 3025 dokumen.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai Investasi Baru pertahun sebesar 7,09 Milyar Rupiah.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Fokus program adalah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

5.2.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina sebesar 94,81 Persen.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam pekan olahraga. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor sebesar 40,00 persen.

5.2.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan SDTD (Satu Data Terpadu Daerah). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100 Persen.

5.2.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah fasilitasi penilaian mandiri Indeks keamanan informasi dan lisensi sertifikat TLS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan (*penetration testing*) sebesar 3,74 Persen.

5.2.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase *event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100 persen.

3. Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya sebesar 100 Persen.

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus program adalah inventarisasi benda cagar budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK *Outcome*) sebesar 95,74 Persen.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengunjung museum batik sebesar 8,29 Persen.

5.2.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan sosialisasi budaya baca serta literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) dengan indeks sebesar 25.

5.2.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip

Fokus program adalah pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis serta pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik sebesar 100 Persen dan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK *Outcome*) dengan indeks sebesar 80.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

5.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta Pemberdayaan Nelayan Kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI sebesar 1 persen dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI sebesar 1 persen.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil, serta penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 3 persen.

3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan sebesar 12,2 persen dan Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) sebanyak 2 pelaku usaha.

5.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah pengelolaan destinasi, serta pengembangan daya tarik wisata. Indikator yang akan dicapai yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK *Outcome*) sebesar 12 Persen.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK *Outcome*) sebesar 41,98 Persen.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fokus program adalah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi sebesar 51,28 persen.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar sebesar 80 persen.

5.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai produksi pertanian pertahun sebesar Rp. 55.783.120.000 dan Nilai produksi peternakan pertahun sebesar Rp. 199.662.000.000.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100 persen.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah operasional RPH, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 5 persen.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota sebesar 100 persen.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Fokus program adalah fasilitasi atau rekomendasi izin usaha pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin sebesar 100 persen.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5 persen.

5.2.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*) sebesar 76,93 persen.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya sebesar 100 persen.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya sebesar 100 persen.

4. Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan volume ekspor sebesar 7,99 persen.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK *Outcome*) sebesar 81,99 persen.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK *Output*) sebesar 6,42 persen.

5.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK *Outcome*) sebesar 75,34 persen.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang industri. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK *Outcome*) sebesar 25 persen.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

5.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.2.4.1 Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program adalah penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan informasi hukum. Indikator yang akan dicapai yaitu Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100 persen, Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif sebesar 100 persen, dan Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100 persen.

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan sebesar 100 Persen, Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 6 persen, dan Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 100 persen.

5.2.4.2 Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan perda dan pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu, peningkatan kapasitas anggota legislative dan fasilitasi penjangkauan aspirasi (reses). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda yang ditetapkan sebesar 100 persen dan Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100 persen.

5.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.2.5.1 Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu serta penyediaan data perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 Persen, Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen, dan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud sebesar 100 Persen, Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian sebesar 100 persen, dan Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah sebesar 100 persen.

5.2.5.2 Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, KUA dan PPAS, perubahan KUA dan perubahan PPAS, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan

kepala daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pengelolaan kas daerah, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan skpd, blud dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK *Outcome*) sebesar 7,50 Persen.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks pengelolaan aset baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 5 Persen.

5.2.5.3 Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan *Assesment Center*, pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, dan monitoring evaluasi kinerja ASN. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang karier sebesar 80 persen, Tingkat Pelaporan Kinerja ASN sebesar 100 persen, Persentase Keterisian Jabatan sebesar 90 persen, dan Persentase Keterpenuhan Formasi ASN sebesar 80 Persen.

5.2.5.4 Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang kompetensinya sebesar 100 persen.

5.2.5.5 Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Fokus program adalah pelaksanaan riset unggulan daerah serta pengelolaan jurnal dan website kelitbang, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta penelitian, pengembangan, dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD sebesar 100 persen, Persentase Pemberdayaan Stakeholder

Kelitbangan sebesar 100 persen, dan Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) sebesar 75 persen.

5.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.2.6.1 Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85 persen.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, fasilitasi asistensi dan penilaian reformasi birokrasi, dan monitoring evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator yang akan dicapai yaitu Level Kapabilitas APIP dengan nilai sebesar 3.

5.2.7 Unsur Kewilayahan

5.2.7.1 Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Timur sebesar 100 Persen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Fokus program adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur sebesar 100 Persen, serta Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100 persen.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur sebesar 100 Persen.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Forkopimca (Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan). Indikator yang akan

dicapai yaitu Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Utara sebesar 100 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Selatan sebesar 100 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Barat sebesar 100 persen, dan Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Timur sebesar 100 persen.

5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

5.2.8.1 Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan bela negara. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100 persen.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Fokus program adalah pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik sebesar 16 lembaga.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, serta penanganan konflik ormas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Fokus program adalah koordinasi, pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebesar 100 persen.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Fokus program adalah optimalisasi penanganan kejadian terkait konflik sosial dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial sebesar 100 persen.

5.2.9 Non Urusan

5.2.9.1 Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan layanan BLUD. indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen, persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen,

persentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100 persen, persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan sekretariat daerah sebesar 100 persen dan persentase pelayanan keprotokoleran sebesar 100 persen.

Tabel 5.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dinas Pendidikan				233.787.353.000	235.292.490.000	242.495.784.000								275.942.196.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				233.787.353.000	235.292.490.000	242.495.784.000								275.942.196.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				233.787.353.000	235.292.490.000	242.495.784.000								275.942.196.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	161.429.301.000	164.150.057.000	169.819.328.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	172.591.061.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	99.750.000	99.750.000	99.534.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pendidikan	100 persen	149.810.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000	8.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	5.250.000	DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.250.000	4.250.000	4.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.560.000	DINAS PENDIDIKAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan	87.000.000	87.000.000	87.084.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		16 Laporan	142.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	159.905.426.000	162.556.182.000	168.135.523.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pendidikan	100 persen	171.036.465.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1431 Orang/bulan	1319 Orang/bulan	159.382.234.000	162.032.990.000	167.612.331.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	SILPA, Opsen BBNKB, DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU Earmark bid. Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1319 Orang/bulan	170.503.715.000	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penqujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	12 Dokumen	519.292.000	519.292.000	519.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	529.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.900.000	3.900.000	3.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	3.750.000	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	100 persen	87.880.000	87.880.000	88.048.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pendidikan	100 persen	86.386.000	DINAS PENDIDIKAN
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	186 Laporan	188 Laporan	87.880.000	87.880.000	88.048.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		188 Laporan	86.386.000	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pendidikan	100 persen	8.638.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	8.638.000	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	486.489.000	556.489.000	546.041.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pendidikan	100 persen	559.598.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	123.322.000	193.322.000	233.322.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	118.598.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.217.000	11.217.000	11.217.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	11.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	82.000.000	82.000.000	82.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	72.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	13.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.900.000	2.900.000	2.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	56 Laporan	117.550.000	117.550.000	72.658.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		56 Laporan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	127.000.000	127.000.000	121.444.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	182.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	674.873.000	674.873.000	675.299.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pendidikan	100 persen	558.553.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	290.997.000	290.997.000	290.997.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	276.553.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	376.876.000	376.876.000	377.302.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	275.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	169.883.000	169.883.000	269.883.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pendidikan	100 persen	191.611.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	28 Unit	61.030.000	61.030.000	61.030.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		28 Unit	50.611.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	58.853.000	58.853.000	158.853.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Unit	91.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	101 Unit	101 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		101 Unit	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen	100 persen	56.788.452.000	55.336.333.000	57.799.333.000							100 persen	87.586.197.000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)	100 persen	100 persen	24.384.092.000	24.408.931.000	26.765.631.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	32.196.617.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0 Ruang	483.821.000	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		0 Ruang	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		2 Unit	1.564.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0 Ruang	248.740.000	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	-	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		0 Ruang	1.660.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	71 Paket	71 Paket	88.750.000	88.750.000	88.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		71 Paket	177.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	35 Paket	11 Paket	143.650.000	143.650.000	143.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		11 Paket	355.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	71 Unit	71 Unit	50.000.000	680.000.000	680.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		71 Unit	106.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	8249 Peserta Didik	7346 Peserta Didik	358.750.000	358.750.000	358.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		7346 Peserta Didik	580.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	1091 Orang	1091 Orang	2.768.076.000	2.768.076.000	2.768.412.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1091 Orang	2.684.800.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	103 Orang	103 Orang	7.680.000	7.680.000	7.680.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		103 Orang	7.100.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	103 Satuan Pendidikan	103 Satuan Pendidikan	126.840.000	206.840.000	202.658.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		103 Satuan Pendidikan	303.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	103 Satuan Pendidikan	103 Satuan Pendidikan	18.064.400.000	18.046.800.000	18.163.653.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	SILPA DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		103 Satuan Pendidikan	12.922.744.000	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	242 Orang	309 Orang	25.720.000	25.720.000	23.145.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		309 Orang	58.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	206 Orang	250 Orang	13.500.000	13.500.000	13.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAK Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		250 Orang	142.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		4 Kegiatan	45.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	990 Paket	1000 Paket	73.000.000	73.000.000	73.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1000 Paket	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	13 Unit	506.850.000	836.850.000	936.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DBH DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		13 Unit	555.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	103 Satuan Pendidikan	103 Satuan Pendidikan	73.395.000	73.395.000	69.579.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		103 Satuan Pendidikan	306.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	71 Ruang	8 Ruang	735.920.000	820.920.000	971.004.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DBH DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		8 Ruang	6.273.168.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	52 Paket	385.000.000	35.000.000	2.035.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		52 Paket	2.156.305.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)	100.00 persen	100.00 persen	20.133.716.000	15.658.095.000	15.963.029.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100.00 persen	31.207.263.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	0 Ruang	490.204.000	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	-	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		0 Ruang	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	53.660.000	53.660.000	53.660.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Unit	1.565.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	27 Ruang	4 Ruang	2.389.415.000	382.640.000	374.808.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		4 Ruang	5.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0 Ruang	105.000.000	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	-	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		0 Ruang	105.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0 Ruang	461.928.000	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	-	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		0 Ruang	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1 Ruang	919.863.000	95.000.000	101.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Ruang	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	4 Unit	350.539.000	298.595.000	598.595.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		4 Unit	580.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	180 Paket	3 Paket	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		3 Paket	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	12 Paket	11 Paket	34.400.000	34.400.000	34.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		11 Paket	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	12 Paket	15 Paket	191.250.000	191.250.000	191.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		15 Paket	425.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	17 Unit	5 Unit	127.500.000	331.500.000	331.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		5 Unit	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	850 Peserta Didik	850 Peserta Didik	277.400.000	327.400.000	329.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		850 Peserta Didik	580.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	105 Orang	105 Orang	293.470.000	293.470.000	293.554.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		105 Orang	332.200.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	17 Orang	17 Orang	9.630.000	9.630.000	9.630.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		17 Orang	7.100.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	166.770.000	166.770.000	160.370.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		30 Satuan Pendidikan	496.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	13.215.800.000	12.940.400.000	12.955.982.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	SILPA DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		30 Satuan Pendidikan	10.127.372.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Dana BOSP-BOS Kinerja							
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	96 Orang	90 Orang	15.280.000	15.280.000	15.280.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		90 Orang	23.175.000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	180 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		180 Orang	51.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		4 Kegiatan	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	40.600.000	40.600.000	36.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		30 Satuan Pendidikan	172.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	0 Ruang	400.000.000	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	-	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		0 Ruang	4.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1500 Paket	1500 Paket	109.500.000	109.500.000	109.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1500 Paket	633.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0 Ruang	127.657.000	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	-	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		0 Ruang	1.740.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	5 Paket	218.850.000	233.000.000	233.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		5 Paket	1.424.416.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)	100 persen	100 persen	8.609.274.000	10.544.637.000	10.355.259.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	17.550.430.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	2 Unit	186.736.000	298.884.000	298.968.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		2 Unit	555.123.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	13.000.000	13.000.000	13.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		4 Paket	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	4 Paket	5 Paket	20.000.000	81.014.000	81.014.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		5 Paket	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2 Orang	2 Orang	55.440.000	55.440.000	55.608.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		2 Orang	48.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4 Orang	4 Orang	3.950.000	3.950.000	3.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		4 Orang	2.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Satuan Pendidikan	268 Satuan Pendidikan	230.000.000	250.064.000	268.814.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		268 Satuan Pendidikan	905.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	270 Satuan Pendidikan	264 Satuan Pendidikan	6.021.600.000	5.901.600.000	5.901.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		264 Satuan Pendidikan	7.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	565 Orang	528 Orang	54.200.000	54.200.000	49.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		528 Orang	129.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	540 Orang	320 Orang	18.250.000	18.250.000	18.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		320 Orang	29.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	270 Dokumen	1 Dokumen	56.000.000	56.000.000	56.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Dokumen	26.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	21.900.000	21.900.000	21.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		2 Dokumen	41.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	146.010.000	546.010.000	546.010.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DBH	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		2 Ruang	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	14.600.000	14.600.000	14.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		2 Kegiatan	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	600 Paket	600 Paket	73.000.000	73.000.000	73.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		600 Paket	142.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit	4 Unit	92.000.000	92.000.000	92.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		4 Unit	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	4 Unit	146.000.000	306.890.000	306.890.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		4 Unit	340.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4 Paket	38 Paket	65.000.000	1.783.835.000	1.783.835.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		38 Paket	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	270 Satuan Pendidikan	268 Satuan Pendidikan	73.000.000	73.000.000	69.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		268 Satuan Pendidikan	6.121.307.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	12 Ruang	1.318.588.000	901.000.000	701.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAK DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		12 Ruang	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	100 persen	100 persen	3.661.370.000	4.724.670.000	4.715.414.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	6.631.887.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)														
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13 Orang	12 Orang	321.680.000	321.680.000	322.016.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		12 Orang	248.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	1 Orang	2.950.000	2.950.000	2.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Orang	1.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	76.840.000	106.840.000	100.158.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		14 Satuan Pendidikan	420.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	15 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	2.467.900.000	3.001.200.000	3.001.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		14 Satuan Pendidikan	2.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	28 Orang	8.500.000	8.500.000	8.090.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		28 Orang	20.400.000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	56 Orang	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		56 Orang	6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Dokumen	3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	2 Ruang	474.500.000	974.500.000	974.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		2 Ruang	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	400 Paket	400 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		400 Paket	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Paket	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	1826 Peserta Didik	14 Peserta Didik	103.000.000	103.000.000	90.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		14 Peserta Didik	1.968.487.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	85 Paket	85 Paket	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		85 Paket	105.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	19.000.000	19.000.000	29.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Unit	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Paket	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen	100 persen	83.800.000	83.800.000	81.800.000							100 persen	299.571.000	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF	100 persen	100 persen	47.125.000	47.125.000	45.125.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	144.984.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Dokumen	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	200 Buku	200 Buku	20.625.000	20.625.000	20.625.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		200 Buku	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	10 Orang	10 Orang	13.000.000	13.000.000	13.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		10 Orang	44.984.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000	5.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Dokumen	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100 persen	100 persen	36.675.000	36.675.000	36.675.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	154.587.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	6.500.000	6.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Dokumen	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	250 Buku	250 Buku	25.675.000	25.675.000	25.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		250 Buku	124.587.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Dokumen	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	100 persen	15.485.800.000	15.722.300.000	14.795.323.000							100 persen	15.465.367.000	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF	100 persen	100 persen	15.485.800.000	15.722.300.000	14.795.323.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	15.465.367.000	DINAS PENDIDIKAN
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan	25 Dokumen	21 Dokumen	614.000.000	850.500.000	859.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		21 Dokumen	941.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	4 Laporan	14.871.800.000	14.871.800.000	13.935.573.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		4 Laporan	14.524.367.000	DINAS PENDIDIKAN
Dinas Kesehatan				111.122.295.000	122.413.044.000	122.725.023.000								117.031.305.750	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				111.122.295.000	122.413.044.000	122.725.023.000								117.031.305.750	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				111.122.295.000	122.413.044.000	122.725.023.000								117.031.305.750	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	67.359.728.000	67.523.513.000	67.702.222.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	64.866.286.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	26.985.000	26.985.000	25.335.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Kesehatan	100 persen	24.850.000	DINAS KESEHATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	2.750.000	DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.485.000	3.485.000	3.485.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.650.000	DINAS KESEHATAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15.000.000	15.000.000	13.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	20.450.000	DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	65.452.026.000	65.452.026.000	65.449.626.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Kesehatan	100 persen	59.249.970.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	484 Orang/bulan	690 Orang/bulan	65.365.341.000	65.365.341.000	65.365.341.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		690 Orang/bulan	59.164.320.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								DAU Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU Earmark bid. Kesehatan							
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	83.455.000	83.455.000	81.055.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	84.000.000	DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.230.000	3.230.000	3.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.650.000	DINAS KESEHATAN
Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaiaan perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Kesehatan	100 persen	9.500.000	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	DINAS KESEHATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	330.700.000	474.485.000	413.414.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Kesehatan	100 persen	438.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.650.000	3.650.000	3.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	5.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	91.250.000	191.250.000	195.920.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		5 Paket	145.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.480.000	5.480.000	5.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	7.500.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	64.420.000	64.420.000	74.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Retribusi Pelayanan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	84.000.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis							
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13 Paket	14.600.000	14.600.000	14.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	26.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.500.000	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	100 Laporan	150.000.000	193.785.000	118.044.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		100 Laporan	168.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	1.167.587.000	1.167.587.000	1.168.667.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Kesehatan	100 persen	1.354.350.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4 Laporan	440.000	440.000	440.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	600.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	625.383.000	625.383.000	625.383.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	753.750.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	541.764.000	541.764.000	542.844.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	600.000.000	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	377.430.000	397.430.000	640.180.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Kesehatan	100 persen	1.209.616.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	183.980.000	183.980.000	174.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		30 Unit	334.616.000	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	146.000.000	166.000.000	418.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	BPHTB DAU Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Unit	790.000.000	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	62 Unit	47.450.000	47.450.000	47.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		62 Unit	85.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	90,00 persen	90,00 persen	41.322.472.000	51.256.107.000	51.496.877.000							90,00 persen	48.658.517.750	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	100 persen	100 persen	13.379.107.000	16.987.467.000	16.765.017.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	14.714.921.000	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	0 Unit	2.350.000.000	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		0 Unit	2.350.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	3.367.515.000	7.046.485.000	7.046.485.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Unit	79.730.000	DINAS KESEHATAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	2 Unit	329.560.000	329.560.000	329.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		2 Unit	3.356.439.000	DINAS KESEHATAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit	89.930.000	89.930.000	89.930.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Unit	428.188.725	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	20 Unit	790.710.000	32.820.000	62.820.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		20 Unit	2.712.040.000	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	77 Unit	37 Unit	191.724.000	148.420.000	348.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan Pendapatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		37 Unit	582.000.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Bagi Hasil Pajak Rokok							
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	6.174.508.000	9.315.052.000	8.862.602.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		3 Paket	5.141.523.275	DINAS KESEHATAN
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	12 Paket	85.160.000	25.200.000	25.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		12 Paket	65.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	27.876.065.000	34.180.340.000	34.643.560.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	33.725.561.750	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6006 Orang	4323 Orang	91.250.000	91.250.000	91.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4323 Orang	127.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5462 Orang	3980 Orang	141.650.000	264.600.000	264.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		3980 Orang	196.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18314 Orang	20196 Orang	114.190.000	114.190.000	114.190.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		20196 Orang	208.745.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45000 Orang	45517 Orang	72.380.000	72.380.000	70.780.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		45517 Orang	144.446.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210465 Orang	225789 Orang	32.820.000	32.820.000	42.820.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		225789 Orang	144.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36783 Orang	34240 Orang	19.750.000	19.750.000	19.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		34240 Orang	39.415.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76872 Orang	79310 Orang	4.810.000	4.810.000	4.810.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		79310 Orang	22.500.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14148 Orang	6650 Orang	4.600.000	4.600.000	4.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		6650 Orang	22.500.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1013 Orang	1013 Orang	8.410.000	8.410.000	8.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1013 Orang	20.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6836 Orang	5863 Orang	30.160.000	30.160.000	30.160.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		5863 Orang	41.305.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16169 Orang	16169 Orang	24.170.000	24.170.000	24.170.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		16169 Orang	33.105.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	2 Dokumen	149.370.000	149.370.000	157.578.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	SILPA DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		2 Dokumen	617.300.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	1 Dokumen	35.870.000	35.870.000	35.870.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	83.350.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	124.940.000	124.940.000	124.940.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	230.116.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.087.768.000	963.469.000	963.469.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	1.347.034.750	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	2 Dokumen	261.190.000	261.190.000	261.190.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		2 Dokumen	650.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000.000	30.318.664.000	30.688.226.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	SILPA DAU DBH CHT DAU Earmark bid. Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	27.000.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	34.490.000	34.490.000	34.490.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	87.400.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	1 Dokumen	1.605.987.000	1.579.947.000	1.656.997.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	1.780.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	8.900.000	21.900.000	21.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		15 Unit	55.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	2 Dokumen	23.360.000	23.360.000	23.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		2 Dokumen	80.620.000	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi	100 persen	100 persen	16.430.000	37.430.000	37.430.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	76.280.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.430.000	37.430.000	37.430.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	76.280.000	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	100 persen	100 persen	50.870.000	50.870.000	50.870.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	141.755.000	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran	52 Unit	66 Unit	50.870.000	50.870.000	50.870.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		66 Unit	141.755.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan														
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	95,00 persen	95,00 persen	708.181.000	525.219.000	525.219.000							95,00 persen	600.000.000	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu	100 persen	100 persen	708.181.000	525.219.000	525.219.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	600.000.000	DINAS KESEHATAN
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	1 Dokumen	708.181.000	525.219.000	525.219.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	600.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	120.784.000	491.125.000	483.625.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	678.502.000	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan	100 persen	100 persen	43.671.000	43.671.000	43.671.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	119.277.000	DINAS KESEHATAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	1 Dokumen	43.671.000	43.671.000	43.671.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	119.277.000	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	100 persen	100 persen	41.523.000	411.864.000	411.864.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	481.023.000	DINAS KESEHATAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5 Dokumen	1 Dokumen	41.523.000	411.864.000	411.864.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	481.023.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan	95 persen	95 persen	35.590.000	35.590.000	28.090.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	95 persen	78.202.000	DINAS KESEHATAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen	1 Dokumen	35.590.000	35.590.000	28.090.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	78.202.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	94,00 persen	94,00 persen	1.611.130.000	2.617.080.000	2.517.080.000							94,00 persen	2.228.000.000	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri	34 persen	34 persen	1.566.090.000	2.572.040.000	2.472.040.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	34 persen	2.100.000.000	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	1 Dokumen	1.566.090.000	2.572.040.000	2.472.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU Earmark bid. Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	2.100.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan	100 persen	100 persen	45.040.000	45.040.000	45.040.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	128.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	1 Dokumen	45.040.000	45.040.000	45.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	128.000.000	DINAS KESEHATAN
RSUD Bendan				105.563.530.000	119.044.546.000	126.408.878.000								110.730.266.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				105.563.530.000	119.044.546.000	126.408.878.000								110.730.266.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				105.563.530.000	119.044.546.000	126.408.878.000								110.730.266.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	103.181.810.000	103.162.826.000	110.527.158.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	100.062.121.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	12.000.000	12.000.000	12.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	RSUD BENDAN	100 persen	11.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.500.000	DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.500.000	DINAS KESEHATAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Laporan	8.000.000	DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	49.300.000	49.300.000	49.300.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	RSUD BENDAN	100 persen	50.108.000	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	47.800.000	47.800.000	47.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	48.608.000	DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.500.000	DINAS KESEHATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	20.510.000	1.526.000	1.013.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	RSUD BENDAN	100 persen	1.013.000	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	1 Laporan	20.510.000	1.526.000	1.013.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.013.000	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	103.100.000.000	103.100.000.000	110.464.845.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	RSUD BENDAN, Masyarakat	100 persen	100.000.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	103.100.000.000	103.100.000.000	110.464.845.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Retribusi Jasa Usaha Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	100.000.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100 persen	100 persen	2.331.339.000	15.831.339.000	15.831.339.000							100 persen	10.640.546.000	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	100 persen	100 persen	2.250.000.000	15.750.000.000	15.750.000.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	10.485.546.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	1 Unit	-	-	609.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Unit	609.600.000	DINAS KESEHATAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0 Unit	750.000.000	750.000.000	-	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		0 Unit	-	DINAS KESEHATAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Unit	-	-	140.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Unit	140.400.000	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	30 Unit	1.500.000.000	9.900.000.000	9.900.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		30 Unit	9.735.546.000	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	3 Unit	-	5.100.000.000	5.100.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		3 Unit	-	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen	100 persen	21.109.000	21.109.000	21.109.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	45.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	600 Orang	21.109.000	21.109.000	21.109.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		600 Orang	45.000.000	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan	100 persen	100 persen	60.230.000	60.230.000	60.230.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	RSUD Bendan, Masyarakat	100 persen	110.000.000	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	27 Unit	27 Unit	60.230.000	60.230.000	60.230.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		27 Unit	110.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 persen	100 persen	50.381.000	50.381.000	50.381.000							100 persen	27.599.000	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase perawat yang terkredensial	100 persen	100 persen	38.571.000	38.571.000	38.571.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	RSUD Bendan	100 persen	13.799.500	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	38.571.000	38.571.000	38.571.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		12 Dokumen	13.799.500	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	20 persen	20 persen	11.810.000	11.810.000	11.810.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	RSUD Bendan	20 persen	13.799.500	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 Orang	84 Orang	11.810.000	11.810.000	11.810.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		84 Orang	13.799.500	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Bendan				3.375.725.000	3.336.238.000	3.158.188.000								0	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.375.725.000	3.336.238.000	3.158.188.000								0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.375.725.000	3.336.238.000	3.158.188.000								0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	2.580.000.000	2.650.000.000	2.471.950.000							100,00 persen	0	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	2.580.000.000	2.650.000.000	2.471.950.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	masyarakat	100 persen	0	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.580.000.000	2.650.000.000	2.471.950.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja		- DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	795.725.000	686.238.000	686.238.000							92,00 persen	0	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	795.725.000	686.238.000	686.238.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat	100 persen	0	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	795.725.000	686.238.000	686.238.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen		- DINAS KESEHATAN
Puskesmas Kramatsari				1.729.560.000	1.652.121.000	1.722.019.000								1.568.791.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.729.560.000	1.652.121.000	1.722.019.000								1.568.791.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.729.560.000	1.652.121.000	1.722.019.000								1.568.791.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.050.000.000	1.050.000.000	1.119.898.000							100,00 persen	889.287.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	1.050.000.000	1.050.000.000	1.119.898.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat	100 persen	889.287.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.050.000.000	1.050.000.000	1.119.898.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkranta	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	889.287.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	679.560.000	602.121.000	602.121.000							92,00 persen	679.504.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	679.560.000	602.121.000	602.121.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat	100 persen	679.504.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	679.560.000	602.121.000	602.121.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkranta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	679.504.000	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Tirta				2.135.353.000	2.189.203.000	2.426.339.000								1.970.921.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.135.353.000	2.189.203.000	2.426.339.000								1.970.921.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.135.353.000	2.189.203.000	2.426.339.000								1.970.921.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.280.000.000	1.450.000.000	1.687.136.000							100,00 persen	1.115.568.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	1.280.000.000	1.450.000.000	1.687.136.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat	100 persen	1.115.568.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.280.000.000	1.450.000.000	1.687.136.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirta Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	1.115.568.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	855.353.000	739.203.000	739.203.000							92,00 persen	855.353.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	855.353.000	739.203.000	739.203.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat	100 persen	855.353.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	855.353.000	739.203.000	739.203.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirta Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	855.353.000	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Medono				2.125.238.000	1.774.061.000	2.015.787.000								1.815.228.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.125.238.000	1.774.061.000	2.015.787.000								1.815.228.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.125.238.000	1.774.061.000	2.015.787.000								1.815.228.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.300.000.000	1.050.000.000	1.291.726.000							100,00 persen	990.000.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	1.300.000.000	1.050.000.000	1.291.726.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Puskesmas Medono	100 persen	990.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.300.000.000	1.050.000.000	1.291.726.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	990.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	825.238.000	724.061.000	724.061.000							92,00 persen	825.228.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	825.238.000	724.061.000	724.061.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat	100 persen	825.228.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	825.238.000	724.061.000	724.061.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	825.228.000	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Noyontaan				1.621.032.000	1.574.369.000	1.697.116.000								1.621.032.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.621.032.000	1.574.369.000	1.697.116.000								1.621.032.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.621.032.000	1.574.369.000	1.697.116.000								1.621.032.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.113.430.000	1.120.000.000	1.242.747.000							100,00 persen	1.113.430.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	1.113.430.000	1.120.000.000	1.242.747.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	1.113.430.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.113.430.000	1.120.000.000	1.242.747.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	1.113.430.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	507.602.000	454.369.000	454.369.000							92,00 persen	507.602.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	507.602.000	454.369.000	454.369.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	507.602.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	507.602.000	454.369.000	454.369.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	507.602.000	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Tondano				1.971.089.000	1.630.197.000	1.915.155.000								1.653.909.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.971.089.000	1.630.197.000	1.915.155.000								1.653.909.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.971.089.000	1.630.197.000	1.915.155.000								1.653.909.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.312.180.000	1.050.000.000	1.334.958.000							100,00 persen	995.000.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	1.312.180.000	1.050.000.000	1.334.958.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	995.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.312.180.000	1.050.000.000	1.334.958.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	995.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	92 persen	92 persen	658.909.000	580.197.000	580.197.000							92 persen	658.909.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen	100 persen	658.909.000	580.197.000	580.197.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	658.909.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	658.909.000	580.197.000	580.197.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	658.909.000	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Klego				1.985.596.000	1.739.413.000	1.724.531.000								1.846.146.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.985.596.000	1.739.413.000	1.724.531.000								1.846.146.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.985.596.000	1.739.413.000	1.724.531.000								1.846.146.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.214.450.000	1.075.000.000	1.060.118.000							100,00 persen	1.075.000.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	1.214.450.000	1.075.000.000	1.060.118.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Puskesmas Klego Kota Pekalongan	100 persen	1.075.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.214.450.000	1.075.000.000	1.060.118.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Retribusi Pelayanan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	1.075.000.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Kesehatan di Puskesmas							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	771.146.000	664.413.000	664.413.000							92,00 persen	771.146.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	771.146.000	664.413.000	664.413.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat	100 persen	771.146.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	771.146.000	664.413.000	664.413.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	771.146.000	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Sokorejo				2.123.266.000	2.353.075.000	2.680.082.000								2.123.266.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.123.266.000	2.353.075.000	2.680.082.000								2.123.266.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.123.266.000	2.353.075.000	2.680.082.000								2.123.266.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.460.880.000	1.767.000.000	2.094.007.000							100,00 persen	1.460.880.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	1.460.880.000	1.767.000.000	2.094.007.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat	100 persen	1.460.880.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.460.880.000	1.767.000.000	2.094.007.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	1.460.880.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	662.386.000	586.075.000	586.075.000							92,00 persen	662.386.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	662.386.000	586.075.000	586.075.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat	100 persen	662.386.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	662.386.000	586.075.000	586.075.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	662.386.000	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Dukuh				1.741.815.000	1.807.460.000	1.959.886.000								1.705.813.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.741.815.000	1.807.460.000	1.959.886.000								1.705.813.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.741.815.000	1.807.460.000	1.959.886.000								1.705.813.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.095.000.000	1.250.000.000	1.402.426.000							100,00 persen	1.058.998.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	1.095.000.000	1.250.000.000	1.402.426.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Puskesmas Dukuh Kota Pekalongan	100 persen	1.058.998.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.095.000.000	1.250.000.000	1.402.426.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	1.058.998.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	646.815.000	557.460.000	557.460.000							92,00 persen	646.815.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	646.815.000	557.460.000	557.460.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	646.815.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	646.815.000	557.460.000	557.460.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	646.815.000	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Krapyak Kidul				2.055.917.000	2.103.675.000	2.054.685.000								2.191.719.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.055.917.000	2.103.675.000	2.054.685.000								2.191.719.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.055.917.000	2.103.675.000	2.054.685.000								2.191.719.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.480.000.000	1.630.000.000	1.581.010.000							100,00 persen	1.650.000.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	1.480.000.000	1.630.000.000	1.581.010.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Puskesmas Krapyak Kidul Kota Pekalongan	100 persen	1.650.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.480.000.000	1.630.000.000	1.581.010.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	1.650.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	575.917.000	473.675.000	473.675.000							92,00 persen	541.719.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	575.917.000	473.675.000	473.675.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	541.719.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	575.917.000	473.675.000	473.675.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	541.719.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Puskesmas Kusuma Bangsa				3.013.385.000	2.973.556.000	3.011.522.000								3.121.585.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.013.385.000	2.973.556.000	3.011.522.000								3.121.585.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.013.385.000	2.973.556.000	3.011.522.000								3.121.585.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	2.176.800.000	2.285.000.000	2.322.966.000							100,00 persen	2.285.000.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	2.176.800.000	2.285.000.000	2.322.966.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat wilayah kerja UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	100 persen	2.285.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.176.800.000	2.285.000.000	2.322.966.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	2.285.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	836.585.000	688.556.000	688.556.000							92,00 persen	836.585.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	836.585.000	688.556.000	688.556.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat wilayah kerja UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	100 persen	836.585.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	836.585.000	688.556.000	688.556.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	836.585.000	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Jenggot				1.987.333.000	2.164.942.000	2.452.464.000								1.987.333.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.987.333.000	2.164.942.000	2.452.464.000								1.987.333.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.987.333.000	2.164.942.000	2.452.464.000								1.987.333.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.335.700.000	1.600.000.000	1.887.522.000							100,00 persen	1.335.700.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	1.335.700.000	1.600.000.000	1.887.522.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat	100 persen	1.335.700.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.335.700.000	1.600.000.000	1.887.522.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	1.335.700.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	651.633.000	564.942.000	564.942.000							92,00 persen	651.633.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen	100 persen	651.633.000	564.942.000	564.942.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat	100 persen	651.633.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	651.633.000	564.942.000	564.942.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	651.633.000	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Pekalongan Selatan				3.260.381.000	3.022.151.000	2.727.693.000								4.878.151.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.260.381.000	3.022.151.000	2.727.693.000								4.878.151.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.260.381.000	3.022.151.000	2.727.693.000								4.878.151.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	2.374.335.000	2.374.000.000	2.079.542.000							100,00 persen	2.020.695.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	2.374.335.000	2.374.000.000	2.079.542.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	MASYARAKAT DI WILAYAH UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN	100 persen	2.020.695.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.374.335.000	2.374.000.000	2.079.542.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	2.020.695.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	886.046.000	648.151.000	648.151.000							92,00 persen	2.857.456.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	886.046.000	648.151.000	648.151.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	MASYARAKAT DI WILAYAH UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN	100 persen	2.857.456.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	886.046.000	648.151.000	648.151.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosoreio	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	2.857.456.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet								
Puskesmas Buaran				1.749.000.000	1.833.134.000	2.140.118.000								1.884.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.749.000.000	1.833.134.000	2.140.118.000								1.884.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.749.000.000	1.833.134.000	2.140.118.000								1.884.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.015.000.000	1.150.000.000	1.456.984.000							100,00 persen	1.150.000.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	1.015.000.000	1.150.000.000	1.456.984.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	1.150.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.015.000.000	1.150.000.000	1.456.984.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	1.150.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92 persen	92 persen	734.000.000	683.134.000	683.134.000							92 persen	734.000.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	100 persen	734.000.000	683.134.000	683.134.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	734.000.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	734.000.000	683.134.000	683.134.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskesmas	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		4 Dokumen	734.000.000	DINAS KESEHATAN
Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu				453.074.000	453.074.000	475.212.000								1.321.886.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				453.074.000	453.074.000	475.212.000								1.321.886.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				453.074.000	453.074.000	475.212.000								1.321.886.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	220.000.000	220.000.000	235.138.000							100,00 persen	421.661.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	220.000.000	220.000.000	235.138.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	421.661.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	220.000.000	220.000.000	235.138.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit Kerja	421.661.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Lainnya yang Sejenis							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	92,00 persen	233.074.000	233.074.000	240.074.000							92,00 persen	900.225.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan BPSJ	100 persen	100 persen	233.074.000	233.074.000	240.074.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	900.225.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	233.074.000	233.074.000	240.074.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	900.225.000	DINAS KESEHATAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				54.761.045.000	54.533.371.000	52.180.401.000								87.286.484.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				54.761.045.000	54.533.371.000	52.180.401.000								87.286.484.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				54.761.045.000	54.533.371.000	52.180.401.000								87.286.484.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	13.415.027.000	13.562.969.000	13.501.809.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	12.137.180.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	19.680.000	19.680.000	19.035.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPUPR	100 Persen	16.239.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5.220.000	5.220.000	5.220.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	1.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.460.000	2.460.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	11.415.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	13.239.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	6.725.548.000	6.725.548.000	6.717.898.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPUPR	100 Persen	7.878.647.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	6.628.268.000	6.628.268.000	6.628.268.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		65 Orang/bulan	7.782.147.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja							
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	95.000.000	95.000.000	87.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	95.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.280.000	2.280.000	2.280.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	25.110.000	25.110.000	23.610.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 Persen	34.881.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	25.110.000	25.110.000	23.610.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan	34.881.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	13.410.000	13.410.000	13.410.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPUPR	100 persen	22.313.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	8.410.000	8.410.000	8.410.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		60 Orang	12.813.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	447.130.000	481.676.000	481.765.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPUPR	100 persen	412.282.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.650.000	3.650.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	3.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	182.500.000	182.500.000	232.604.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	83.590.000	118.136.000	118.136.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	21.900.000	21.900.000	21.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Paket	30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.190.000	2.190.000	2.190.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	30 Laporan	146.000.000	146.000.000	94.935.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		30 Laporan	105.782.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	7.300.000	7.300.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Dokumen	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	678.900.000	758.900.000	758.900.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPUPR	100 persen	4.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	678.900.000	758.900.000	758.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit	4.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	4.829.307.000	4.829.307.000	4.779.203.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPUPR	100 persen	3.000.701.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.190.000	2.190.000	2.190.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.423.250.000	4.423.250.000	4.373.146.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	2.597.701.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	403.867.000	403.867.000	403.867.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	675.942.000	709.338.000	707.988.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPUPR	100 persen	768.117.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit	48 Unit	548.452.000	571.848.000	550.498.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		48 Unit	496.723.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	43.670.000	43.670.000	43.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Unit	71.394.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	47.320.000	57.320.000	77.320.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	70 Unit	36.500.000	36.500.000	36.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		70 Unit	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	8.455.948.000	8.441.918.000	8.367.918.000							100 persen	19.122.666.000	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	39 unit	39 unit	7.551.208.000	7.537.178.000	7.472.728.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Masyarakat Kota Pekalongan	39 unit	16.849.351.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	1.155.258.000	1.141.228.000	1.141.228.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		10 Unit	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	39 Unit	39 Unit	3.611.950.000	3.611.950.000	3.547.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU Earmark bid. Pekerjaan Umum	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		39 Unit	5.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,4 KM	0,4 KM	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pekerjaan Umum	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		0,4 KM	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,159 KM	0,146 KM	365.000.000	365.000.000	365.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		0,146 KM	4.749.351.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,348 KM	0,736 KM	800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		0,736 KM	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,436 KM	0 KM	1.000.000.000	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		0 KM	1.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	219.000.000	219.000.000	219.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pekerjaan Umum	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		1 Unit	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	84.21 persen	84.21 persen	904.740.000	904.740.000	895.190.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Masyarakat Kota Pekalongan	84.21 persen	2.273.315.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,151 KM	0,138 KM	904.740.000	904.740.000	895.190.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		0,138 KM	2.273.315.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	90,90 persen	90,90 persen	2.692.452.000	2.608.052.000	1.596.588.000							90,90 persen	2.600.000.000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	2.692.452.000	2.608.052.000	1.596.588.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Masyarakat Kota Pekalongan	100 Persen	2.600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	0 Unit	1.372.052.000	276.577.000	160.273.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		0 Unit	1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	60 SR	139 SR	1.320.400.000	2.331.475.000	1.436.315.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		139 SR	1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	80,00 persen	80,00 persen	5.092.114.000	2.411.000.000	3.951.000.000							80,00 persen	700.000.000	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	80 Persen	80 Persen	5.092.114.000	2.411.000.000	3.951.000.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Masyarakat Kota Pekalongan	80 Persen	700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0,102 Ton/hari	0,480 Ton/hari	5.092.114.000	2.411.000.000	3.951.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pajak Air Tanah DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		0,480 Ton/hari	700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	12,27 persen	12,27 persen	2.549.260.000	2.173.514.000	2.517.114.000							12,27 persen	4.495.596.000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)	59951 unit	59951 unit	2.549.260.000	2.173.514.000	2.517.114.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06	Masyarakat Kota Pekalongan	59951 unit	4.495.596.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	0,08 M³/Hari	0 M³/Hari	-	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		0 M³/Hari	545.596.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	119.802.000	86.406.000	80.406.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		150 Rumah Tangga	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M³/Hari	0 M³/Hari	100.000.000	200.000.000	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pajak Air Tanah	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		0 M³/Hari	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	116 Rumah Tangga	180 Rumah Tangga	2.329.458.000	1.887.108.000	2.243.608.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Pajak Air Tanah DAK Earmark bid. Kesehatan DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		180 Rumah Tangga	1.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-	2 Dokumen	-	-	193.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		2 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	70,48 persen	70,48 persen	4.755.600.000	4.402.600.000	3.672.655.000							70,48 persen	6.818.974.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	174642.18 meter	183443 meter	4.755.600.000	4.402.600.000	3.672.655.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Masyarakat Kota Pekalongan	183443 meter	6.818.974.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	3.912.500.000	3.934.500.000	3.217.755.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		8 Sistem Drainase Perkotaan	4.158.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	375.000.000	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		0 Sistem Drainase Perkotaan	1.960.974.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	468.100.000	468.100.000	454.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pekerjaan Umum	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		8 Sistem Drainase Perkotaan	700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,44 persen	18,44 persen	1.305.880.000	1.775.544.000	1.875.369.000							18,44 persen	2.663.368.000	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	340 dokumen	340 dokumen	1.305.880.000	1.775.544.000	1.875.369.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Masyarakat Kota Pekalongan	340 dokumen	2.663.368.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	1.011.980.000	1.481.644.000	1.681.469.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		10 Bangunan Gedung	2.213.368.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	1 Dokumen	184.400.000	184.400.000	84.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		1 Dokumen	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	130 Dokumen	130 Dokumen	109.500.000	109.500.000	109.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		130 Dokumen	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	85,48 persen	79,02 persen	16.084.720.000	18.747.730.000	16.292.644.000							79,02 persen	38.368.700.000	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	131.137 KM	118.757 KM	16.084.720.000	18.747.730.000	16.292.644.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Masyarakat Kota Pekalongan	118.757 KM	38.368.700.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	3 Dokumen	73.000.000	73.000.000	98.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		3 Dokumen	103.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1,4 KM	2,1 KM	5.900.000.000	13.508.030.000	10.817.444.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		2,1 KM	22.091.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Sebelumnya DAU Earmark bid. Pekerjaan Umum Opsen PKB							
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	5 Jembatan	250.780.000	250.780.000	248.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Opsen PKB	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		5 Jembatan	879.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	150,607 KM	150,274 KM	123.740.000	123.740.000	123.740.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		150,274 KM	103.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,8 KM	0,4 KM	5.630.020.000	675.000.000	878.454.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Opsen PKB	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		0,4 KM	4.648.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2,5 KM	2 KM	4.107.180.000	4.117.180.000	4.126.626.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Opsen PKB	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		2 KM	10.542.700.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	18,53 persen	18,53 persen	108.640.000	108.640.000	112.300.000							18,53 persen	155.000.000	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	1 kali	1 kali	71.640.000	71.640.000	70.640.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	DPUPR	1 kali	95.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	4 Lembaga	19.240.000	19.240.000	18.240.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		4 Lembaga	35.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	40 Orang	40 Orang	52.400.000	52.400.000	52.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		40 Orang	60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	100 Persen	100 Persen	37.000.000	37.000.000	41.660.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	DPUPR	100 Persen	60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000	37.000.000	41.660.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		2 Dokumen	60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100 persen	100 persen	301.404.000	301.404.000	293.004.000							100 persen	225.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	98.550.000	98.550.000	98.550.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Kota Pekalongan	12 Kali	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	98.550.000	98.550.000	98.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		1 Dokumen		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	184.604.000	184.604.000	178.604.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Masyarakat Kota Pekalongan	12 kali	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	184.604.000	184.604.000	178.604.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		2 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian	12 kali	12 kali	18.250.000	18.250.000	15.850.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Kota Pekalongan	12 kali	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan														
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	18.250.000	18.250.000	15.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		2 Dokumen	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				53.098.398.000	47.537.819.000	48.745.513.000								29.705.957.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				52.653.858.000	46.793.299.000	47.997.385.000								28.605.672.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				52.653.858.000	46.793.299.000	47.997.385.000								28.605.672.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	4.498.682.000	4.530.082.000	4.634.512.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	5.004.493.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	16.864.000	16.864.000	13.530.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 persen	17.350.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.306.000	3.306.000	2.806.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	2.750.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.558.000	1.558.000	1.558.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.650.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	9.166.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	12.950.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.924.692.000	2.911.042.000	2.945.392.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 persen	3.504.754.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.893.172.000	2.893.172.000	2.893.172.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		22 Orang/bulan	3.473.104.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	16.350.000	50.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.520.000	1.520.000	1.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.650.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 persen	9.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	140.470.000	185.521.000	179.965.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 persen	209.568.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.650.000	3.650.000	3.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	32.120.000	45.791.000	80.685.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	48.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.460.000	1.460.000	1.460.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	2.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	29.200.000	29.200.000	28.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	49.068.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.650.000	3.650.000	3.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Paket	5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.770.000	1.770.000	1.770.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	40 Laporan	68.620.000	100.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		40 Laporan	98.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	1.171.586.000	1.171.585.000	1.193.549.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 persen	976.720.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.320.000	1.320.000	1.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	1.800.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	962.400.000	962.400.000	951.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	758.200.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	207.866.000	207.865.000	240.629.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	216.720.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	240.070.000	240.070.000	297.076.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 persen	286.601.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	86.440.000	86.440.000	112.696.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		18 Unit	90.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	36.500.000	36.500.000	46.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit	76.601.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	1 Unit	117.130.000	117.130.000	137.630.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit	120.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 persen	100 persen	1.352.512.000	1.702.512.000	1.728.749.000							100 persen	1.591.292.000	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	21.900.000	21.900.000	21.900.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06	Dinperkim Kota Pekalongan	1 dokumen	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	21.900.000	21.900.000	21.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		1 Dokumen	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	3 kegiatan	3 kegiatan	32.850.000	32.850.000	32.850.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06	Masyarakat Kota Pekalongan	3 kegiatan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	7.300.000	7.300.000	7.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		60 Orang	10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	6 Orang	6 Orang	18.250.000	18.250.000	18.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		6 Orang	30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang	7.300.000	7.300.000	7.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		2 Orang	10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)	100 persen	100 persen	169.410.000	169.410.000	93.910.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	281.292.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	96.410.000	96.410.000	53.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		4 Unit Rumah	181.292.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	73.000.000	73.000.000	40.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		2 Unit Rumah	100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 persen	100 persen	1.128.352.000	1.478.352.000	1.580.089.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	1.200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	3 Laporan	1.128.352.000	1.478.352.000	1.580.089.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		3 Laporan	1.200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh	121,39 hektar	121,39 hektar	24.022.630.000	25.896.835.000	29.017.925.000							121,39 hektar	16.802.744.000	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	100 persen	100 persen	170.460.000	170.460.000	165.685.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06	Kota Pekalongan	100 persen	250.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	109.500.000	109.500.000	104.725.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		2 Dokumen	150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	60.960.000	60.960.000	60.960.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	102 hektar	102 hektar	23.852.170.000	25.726.375.000	28.852.240.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06	Masyarakat Kota Pekalongan	102 hektar	16.552.744.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	97 Unit Rumah	2.436.000.000	2.562.891.000	2.133.159.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		97 Unit Rumah	1.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	2 Ha	2 Ha	16.899.290.000	19.977.909.000	22.974.171.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan BPHTB DAU Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		2 Ha	15.552.744.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	58 Unit	71 Unit	4.516.880.000	3.185.575.000	3.744.910.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		71 Unit		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2075,41 hektar	2075,41 hektar	10.730.514.000	6.840.514.000	6.815.714.000							2075,41 hektar	4.592.098.000	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	1.04 persen	1.04 persen	10.730.514.000	6.840.514.000	6.815.714.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06	Warga Penghuni RTLH	1.04 persen	4.592.098.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	743 Unit Rumah	386 Unit Rumah	10.730.514.000	6.840.514.000	6.815.714.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan BPHTB DAU Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		386 Unit Rumah	4.592.098.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	63,04 persen	63,04 persen	12.049.520.000	7.823.356.000	5.800.485.000							63,04 persen	615.045.000	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU	68.48 persen	68.48 persen	12.049.520.000	7.823.356.000	5.800.485.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06	PSU Perumahan	68.48 persen	615.045.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	4 Dokumen	452.000.000	403.276.000	368.144.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		4 Dokumen	230.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	12 Lokasi	10 Lokasi	11.524.520.000	1.750.959.000	1.463.872.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		10 Lokasi	280.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	73.000.000	105.724.000	140.524.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		1 Laporan	105.045.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-	1 Lokasi	-	5.563.397.000	3.827.945.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-06		1 Lokasi	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				444.540.000	744.520.000	748.128.000								1.100.285.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				444.540.000	744.520.000	748.128.000								1.100.285.000	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen	100 persen	438.000.000	644.720.000	688.828.000							100 persen	1.091.192.000	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luasan bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya	73.35 persen	73.35 persen	438.000.000	644.720.000	688.828.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Masyarakat Kota Pekalongan	73.35 persen	1.091.192.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	438.000.000	644.720.000	688.828.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		1 Dokumen	1.091.192.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen	50 persen	6.540.000	99.800.000	59.300.000							50 persen	9.093.000	
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen	50 persen	6.540.000	99.800.000	59.300.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Masyarakat Kota Pekalongan	50 persen	9.093.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.540.000	99.800.000	59.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		2 Dokumen	9.093.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				11.813.808.000	12.439.172.000	12.254.008.000								13.207.214.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.813.808.000	12.439.172.000	12.254.008.000								13.207.214.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.813.808.000	12.439.172.000	12.254.008.000								13.207.214.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	5.971.915.000	6.168.080.000	6.111.593.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	5.445.107.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	18.110.000	18.110.000	10.019.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Satpol P3KP	100 persen	62.450.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	7.320.000	7.320.000	6.024.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	10.750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.650.000	1.650.000	1.485.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	9.140.000	9.140.000	2.510.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	50.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.340.904.000	5.485.914.000	5.485.369.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Satpol P3KP	100 persen	4.578.591.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.289.254.000	5.434.264.000	5.434.264.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		40 Orang/bulan	4.524.941.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	50.000.000	49.620.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	52.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	1.650.000	1.650.000	1.485.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	4.500.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Satpol P3KP	100 persen	9.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	4.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	162.750.000	191.650.000	148.792.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Satpol P3KP	100 persen	225.441.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.480.000	5.480.000	4.932.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	22.210.000	22.210.000	20.753.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	35.941.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.840.000	5.840.000	5.258.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	70.810.000	70.810.000	63.729.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	97.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.480.000	5.480.000	4.932.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Paket	7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.830.000	1.830.000	1.188.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	50 Laporan	51.100.000	80.000.000	48.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		50 Laporan	65.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	126.929.000	149.184.000	149.159.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Satpol P3KP	100 persen	129.125.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.278.000	1.278.000	1.278.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	2.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	125.651.000	147.906.000	147.881.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	127.125.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	318.222.000	318.222.000	313.754.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	100 persen	440.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	29 Unit	310.222.000	310.222.000	306.854.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		29 Unit	400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	8.000.000	8.000.000	6.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Unit	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	85 persen	85 persen	4.968.603.000	5.236.802.000	5.119.892.000							85 persen	6.586.817.000	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	97 persen	97 persen	1.052.490.000	1.052.490.000	971.340.000			Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11	Masyarakat Kota Pekalongan	97 persen	1.772.410.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	39 Dokumen	35 Dokumen	758.590.000	758.590.000	728.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		35 Dokumen	1.020.410.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	155 Orang	155 Orang	15.410.000	15.410.000	42.080.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		155 Orang	48.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	2 Dokumen	91.250.000	91.250.000	24.590.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		2 Dokumen	148.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	300 laporan	300 laporan	31.390.000	31.390.000	22.990.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		300 laporan	106.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1800 Laporan	1800 Laporan	155.850.000	155.850.000	143.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		1800 Laporan	450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	2 Laporan	-	-	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		2 Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	20 perda	20 perda	3.905.163.000	4.173.362.000	4.143.077.000			Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11	Masyarakat Kota Pekalongan	20 perda	4.794.856.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	48 laporan	-	471.932.000	471.932.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH CHT	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		48 laporan	505.360.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Laporan	4 Laporan	37.750.000	37.750.000	25.961.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		4 Laporan	223.515.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	6 Laporan	3.856.463.000	3.652.730.000	3.639.169.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		6 Laporan	4.045.981.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48 Laporan	24 Laporan	10.950.000	10.950.000	6.015.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		24 Laporan	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	18 persen	18 persen	10.950.000	10.950.000	5.475.000			Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11	PPNS Kota Pekalongan	18 persen	19.551.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	2 Laporan	10.950.000	10.950.000	5.475.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		2 Laporan	19.551.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100 persen	100 persen	873.290.000	1.034.290.000	1.022.523.000							100 persen	1.175.290.000	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen	100 persen	751.270.000	912.270.000	930.144.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	975.239.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	3 Dokumen	18.070.000	18.070.000	12.770.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	53.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	180 Laporan	180 Laporan	680.270.000	680.270.000	680.686.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		180 Laporan	837.239.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan	42 Orang	42 Orang	10.950.000	10.950.000	8.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		42 Orang	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dan Penanggulangan Kebakaran														
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	5.480.000	5.480.000	4.498.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Desa/Kelurahan	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	2 Unit	10.950.000	171.950.000	209.464.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Unit	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3 Dokumen	2 Dokumen	25.550.000	25.550.000	14.576.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100 persen	100 persen	29.200.000	29.200.000	17.120.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	45.466.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	9 Dokumen	9 Dokumen	29.200.000	29.200.000	17.120.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Dokumen	45.466.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen	100 persen	53.020.000	53.020.000	37.039.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	81.839.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	80 Orang	80 Orang	30.660.000	30.660.000	14.944.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		80 Orang	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	22.360.000	22.360.000	22.095.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		21 Desa/Kelurahan	31.839.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen	100 persen	39.800.000	39.800.000	38.220.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	72.746.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang	12 Laporan	12 Laporan	39.800.000	39.800.000	38.220.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	72.746.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Mengancam Keselamatan Manusia														KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3.564.489.000	3.489.739.000	3.424.927.000								3.370.513.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.564.489.000	3.489.739.000	3.424.927.000								3.370.513.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.564.489.000	3.489.739.000	3.424.927.000								3.370.513.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	2.082.849.000	2.102.949.000	2.066.723.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	2.067.004.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	17.984.000	17.984.000	12.734.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen	17.722.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	4.836.000	4.836.000	4.476.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	2.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.148.000	1.148.000	1.148.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	7.110.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	13.722.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	1.722.562.000	1.722.562.000	1.722.442.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen	1.509.642.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.687.598.000	1.687.598.000	1.687.598.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Opsen PKB	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Orang/bulan	1.476.592.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	33.900.000	33.900.000	33.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Keroon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	31.550.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.064.000	1.064.000	944.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	16.070.000	10.070.000	10.070.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen	22.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	7.070.000	7.070.000	7.070.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Paket	9.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	9.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		50 Orang	12.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	92.900.000	119.800.000	89.800.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen	182.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.320.000	1.320.000	1.320.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	2.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4 Paket	7.990.000	7.990.000	7.990.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	58.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	730.000	6.580.000	6.580.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	19.710.000	19.710.000	19.710.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	30.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13 Paket	6.570.000	6.570.000	6.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	9.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	1 Dokumen	1.830.000	2.630.000	2.630.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	2.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	35 Laporan	54.750.000	75.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		35 Laporan	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	113.683.000	112.883.000	113.027.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen	125.840.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4 Laporan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Keroon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	1.800.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	58.313.000	57.513.000	57.513.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	68.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54.270.000	54.270.000	54.414.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	55.640.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	119.650.000	119.650.000	118.650.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen	209.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	73.000.000	73.000.000	73.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		11 Unit	115.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	14.600.000	14.600.000	14.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Unit	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	45 Unit	32.050.000	32.050.000	31.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		45 Unit	44.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase korban bencana alam yang ditangani	100 persen	100 persen	1.481.640.000	1.386.790.000	1.358.204.000							100 persen	1.303.509.000	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen	100 Persen	51.180.000	46.560.000	37.360.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana	100 Persen	65.926.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	50 Orang	51.180.000	46.560.000	37.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		50 Orang	65.926.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen	100 Persen	873.940.000	923.940.000	927.066.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana	100 Persen	946.610.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	3 Unit	4 Unit	10.830.000	60.830.000	60.680.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Unit	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelethan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Kawasan	1 Kawasan	863.110.000	863.110.000	866.386.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Kawasan	846.610.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen	100 Persen	510.890.000	375.660.000	359.340.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana	100 Persen	150.040.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	125.040.000	125.040.000	117.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	125.040.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2500 Orang	2500 Orang	385.850.000	250.620.000	242.340.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2500 Orang	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	100 Persen	100 Persen	45.630.000	40.630.000	34.438.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana	100 Persen	140.933.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	27.380.000	27.380.000	21.188.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Kegiatan	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	18.250.000	13.250.000	13.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	90.933.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				12.042.547.000	11.415.833.000	11.238.997.000								12.197.202.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.980.133.000	7.846.723.000	7.676.587.000								7.876.244.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.980.133.000	7.846.723.000	7.676.587.000								7.876.244.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	3.649.209.000	3.755.039.000	3.731.735.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	4.153.760.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	26.640.000	26.640.000	24.270.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100 persen	16.363.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000	8.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	2.750.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.720.000	5.720.000	3.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.420.000	12.420.000	12.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	11.963.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.610.150.000	2.610.150.000	2.609.250.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN	100 persen	3.352.604.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.567.467.000	2.567.467.000	2.567.467.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		19 Orang/bulan	3.302.654.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	39.300.000	39.300.000	39.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	48.300.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.383.000	3.383.000	2.483.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 persen	8.639.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	8.639.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	241.348.000	291.258.000	279.886.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 persen	312.853.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.300.000	7.300.000	7.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	41.140.000	91.050.000	113.004.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		6 Paket	100.766.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.110.000	4.110.000	4.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	7.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	82.318.000	82.318.000	88.918.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	75.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	13 Paket	5.480.000	5.480.000	5.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	2.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	50 Laporan	100.000.000	100.000.000	60.074.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		50 Laporan	107.087.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	365.321.000	365.321.000	349.422.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 persen	196.050.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.760.000	1.760.000	1.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	2.400.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	177.561.000	177.561.000	165.340.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	128.450.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	186.000.000	186.000.000	182.322.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	65.200.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	400.750.000	456.670.000	463.907.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 persen	267.251.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	69 Unit	68 Unit	200.000.000	225.920.000	229.157.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		68 Unit	223.351.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	182.500.000	202.500.000	202.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		8 Unit	25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 Unit	63 Unit	18.250.000	28.250.000	32.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		63 Unit	18.900.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	75 persen	386.432.000	390.512.000	381.396.000							75 persen	427.366.000	
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	10 persen	182.140.000	182.140.000	177.748.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	10 persen	161.098.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Keluarga	600 Keluarga	182.140.000	182.140.000	177.748.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		600 Keluarga	161.098.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	75 persen	204.292.000	208.372.000	203.648.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02	DINSOS P2KB	75 persen	266.268.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	41.480.000	41.480.000	41.240.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		30 Orang	107.520.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	3 Orang	130.872.000	104.952.000	100.968.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		3 Orang	158.748.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	31.940.000	61.940.000	61.440.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		1 Lembaga		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	100 persen	1.720.232.000	1.760.492.000	1.729.610.000							100 persen	1.475.572.000	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 Persen	100 Persen	1.161.926.000	1.189.082.000	1.167.222.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02	Masyarakat Kota Pekalongan	100 Persen	1.411.919.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	65 Orang	456.696.000	457.932.000	494.556.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		65 Orang	214.572.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	65 Orang	643.860.000	669.780.000	638.176.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		65 Orang	1.197.347.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	65 Orang	61.370.000	61.370.000	34.490.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		65 Orang		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.82 Persen	3.82 Persen	558.306.000	571.410.000	562.388.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02	Masyarakat Kota Pekalongan	3.82 Persen	63.653.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	903 Orang	923 Orang	428.560.000	428.560.000	427.060.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		923 Orang		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	23.540.000	23.540.000	22.490.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		10 Orang		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	60 Orang	16.010.000	16.010.000	12.260.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		60 Orang		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	37.446.000	50.550.000	50.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		10 Orang	63.653.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83 Orang	100 Orang	52.750.000	52.750.000	50.028.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		100 Orang		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	53,73 persen	53,73 persen	1.328.740.000	1.492.520.000	1.385.700.000							53,73 persen	982.056.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH	10 Persen	10 Persen	1.328.740.000	1.492.520.000	1.385.700.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02	Masyarakat Kota Pekalongan	10 Persen	982.056.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 Orang	16000 Orang	564.920.000	627.110.000	534.210.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		16000 Orang	646.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 Keluarga	1300 Keluarga	763.820.000	865.410.000	851.490.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU DBH CHT	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		1300 Keluarga	335.406.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	100 persen	704.500.000	345.250.000	345.092.000							100 persen	487.399.000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	100 persen	704.500.000	345.250.000	345.092.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	487.399.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	500 Orang	300.000.000	300.000.000	289.882.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		500 Orang	455.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	500 Orang	386.250.000	27.000.000	42.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		500 Orang	32.399.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	500 Orang	18.250.000	18.250.000	13.210.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		500 Orang		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	100 persen	191.020.000	102.910.000	103.054.000							100 persen	350.091.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	100 persen	191.020.000	102.910.000	103.054.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02	Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan	100 persen	350.091.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	128.110.000	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		0 Dokumen	295.091.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	62.910.000	102.910.000	103.054.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-02		1 Makam	55.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.062.414.000	3.569.110.000	3.562.410.000								4.320.958.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.062.414.000	3.569.110.000	3.562.410.000								4.320.958.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	100 persen	247.600.000	205.380.000	205.380.000							100 persen	72.746.000	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBP (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	100 persen	247.600.000	205.380.000	205.380.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Kota Pekalongan	100 persen	72.746.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	54.480.000	54.480.000	54.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	72.746.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	27 Laporan	145.120.000	122.100.000	122.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		27 Laporan		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 Dokumen	8 Dokumen	48.000.000	28.800.000	28.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		8 Dokumen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	12 persen	12 persen	1.859.294.000	1.746.610.000	1.742.610.000							12 persen	2.601.871.000	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertlilty Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.24 perseribu	8.24 perseribu	969.070.000	899.576.000	899.576.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	8.24 perseribu	1.845.020.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	80.010.000	486.456.000	486.456.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		2 Laporan		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan	16 Laporan	196.000.000	96.800.000	96.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		16 Laporan	1.735.020.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 Laporan	40 Laporan	111.360.000	83.120.000	83.120.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		40 Laporan		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	381.700.000	109.300.000	109.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	110.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi	3 Organisasi	200.000.000	123.900.000	123.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		3 Organisasi		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.6 persen	20.6 persen	890.224.000	847.034.000	843.034.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	20.6 persen	756.851.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	62.452.000	78.500.000	78.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		12 Laporan		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 Orang	1137 Orang	427.747.000	517.624.000	517.624.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1137 Orang		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	0 Unit	199.995.000	-	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelavangan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		0 Unit	470.376.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Kesehatan Dasar							
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	1 Laporan	200.030.000	250.910.000	246.910.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Laporan	286.475.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	13,00 persen	13,00 persen	1.955.520.000	1.617.120.000	1.614.420.000							13,00 persen	1.646.341.000	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	100 persen	1.955.520.000	1.617.120.000	1.614.420.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	1.646.341.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Organisasi	5 Organisasi	468.720.000	130.320.000	127.620.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		5 Organisasi	159.541.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	10 laporan	708.000.000	708.000.000	708.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		10 laporan	708.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	11 laporan	778.800.000	778.800.000	778.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		11 laporan	778.800.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Dinas Lingkungan Hidup				32.393.284.000	35.923.164.000	55.024.839.000								32.385.800.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				32.393.284.000	35.923.164.000	55.024.839.000								32.385.800.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				32.393.284.000	35.923.164.000	55.024.839.000								32.385.800.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	15.570.419.500	18.066.571.000	17.225.871.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	13.320.509.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	17.120.000	27.470.000	27.470.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	23.051.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.480.000	3.480.000	3.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	2.750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.640.000	1.640.000	1.640.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	22.350.000	22.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	18.651.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	10.170.149.000	10.170.149.000	10.170.149.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	10.280.620.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	10.064.449.000	10.064.449.000	10.064.449.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		105 Orang/bulan	10.172.970.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	104.180.000	104.180.000	104.180.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	106.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.520.000	1.520.000	1.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	12.330.000	12.330.000	12.330.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	28.531.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	12.330.000	12.330.000	12.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Paket	28.531.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	390.688.000	2.090.488.000	504.892.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	250.975.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.026.000	9.026.000	9.026.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	5.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	60.964.000	1.760.764.000	170.006.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	57.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Usaha DAU							
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	730.000	730.000	4.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	8.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	141.700.000	141.700.000	163.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	82.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	24.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.580.000	2.580.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87 Laporan	87 Laporan	140.688.000	140.688.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		87 Laporan	70.075.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	564.433.000	564.433.000	657.758.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	554.735.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.760.000	1.760.000	1.760.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	2.400.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	267.960.000	267.960.000	353.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	263.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	294.713.000	294.713.000	302.038.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	289.335.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4.415.699.500	5.201.701.000	5.853.272.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	2.182.597.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	173.149.500	173.151.000	198.601.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		19 Unit	162.982.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	47 Unit	47 Unit	4.120.360.000	4.520.360.000	5.030.081.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		47 Unit	1.889.315.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	103.940.000	489.940.000	595.940.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit	105.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	54 Unit	18.250.000	18.250.000	28.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		54 Unit	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase limbah yang diolah	45.97 persen	45.97 persen	1.167.896.000	1.167.896.000	1.152.446.000							45.97 persen	3.595.020.000	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	54.38 persen	54.38 persen	805.556.000	805.556.000	796.806.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Masyarakat Kota Pekalongan	54.38 persen	952.518.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	533.720.000	533.720.000	533.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Kesehatan	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		1 Dokumen	570.018.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.250.000	18.250.000	18.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		1 Dokumen	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	200 Dokumen	200 Dokumen	253.586.000	253.586.000	244.836.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pajak Air Tanah	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		200 Dokumen	357.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76.47 persen	76.47 persen	362.340.000	362.340.000	355.640.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Masyarakat Kota Pekalongan	76.47 persen	2.642.502.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan	48.180.000	48.180.000	48.180.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		2 Laporan	66.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Titik	5 Titik	314.160.000	314.160.000	307.460.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pajak Air Tanah	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		5 Titik	2.576.502.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,939 persen	2,939 persen	3.635.404.500	3.489.103.000	3.449.336.000							2,939 persen	4.191.994.000	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik	109.981 Ha	109.981 Ha	3.635.404.500	3.489.103.000	3.449.336.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Masyarakat Kota Pekalongan	109.981 Ha	4.191.994.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	108,53 Ha	108,53 Ha	2.750.334.500	2.604.033.000	2.566.916.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DBH Pajak Air Tanah	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		108,53 Ha	3.929.494.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	34,1 Unit	7 Unit	885.070.000	885.070.000	882.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		7 Unit	262.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	13,33 persen	1.640.000	1.640.000	1.115.000							13,33 persen	2.273.000	
Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	6 persen	6 persen	1.640.000	1.640.000	1.115.000			Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07	Masyarakat Kota Pekalongan	6 persen	2.273.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	1.640.000	1.640.000	1.115.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-03	Prio Kota-07		1 Laporan	2.273.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	16,67 persen	29.590.000	129.590.000	374.190.000							16,67 persen	61.518.000	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	10 kegiatan	10 kegiatan	29.590.000	129.590.000	374.190.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	10 kegiatan	61.518.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.230.000	11.230.000	260.030.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	23.368.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	67 Badan Usaha	45 Badan Usaha	18.360.000	118.360.000	114.160.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		45 Badan Usaha	38.150.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	50,00 persen	244.480.000	603.330.000	659.452.000							50,00 persen	322.836.000	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	5 komunitas	5 komunitas	244.480.000	603.330.000	659.452.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	5 komunitas	322.836.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	38.330.000	138.330.000	138.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	90.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	700 Orang	5000 Orang	105.050.000	226.415.000	282.537.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		5000 Orang	232.836.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 Lembaga	5 Lembaga	101.100.000	238.585.000	238.585.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		5 Lembaga	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	100 persen	100 persen	44.350.000	44.350.000	42.350.000							100 persen	86.368.000	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten/Kota	3 penghargaan	3 penghargaan	44.350.000	44.350.000	42.350.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	3 penghargaan	86.368.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	4 Entitas	44.350.000	44.350.000	42.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Entitas	86.368.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	10.630.000	10.630.000	8.305.000							100 persen	18.187.000	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6 kasus	6 kasus	10.630.000	10.630.000	8.305.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	6 kasus	18.187.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	18 Pengaduan	18 Pengaduan	9.310.000	9.310.000	7.285.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		18 Pengaduan	18.187.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	1 Perkara	1.320.000	1.320.000	1.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Perkara	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	0,3 persen	0,3 persen	11.688.874.000	12.410.054.000	32.111.774.000							0,3 persen	10.787.095.000	
Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	17.94 persen	17.94 persen	11.688.874.000	12.410.054.000	32.111.774.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Masyarakat Kota Pekalongan	17.94 persen	10.787.095.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	35 Kelompok	35 Kelompok	497.950.000	907.950.000	1.862.295.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		35 Kelompok	427.734.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.606.445.000	2.944.445.000	19.857.308.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DBH DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		1 Dokumen	3.585.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada														
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	56324807 Ton	40280 Ton	8.584.479.000	8.557.659.000	10.392.171.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		40280 Ton	6.774.361.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				5.442.217.000	5.623.367.000	5.553.152.000								5.974.616.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.442.217.000	5.623.367.000	5.553.152.000								5.974.616.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.442.217.000	5.623.367.000	5.553.152.000								5.974.616.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	4.715.027.000	4.842.677.000	4.798.047.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	5.152.947.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	18.050.000	18.050.000	20.450.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Disdukcapil	100 Persen	39.219.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.523.000	2.523.000	2.523.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	10.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.189.000	1.189.000	1.189.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	14.338.000	14.338.000	16.738.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	26.819.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.605.636.000	3.605.636.000	3.608.636.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Disdukcapil	100 Persen	3.439.120.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.569.802.000	3.569.802.000	3.569.802.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		28 Orang/bulan	3.374.470.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penqujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000	34.200.000	37.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	63.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.634.000	1.634.000	1.634.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	8.880.000	8.880.000	8.880.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Disdukcapil	100 Persen	21.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	51 Orang	3.880.000	3.880.000	3.880.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		51 Orang	12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	666.291.000	783.941.000	749.069.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Disdukcapil	100 Persen	1.254.736.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.575.000	2.575.000	2.575.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	1.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	534.210.000	642.136.000	634.871.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	1.069.736.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.290.000	3.290.000	3.290.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	4.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	26.200.000	26.200.000	27.483.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	29.200.000	29.200.000	29.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	2.240.000	2.240.000	2.240.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	4.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	24 Laporan	68.576.000	78.300.000	49.260.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		24 Laporan	100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	264.903.000	264.903.000	249.795.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Disdukcapil	100 Persen	297.801.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.190.000	2.190.000	2.190.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	136.505.000	136.505.000	136.505.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	110.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	126.208.000	126.208.000	111.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	184.701.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	151.267.000	161.267.000	161.217.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Disdukcapil	100 Persen	100.571.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	13 Unit	94.257.000	94.257.000	94.057.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Unit	56.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	19.350.000	29.350.000	29.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Unit	23.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit	37.660.000	37.660.000	37.660.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		28 Unit	21.571.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	87,07 persen	88,10 persen	313.670.000	316.270.000	307.272.000							88,10 persen	351.135.000	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	415016 dokumen	415016 dokumen	313.670.000	316.270.000	307.272.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat	415016 dokumen	351.135.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	46000 Dokumen	40000 Dokumen	284.583.000	284.583.000	283.435.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		40000 Dokumen	283.635.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	16.473.000	20.063.000	13.913.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	31.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	12.614.000	11.624.000	9.924.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan	36.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,85 persen	94,00 persen	341.730.000	341.730.000	329.193.000							94,00 persen	291.975.000	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	6981 dokumen	6981 dokumen	341.730.000	341.730.000	329.193.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat	6981 dokumen	291.975.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9285 Dokumen	5852 Dokumen	320.415.000	320.415.000	318.128.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		5852 Dokumen	279.975.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	1 Layanan	21.315.000	21.315.000	11.065.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Layanan	12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	12,00 OPD	12,00 OPD	71.790.000	122.690.000	118.640.000							12,00 OPD	178.559.000	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali	2 kali	71.790.000	122.690.000	118.640.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat	2 kali	178.559.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	22.220.000	72.220.000	72.220.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan	76.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	18.540.000	18.990.000	17.340.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan	80.559.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1 Dokumen	31.030.000	31.480.000	29.080.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak				5.467.058.000	5.741.063.000	5.708.306.000								5.703.080.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.467.058.000	5.741.063.000	5.708.306.000								5.703.080.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				514.261.000	514.062.000	467.335.000								350.791.000	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9,24 persen	9,24 persen	150.940.000	165.940.000	190.845.000							9,24 persen	98.798.000	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	16.67 persen	16.67 persen	14.960.000	14.960.000	12.304.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05	OPD se Kota Pekalongan, Masyarakat/Pegiat Pengarusutamaan Gender (PUG)	16.67 persen	47.785.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	14.960.000	14.960.000	12.304.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05		4 Dokumen	47.785.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	33.33 persen	33.33 persen	15.590.000	15.590.000	12.715.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Forkom Puspa (Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)	33.33 persen	36.373.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	15.590.000	15.590.000	12.715.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05		2 Dokumen	36.373.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100 Persen	100 Persen	120.390.000	135.390.000	165.826.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05	Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan	100 Persen	14.640.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	2 Lembaga	120.390.000	135.390.000	165.826.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05		2 Lembaga	14.640.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15.01 persen	15.01 persen	78.062.000	73.612.000	64.459.000							15.01 persen	64.476.000	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan	100 persen	100 persen	9.770.000	9.770.000	8.895.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05	Masyarakat, Tim LPPAR, Tim PPKBM PUSPAGA ELPePar, Tim HIMPSI	100 persen	28.639.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota														PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	9.770.000	9.770.000	8.895.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05		3 Dokumen	28.639.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	100 Persen	100 Persen	68.292.000	63.842.000	55.564.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05	Masyarakat/Korban Tindak Kekerasan	100 Persen	35.837.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Layanan	35 Layanan	68.292.000	63.842.000	55.564.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05		35 Layanan	35.837.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	48,15 persen	48,15 persen	215.615.000	215.615.000	161.820.000							48,15 persen	137.872.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak yang aktif	34.38 persen	34.38 persen	215.615.000	215.615.000	161.820.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05	Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat	34.38 persen	137.872.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	98.225.000	98.225.000	68.054.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05		300 Orang	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	96.770.000	96.770.000	75.446.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05		5 Dokumen	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	20.620.000	20.620.000	18.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05		2 Dokumen	42.872.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100 persen	100 persen	69.644.000	58.895.000	50.211.000							100 persen	49.645.000	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)	100.00 Persen	100.00 Persen	9.780.000	9.780.000	8.530.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05	Sekolah dan Siswa	100.00 Persen	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9.780.000	9.780.000	8.530.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05		1 Kegiatan	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	53.232.000	42.483.000	36.399.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05	Anak Korban Kekerasan, Keluarga dan Masyarakat	100 persen	23.225.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	24 Layanan	35 Layanan	53.232.000	42.483.000	36.399.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05		35 Layanan	23.225.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	100 persen	6.632.000	6.632.000	5.282.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05	PATBM Kelurahan, Dinas/Instansi /Lembaga terkait	100 persen	11.420.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	25 Orang	27 Orang	6.632.000	6.632.000	5.282.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-05		27 Orang	11.420.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.952.797.000	5.227.001.000	5.240.971.000								5.352.289.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	3.666.753.000	3.890.957.000	3.341.998.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	3.412.954.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	20.762.000	20.762.000	17.364.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00 Persen	19.686.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	7.204.000	7.204.000	6.214.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	4.186.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.558.000	1.558.000	1.403.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	9.747.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	14.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	2.558.067.000	2.767.072.000	2.764.199.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00 Persen	2.823.407.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.517.093.000	2.726.098.000	2.726.098.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebliakan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		21 Orang/bulan	2.775.257.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja							
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	39.530.000	39.530.000	36.837.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	46.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.444.000	1.444.000	1.264.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.650.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	3.650.000	3.650.000	3.650.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00 Persen	8.639.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	3.650.000	3.650.000	3.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	8.639.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	192.256.000	207.455.000	165.169.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00 Persen	198.220.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.710.000	1.710.000	1.710.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	44.952.000	44.952.000	44.952.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	26.720.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.050.000	2.050.000	2.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	38.244.000	38.244.000	38.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	22.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13 Paket	4.380.000	4.380.000	4.380.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	2.530.000	2.530.000	2.530.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	2.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	42 Laporan	98.390.000	113.589.000	71.303.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		42 Laporan	140.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	270.268.000	270.268.000	272.620.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00 Persen	184.956.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.520.000	2.520.000	2.520.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	2.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	107.400.000	107.400.000	86.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	78.856.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	160.348.000	160.348.000	184.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	103.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	621.750.000	621.750.000	118.996.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00 Persen	178.046.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	71.960.000	71.960.000	71.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		16 Unit	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	535.300.000	535.300.000	32.546.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Unit	102.246.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	52 Unit	14.490.000	14.490.000	14.490.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		52 Unit	10.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerja sama TNI dan kelurahan	83,33 persen	83,33 persen	557.400.000	557.400.000	1.162.250.000							83,33 persen	1.240.847.000	
Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan	11.11 persen	11.11 persen	557.400.000	557.400.000	1.162.250.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	11.11 persen	1.240.847.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	557.400.000	557.400.000	1.162.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Dokumen	1.240.847.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	88.89 persen	88.89 persen	32.528.000	32.528.000	31.178.000							88.89 persen	50.164.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	32.528.000	32.528.000	31.178.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kelurahan	100.00 persen	50.164.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	32.528.000	32.528.000	31.178.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	50.164.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masvarakat	97.75 persen	97.75 persen	696.116.000	746.116.000	705.545.000							97.75 persen	648.324.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100.00 persen	100.00 persen	696.116.000	746.116.000	705.545.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat	100.00 persen	648.324.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	130.182.000	130.182.000	120.876.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	165.475.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	54.894.000	54.894.000	50.216.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Lembaga	158.375.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	49.770.000	49.770.000	31.920.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	86.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	34.980.000	34.980.000	20.180.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	68.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	426.290.000	476.290.000	482.353.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	170.274.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Perhubungan				27.272.850.000	26.632.532.000	26.891.056.000								26.495.918.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.272.850.000	26.632.532.000	26.891.056.000								26.495.918.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				27.272.850.000	26.632.532.000	26.891.056.000								26.495.918.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	21.525.040.000	6.637.480.000	6.628.001.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	19.330.918.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	21.528.200	21.528.000	18.508.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perhubungan	100 persen	21.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.741.000	3.741.000	3.401.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	3.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.763.000	1.763.000	1.568.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	16.024.200	16.024.000	13.539.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	16.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	4.585.024.800	4.585.025.000	4.581.019.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perhubungan	100 persen	4.927.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.496.695.000	4.496.695.000	4.496.695.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pajak Daerah Retribusi Jasa Umum DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		39 Orang/bulan	4.839.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	86.695.800	86.696.000	83.096.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	86.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.634.000	1.634.000	1.228.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	2.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	20.000.000	20.000.000	14.972.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perhubungan	100 persen	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	14.972.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perhubungan	100 persen	160.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	160.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	556.620.000	653.680.000	680.957.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perhubungan	100 persen	685.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.650.000	3.650.000	3.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	51.100.000	126.100.000	174.970.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.870.000	11.870.000	11.385.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	7.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	298.000.000	298.000.000	295.917.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	325.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13 Paket	111.840.000	111.840.000	130.464.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	170.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.220.000	2.220.000	2.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	60 Laporan	77.940.000	100.000.000	62.051.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		60 Laporan	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	65.700.000	65.700.000	72.250.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perhubungan	100 persen	165.887.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	65.700.000	65.700.000	72.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Unit	165.887.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	15.829.749.000	745.129.000	720.959.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perhubungan	100 persen	12.641.531.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.320.000	1.320.000	2.120.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	2.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.481.570.000	396.950.000	371.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	12.318.531.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	346.859.000	346.859.000	347.039.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	321.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	441.418.000	541.418.000	534.336.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Perhubungan	100 persen	690.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	34 Unit	336.348.000	336.348.000	342.340.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		34 Unit	300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	62.050.000	162.050.000	151.220.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Unit	350.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61 Unit	75 Unit	43.020.000	43.020.000	40.776.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		75 Unit	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	97,00 persen	97,00 persen	5.747.810.000	19.995.052.000	20.263.055.000							97,00 persen	7.165.000.000	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	100 persen	100 persen	2.856.700.000	2.856.700.000	2.935.404.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Pengguna Jalan	100 persen	2.965.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	49.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Opsen PKB	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		1 Dokumen	65.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	38 Dokumen	38 Dokumen	2.831.700.000	2.831.700.000	2.886.404.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Opsen PKB	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		38 Dokumen	2.900.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan	4 jenis	4 jenis	1.868.270.000	16.065.512.000	16.089.161.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Pengguna Jalan	4 jenis	2.804.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	99 Unit	67 Unit	649.470.000	519.470.000	539.170.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		67 Unit	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	9 Unit	215.100.000	257.722.000	321.660.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		9 Unit	790.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15 Unit	46 Unit	803.680.000	803.680.000	1.020.347.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Opsen PKB	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		46 Unit	1.214.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit	12 Unit	200.020.000	14.484.640.000	14.207.984.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		12 Unit	300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 kali	1 kali	21.900.000	21.900.000	21.900.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Pengguna Angkutan	1 kali	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	2 Unit	21.900.000	21.900.000	21.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Opsen PKB	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		2 Unit	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pembinaan dan pengawasan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dilaksanakan	180 kali	180 kali	237.880.000	287.880.000	525.880.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Pengguna Jalan	180 kali	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	237.880.000	287.880.000	525.880.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Opsen PKB	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		4 Laporan	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)	65.12 persen	65.12 persen	177.180.000	177.180.000	181.742.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Pengguna Jalan	65.12 persen	299.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2980 Unit	2980 Unit	15.250.000	15.250.000	27.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Opsen PKB	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		2980 Unit	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2787 Dokumen	2787 Dokumen	72.550.000	72.550.000	12.828.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		2787 Dokumen	170.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit	89.380.000	89.380.000	141.584.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Opsen PKB	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		9 Unit	104.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	92 persen	92 persen	535.870.000	535.870.000	443.400.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Pengguna Jalan	92 persen	502.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	5 Dokumen	25.020.000	25.020.000	23.261.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		5 Dokumen	32.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	2 Laporan	16.000.000	16.000.000	13.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		2 Laporan	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	494.850.000	494.850.000	406.689.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		12 Laporan	440.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)	83 persen	83 persen	10.000.000	10.000.000	6.920.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Pengguna Jalan	83 persen	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	6 Laporan	10.000.000	10.000.000	6.920.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		6 Laporan	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	20.510.000	20.510.000	18.552.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Pengguna Jalan	2 kegiatan	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	13.510.000	13.510.000	12.710.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		1 Laporan	20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	7.000.000	5.842.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		1 Laporan	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah Kab/Kota yang difasilitasi	3 jenis	3 jenis	19.500.000	19.500.000	40.096.000			Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08	Pengguna Jalan	3 jenis	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	8.721.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		1 Laporan	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	9.500.000	9.500.000	31.375.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Opsen PKB	Prio Nas-03	Prio Prov-01	Prio Kota-08		1 Unit	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Dinas Komunikasi dan Informatika				12.758.794.000	13.587.604.000	13.178.955.000								67.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.758.794.000	13.587.604.000	13.178.955.000								67.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.566.784.000	13.395.594.000	12.995.137.000								67.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	5.705.790.000	5.881.600.000	5.812.089.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	67.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	21.257.000	21.257.000	18.561.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	7.494.000	7.494.000	6.211.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.763.000	1.763.000	1.559.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	10.791.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	4.345.643.000	4.345.643.000	4.344.873.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.300.101.000	4.300.101.000	4.300.101.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		34 Orang/bulan		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	43.870.000	43.870.000	43.330.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.672.000	1.672.000	1.442.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	72.000.000	143.110.000	143.110.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen	67.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	67.000.000	138.110.000	138.110.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DBH CHT	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		100 Orang	67.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	291.496.000	296.196.000	250.156.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.990.000	2.990.000	2.990.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	71.460.000	71.460.000	64.314.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.686.000	4.686.000	4.686.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	81.160.000	81.160.000	81.160.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	29.200.000	29.200.000	26.290.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Paket		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	11.700.000	11.700.000	11.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	40 Laporan	90.300.000	95.000.000	59.016.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		40 Laporan		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	632.380.000	632.380.000	617.380.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Barat, Semua Kel/Desa								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	501.220.000	501.220.000	486.220.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	128.760.000	128.760.000	128.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	343.014.000	443.014.000	438.009.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen		0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit	200.800.000	200.800.000	209.130.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		24 Unit		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	54.614.000	154.614.000	149.214.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Unit		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	87.600.000	87.600.000	79.665.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		50 Unit		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen	100 persen	4.542.566.000	5.163.566.000	4.955.756.000							100 persen		0
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	90 persen	90 persen	4.542.566.000	5.163.566.000	4.955.756.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan ASN	90 persen		0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12 Laporan	836.152.000	1.238.652.000	1.214.652.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	2 Komunitas	43.660.000	43.660.000	25.310.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Komunitas		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	30 Permohonan	151.980.000	151.980.000	114.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		30 Permohonan		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	75 Persentase	20.000.000	20.000.000	2.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		75 Persentase		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	433.710.000	571.210.000	568.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Rekomendasi		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	2 Media	2.927.568.000	3.008.568.000	2.901.568.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Media		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	12500 Konten	9500 Konten	129.496.000	129.496.000	129.496.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9500 Konten		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,20 indeks	3,20 indeks	2.318.428.000	2.350.428.000	2.227.292.000							3,20 indeks	0	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	64.24 persen	64.24 persen	20.000.000	20.000.000	17.462.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	ASN dan Masyarakat	64.24 persen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	20.000.000	17.462.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)	9.35 persen	9.35 persen	2.298.428.000	2.330.428.000	2.209.830.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	ASN dan Masyarakat	9.35 persen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	2 Aplikasi	79.420.000	86.420.000	78.248.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Aplikasi		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi penyusunan proses bisnis di Dinas Kominfo	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	2 Dokumen	1 Dokumen	16.430.000	16.430.000	14.009.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	3 Laporan	3 Laporan	107.850.000	107.850.000	94.190.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Laporan		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	2 Dokumen	77.850.000	77.850.000	600.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	3 Aplikasi	375.448.000	375.448.000	374.925.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Aplikasi		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	-	30 unit	-	25.000.000	22.548.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		30 unit		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan	181 Perangkat Daerah	181 Perangkat Daerah	1.404.350.000	1.404.350.000	1.397.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		181 Perangkat Daerah		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	5 Layanan	5 Layanan	49.470.000	49.470.000	49.038.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		5 Layanan		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	10 Dokumen	10 Dokumen	167.900.000	167.900.000	162.072.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Dokumen		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	3 Aplikasi	3 Aplikasi	19.710.000	19.710.000	16.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Aplikasi		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				86.960.000	86.960.000	86.960.000								0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 persen	100 persen	86.960.000	86.960.000	86.960.000							100 persen	0	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 persen	100 persen	86.960.000	86.960.000	86.960.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	15 Dokumen	15 Dokumen	50.910.000	50.910.000	50.910.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Dokumen		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	10 Dokumen	10 Dokumen	36.050.000	36.050.000	36.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Dokumen		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				105.050.000	105.050.000	96.858.000								0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen	3,74 persen	105.050.000	105.050.000	96.858.000							3,74 persen	0	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	9.35 persen	9.35 persen	78.420.000	78.420.000	72.076.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	9.35 persen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000	7.400.000	6.352.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	4 Laporan	51.800.000	51.800.000	48.736.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	19.220.000	19.220.000	16.988.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		30 Perangkat Daerah		- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100 persen	100 persen	26.630.000	26.630.000	24.782.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	26.630.000	26.630.000	24.782.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		30 Perangkat Daerah		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				5.319.645.000	5.063.264.000	5.043.674.000								6.963.162.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.319.645.000	5.063.264.000	5.043.674.000								6.963.162.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.319.645.000	5.063.264.000	5.043.674.000								6.963.162.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	3.763.374.000	3.968.808.000	3.966.308.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	5.218.727.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	19.639.000	37.965.000	45.503.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPMPSTP	100 Persen	23.950.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5.097.000	5.097.000	4.377.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.542.000	2.542.000	2.002.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	3.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	30.326.000	39.124.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	18.450.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	2.676.895.000	2.676.895.000	2.675.185.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPMPSTP	100 Persen	3.843.656.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.639.417.000	2.639.417.000	2.639.417.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		22 Orang/bulan	3.793.556.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	36.300.000	36.300.000	34.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	48.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.178.000	1.178.000	818.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.650.000	3.650.000	3.650.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPMPTSP	100 Persen	8.639.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	3.650.000	3.650.000	3.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	8.639.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	231.240.000	237.540.000	213.282.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPMPTSP	100 Persen	461.224.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.830.000	1.830.000	3.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	6.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	59.420.000	59.420.000	52.890.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	126.224.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.560.000	2.560.000	6.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	45.150.000	45.150.000	45.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	40.150.000	40.150.000	31.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2 Dokumen	1.830.000	1.830.000	1.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	4.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	25 Laporan	80.300.000	86.600.000	71.872.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		25 Laporan	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	696.390.000	877.198.000	824.998.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPMPTSP	100 Persen	659.829.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	4.350.000	4.350.000	4.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	12.800.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	435.000.000	435.000.000	382.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	450.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	257.040.000	437.848.000	437.848.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	197.029.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	135.560.000	135.560.000	203.690.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPMPTSP	100 Persen	221.429.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	14 Unit	89.060.000	89.060.000	100.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		14 Unit	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	31.900.000	31.900.000	41.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Unit	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	45 Unit	14.600.000	14.600.000	61.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		45 Unit	21.429.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 dokumen	1,00 dokumen	51.180.000	32.854.000	42.854.000							1,00 dokumen	95.479.000	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan penanaman modal yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	24.350.000	6.024.000	16.024.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	penerima manfaat kegiatan	1 dokumen	55.479.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	24.350.000	6.024.000	16.024.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	55.479.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi penanaman modal yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	26.830.000	26.830.000	26.830.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	penerima manfaat kegiatan	1 dokumen	40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	26.830.000	26.830.000	26.830.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	28.930.000	28.930.000	28.930.000							100 persen	81.839.000	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28.930.000	28.930.000	28.930.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat	1 Kegiatan	81.839.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	28.930.000	28.930.000	28.930.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	81.839.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3025 dokumen	3025 dokumen	739.790.000	765.794.000	733.874.000							3025 dokumen	961.021.000	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun	12 bulan	12 bulan	739.790.000	765.794.000	733.874.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat di Kota Pekalongan	12 bulan	961.021.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	12 Dokumen	9.860.000	9.860.000	9.860.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		12 Dokumen	20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3025 Pelaku Usaha	3025 Pelaku Usaha	441.280.000	467.284.000	455.764.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		3025 Pelaku Usaha	558.820.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	110 Pelaku Usaha	110 Pelaku Usaha	62.460.000	62.460.000	49.260.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		110 Pelaku Usaha	105.001.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	60 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	226.190.000	226.190.000	218.990.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		40 Kegiatan Usaha	277.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru pertahun	7,09 Miliar Rupiah	6,95 Miliar Rupiah	638.003.000	168.510.000	168.340.000							6,95 Miliar Rupiah	486.611.000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal	200 Perusahaan	126 Perusahaan	638.003.000	168.510.000	168.340.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat	126 Perusahaan	486.611.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2 Kegiatan Usaha.	40 Kegiatan Usaha.	107.446.000	52.400.000	47.260.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		40 Kegiatan Usaha.	117.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	290 Pelaku Usaha	127 Pelaku Usaha	348.703.000	79.350.000	77.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		127 Pelaku Usaha	267.231.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	181.854.000	36.760.000	43.970.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		100 Kegiatan Usaha	102.380.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	98.368.000	98.368.000	103.368.000							100 persen	119.485.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	12 Bulan	12 Bulan	98.368.000	98.368.000	103.368.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	DPMTSP Kota Pekalongan	12 Bulan	119.485.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Elektronik yang di Olah, Kaji dan Dimanfaatkan														
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen	98.368.000	98.368.000	103.368.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		12 Dokumen	119.485.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				4.926.753.000	5.286.053.000	5.115.676.000								4.258.396.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.926.753.000	5.286.053.000	5.115.676.000								4.258.396.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				741.097.000	741.097.000	705.041.000								522.605.000	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	25 indeks	25 indeks	741.097.000	741.097.000	705.041.000							25 indeks	522.605.000	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)	2.67 persen	2.67 persen	468.012.000	468.012.000	448.279.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03	Dinarpus	2.67 persen	279.713.800	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	85.650.000	85.650.000	85.693.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		3 Perpustakaan	34.626.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	1 Layanan	151.181.000	151.181.000	147.134.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Layanan	20.802.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	43.785.000	43.785.000	28.726.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Orang	55.126.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	400 Eksemplar	74.410.000	74.410.000	73.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		400 Eksemplar	65.627.700	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	112.986.000	112.986.000	112.851.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Perpustakaan	103.531.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan Nilai Budaya Baca	34.11 persen	34.11 persen	273.085.000	273.085.000	256.762.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03	Masyarakat Kota Pekalongan	34.11 persen	242.891.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	188.380.000	188.380.000	180.825.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Perpustakaan	90.369.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	35.500.000	35.500.000	31.995.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Perpustakaan	67.869.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	1 Orang	3 Orang	23.355.000	23.355.000	20.777.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		3 Orang	43.684.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	1 Lokus	25.850.000	25.850.000	23.165.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-03		1 Lokus	40.969.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				4.185.656.000	4.544.956.000	4.410.635.000								3.735.791.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	3.708.459.600	4.067.759.600	3.952.942.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	3.221.618.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	31.260.000	31.260.000	29.487.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 persen	13.350.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	10.000.000	9.313.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	5.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.300.000	1.300.000	1.235.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.350.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	19.960.000	19.960.000	18.939.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	7.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.534.909.000	2.534.909.000	2.531.044.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 persen	2.410.283.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.490.859.000	2.490.859.000	2.490.859.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		14 Orang/bulan	2.361.483.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	42.750.000	42.750.000	39.015.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	47.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.300.000	1.300.000	1.170.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.300.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 persen	9.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	199.986.600	209.286.600	152.833.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 persen	226.178.100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.389.500	3.389.500	3.390.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	4.686.300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	76.877.600	76.877.600	53.177.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	109.657.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	1.686.300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	42.828.000	42.828.000	40.401.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	60.500.100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13 Paket	6.691.500	6.691.500	6.365.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	5.931.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.186.300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	65.700.000	75.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		35 Laporan	41.530.100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	571.990.000	571.990.000	581.386.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 persen	388.493.900	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	900.000	900.000	450.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	1.800.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	414.000.000	414.000.000	423.414.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	302.636.705	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	157.090.000	157.090.000	157.522.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	84.057.195	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	365.314.000	715.314.000	653.192.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 persen	173.813.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	12 Unit	100.480.000	100.480.000	95.506.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Unit	78.478.800	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	236.734.000	586.734.000	530.396.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Unit	67.834.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	61 Unit	39 Unit	28.100.000	28.100.000	27.290.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		39 Unit	27.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	100 persen	100 persen	328.042.600	328.042.600	318.749.000							100 persen	350.333.000	
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	32.26 persen	32.26 persen	253.850.000	253.850.000	251.529.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	32.26 persen	261.221.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas	3 Berkas	169.070.000	169.070.000	172.261.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Berkas	178.998.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	30 Laporan	84.780.000	84.780.000	79.268.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		30 Laporan	82.223.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip	18 persen	18 persen	55.242.600	55.242.600	54.712.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	18 persen	42.630.640	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25 Arsip	3 Arsip	55.242.600	55.242.600	54.712.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Arsip	42.630.640	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan	80 persen	80 persen	18.950.000	18.950.000	12.508.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	80 persen	46.481.360	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	2 Laporan	18.950.000	18.950.000	12.508.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan	46.481.360	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	149.153.800	149.153.800	138.944.000							100 persen	163.840.000	
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)	100 persen	100 persen	89.530.000	89.530.000	86.639.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	97.483.950	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	600 Berkas	10.040.000	10.040.000	9.078.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		600 Berkas	19.126.900	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	600 Arsip	2500 Arsip	79.490.000	79.490.000	77.561.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2500 Arsip	78.357.050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	100 persen	100 persen	59.623.800	59.623.800	52.305.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	66.356.050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai	1 Arsip	900 Arsip	59.623.800	59.623.800	52.305.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		900 Arsip	66.356.050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
Dinas Kelautan dan Perikanan				8.151.380.000	9.487.959.000	8.916.495.000								8.896.460.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.151.380.000	9.487.959.000	8.916.495.000								8.896.460.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				8.151.380.000	9.487.959.000	8.916.495.000								8.896.460.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	5.320.066.000	5.458.866.000	5.194.828.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	5.010.107.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	24.500.000	24.500.000	19.680.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DKP Kota Pekalongan	100 Persen	22.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	10.000.000	6.280.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	2.750.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	13.000.000	13.000.000	11.950.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	18.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.645.820.000	3.645.820.000	3.639.570.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DKP Kota Pekalongan	100 Persen	4.248.149.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.588.710.000	3.588.710.000	3.588.710.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		23 Orang/bulan	4.186.649.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	55.510.000	55.510.000	49.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	60.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.600.000	1.600.000	1.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DKP Kota Pekalongan	100 Persen	9.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	244.280.000	383.080.000	248.313.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DKP Kota Pekalongan	100 Persen	247.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.670.000	7.670.000	7.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	7.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	71.200.000	135.000.000	81.243.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	41.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.750.000	4.750.000	4.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	4.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	42.760.000	67.760.000	67.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	69.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13 Paket	6.570.000	6.570.000	6.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	7.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.830.000	1.830.000	1.830.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	40 Laporan	109.500.000	159.500.000	78.490.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		40 Laporan	115.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	546.168.000	561.168.000	723.268.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DKP Kota Pekalongan	100 Persen	263.647.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	1.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	181.375.000	196.375.000	361.595.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	152.047.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	363.193.000	363.193.000	360.073.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	109.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	854.298.000	839.298.000	558.997.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DKP Kota Pekalongan	100 Persen	219.061.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	27 Unit	126.358.000	126.358.000	126.058.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		27 Unit	120.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	698.620.000	683.620.000	403.619.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Unit	76.561.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	20 Unit	29.320.000	29.320.000	29.320.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		20 Unit	22.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen	2.227.388.000	3.319.967.000	3.131.896.000							1,00 persen	2.479.286.000	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 persen	5 persen	117.454.000	117.454.000	40.551.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat Kota Pekalongan	5 persen	30.550.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	1 Dokumen	117.454.000	117.454.000	40.551.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	30.550.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Kecil yang dibina	10 persen	10 persen	67.740.000	67.740.000	63.290.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Nelayan Kecil Kota Pekalongan	10 persen	80.850.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	25 Orang	25 Orang	32.190.000	32.190.000	30.440.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		25 Orang	35.850.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	19 Kelompok	15 Kelompok	35.550.000	35.550.000	32.850.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		15 Kelompok	45.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	1 persen	1 persen	2.042.194.000	3.134.773.000	3.028.055.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat Kota Pekalongan	1 persen	2.367.886.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	353 Layanan	353 Layanan	2.042.194.000	3.134.773.000	3.028.055.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		353 Layanan	2.367.886.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,00 persen	3,00 persen	181.988.000	287.188.000	226.838.000							3,00 persen	338.508.000	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100 persen	100 persen	181.988.000	287.188.000	226.838.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Pembudidaya Kota Pekalongan; DKP	100 persen	338.508.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	8.470.000	8.470.000	7.620.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	15.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	12.410.000	12.410.000	11.660.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		2 Unit	114.408.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	4 Dokumen	8.970.000	8.970.000	7.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		4 Dokumen	25.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	126.588.000	246.588.000	192.238.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Unit	50.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	25 Unit	25 Unit	25.550.000	10.750.000	7.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		25 Unit	134.100.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha	2,00 pelaku usaha	421.938.000	421.938.000	362.933.000							2,00 pelaku usaha	1.068.559.000	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Fasilitas Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	16.67 persen	16.67 persen	36.740.000	36.740.000	600.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Poklhasar; Pelaku Usaha Perikanan; Masyarakat Kota Pekalongan	16.67 persen	43.653.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	345 Unit Usaha	50 Unit Usaha	36.740.000	36.740.000	600.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		50 Unit Usaha	43.653.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70 persen	70 persen	385.198.000	385.198.000	362.333.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Pelaku Usaha Perikanan; Poklhasar; Masyarakat Kota Pekalongan	70 persen	1.024.906.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	385.198.000	385.198.000	362.333.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		2 Pelaku Usaha	1.024.906.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga				20.861.161.000	23.414.707.000	23.365.061.000								14.628.147.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.650.050.000	12.517.654.000	13.001.989.500								6.698.634.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				6.559.630.000	9.479.130.000	9.801.045.000								3.158.131.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,81 persen	94,81 persen	1.081.970.000	2.021.970.000	2.241.775.000							94,81 persen	1.047.363.000	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)	0.88 Persen	0.88 Persen	366.970.000	416.970.000	410.875.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemuda Kota Pekalongan	0.88 Persen	950.700.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	30 Orang	10.950.000	60.950.000	54.855.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	BPHTB DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		30 Orang	500.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	3 Kegiatan	3 Kegiatan	356.020.000	356.020.000	356.020.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Kegiatan	450.700.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKK Outcome)	0.563 Persen	0.563 Persen	715.000.000	1.605.000.000	1.830.900.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemuda Kota Pekalongan	0.563 Persen	96.663.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	715.000.000	1.605.000.000	1.830.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan BPHTB DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Organisasi	96.663.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	40,00 persen	40,00 persen	5.477.660.000	7.457.160.000	7.559.270.000							40,00 persen	2.110.768.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarpras olahraga pada jenjang pendidikan	76.19 Persen	76.19 Persen	893.370.000	1.413.370.000	1.277.743.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Altet Kota Pekalongan	76.19 Persen	672.971.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit	3 Unit	893.370.000	1.413.370.000	1.277.743.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Unit	672.971.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan prestasi olahraga tingkat kota	42.86 Persen	42.86 Persen	1.453.700.000	1.848.700.000	2.109.437.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Altet Kota Pekalongan	42.86 Persen	935.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10 Kegiatan	10 Kegiatan	1.110.240.000	1.505.240.000	1.821.211.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Kegiatan	367.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	56.420.000	56.420.000	47.403.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Kegiatan	367.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	70 Orang	70 Orang	287.040.000	287.040.000	240.823.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		70 Orang	200.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi	41 orang	41 orang	2.956.450.000	4.020.950.000	3.997.950.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Altet Kota Pekalongan	41 orang	399.890.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	150 Orang	186.460.000	186.460.000	153.460.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		150 Orang	215.800.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	150 Orang	150 Orang	2.769.990.000	3.834.490.000	3.844.490.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		150 Orang	184.090.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	4 Event	4 Event	174.140.000	174.140.000	174.140.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Altet Kota Pekalongan	4 Event	102.907.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3 Laporan	3 Laporan	174.140.000	174.140.000	174.140.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Laporan	102.907.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.090.420.000	3.038.524.000	3.200.944.500								3.540.503.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	100 persen	1.259.890.000	1.184.740.000	1.339.733.000							100 persen	1.748.642.000	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan	5 Event	5 Event	867.700.000	836.590.000	1.002.076.000			Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10	Kota Pekalongan	5 Event	998.642.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	867.700.000	836.590.000	1.002.076.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10		1 Objek	998.642.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	8 Event	8 Event	392.190.000	348.150.000	337.657.000			Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10	Kota Pekalongan	8 Event	750.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek	392.190.000	348.150.000	337.657.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10		3 Objek	750.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen	100 persen	155.480.000	155.630.000	155.630.000							100 persen	495.593.000	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	26 komunitas	26 komunitas	155.480.000	155.630.000	155.630.000			Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10	Kota Pekalongan	26 komunitas	495.593.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	155.480.000	155.630.000	155.630.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10		1 Lembaga	495.593.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	100 persen	31.250.000	31.250.000	31.250.000							100 persen	68.199.000	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi	100 Persen	100 Persen	31.250.000	31.250.000	31.250.000			Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10	Kota Pekalongan	100 Persen	68.199.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	31.250.000	31.250.000	31.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10		1 Dokumen	68.199.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	95,74 persen	95,74 persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000							95,74 persen	19.551.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.84 Persen	2.84 Persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000			Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10	Kota Pekalongan	2.84 Persen	19.551.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	3 Objek	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10		3 Objek	19.551.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum batik	8,29 persen	8,29 persen	1.623.800.000	1.646.904.000	1.654.331.500							8,29 persen	1.208.518.000	
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung museum batik	29000 Orang	29000 Orang	1.623.800.000	1.646.904.000	1.654.331.500			Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10	Kota Pekalongan	29000 Orang	1.208.518.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1310 Unit	1310 Unit	240.457.000	241.000.000	241.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10		1310 Unit	210.684.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4 Unit	4 Unit	1.270.293.000	1.292.854.000	1.300.281.500	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10		4 Unit	876.623.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	9 Unit	9 Unit	113.050.000	113.050.000	113.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Prio Nas-08	Prio Prov-01	Prio Kota-10		9 Unit	121.211.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				11.211.111.000	10.897.053.000	10.363.071.500								7.929.513.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				11.211.111.000	10.897.053.000	10.363.071.500								7.929.513.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	6.362.312.000	5.525.236.000	5.535.538.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	5.863.761.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	29.788.000	29.788.000	26.158.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	22.850.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	8.538.000	8.538.000	8.088.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	2.750.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.501.000	2.501.000	2.501.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.650.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	18.749.000	18.749.000	15.569.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	18.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	4.243.188.000	4.243.188.000	4.243.068.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	4.930.177.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.182.818.000	4.182.818.000	4.182.818.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Usaha DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		30 Orang/bulan	4.848.077.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	57.900.000	57.900.000	57.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	80.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.470.000	2.470.000	2.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.650.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	915.726.000	28.650.000	28.650.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	9.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	3.650.000	28.650.000	28.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	912.076.000	-	-	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DBH CHT	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		100 Orang	-	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	244.330.000	244.330.000	208.569.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	296.666.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.480.000	5.480.000	5.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	7.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	54.200.000	54.200.000	56.387.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	40.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.480.000	5.480.000	7.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	10.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	60.370.000	60.370.000	60.370.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	58.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	14.600.000	14.600.000	14.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.830.000	1.830.000	2.830.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan	230 Laporan	102.370.000	102.370.000	61.422.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		230 Laporan	158.166.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	632.600.000	668.600.000	668.660.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	447.400.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	2.400.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	374.000.000	410.000.000	410.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	268.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	256.200.000	256.200.000	256.260.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	177.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	296.680.000	310.680.000	360.433.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	157.168.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	84.730.000	101.230.000	101.230.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		19 Unit	74.840.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	182.350.000	179.850.000	234.599.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit	62.328.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17 Unit	29.600.000	29.600.000	24.604.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		17 Unit	20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12,00 persen	12,00 persen	3.292.957.000	3.237.957.000	3.173.863.000							12,00 persen	508.450.000	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang berkembang	100 Persen	100 Persen	3.285.657.000	3.230.657.000	3.166.563.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Kota Pekalongan	100 Persen	488.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	620.000.000	620.000.000	620.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		2 Unit	488.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Laporan		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1 Lokasi	2.615.657.000	2.560.657.000	2.501.563.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Lokasi		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Pariwisata yang mendapat rekomendasi	100 Persen	100 Persen	7.300.000	7.300.000	7.300.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Kota Pekalongan	100 Persen	20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	7.300.000	7.300.000	7.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	41,98 persen	41,98 persen	678.342.000	778.342.000	643.534.500							41,98 persen	1.051.705.000	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	25 Persen	25 Persen	678.342.000	778.342.000	643.534.500			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Kota Pekalongan	25 Persen	1.051.705.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	300.000.000	256.342.500	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	BPHTB DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		2 Dokumen	279.205.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	203.342.000	303.342.000	262.192.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	BPHTB DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	495.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000	50.000.000		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		2 Kegiatan	224.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	2 Promosi	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		2 Promosi	53.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk	51,28 persen	51,28 persen	165.000.000	260.000.000	210.118.000							51,28 persen	272.798.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	berekspresi, berpromosi dan berinteraksi														
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan EKRAF EXPO	1 event	1 event	150.000.000	245.000.000	203.950.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	SDM Ekonomi Kreatif	1 event	242.798.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	1 Unit	150.000.000	245.000.000	203.950.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	BPHTB DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Unit	242.798.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase ketercapaian pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	100 persen	100 persen	15.000.000	15.000.000	6.168.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	SDM Ekonomi Kreatif	100 persen	30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	15 Produk	0 Produk	15.000.000	15.000.000	6.168.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		0 Produk	30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	80,00 persen	80,00 persen	712.500.000	1.095.518.000	800.018.000							80,00 persen	232.799.000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar	15.38 Persen	15.38 Persen	697.500.000	1.080.518.000	794.018.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	SDM Ekonomi Kreatif	15.38 Persen	202.799.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	373.000.000	806.018.000	556.018.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Laporan	100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	30 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		30 Orang	32.799.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100 Orang	100 Orang	273.000.000	223.000.000	223.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU Earmark bid. Pendidikan	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		100 Orang	20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	25 Orang	0 Orang	36.500.000	36.500.000		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		0 Orang	50.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 persen	100 persen	15.000.000	15.000.000	6.000.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	SDM Ekonomi Kreatif	100 persen	30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis,	60 Orang	30 Orang	15.000.000	15.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		30 Orang	30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						Utara, Panjang Wetan								KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Pertanian dan Pangan				8.037.309.000	7.336.461.000	7.286.839.000								7.718.188.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				359.770.000	479.770.000	429.234.000								263.178.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				359.770.000	479.770.000	429.234.000								263.178.000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan daerah	4,70 persen	4,70 persen	296.439.000	416.439.000	378.373.000							4,70 persen	202.252.000	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	129.157.000	129.157.000	116.307.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	69.400.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	106.747.000	106.747.000	102.837.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Laporan	32.600.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.140.000	10.140.000	5.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		12 Dokumen	16.800.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	12.270.000	12.270.000	8.070.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan daerah	4500 Kg	9700 Kg	114.155.000	234.155.000	196.039.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	9700 Kg	132.322.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	8.155.000	8.155.000	5.905.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4,5 Ton	9,7 Ton	106.000.000	226.000.000	190.134.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		9,7 Ton	107.322.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan	3 kegiatan	3 kegiatan	53.127.000	53.127.000	66.027.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	3 kegiatan	530.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	53.127.000	53.127.000	66.027.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Laporan	530.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen	100 persen	35.881.000	35.881.000	24.361.000							100 persen	18.187.000	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	4 kecamatan	4 kecamatan	35.881.000	35.881.000	24.361.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 kecamatan	18.187.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.881.000	35.881.000	24.361.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	18.187.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari	86,4 persen	86,4 persen	27.450.000	27.450.000	26.500.000							86,4 persen	42.739.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	pengawasan keamanan pangan														
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	26 sampel	26 sampel	27.450.000	27.450.000	26.500.000			Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01	Masyarakat kota Pekalongan	26 sampel	42.739.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	27.450.000	27.450.000	26.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-04	Prio Prov-02	Prio Kota-01		1 Dokumen	42.739.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.677.539.000	6.856.691.000	6.857.605.000								7.455.010.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				7.677.539.000	6.856.691.000	6.857.605.000								7.455.010.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	5.860.462.000	5.954.614.000	5.914.510.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	6.800.586.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	20.433.000	20.433.000	18.633.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinperpa	100 persen	23.850.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.915.000	3.915.000	3.915.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	4.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.690.000	3.690.000	3.690.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.650.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.828.000	12.828.000	11.028.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	17.700.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.059.045.000	5.140.250.000	5.137.850.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinperpa	100 persen	6.286.975.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	39 Orang/bulan	5.006.285.000	5.087.490.000	5.087.490.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		39 Orang/bulan	6.204.154.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	51.050.000	51.050.000	48.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	81.171.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.710.000	1.710.000	1.710.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.650.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinperpa	100 persen	9.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	246.503.000	259.450.000	199.138.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinperpa	100 persen	148.942.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	1.250.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50.766.000	50.766.000	50.001.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	36.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.760.000	2.760.000	2.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	34.028.000	34.028.000	34.028.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	40.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	12.926.000	12.926.000	12.926.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.720.000	1.720.000	1.720.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159 Laporan	94 Laporan	143.053.000	156.000.000	96.453.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		94 Laporan	56.192.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	332.643.000	332.643.000	357.231.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinperpa	100 persen	274.619.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.640.000	1.640.000	1.640.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	2.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	125.000.000	149.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	120.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	206.003.000	206.003.000	206.591.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	152.619.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	196.838.000	196.838.000	196.658.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinperpa	100 persen	56.700.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	31 Unit	59.290.000	59.290.000	59.110.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		31 Unit	38.200.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	118.467.000	118.467.000	118.467.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit	8.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	45 Unit	19.081.000	19.081.000	19.081.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		45 Unit	10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian pertahun Nilai produksi peternakan pertahun	55,78 199,66 Miliar Rupiah	55,78 199,66 Miliar Rupiah	1.421.483.000	406.483.000	430.828.000							55,78 199,66 Miliar Rupiah	242.404.000	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen	100 persen	1.021.860.000	211.860.000	204.797.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Dinperpa	100 persen	109.880.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	14 Laporan	1 Laporan	910.000.000	-	14.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	SILPA	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Laporan	-	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	111.860.000	211.860.000	190.097.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		12 Laporan	109.880.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota	100 persen	100 persen	53.573.000	53.573.000	48.797.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Dinperpa	100 persen	77.867.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	13.470.000	13.470.000	9.630.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	40.103.000	40.103.000	39.167.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		3 Varietas Unggul Baru (VUB)	52.867.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 kali	5 kali	58.550.000	83.550.000	83.334.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat Kota Pekalongan	5 kali	37.657.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	6 Laporan	1 Laporan	23.550.000	23.550.000	23.034.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Laporan	17.157.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	6 Laporan	1 Laporan	35.000.000	60.000.000	60.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Laporan	20.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan pelayanan ULIB	5 persen	5 persen	287.500.000	57.500.000	93.900.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat Kota Pekalongan	5 persen	17.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	200 Laporan	1 Laporan	287.500.000	57.500.000	93.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Laporan	17.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen	100 persen	16.466.000	116.466.000	116.466.000							100 persen	20.000.000	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)	100 persen	100 persen	16.466.000	116.466.000	116.466.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Kelompok Tani	100 persen	20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	16.466.000	116.466.000	116.466.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Unit	20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen	5,00 persen	305.194.000	305.194.000	283.232.000							5,00 persen	230.515.000	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani	800 kasus	800 kasus	63.105.000	63.105.000	60.589.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat Kota Pekalongan	800 kasus	56.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	2 Laporan	63.105.000	63.105.000	60.589.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		2 Laporan	56.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak	100 persen	100 persen	10.984.000	10.984.000	9.534.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	6 laporan	1 laporan	10.984.000	10.984.000	9.534.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 laporan	15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN	500 ekor	500 ekor	20.620.000	18.720.000	10.520.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat Kota Pekalongan	500 ekor	35.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	1 Laporan	20.620.000	18.720.000	10.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Laporan	35.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 persen	100 persen	210.485.000	212.385.000	202.589.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	124.515.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	29.575.000	31.475.000	25.525.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Laporan	37.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	180.910.000	180.910.000	177.064.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		12 Unit Usaha	87.015.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	100 persen	13.300.000	13.300.000	12.300.000							100 persen	25.000.000	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan	4 kali	4 kali	13.300.000	13.300.000	12.300.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat Kota Pekalongan	4 kali	25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 Ha	1 Ha	13.300.000	13.300.000	12.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Ha	25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100 persen	100 persen	24.927.000	24.927.000	15.137.000							100 persen	31.826.000	
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin	5 persen	5 persen	24.927.000	24.927.000	15.137.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat Kota Pekalongan	5 persen	31.826.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan	24.927.000	24.927.000	15.137.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Laporan	31.826.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen	5,00 persen	35.707.000	35.707.000	85.132.000							5,00 persen	104.679.000	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 persen	100 persen	35.707.000	35.707.000	85.132.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	104.679.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	12.850.000	12.850.000	5.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Unit	25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	22.857.000	22.857.000	42.802.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Unit	43.199.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	8 Orang	-	-	36.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		8 Orang	36.480.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				20.301.719.000	22.726.719.000	25.838.151.000								18.938.375.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				385.300.000	1.010.300.000	1.209.160.000								2.209.866.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				385.300.000	1.010.300.000	1.209.160.000								2.209.866.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen	32,36 persen	47.180.000	97.180.000	237.765.000							32,36 persen	123.668.000	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	64,46 persen	64,46 persen	47.180.000	97.180.000	237.765.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	KSP/USP/KSPPS	64,46 persen	123.668.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	60 Unit Usaha	47.180.000	97.180.000	237.765.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		60 Unit Usaha	123.668.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	10,48 persen	10,48 persen	14.600.000	14.600.000	105.485.000							10,48 persen	667.649.000	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0,9863 persen	0,9863 persen	14.600.000	14.600.000	105.485.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Koperasi dan UMKM	0,9863 persen	667.649.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	204 Orang	14.600.000	14.600.000	105.485.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	SILPA DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		204 Orang	667.649.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 persen	12,27 persen	323.520.000	898.520.000	865.910.000							12,27 persen	1.418.549.000	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	6,06 UMKM	6,06 UMKM	323.520.000	898.520.000	865.910.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	UMKM	6,06 UMKM	1.418.549.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	47 Unit Usaha	183 Unit Usaha	323.520.000	898.520.000	865.910.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		183 Unit Usaha	1.418.549.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				19.916.419.000	21.716.419.000	24.628.991.000								16.728.509.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				19.916.419.000	21.716.419.000	24.628.991.000								16.728.509.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	9.777.328.000	9.777.328.000	10.524.988.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	9.259.026.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	18.084.000	18.084.000	14.980.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dindagkop UKM	100 Persen	22.850.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.132.000	3.132.000	3.602.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	2.750.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.952.000	2.952.000	2.472.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.650.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	8.906.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	18.450.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	6.996.168.000	6.996.168.000	6.989.488.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dindagkop UKM	100 Persen	8.031.431.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	6.926.650.000	6.926.650.000	6.926.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		62 Orang/bulan	7.956.581.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	67.800.000	67.800.000	61.150.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	73.200.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.718.000	1.718.000	1.688.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.650.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	9.500.000	9.500.000	9.500.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dindagkop UKM	100 Persen	14.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	9.500.000	9.500.000	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	14.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	633.441.000	633.441.000	693.055.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dindagkop UKM	100 Persen	317.450.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	7.093.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	2.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	196.011.000	196.011.000	264.756.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	47.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	2.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	85.850.000	85.850.000	85.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	64.950.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	67.000.000	67.000.000	59.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	60.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.580.000	2.580.000	2.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	100 Laporan	272.000.000	272.000.000	265.176.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		100 Laporan	137.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.498.735.000	1.498.735.000	2.235.760.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dindagkop UKM	100 Persen	518.053.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	2.400.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	979.300.000	979.300.000	1.721.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	415.240.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	516.935.000	516.935.000	511.960.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	100.413.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	621.400.000	621.400.000	582.205.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dindagkop UKM	100 Persen	354.742.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	39 Unit	465.000.000	465.000.000	422.429.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		39 Unit	304.742.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	130.000.000	130.000.000	127.376.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Unit	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	61 Unit	26.400.000	26.400.000	32.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		61 Unit	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93 persen	76,93 persen	6.330.000	6.330.000	5.571.000							76,93 persen	2.728.000	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen	100 persen	4.530.000	4.530.000	4.071.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko dan Swalayan, serta Toko dan Swalayan Berjejaring	100 persen	1.728.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	4 Dokumen	4.530.000	4.530.000	4.071.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		4 Dokumen	1.728.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 persen	100 persen	1.800.000	1.800.000	1.500.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Pemilik Gudang	100 persen	1.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1.800.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	1.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen	100 persen	8.682.729.000	10.482.729.000	12.692.721.000							100 persen	6.050.840.000	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18.75 persen	18.75 persen	8.633.379.000	10.433.379.000	12.635.371.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Masyarakat, Pedagang dan UMKM	18.75 persen	5.928.840.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	1.500.000.000	2.750.000.000	4.945.872.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Lain-lain PAD Yang Sah DBH DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Unit		DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	12 Unit	7.133.379.000	7.683.379.000	7.689.499.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha DBH DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		12 Unit	5.928.840.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	57.47 Persen	57.47 Persen	49.350.000	49.350.000	57.350.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Petugas Pasar (Pegawai Kebersihan, Keamanan, Penjaga Malam, Pengampu Pasar dan Juru Pungut Retribusi)	57.47 Persen	122.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	49.350.000	49.350.000	57.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Retribusi Jasa Umum	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		2 Dokumen	122.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	100 persen	100 persen	102.960.000	102.960.000	94.801.000							100 persen	482.398.000	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	90.91 persen	90.91 persen	96.740.000	96.740.000	90.061.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Pedagang, Agen, Distributor, Toko dan Swalayan, serta Toko dan Swalayan Berjejaring	90.91 persen	477.398.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	18 Laporan	19 Laporan	96.740.000	96.740.000	90.061.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		19 Laporan	130.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	6.220.000	6.220.000	4.740.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Distributor dan Kios Tani Penyalur Pupuk Bersubsidi	100 persen	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	3 Laporan	6.220.000	6.220.000	4.740.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		3 Laporan	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen	7,99 persen	98.970.000	98.970.000	93.970.000							7,99 persen	117.849.000	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir	1 pelaku usaha	1 pelaku usaha	98.970.000	98.970.000	93.970.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	UMKM dan Eksportir	1 pelaku usaha	117.849.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 Produk	30 Produk	98.970.000	98.970.000	93.970.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		30 Produk	117.849.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 persen	81,99 persen	279.022.000	279.022.000	244.352.000							81,99 persen	354.637.000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	81,99 persen	81,99 persen	279.022.000	279.022.000	244.352.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Pedagang dan Pelaku Usaha pemilik Alat Ukur dan Perlengkapannya	81,99 persen	354.637.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5164 Unit	2582 Unit	254.112.000	254.112.000	227.692.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		2582 Unit	309.637.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	50 Orang	24.910.000	24.910.000	16.660.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		50 Orang	45.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 persen	6,42 persen	969.080.000	969.080.000	972.588.000							6,42 persen	461.031.000	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 persen	100 persen	969.080.000	969.080.000	972.588.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	UMKM	100 persen	461.031.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150 UMKM	150 UMKM	872.330.000	872.330.000	892.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		150 UMKM	370.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	30 UMKM	96.750.000	96.750.000	80.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		30 UMKM	91.031.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				11.554.775.000	13.349.286.000	13.306.243.000								15.325.137.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.123.805.000	13.038.316.000	13.038.506.000								14.733.957.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				11.123.805.000	13.038.316.000	13.038.506.000								14.733.957.000	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen	1,15 persen	3.355.717.000	5.028.594.000	5.084.795.000							1,15 persen	5.324.808.000	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen	100 persen	3.213.567.000	4.886.444.000	4.953.389.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04	Pencari Kerja Kota Pekalongan	100 persen	5.087.510.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1621 Orang	1480 Orang	2.832.939.000	4.307.776.000	4.401.030.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DBH CHT	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		1480 Orang	4.600.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	1 Lembaga	238.738.000	436.778.000	420.305.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		1 Lembaga	252.049.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	141 Unit	148 Unit	141.890.000	141.890.000	132.054.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		148 Unit	235.461.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	90 persen	90 persen	19.830.000	19.830.000	15.086.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04	LPKS Kota Pekalongan	90 persen	75.259.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	20 Lembaga	19.830.000	19.830.000	15.086.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		20 Lembaga	75.259.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	6 tenant	6 tenant	68.656.000	68.656.000	68.656.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04	Tenant Kota Pekalongan	6 tenant	87.039.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	30 Perusahaan	68.656.000	68.656.000	68.656.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		30 Perusahaan	87.039.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	46.67 persen	46.67 persen	53.664.000	53.664.000	47.664.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04	Alumni siswa pelatihan dan Peminat magang Jepang Kota Pekalongan	46.67 persen	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	53.664.000	53.664.000	47.664.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		2 Dokumen	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen	27,93 persen	350.444.000	350.444.000	306.283.000							27,93 persen	830.134.000	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di	12.97 persen	12.97 persen	158.114.000	158.114.000	138.493.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04	1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat	12.97 persen	265.625.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan											Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan			
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	40 Orang	0 Orang	7.524.000	7.524.000		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		0 Orang	20.625.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	140 Orang	140 Orang	25.760.000	25.760.000	25.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		140 Orang	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 Orang	20 Orang	14.600.000	14.600.000	14.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		20 Orang	25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	61 Orang	60 Orang	110.230.000	110.230.000	98.133.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		60 Orang	170.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	12 buku	12 buku	150.530.000	150.530.000	146.530.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan Kota Pekalongan	12 buku	196.764.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	62.970.000	62.970.000	62.970.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		1 Dokumen	65.746.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700 Orang	700 Orang	17.200.000	17.200.000	16.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		700 Orang	25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	100 Orang	70.360.000	70.360.000	67.160.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		100 Orang	106.018.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	49 orang	49 orang	41.800.000	41.800.000	21.260.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04	CPMI Kota Pekalongan	49 orang	367.745.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	0 Orang	20.540.000	20.540.000		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		0 Orang	335.724.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	102 Orang	102 Orang	21.260.000	21.260.000	21.260.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		102 Orang	32.021.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen	52,00 persen	376.100.000	538.324.000	594.959.000							52,00 persen	644.442.000	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanva Beroperasi dalam 1	41.22 persen	41.22 persen	82.550.000	82.550.000	62.805.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04	Perusahaan di Kota Pekalongan	41.22 persen	116.394.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan														
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	12 Perusahaan	30 Perusahaan	17.090.000	17.090.000	10.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		30 Perusahaan	25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	8 Perusahaan	25 Perusahaan	13.140.000	13.140.000	9.405.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		25 Perusahaan	18.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	11 Laporan	6 Laporan	52.320.000	52.320.000	42.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		6 Laporan	73.394.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	77.11 persen	77.11 persen	293.550.000	455.774.000	532.154.000			Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan	77.11 persen	528.048.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 Perkara	15 Perkara	8.420.000	8.420.000	6.280.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		15 Perkara	15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	8 Perkara	8 Perkara	5.480.000	5.480.000	5.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		8 Perkara	12.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.240.000	12.240.000	9.554.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	22.048.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	70.810.000	70.810.000	61.430.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		1 Lembaga	99.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40 Orang	4559 Orang	196.600.000	358.824.000	449.410.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU DBH CHT	Prio Nas-06	Prio Prov-02	Prio Kota-04		4559 Orang	380.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase	100 persen	100 persen	7.041.544.000	7.120.954.000	7.052.469.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	7.934.573.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	25.287.000	25.287.000	23.037.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinperinaker	100 persen	26.450.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	6.249.000	6.249.000	6.249.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	6.249.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.132.000	2.132.000	2.132.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.132.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	16.906.000	16.906.000	14.656.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	18.069.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	6.028.036.000	6.028.036.000	6.026.236.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinperinaker	100 persen	6.564.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	48 Orang/bulan	5.968.560.000	5.968.560.000	5.968.560.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Usaha DAU Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		48 Orang/bulan	6.500.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	57.500.000	57.500.000	55.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	62.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.976.000	1.976.000	1.976.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	2.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	3.650.000	3.650.000	3.650.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinperinaker	100 persen	9.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	3.650.000	3.650.000	3.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	259.938.000	284.348.000	240.813.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinperinaker	100 persen	355.623.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.380.000	4.380.000	4.380.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	6.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	90.027.000	90.027.000	90.027.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	120.873.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	74.716.000	74.716.000	71.496.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	85.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13 Paket	7.825.000	7.825.000	7.825.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	8.750.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.650.000	3.650.000	3.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	10 Laporan	75.590.000	100.000.000	59.685.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Laporan	125.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	540.679.000	595.679.000	587.079.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinperinaker	100 persen	649.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	4.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	260.500.000	260.500.000	260.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	295.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	277.179.000	332.179.000	323.579.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	350.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	183.954.000	183.954.000	171.654.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Dinperinaker	100 persen	330.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	108.774.000	108.774.000	108.774.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		23 Unit	120.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	49.400.000	49.400.000	37.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit	180.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	54 Unit	25.780.000	25.780.000	25.780.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		54 Unit	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				430.970.000	310.970.000	267.737.000								591.180.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				430.970.000	310.970.000	267.737.000								591.180.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	75,34 persen	389.560.000	269.560.000	233.577.000							75,34 persen	481.600.000	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	4,0 persen	4,0 persen	389.560.000	269.560.000	233.577.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan	4,0 persen	481.600.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	31.730.000	31.730.000	18.777.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	41.600.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	42.830.000	42.830.000	30.610.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	45.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	114.300.000	144.300.000	142.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	235.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	88.850.000	38.850.000	30.640.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	110.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	111.850.000	11.850.000	11.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	25,00 persen	7.470.000	7.470.000	4.470.000							25,00 persen	13.640.000	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	30 persen	30 persen	7.470.000	7.470.000	4.470.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	IKM Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan	30 persen	13.640.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	7.470.000	7.470.000	4.470.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	13.640.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat														
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	33.940.000	33.940.000	29.690.000							100 persen	95.940.000	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	33 persen	33 persen	33.940.000	33.940.000	29.690.000			Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan	33 persen	95.940.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.800.000	30.800.000	26.550.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	90.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	3.140.000	3.140.000	3.140.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-05	Prio Prov-01	Prio Kota-09		1 Dokumen	5.940.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Sekretariat Daerah				17.495.764.000	15.977.091.000	15.977.091.000								14.698.272.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				17.495.764.000	15.977.091.000	15.977.091.000								14.698.272.000	
SEKRETARIAT DAERAH				17.495.764.000	15.977.091.000	15.977.091.000								14.698.272.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	16.111.414.000	15.977.091.000	15.977.091.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	14.698.272.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	15.977.091.000	15.977.091.000	15.977.091.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat Daerah	100 persen	14.698.272.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	119 Orang/bulan	15.977.091.000	15.977.091.000	15.977.091.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		119 Orang/bulan	14.698.272.000	SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pemerintahan				134.640.000	518.990.000	465.104.000								858.996.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				134.640.000	518.990.000	465.104.000								858.996.000	
SEKRETARIAT DAERAH				134.640.000	518.990.000	465.104.000								858.996.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen	100 persen	134.640.000	518.990.000	465.104.000							100 persen	858.996.000	
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	100 persen	100 persen	134.640.000	426.280.000	362.959.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	788.996.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	77.910.000	70.510.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	349.417.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	213.730.000	150.744.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	247.509.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	134.640.000	134.640.000	141.705.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	192.070.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase efektivitas kerja sama daerah	100 persen	100 persen	0	92.710.000	102.145.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	-	92.710.000	102.145.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		20 Dokumen	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Hukum				508.356.000	508.356.000	444.107.000								1.010.824.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				508.356.000	508.356.000	444.107.000								1.010.824.000	
SEKRETARIAT DAERAH				508.356.000	508.356.000	444.107.000								1.010.824.000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100 persen	100 persen	508.356.000	508.356.000	444.107.000							100 persen	1.010.824.000	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 persen	100 persen	508.356.000	508.356.000	444.107.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Bagian Hukum, Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	1.010.824.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	95.630.000	95.630.000	114.769.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Dokumen	108.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	19 Kasus	6 Kasus	320.370.000	320.370.000	237.582.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		6 Kasus	818.824.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1200 Dokumen	1200 Dokumen	92.356.000	92.356.000	91.756.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1200 Dokumen	84.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Organisasi				217.107.000	281.430.000	239.333.000								447.662.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				217.107.000	281.430.000	239.333.000								447.662.000	
SEKRETARIAT DAERAH				217.107.000	281.430.000	239.333.000								447.662.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen	100 persen	217.107.000	281.430.000	239.333.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	447.662.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Kota	80 indeks	80 indeks	217.107.000	281.430.000	239.333.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Seluruh OPD Kota Pekalongan	80 indeks	447.662.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	64.323.000	49.023.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	110.662.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	126.607.000	126.607.000	114.635.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan	157.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	36 Dokumen	36 Dokumen	90.500.000	90.500.000	75.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		36 Dokumen	180.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Perekonomian Dan SDA				294.780.000	568.500.000	572.106.000								891.031.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				294.780.000	568.500.000	572.106.000								891.031.000	
SEKRETARIAT DAERAH				294.780.000	568.500.000	572.106.000								891.031.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100 Persen	100 Persen	294.780.000	568.500.000	572.106.000							100 Persen	891.031.000	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100 Persen	100 Persen	209.780.000	209.780.000	213.386.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Agen Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan Kota Pekalongan	100 Persen	237.665.000	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	41.500.000	41.500.000	63.990.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	76.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	90.130.000	90.130.000	79.167.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	63.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	78.150.000	78.150.000	70.229.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	98.665.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT	12 bulan	12 bulan	85.000.000	358.720.000	358.720.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	OPD Penerima DBHCHT, Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan	12 bulan	653.366.000	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	85.000.000	358.720.000	358.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH CHT	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	653.366.000	SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan				523.610.000	723.610.000	481.338.000								622.867.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				523.610.000	723.610.000	481.338.000								622.867.000	
SEKRETARIAT DAERAH				523.610.000	723.610.000	481.338.000								622.867.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen	6,00 persen	523.610.000	723.610.000	481.338.000							6,00 persen	622.867.000	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	100 persen	100 persen	60.738.000	60.738.000	70.138.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	110.029.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	28.450.000	28.450.000	32.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan	42.681.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	32.288.000	32.288.000	37.188.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan	67.348.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	100 persen	100 persen	462.872.000	662.872.000	411.200.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	512.838.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	4 Dokumen	190.000.000	190.000.000	190.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Dokumen	224.984.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen	272.872.000	472.872.000	221.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Dokumen	287.854.000	SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesejahteraan Rakyat				16.881.040.000	16.505.040.000	16.608.906.000								16.039.090.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				16.881.040.000	16.505.040.000	16.608.906.000								16.039.090.000	
SEKRETARIAT DAERAH				16.881.040.000	16.505.040.000	16.608.906.000								16.039.090.000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian fasilitas pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen	16.881.040.000	16.505.040.000	16.608.906.000							100 persen	16.039.090.000	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 persen	100 persen	16.881.040.000	16.505.040.000	16.608.906.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	16.039.090.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	106 Dokumen	88 Dokumen	15.665.203.000	15.279.203.000	15.417.131.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	PBB Pedesaan dan Perkotaan DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		88 Dokumen	14.436.520.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	22 Dokumen	22 Dokumen	520.422.000	530.422.000	522.024.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DBH CHT	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		22 Dokumen	660.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan	79 Dokumen	57 Dokumen	695.415.000	695.415.000	669.751.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		57 Dokumen	942.570.000	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas														
Bagian Umum				18.121.809.000	20.438.729.000	20.514.806.000								15.549.424.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				18.121.809.000	20.438.729.000	20.514.806.000								15.549.424.000	
SEKRETARIAT DAERAH				18.121.809.000	20.438.729.000	20.514.806.000								15.549.424.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	18.121.809.000	20.438.729.000	20.514.806.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	15.549.424.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	61.851.000	61.851.000	60.701.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat Daerah	100 persen	75.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	7.842.000	7.842.000	7.692.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	3.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.009.000	2.009.000	2.009.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	12.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	52.000.000	52.000.000	51.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	59.750.000	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	199.712.000	199.712.000	199.712.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat Daerah	100 persen	231.100.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	197.850.000	197.850.000	197.850.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	211.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.862.000	1.862.000	1.862.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	19.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	338.667.000	360.732.000	400.532.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat Daerah	100 persen	87.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	338.667.000	360.732.000	400.532.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Paket	87.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	8.487.129.000	9.516.484.000	8.981.166.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat Daerah	100 persen	0	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 Paket	4 Paket	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	-	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bangunan Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.057.939.000	1.407.939.000	1.668.739.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	1.020.725.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	202.669.000	202.669.000	202.669.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.420.987.000	1.317.307.000	1.218.063.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	1.591.721.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	66.831.000	66.831.000	66.831.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	257.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	83.445.000	83.445.000	83.445.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	77.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	1.085.258.000	1.174.208.000	1.574.208.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	1.085.258.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3000 Laporan	3000 Laporan	4.500.000.000	5.194.085.000	4.097.211.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3000 Laporan	2.102.672.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.753.905.000	2.832.565.000	2.897.785.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat Daerah	100 persen	2.376.180.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	27.600.000	27.600.000	27.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	26.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.173.000.000	1.173.000.000	1.173.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	969.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.553.305.000	1.631.965.000	1.697.185.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	1.380.580.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	4.018.296.000	4.670.136.000	5.204.960.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat Daerah	100 persen	4.866.312.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	70 Unit	1.665.124.000	1.742.884.000	1.712.532.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		70 Unit	1.456.080.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	1.952.472.000	2.526.552.000	3.091.728.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Unit	3.009.732.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	190 Unit	190 Unit	400.700.000	400.700.000	400.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		190 Unit	400.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	100 persen	100 persen	892.249.000	1.117.249.000	1.089.950.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	717.956.000	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	852.249.000	1.077.249.000	1.049.950.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pajak Reklame	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Orang/Bulan	687.956.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pajak Reklame	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Orang	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100 persen	100 persen	1.440.000.000	1.680.000.000	1.680.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	810.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	840.000.000	960.000.000	960.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pajak Reklame	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Paket	480.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	600.000.000	720.000.000	720.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pajak Reklame	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Paket	330.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1.181.988.000	1.181.988.000	1.378.640.000								1.244.310.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1.181.988.000	1.181.988.000	1.378.640.000								1.244.310.000	
SEKRETARIAT DAERAH				1.181.988.000	1.181.988.000	1.378.640.000								1.244.310.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen	100 persen	1.181.988.000	1.181.988.000	1.378.640.000							100,00 persen	1.244.310.000	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	100 persen	100 persen	1.181.988.000	1.181.988.000	1.378.640.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	1.244.310.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	244.400.000	244.400.000	221.340.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	283.728.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	201 Laporan	201 Laporan	639.800.000	639.800.000	864.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		201 Laporan	610.582.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	297.788.000	297.788.000	292.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat DPRD				61.718.912.000	61.530.977.000	63.935.007.000								48.388.190.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				61.718.912.000	61.530.977.000	63.935.007.000								48.388.190.000	
SEKRETARIAT DPRD				61.718.912.000	61.530.977.000	63.935.007.000								48.388.190.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	34.511.800.000	35.293.631.000	36.228.767.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	28.908.364.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran	100 Persen	100 Persen	20.064.000	20.064.000	20.064.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat DPRD	100 Persen	16.500.000	SEKRETARIAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dan evaluasi kinerja perangkat daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.306.000	3.306.000	3.306.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	7.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.558.000	1.558.000	1.558.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.500.000	SEKRETARIAT DPRD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15.200.000	15.200.000	15.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	8.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.227.585.000	3.263.585.000	3.263.585.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat DPRD	100 Persen	3.328.071.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.163.841.000	3.163.841.000	3.163.841.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		25 Orang/bulan	3.256.171.000	SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	62.300.000	98.300.000	98.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	70.400.000	SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.444.000	1.444.000	1.444.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.500.000	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat DPRD	100 Persen	9.500.000	SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Paket	9.500.000	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.689.605.000	3.488.161.000	2.402.904.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat DPRD	100 Persen	2.710.411.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.131.000	19.131.000	19.131.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	516.517.000	400.517.000	346.530.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		5 Paket	255.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	714.772.000	714.772.000	711.472.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	627.911.000	SEKRETARIAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	4 Paket	32.235.000	32.235.000	32.235.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	142.500.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	25.800.000	25.800.000	25.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	35.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	379.250.000	379.250.000	217.550.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	450 Laporan	1.995.900.000	1.910.456.000	1.044.186.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		450 Laporan	1.300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.244.025.000	1.344.025.000	1.485.429.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat DPRD	100 Persen	940.937.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	1.800.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	276.252.000	276.252.000	339.271.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	965.973.000	1.065.973.000	1.144.358.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	739.137.000	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	893.823.000	1.345.798.000	1.156.964.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat DPRD	100 Persen	1.431.640.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	550.723.000	550.723.000	637.264.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		23 Unit	911.640.000	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	250.000.000	701.975.000	402.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Unit	400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	143 Unit	143 Unit	93.100.000	93.100.000	117.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		143 Unit	120.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 Persen	100 Persen	24.595.218.000	24.720.518.000	26.886.351.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPRD	100 Persen	19.471.305.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	23.704.121.000	23.796.621.000	26.279.585.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		35 Orang/Bulan	18.541.305.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	140 Paket	140 Paket	335.725.000	335.725.000	38.139.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		140 Paket	400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	555.372.000	588.172.000	568.627.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		35 Orang	530.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 Persen	100 Persen	836.480.000	1.106.480.000	1.008.470.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPRD	100 Persen	1.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	386.480.000	386.480.000	288.470.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	450.000.000	720.000.000	720.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Paket	600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen	100 persen	27.207.112.000	26.237.346.000	27.706.240.000							100 persen	19.479.826.000	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen	100 Persen	4.692.620.000	5.857.070.000	8.838.400.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPRD	100 Persen	8.300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	2.772.250.000	2.759.170.000	2.188.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	3.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	11 Dokumen	1.920.370.000	3.097.900.000	6.650.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		11 Dokumen	5.300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 persen	100 persen	302.850.000	275.509.000	100.921.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Sekretariat DPRD	100 persen	409.197.000	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	149.200.000	107.448.000	48.702.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	149.200.000	163.611.000	47.769.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.450.000	4.450.000	4.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	109.197.000	SEKRETARIAT DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD	100 Persen	100 Persen	2.324.597.000	2.607.462.000	2.450.376.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPRD	100 Persen	3.150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.442.100.000	1.506.900.000	1.506.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Dokumen	2.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	217.340.000	159.830.000	106.230.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		20 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	64.600.000	140.175.000	36.689.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	48 Dokumen	9 Dokumen	600.557.000	800.557.000	800.557.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Dokumen	800.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	100 Persen	1.165.715.000	1.036.790.000	1.484.330.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPRD	100 Persen	1.700.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	4 Laporan	259.665.000	130.740.000	44.990.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	906.050.000	906.050.000	1.439.340.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	1.400.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen	100 Persen	18.721.330.000	16.460.515.000	14.832.213.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	DPRD	100 Persen	5.920.629.000	SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	4 Dokumen	18.721.330.000	16.460.515.000	14.832.213.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Dokumen	5.920.629.000	SEKRETARIAT DPRD
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah				6.876.290.000	7.266.920.000	7.277.186.000								9.392.179.000	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.876.290.000	7.266.920.000	7.277.186.000								9.392.179.000	
PERENCANAAN				6.357.854.000	6.398.484.000	6.721.368.000								8.139.035.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	5.418.748.000	5.459.378.000	5.612.580.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	6.725.961.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	19.916.000	19.916.000	19.856.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Bappeda Kota Pekalongan	100 persen	320.211.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	6.972.000	6.972.000	6.942.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	2.716.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.394.000	1.394.000	1.364.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.630.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	11.550.000	11.550.000	11.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	315.865.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	4.811.585.000	4.811.585.000	4.811.585.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Bappeda Kota Pekalongan	100 persen	5.827.228.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.774.293.000	4.774.293.000	4.774.293.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		33 Orang/bulan	5.784.450.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	12 Dokumen	36.000.000	36.000.000	36.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	41.321.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.292.000	1.292.000	1.292.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.457.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Bappeda Kota Pekalongan	100 persen	8.639.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	8.639.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	287.256.000	332.698.000	483.509.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Bappeda Kota Pekalongan	100 persen	332.253.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.120.000	2.120.000	3.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	1.359.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	36.500.000	41.312.000	165.790.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	59.254.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	2.717.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	48.536.000	48.536.000	48.536.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	48.920.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.990.000	10.750.000	10.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Paket	13.589.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	2.340.000	2.580.000	2.580.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	2.582.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	184.370.000	225.000.000	250.133.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		200 Laporan	203.832.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	168.421.000	168.421.000	167.581.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Bappeda Kota Pekalongan	100 persen	157.932.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	990.000	990.000	990.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	1.363.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	75.000.000	73.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	67.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92.431.000	92.431.000	92.791.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	89.569.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	126.570.000	121.758.000	125.049.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Bappeda Kota Pekalongan	100 persen	79.698.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	107.000.000	102.188.000	103.484.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		16 Unit	59.238.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit	60 Unit	19.570.000	19.570.000	21.565.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		60 Unit	20.460.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	100 persen	437.964.000	437.964.000	592.661.000							100 persen	620.952.000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen	100 persen	377.759.000	377.759.000	532.456.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	498.531.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	6 Dokumen	377.759.000	377.759.000	532.456.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		6 Dokumen	498.531.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen	100 persen	15.050.000	15.050.000	15.050.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kota Pekalongan	100 persen	109.690.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	15.050.000	15.050.000	15.050.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	109.690.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	45.155.000	45.155.000	45.155.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kota Pekalongan	100 persen	12.731.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan	6 Laporan	45.155.000	45.155.000	45.155.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		6 Laporan	12.731.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen	100 persen	501.142.000	501.142.000	516.127.000							100 persen	792.122.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	151.660.000	151.660.000	145.130.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kota Pekalongan	100 persen	216.705.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	14.965.000	14.965.000	14.965.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	8.727.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	4 Laporan	33.500.000	33.500.000	30.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	76.798.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	14.965.000	14.965.000	14.965.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	26.181.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	3 Laporan	88.230.000	88.230.000	84.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Laporan	104.999.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Move Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen	100 persen	135.030.000	137.030.000	47.430.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kota Pekalongan	100 persen	166.220.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	3 Laporan	135.030.000	137.030.000	47.430.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Laporan	166.220.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	100 persen	214.452.000	212.452.000	323.567.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kota Pekalongan	100 persen	409.197.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	4 Laporan	154.210.000	136.660.000	297.810.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	200.052.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	3 Laporan	60.242.000	75.792.000	25.757.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Laporan	209.145.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				518.436.000	868.436.000	555.818.000								1.253.144.000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	100 persen	518.436.000	868.436.000	555.818.000							100 persen	1.253.144.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbang	100 persen	100 persen	234.598.000	234.598.000	229.998.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	257.175.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Laporan	5 Laporan	171.760.000	171.760.000	170.260.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		5 Laporan	178.228.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	62.838.000	62.838.000	59.738.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	78.947.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen	100 persen	111.321.000	111.321.000	128.433.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	301.622.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	111.321.000	111.321.000	128.433.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	301.622.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100 persen	100 persen	172.517.000	522.517.000	197.387.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	694.347.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	2 Dokumen	164.117.000	514.117.000	189.987.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	694.347.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	8.400.000	8.400.000	7.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah				24.012.710.000	25.021.579.000	32.750.974.000								23.815.608.000	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				24.012.710.000	25.021.579.000	32.750.974.000								23.815.608.000	
KEUANGAN				24.012.710.000	25.021.579.000	32.750.974.000								23.815.608.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	17.219.881.000	17.864.500.000	17.643.660.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	14.927.384.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	20.637.000	20.637.000	20.337.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BPKAD Kota Pekalongan	100 Persen	18.150.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	8.300.000	8.300.000	8.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	4.700.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.337.000	2.337.000	2.337.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	2.250.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	11.200.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	13.146.766.000	14.642.813.000	14.245.374.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BPKAD Kota Pekalongan	100 Persen	13.167.565.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	56 Orang/bulan	13.028.800.000	14.509.247.000	14.112.308.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	Pajak Reklame PBB Pedesaan dan Perkotaan BPHTB	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		56 Orang/bulan	13.030.315.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Retribusi Jasa Usaha DAU Pajak Air Tanah							
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	115.800.000	131.400.000	130.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	135.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.166.000	2.166.000	2.166.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	2.250.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BPKAD Kota Pekalongan	100 Persen	9.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	531.480.000	855.942.000	1.040.441.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BPKAD Kota Pekalongan	100 Persen	754.935.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.480.000	5.480.000	5.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	7.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	160.590.000	410.590.000	441.890.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	241.935.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.950.000	10.950.000	10.950.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	18.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	80.300.000	80.300.000	86.550.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	110.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13 Paket	36.500.000	36.500.000	26.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	50.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000	1.775.000	1.775.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	2.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	300 Laporan	235.885.000	310.347.000	467.296.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jasa Giro	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		300 Laporan	325.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	675.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BPKAD Kota Pekalongan	100 Persen	0	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	675.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DBH	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Unit	-	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	763.064.000	822.174.000	802.174.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BPKAD Kota Pekalongan	100 Persen	725.464.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.190.000	4.000.000	4.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pendapatan Bunga	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	3.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	514.816.000	514.816.000	494.816.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pendapatan Bunga	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	506.400.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	246.058.000	303.358.000	303.358.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pendapatan Bunga	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	216.064.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.077.934.000	477.934.000	490.334.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BPKAD Kota Pekalongan	100 Persen	251.770.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	37 Unit	151.214.000	151.214.000	150.614.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pendapatan Bunga	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		37 Unit	136.770.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.891.680.000	291.680.000	302.680.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	PBB Pedesaan dan Perkotaan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit	75.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	70 Unit	35.040.000	35.040.000	37.040.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		70 Unit	40.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,5 persen	7,5 persen	4.000.978.000	4.163.278.000	12.351.721.000							7,5 persen	6.095.342.000	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen	100 persen	766.836.000	929.136.000	907.112.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	934.119.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	15.451.000	15.451.000	11.220.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	35.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	15.451.000	15.451.000	11.220.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	35.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	21.424.000	21.424.000	15.325.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	62.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	574.328.000	736.628.000	732.079.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	631.182.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	75.548.000	75.548.000	68.533.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	144.937.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	64.634.000	64.634.000	68.735.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	26.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen	100 persen	337.692.000	337.692.000	319.994.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	262.900.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	8500 Dokumen	7000 Dokumen	228.500.000	228.500.000	218.395.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7000 Dokumen	87.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	24 Dokumen	21 Dokumen	12.600.000	12.600.000	12.018.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		21 Dokumen	23.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	49 Dokumen	13.690.000	13.690.000	11.920.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		49 Dokumen	25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	2 Laporan	45.852.000	45.852.000	43.902.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan	70.900.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.690.000	13.690.000	13.390.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	220 Orang	23.360.000	23.360.000	20.369.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		220 Orang	32.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen	100 persen	396.450.000	396.450.000	308.615.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	398.323.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	4 Dokumen	43.070.000	43.070.000	38.778.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Dokumen	59.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	13 Laporan	5.840.000	5.840.000	5.271.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Laporan	8.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	7 Laporan	101.500.000	101.500.000	94.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Laporan	95.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000	80.000.000	37.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	90.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	12 Dokumen	7.300.000	7.300.000	6.090.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	10.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	14.600.000	14.600.000	13.140.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	20.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	144.140.000	144.140.000	113.666.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		120 Orang	116.323.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen	100 persen	2.500.000.000	2.500.000.000	10.816.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	4.500.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000.000	2.500.000.000	10.816.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	Dividen atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	4.500.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	934.850.000	1.011.850.000	950.642.000							100 persen	1.212.565.000	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen	100 persen	934.850.000	1.011.850.000	950.642.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	1.212.565.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	56.650.000	65.450.000	59.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	55.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	13.690.000	22.390.000	17.590.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Dokumen	30.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	113.150.000	86.000.000	92.542.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	165.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	63.950.000	77.870.000	50.020.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan	65.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	258.450.000	250.388.000	223.688.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	325.480.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	81 Laporan	81 Laporan	428.960.000	509.752.000	507.152.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		81 Laporan	572.085.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 persen	5,00 persen	1.857.001.000	1.981.951.000	1.804.951.000							5,00 persen	1.580.317.000	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	100 persen 4.9 persen	100 persen 4.9 persen	1.857.001.000	1.981.951.000	1.804.951.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen 4.9 persen	1.580.317.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	4 Laporan	127.390.000	127.390.000	63.015.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	163.040.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	277.380.000	252.631.000	212.231.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	30.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	33.510.000	97.813.000	97.813.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	59.837.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3000 Obyek Pajak	3000 Obyek Pajak	125.560.000	121.008.000	107.533.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3000 Obyek Pajak	176.550.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	115000 Dokumen	115000 Dokumen	206.960.000	287.220.000	271.270.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Opsen BBNKB	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		115000 Dokumen	300.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14400 Layanan	14400 Layanan	334.595.000	346.675.000	346.675.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Opsen BBNKB	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		14400 Layanan	396.077.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2500 Dokumen	2500 Dokumen	25.550.000	23.158.000	18.958.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Opsen BBNKB	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2500 Dokumen	67.632.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3500 Dokumen	4500 Dokumen	615.928.000	615.928.000	580.128.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Opsen BBNKB	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4500 Dokumen	227.681.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Paik Daerah	160 Dokumen	160 Dokumen	82.678.000	82.678.000	79.878.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Retribusi Jasa Usaha	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		160 Dokumen	159.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	27.450.000	27.450.000	27.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Opsen BBNKB	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan		BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				7.065.317.000	7.065.317.000	6.652.032.000								10.151.857.000	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.065.317.000	7.065.317.000	6.652.032.000								10.151.857.000	
KEPEGAWAIAN				5.530.451.000	5.530.451.000	5.341.007.000								6.578.115.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	4.343.251.000	4.343.251.000	4.217.718.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	5.082.896.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	23.594.000	23.594.000	23.504.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BKPSDM	100 persen	12.850.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.132.000	3.132.000	3.132.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	2.750.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.952.000	2.952.000	2.862.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	17.510.000	17.510.000	17.510.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	8.450.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	3.556.643.000	3.556.643.000	3.554.223.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BKPSDM	100 persen	4.430.374.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.518.675.000	3.518.675.000	3.518.675.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		28 Orang/bulan	4.373.724.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	36.600.000	36.600.000	34.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	55.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	1.368.000	1.368.000	1.248.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BKPSDM	100 persen	9.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	202.840.000	202.840.000	210.705.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BKPSDM	100 persen	189.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.190.000	2.190.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	2.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	29.160.000	29.160.000	84.299.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.430.000	2.430.000	2.430.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	1.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	38.990.000	38.990.000	48.990.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	52.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	7.300.000	7.300.000	7.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000	1.900.000	1.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	2.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	75 Laporan	120.870.000	120.870.000	63.286.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		75 Laporan	100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	404.914.000	404.914.000	326.326.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BKPSDM	100 persen	264.784.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.760.000	1.760.000	1.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	2.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	200.004.000	200.004.000	123.277.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	140.784.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	203.150.000	203.150.000	201.289.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	122.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	150.260.000	150.260.000	97.960.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	BKPSDM	100 persen	175.888.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	47.280.000	47.280.000	47.280.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Unit	35.877.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	93.850.000	93.850.000	39.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Unit	128.011.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	9.130.000	9.130.000	11.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Unit	12.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 persen	80,00 persen	1.187.200.000	1.187.200.000	1.123.289.000							80,00 persen	1.495.219.000	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ketersediaan data PNS	100 persen	100 persen	435.000.000	435.000.000	205.789.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	771.518.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	63.714.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	656.068.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	135.000.000	135.000.000	142.075.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	115.450.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN	90 persen	90 persen	391.210.000	391.210.000	686.610.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	90 persen	102.754.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	32.610.000	32.610.000	32.610.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		6 Dokumen	19.600.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	3 Dokumen	358.600.000	358.600.000	654.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	83.154.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)	42 persen	42 persen	189.990.000	189.990.000	74.420.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	42 persen	479.728.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	98.970.000	98.970.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	338.048.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	2 Orang	58.900.000	58.900.000	17.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Orang	86.680.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	0 Dokumen	18.250.000	18.250.000		Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		0 Dokumen	36.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	13.870.000	13.870.000	12.420.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	19.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tingkat Disiplin ASN	100 persen	100 persen	171.000.000	171.000.000	156.470.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	141.219.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	130 orang Orang	130 orang Orang	43.000.000	43.000.000	43.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		130 orang Orang	33.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Orang	3 Orang	91.500.000	91.500.000	87.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Orang	102.219.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	5 Laporan	36.500.000	36.500.000	25.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		5 Laporan	6.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.534.866.000	1.534.866.000	1.311.025.000								3.573.742.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100 persen	100 persen	1.534.866.000	1.534.866.000	1.311.025.000							100 persen	3.573.742.000	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Penyelenggaraan, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	100 persen	1.138.366.000	1.138.366.000	935.250.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	1.018.924.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	125 Orang	136 Orang	760.000.000	760.000.000	717.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		136 Orang	930.424.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	378.366.000	378.366.000	218.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	88.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	250 orang	250 orang	396.500.000	396.500.000	375.775.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah Kota Pekalongan	250 orang	2.554.818.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang	6 Orang	36.500.000	36.500.000	33.775.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		6 Orang		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan	360.000.000	360.000.000	342.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	2.554.818.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Inspektorat Daerah				16.176.644.000	16.176.644.000	15.387.854.000								11.564.199.000	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				16.176.644.000	16.176.644.000	15.387.854.000								11.564.199.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
INSPEKTORAT DAERAH				16.176.644.000	16.176.644.000	15.387.854.000								11.564.199.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	15.358.669.000	15.358.669.000	14.556.296.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	11.095.448.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	20.465.000	20.465.000	20.165.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Inspektorat Kota Pekalongan	100 Persen	12.730.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	7.030.000	7.030.000	6.730.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	1.930.000	INSPEKTORAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.435.000	1.435.000	1.435.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.300.000	INSPEKTORAT DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	9.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	6.220.144.000	6.220.144.000	6.220.369.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Inspektorat Kota Pekalongan	100 Persen	5.074.828.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.176.644.000	6.176.644.000	6.176.644.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		39 Orang/bulan	5.040.328.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	42.000.000	42.000.000	42.225.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	511.000.000	511.000.000	508.346.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Inspektorat Kota Pekalongan	100 Persen	8.639.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26 Dokumen	26 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		26 Dokumen	1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	35 Orang	500.000.000	500.000.000	497.346.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		35 Orang	6.639.000	INSPEKTORAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	805.883.000	805.883.000	517.397.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Inspektorat Kota Pekalongan	100 Persen	204.416.000	INSPEKTORAT DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.749.000	5.749.000	5.749.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	2.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	504.987.000	504.987.000	326.031.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	49.967.000	49.967.000	49.967.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13 Paket	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	6.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	2.680.000	2.680.000	2.680.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	2.700.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	225.000.000	225.000.000	115.470.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		90 Laporan	106.216.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	7.498.657.000	7.498.657.000	7.024.590.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Inspektorat Daeah Kota Pekalongan	100 persen	5.600.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	479.567.000	479.567.000		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		0 Unit	600.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	7.019.090.000	7.019.090.000	7.024.590.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit	5.000.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	123.182.000	123.182.000	94.217.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Inspektorat Kota Pekalongan	100 Persen	61.835.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	75.000.000	47.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	34.835.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	44.682.000	44.682.000	43.317.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	22.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	179.338.000	179.338.000	171.212.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Inspektorat Daeah Kota Pekalongan	100 Persen	133.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	17 Unit	130.838.000	130.838.000	130.912.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		17 Unit	70.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit	33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	70 Unit	33.500.000	33.500.000	25.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		70 Unit	30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	85,00 persen	437.038.000	437.038.000	333.488.000							85,00 persen	124.123.000	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	100 persen	100 persen	377.038.000	377.038.000	273.713.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	OPD Kota Pekalongan	100 persen	107.755.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37 Laporan	31 Laporan	43.780.000	43.780.000	43.780.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		31 Laporan	12.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	150 Laporan	141 Laporan	43.876.000	43.876.000	43.876.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		141 Laporan	12.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	107 Laporan	105 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		105 Laporan	12.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	46 Laporan	35 Laporan	19.750.000	19.750.000	21.175.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		35 Laporan	11.755.000	INSPEKTORAT DAERAH
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	2 Kesepakatan	22.870.000	22.870.000	15.370.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Kesepakatan	9.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	7 Dokumen	6 Dokumen	196.762.000	196.762.000	99.512.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		6 Dokumen	51.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	100 persen	100 persen	60.000.000	60.000.000	59.775.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	OPD Kota Pekalongan	100 persen	16.368.000	INSPEKTORAT DAERAH
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	3 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Laporan	8.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18 Laporan	18 Laporan	50.000.000	50.000.000	49.775.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		18 Laporan	8.368.000	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	3,00 nilai	380.937.000	380.937.000	498.070.000							3,00 nilai	344.628.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100 persen	100 persen	30.937.000	30.937.000	27.937.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	OPD Kota Pekalongan	100 persen	35.010.000	INSPEKTORAT DAERAH
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	27.937.000	27.937.000	27.937.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		5 Rekomendasi	32.010.000	INSPEKTORAT DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3.000.000	3.000.000	-	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Rekomendasi	3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	97 persen	97 persen	350.000.000	350.000.000	470.133.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	OPD Kota Pekalongan	97 persen	309.618.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	50.000.000	50.000.000	179.986.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		30 perangkat daerah	30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21 perangkat daerah	21 perangkat daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		21 perangkat daerah	15.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	100.147.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		19 Kegiatan	139.618.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	150.000.000	150.000.000	140.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 perangkat daerah	125.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Kecamatan Pekalongan Utara				9.786.690.000	10.694.320.000	10.580.405.000								9.733.312.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				9.786.690.000	10.694.320.000	10.580.405.000								9.733.312.000	
KECAMATAN				9.786.690.000	10.694.320.000	10.580.405.000								9.733.312.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	9.368.020.000	10.275.650.000	10.199.210.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	9.343.861.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	114.586.000	114.586.000	53.136.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	124.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4.089.000	4.089.000	3.969.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.927.000	1.927.000	1.837.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	108.570.000	108.570.000	47.330.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	116.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	7.773.745.000	7.855.245.000	7.855.155.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	ASN Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan	100 persen	7.810.263.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	70 Orang/bulan	7.576.059.000	7.657.559.000	7.657.559.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		70 Orang/bulan	7.609.263.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	195.900.000	195.900.000	195.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	198.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.786.000	1.786.000	1.696.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	7.300.000	7.300.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	16.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	7.300.000	7.300.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	16.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	303.952.000	305.082.000	292.482.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	441.140.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.280.000	6.280.000	6.280.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	8.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	99.000.000	99.000.000	99.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	152.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.140.000	3.140.000	3.140.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	12.750.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	139.362.000	139.362.000	139.362.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	195.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	30.300.000	30.300.000	30.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	40.250.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	5.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13.870.000	15.000.000	9.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	12.540.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	892.017.000	892.017.000	892.017.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	712.480.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	7.670.000	7.670.000	7.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	140.184.000	140.184.000	140.184.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	125.884.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	744.163.000	744.163.000	744.163.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	576.096.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	276.420.000	1.101.420.000	1.101.420.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	239.478.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	37 Unit	165.570.000	165.570.000	165.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		37 Unit	115.978.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	13 Unit	78.000.000	903.000.000	903.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Unit	78.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	75 Unit	32.850.000	32.850.000	32.850.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		75 Unit	45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen	100 persen	13.590.000	13.590.000	9.820.000							100 persen	61.377.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	9.130.000	9.130.000	7.880.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan	100 persen	10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	9.130.000	9.130.000	7.880.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	4.460.000	4.460.000	1.940.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan	100 persen	51.377.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	4.460.000	4.460.000	1.940.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	51.377.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	98.570.000	98.570.000	89.165.000							100 persen	62.841.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	41.220.000	41.220.000	37.890.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kelurahan, LKK, dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	100 persen	19.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	41.220.000	41.220.000	37.890.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Lembaga Kemasyarakatan	19.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	57.350.000	57.350.000	51.275.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	43.241.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1823 Keluarga	966 Keluarga	57.350.000	57.350.000	51.275.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		966 Keluarga	43.241.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen	100 persen	301.540.000	301.540.000	277.890.000							100 persen	258.977.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen	301.540.000	301.540.000	277.890.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	258.977.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	301.540.000	301.540.000	277.890.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		11 Laporan	258.977.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen	100 persen	4.970.000	4.970.000	4.320.000							100 persen	6.256.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	4.970.000	4.970.000	4.320.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	6.256.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.970.000	4.970.000	4.320.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	6.256.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Kelurahan Kandang Panjang				453.846.000	558.846.000	568.846.000								406.130.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				453.846.000	558.846.000	568.846.000								406.130.000	
KECAMATAN				453.846.000	558.846.000	568.846.000								406.130.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	453.846.000	558.846.000	568.846.000							100 persen	406.130.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	453.846.000	558.846.000	568.846.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 persen	406.130.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	10 Unit	131.882.000	236.882.000	236.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Unit	70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	309.464.000	309.464.000	319.464.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	323.630.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Kelurahan Panjang Wetan				570.542.000	504.042.000	514.042.000								427.857.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				570.542.000	504.042.000	514.042.000								427.857.000	
KECAMATAN				570.542.000	504.042.000	514.042.000								427.857.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	570.542.000	504.042.000	514.042.000							100 persen	427.857.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	570.542.000	504.042.000	514.042.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	LKK dan Masyarakat	100 persen	427.857.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	8 Unit	224.244.000	157.744.000	157.744.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	BPHTB DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		8 Unit	70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	333.798.000	333.798.000	343.798.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	345.357.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Kelurahan Degayu				380.630.000	580.630.000	590.630.000								339.467.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				380.630.000	580.630.000	590.630.000								339.467.000	
KECAMATAN				380.630.000	580.630.000	590.630.000								339.467.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	380.630.000	580.630.000	590.630.000							100 persen	339.467.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	380.630.000	580.630.000	590.630.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 persen	339.467.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	6 Unit	124.244.000	324.244.000	324.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	DAU DUA Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		6 Unit	68.867.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	243.886.000	243.886.000	253.886.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	DAU DUA Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Pokmas / Ormas	258.100.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Kelurahan Bandengan				347.722.000	347.722.000	357.722.000								112.500.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				347.722.000	347.722.000	357.722.000								112.500.000	
KECAMATAN				347.722.000	347.722.000	357.722.000								112.500.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	347.722.000	347.722.000	357.722.000							100 persen	112.500.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	347.722.000	347.722.000	357.722.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 persen	112.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	124.244.000	124.244.000	124.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	DAU DUA Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Unit	70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	210.978.000	210.978.000	220.978.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	DAU DUA Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	30.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Kelurahan Krapyak				722.226.000	817.226.000	877.226.000								545.493.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				722.226.000	817.226.000	877.226.000								545.493.000	
KECAMATAN				722.226.000	817.226.000	877.226.000								545.493.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	722.226.000	817.226.000	877.226.000							100 persen	545.493.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	722.226.000	817.226.000	877.226.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 persen	545.493.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	16 Unit	234.244.000	264.244.000	324.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	BPHTB DUA DUA Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		16 Unit	70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	475.482.000	540.482.000	540.482.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Pokmas / Ormas	462.993.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Kelurahan Padukuhan Kraton				477.481.000	487.481.000	497.481.000								430.115.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				477.481.000	487.481.000	497.481.000								430.115.000	
KECAMATAN				477.481.000	487.481.000	497.481.000								430.115.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	477.481.000	487.481.000	497.481.000							100 persen	430.115.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	477.481.000	487.481.000	497.481.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 persen	430.115.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	6 Unit	127.366.000	137.366.000	137.366.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		6 Unit	70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	337.615.000	337.615.000	347.615.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	347.615.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Kelurahan Panjang Baru				427.336.000	457.336.000	467.336.000								386.492.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				427.336.000	457.336.000	467.336.000								386.492.000	
KECAMATAN				427.336.000	457.336.000	467.336.000								386.492.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	427.336.000	457.336.000	467.336.000							100 persen	386.492.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	427.336.000	457.336.000	467.336.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 persen	386.492.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	124.244.000	124.244.000	124.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		5 Unit	70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	290.592.000	320.592.000	330.592.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	303.992.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Kecamatan Pekalongan Selatan				10.088.404.000	10.117.204.000	10.030.984.000								8.722.301.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				10.088.404.000	10.117.204.000	10.030.984.000								8.722.301.000	
KECAMATAN				10.088.404.000	10.117.204.000	10.030.984.000								8.722.301.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	9.693.612.000	9.726.214.000	9.668.238.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	8.396.613.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	103.442.000	103.442.000	59.822.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 Persen	102.757.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.828.000	3.828.000	3.124.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.804.000	1.804.000	1.714.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	97.810.000	97.810.000	54.984.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	94.757.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	7.197.272.000	7.197.272.000	7.197.272.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 Persen	7.029.493.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	57 Orang/bulan	7.023.100.000	7.023.100.000	7.023.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		57 Orang/bulan	6.851.893.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	172.500.000	172.500.000	172.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	174.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.672.000	1.672.000	1.672.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 Persen	18.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	18.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Selatan, Semua Kel/Desa								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	288.488.000	284.790.000	284.244.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 Persen	346.116.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.700.000	5.700.000	5.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	7.800.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	114.370.000	108.172.000	122.432.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	136.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.400.000	3.400.000	3.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	9.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	114.288.000	114.288.000	111.272.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	127.816.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13 Paket	26.650.000	26.650.000	26.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	35.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.580.000	11.580.000	5.790.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	17.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	4 Laporan	12.500.000	15.000.000	9.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	863.914.000	900.214.000	900.664.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 Persen	711.837.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	6.400.000	6.400.000	6.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	9.300.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	98.720.000	135.020.000	135.020.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	86.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	758.794.000	758.794.000	759.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	BPHTB DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	616.537.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.235.496.000	1.235.496.000	1.221.236.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 Persen	187.905.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit	38 Unit	144.496.000	144.496.000	137.736.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		38 Unit	85.905.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	1.062.000.000	1.062.000.000	1.054.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Unit	62.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	89 Unit	90 Unit	29.000.000	29.000.000	29.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		90 Unit	40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen	12.580.000	12.580.000	9.030.000							100 persen	22.321.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 Persen	100 Persen	8.600.000	8.600.000	6.850.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 Persen	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	8.600.000	8.600.000	6.850.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	3.980.000	3.980.000	2.180.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	9.821.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	4 Laporan	3.980.000	3.980.000	2.180.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	9.821.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen	98.040.000	98.040.000	82.388.000							100 persen	60.112.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	40.690.000	40.690.000	35.870.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 Persen	25.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	4 Lembaga	40.690.000	40.690.000	35.870.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	57.350.000	57.350.000	46.518.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan	100 persen	35.112.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	117 Keluarga	545 Keluarga	57.350.000	57.350.000	46.518.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		545 Keluarga	35.112.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 persen	100 persen	279.102.000	275.300.000	266.258.000							100 persen	231.979.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen	279.102.000	275.300.000	266.258.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan	100 Persen	231.979.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	279.102.000	275.300.000	266.258.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Laporan	231.979.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen	5.070.000	5.070.000	5.070.000							100 persen	11.276.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 Persen	100 Persen	5.070.000	5.070.000	5.070.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan	100 Persen	11.276.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.070.000	5.070.000	5.070.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	11.276.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Kelurahan Jenggot				418.057.000	458.057.000	468.057.000								387.312.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				418.057.000	458.057.000	468.057.000								387.312.000	
KECAMATAN				418.057.000	458.057.000	468.057.000								387.312.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	418.057.000	458.057.000	468.057.000							100 persen	387.312.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	418.057.000	458.057.000	468.057.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 persen	387.312.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	12 Unit	124.244.000	164.244.000	164.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Unit	88.867.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	281.313.000	281.313.000	291.313.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	285.945.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Kelurahan Buaran Kradenan				565.157.000	475.157.000	485.157.000								385.771.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				565.157.000	475.157.000	485.157.000								385.771.000	
KECAMATAN				565.157.000	475.157.000	485.157.000								385.771.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	565.157.000	475.157.000	485.157.000							100 persen	385.771.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	565.157.000	475.157.000	485.157.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 persen	385.771.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel. Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	6 Unit	275.144.000	185.144.000	185.144.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	BPHTB DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		6 Unit	88.867.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	277.513.000	277.513.000	287.513.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Pokmas / Ormas	284.404.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Kelurahan Kuripan Kertoharjo				347.693.000	358.591.000	368.591.000								321.037.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				347.693.000	358.591.000	368.591.000								321.037.000	
KECAMATAN				347.693.000	358.591.000	368.591.000								321.037.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	347.693.000	358.591.000	368.591.000							100 persen	321.037.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	347.693.000	358.591.000	368.591.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 persen	321.037.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	9 Unit	124.244.000	133.244.000	133.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Unit	88.867.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	210.949.000	212.847.000	222.847.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	219.670.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Kelurahan Kuripan Yosorejo				407.772.000	464.772.000	474.772.000								112.500.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				407.772.000	464.772.000	474.772.000								112.500.000	
KECAMATAN				407.772.000	464.772.000	474.772.000								112.500.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	407.772.000	464.772.000	474.772.000							100 persen	112.500.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	407.772.000	464.772.000	474.772.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	MASYARAKAT, LKK	100 persen	112.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	8 Unit	135.004.000	192.004.000	192.004.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		8 Unit	70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	260.268.000	260.268.000	270.268.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	30.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Kelurahan Soko Duwet				381.336.000	381.336.000	391.336.000								350.554.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				381.336.000	381.336.000	391.336.000								350.554.000	
KECAMATAN				381.336.000	381.336.000	391.336.000								350.554.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	381.336.000	381.336.000	391.336.000							100 persen	350.554.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	381.336.000	381.336.000	391.336.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 persen	350.554.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	131.882.000	131.882.000	131.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		6 Unit	96.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	236.954.000	236.954.000	246.954.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	241.549.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Kelurahan Banyurip				426.111.000	430.111.000	440.111.000								393.978.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				426.111.000	430.111.000	440.111.000								393.978.000	
KECAMATAN				426.111.000	430.111.000	440.111.000								393.978.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	426.111.000	430.111.000	440.111.000							100 persen	393.978.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	426.111.000	430.111.000	440.111.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 persen	393.978.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	7 Unit	131.882.000	135.882.000	135.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DAU DAI Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Unit	100.005.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	281.729.000	281.729.000	291.729.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DAU DAI Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Pokmas / Ormas	281.473.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Kecamatan Pekalongan Barat				10.387.971.000	10.058.226.000	9.926.987.000								9.690.101.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				10.387.971.000	10.058.226.000	9.926.987.000								9.690.101.000	
KECAMATAN				10.387.971.000	10.058.226.000	9.926.987.000								9.690.101.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	9.749.214.000	9.750.344.000	9.642.694.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	9.380.355.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	114.586.000	114.586.000	68.946.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kec. Pekalongan Barat	100 Persen	130.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4.089.000	4.089.000	3.819.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	13.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.927.000	1.927.000	1.837.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	108.570.000	108.570.000	63.290.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	114.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	8.044.497.000	8.044.497.000	8.044.497.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kec. Pekalongan Barat	100 Persen	7.777.528.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	72 Orang/bulan	7.846.811.000	7.846.811.000	7.846.811.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU DAI Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		72 Orang/bulan	7.579.528.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	195.900.000	195.900.000	195.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	195.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.786.000	1.786.000	1.786.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	7.300.000	7.300.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kec. Pekalongan Barat	100 Persen	18.533.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	7.300.000	7.300.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	18.533.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	286.409.000	287.539.000	262.802.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kec. Pekalongan Barat	100 Persen	432.426.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.280.000	6.280.000	6.280.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	8.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	74.530.000	74.530.000	63.653.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	149.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.670.000	7.670.000	7.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	141.759.000	141.759.000	141.759.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	191.326.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	30.300.000	30.300.000	30.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	6.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	12 Laporan	13.870.000	15.000.000	6.640.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.032.809.000	1.032.809.000	1.011.555.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kec. Pekalongan Barat	100 Persen	805.276.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	7.670.000	7.670.000	7.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	117.900.000	117.900.000	117.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	105.250.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	907.239.000	907.239.000	885.985.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	689.526.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	263.613.000	263.613.000	249.894.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kec. Pekalongan Barat	100 Persen	216.092.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	33 Unit	143.163.000	143.163.000	137.163.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		33 Unit	104.592.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	13 Unit	87.600.000	87.600.000	79.881.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Unit	66.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	126 Unit	82 Unit	32.850.000	32.850.000	32.850.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		82 Unit	45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100 persen	100 persen	13.590.000	13.590.000	7.600.000							100 persen	41.029.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 Persen	100 Persen	9.130.000	9.130.000	5.108.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	100 Persen	15.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	2 Laporan	9.130.000	9.130.000	5.108.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan	15.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	4.460.000	4.460.000	2.492.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	26.029.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	2 Laporan	4.460.000	4.460.000	2.492.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Laporan	26.029.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Barat	100 persen	100 persen	427.575.000	96.700.000	90.124.000							100 persen	66.927.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	41.220.000	41.220.000	35.524.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	100 Persen	47.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	41.220.000	41.220.000	35.524.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Lembaga Kemasyarakatan	47.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	55.480.000	55.480.000	54.600.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	19.327.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1166 Keluarga	1444 Keluarga	55.480.000	55.480.000	54.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1444 Keluarga	19.327.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	100 persen	100 persen	192.622.000	192.622.000	182.474.000							100 persen	191.787.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase tercapainya koordinasi upaya penyelenggaraan Trantibum	100 Persen	100 Persen	192.622.000	192.622.000	182.474.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	100 Persen	191.787.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	9 Laporan	192.622.000	192.622.000	182.474.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Laporan	191.787.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100 persen	100 persen	4.970.000	4.970.000	4.095.000							100 persen	10.003.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 Persen	100 Persen	4.970.000	4.970.000	4.095.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	100 Persen	10.003.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.970.000	4.970.000	4.095.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	10.003.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Kelurahan Medono				527.465.000	543.715.000	553.715.000								421.660.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				527.465.000	543.715.000	553.715.000								421.660.000	
KECAMATAN				527.465.000	543.715.000	553.715.000								421.660.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	527.465.000	543.715.000	553.715.000							100 persen	421.660.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 Persen	100 Persen	527.465.000	543.715.000	553.715.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 Persen	421.660.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	480 Unit	192.632.000	208.882.000	208.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		480 Unit	106.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	322.333.000	322.333.000	332.333.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		8 Pokmas / Ormas	302.655.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Kelurahan Podosugih				530.247.000	682.247.000	692.247.000								339.490.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				530.247.000	682.247.000	692.247.000								339.490.000	
KECAMATAN				530.247.000	682.247.000	692.247.000								339.490.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	530.247.000	682.247.000	692.247.000							100 persen	339.490.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 Persen	100 Persen	530.247.000	682.247.000	692.247.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 Persen	339.490.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	60 Unit	242.382.000	389.382.000	389.382.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	BPHTB DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		60 Unit	99.305.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	275.365.000	280.365.000	290.365.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	BPHTB DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		8 Pokmas / Ormas	227.685.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Kelurahan Tirta				473.876.000	623.876.000	643.876.000								365.290.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				473.876.000	623.876.000	643.876.000								365.290.000	
KECAMATAN				473.876.000	623.876.000	643.876.000								365.290.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	473.876.000	623.876.000	643.876.000							100 persen	365.290.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 Persen	100 Persen	473.876.000	623.876.000	643.876.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK	100 Persen	365.290.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirta	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	42 Unit	201.882.000	351.882.000	361.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirta	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		42 Unit	106.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	259.494.000	259.494.000	269.494.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirta	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	246.285.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Kelurahan Sapuro Kebulen				182.994.000	630.119.000	682.619.000								416.017.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
UNSUR KEWILAYAHAN				182.994.000	630.119.000	682.619.000								416.017.000	
KECAMATAN				182.994.000	630.119.000	682.619.000								416.017.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	182.994.000	630.119.000	682.619.000							100 persen	416.017.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 Persen	100 Persen	182.994.000	630.119.000	682.619.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 Persen	416.017.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	-	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	11 Unit	182.994.000	249.244.000	291.744.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		11 Unit	98.697.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	-	368.375.000	378.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	304.820.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Kelurahan Bendan Kergon				550.844.000	560.844.000	580.844.000								490.677.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				550.844.000	560.844.000	580.844.000								490.677.000	
KECAMATAN				550.844.000	560.844.000	580.844.000								490.677.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Barat	100 persen	100 persen	550.844.000	560.844.000	580.844.000							100 persen	490.677.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 Persen	100 Persen	550.844.000	560.844.000	580.844.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 Persen	490.677.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	9 Unit	139.744.000	149.744.000	159.744.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Unit	98.697.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	398.600.000	398.600.000	408.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	379.480.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Kelurahan Pasirkratonkramat				644.161.000	625.411.000	635.411.000								514.340.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				644.161.000	625.411.000	635.411.000								514.340.000	
KECAMATAN				644.161.000	625.411.000	635.411.000								514.340.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	644.161.000	625.411.000	635.411.000							100 persen	514.340.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 Persen	100 Persen	644.161.000	625.411.000	635.411.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	masyarakat dan LKK	100 Persen	514.340.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	28 Unit	253.754.000	235.004.000	235.004.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	BPHTB DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		28 Unit	106.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	377.907.000	377.907.000	387.907.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	395.840.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Kelurahan Pringrejo				564.450.000	655.700.000	705.700.000								486.914.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				564.450.000	655.700.000	705.700.000								486.914.000	
KECAMATAN				564.450.000	655.700.000	705.700.000								486.914.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	564.450.000	655.700.000	705.700.000							100 persen	486.914.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 Persen	100 Persen	564.450.000	655.700.000	705.700.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 Persen	486.914.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	66 Unit	446 Unit	152.994.000	244.244.000	284.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		446 Unit	109.711.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	398.956.000	398.956.000	408.956.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Pokmas / Ormas	364.703.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Kecamatan Pekalongan Timur				13.525.562.000	13.602.448.000	11.144.660.000								10.176.033.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				13.525.562.000	13.602.448.000	11.144.660.000								10.176.033.000	
KECAMATAN				13.525.562.000	13.602.448.000	11.144.660.000								10.176.033.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	13.143.988.000	13.345.114.000	10.911.271.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	9.856.722.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	114.586.000	114.586.000	69.446.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	112.669.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4.089.000	4.089.000	3.669.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.927.000	1.927.000	1.807.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	108.570.000	108.570.000	63.970.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	95.669.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	8.358.198.000	8.358.198.000	8.335.768.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	8.205.944.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	8.135.982.000	8.135.982.000	8.135.982.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		66 Orang/bulan	8.168.944.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	220.430.000	220.430.000	198.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	34.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.786.000	1.786.000	1.786.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	7.300.000	7.300.000	7.300.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	18.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	7.300.000	7.300.000	7.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	18.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	326.708.000	327.838.000	320.565.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	398.464.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	8.600.000	8.600.000	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	110.960.000	110.960.000	110.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	131.964.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.140.000	3.140.000	3.140.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	144.768.000	144.768.000	144.768.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	185.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	30.300.000	30.300.000	30.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		13 Paket	32.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	15.070.000	15.070.000	15.070.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	16.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	3 Laporan	13.870.000	15.000.000	7.727.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Laporan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	2.500.000.000	2.500.000.000	141.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	masyarakat	100 persen	0	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	2.500.000.000	2.500.000.000	141.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		0 Unit	-	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	1.372.464.000	1.372.464.000	1.372.464.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	904.955.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	7.670.000	7.670.000	7.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	198.780.000	198.780.000	198.780.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	94.408.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.166.014.000	1.166.014.000	1.166.014.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	800.047.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	464.732.000	664.728.000	664.728.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	216.185.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit	37 Unit	162.532.000	162.528.000	162.528.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		37 Unit	141.185.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	269.350.000	469.350.000	469.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Unit	45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120 Unit	120 Unit	32.850.000	32.850.000	32.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		120 Unit	30.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen	100 persen	13.590.000	13.594.000	10.264.000							100 persen	48.099.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen	100 persen	9.130.000	9.130.000	7.480.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Timur dan Masyarakat	100 persen	17.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	9.130.000	9.130.000	7.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	17.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	4.460.000	4.464.000	2.784.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Kecamatan Timur dan masyarakat	100 persen	31.099.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	4.460.000	4.464.000	2.784.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	31.099.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen	100 persen	222.814.000	98.570.000	88.635.000							100 persen	60.293.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	41.220.000	41.220.000	35.505.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat	100 persen	28.293.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	41.220.000	41.220.000	35.505.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Lembaga Kemasyarakatan	28.293.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	57.350.000	57.350.000	53.130.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat	100 persen	32.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	710 Keluarga	710 Keluarga	57.350.000	57.350.000	53.130.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		710 Keluarga	32.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	100 persen	100 persen	140.200.000	140.200.000	130.520.000							100 persen	204.554.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	140.200.000	140.200.000	130.520.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat	100 persen	204.554.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	140.200.000	140.200.000	130.520.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		11 Laporan	204.554.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	undefined undefined	undefined undefined	4.970.000	4.970.000	3.970.000							undefined undefined	6.365.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	4.970.000	4.970.000	3.970.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat	100 persen	6.365.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.970.000	4.970.000	3.970.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	6.365.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Kelurahan Kauman				541.422.000	595.422.000	622.422.000								505.522.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				541.422.000	595.422.000	622.422.000								505.522.000	
KECAMATAN				541.422.000	595.422.000	622.422.000								505.522.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	541.422.000	595.422.000	622.422.000							100 persen	505.522.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	541.422.000	595.422.000	622.422.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	RT,RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu, PKK, FKSS Poktan, Tagana	100 persen	505.522.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatn	7 Lembaga Kemasyarakatn	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatn	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	4 Unit	124.244.000	178.244.000	195.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Unit	92.227.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	404.678.000	404.678.000	414.678.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	400.795.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Kelurahan Poncol				459.198.000	498.198.000	508.198.000								387.954.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				459.198.000	498.198.000	508.198.000								387.954.000	
KECAMATAN				459.198.000	498.198.000	508.198.000								387.954.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	459.198.000	498.198.000	508.198.000							100 persen	387.954.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	459.198.000	498.198.000	508.198.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kelurahan Poncol	100 persen	387.954.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatana	7 Lembaga Kemasyarakatana	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatana	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	7 Unit	131.882.000	170.882.000	170.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Unit	50.638.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	314.816.000	314.816.000	324.816.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	324.816.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Kelurahan Klego				287.591.000	436.835.000	446.835.000								373.924.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				287.591.000	436.835.000	446.835.000								373.924.000	
KECAMATAN				287.591.000	436.835.000	446.835.000								373.924.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	287.591.000	436.835.000	446.835.000							100 persen	373.924.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	287.591.000	436.835.000	446.835.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kelurahan Klego	100 persen	373.924.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatana	7 Lembaga Kemasyarakatana	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatana	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	-	149.244.000	149.244.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Unit	82.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	275.091.000	275.091.000	285.091.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	279.424.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Kelurahan Gamer				354.222.000	379.222.000	402.222.000								115.000.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				354.222.000	379.222.000	402.222.000								115.000.000	
KECAMATAN				354.222.000	379.222.000	402.222.000								115.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	354.222.000	379.222.000	402.222.000							100 persen	115.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	354.222.000	379.222.000	402.222.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kelurahan Gamer	100 persen	115.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DBH DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	124.244.000	149.244.000	162.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		5 Unit	70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	217.478.000	217.478.000	227.478.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	30.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Kelurahan Noyontaansari				455.287.000	653.787.000	663.787.000								404.312.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				455.287.000	653.787.000	663.787.000								404.312.000	
KECAMATAN				455.287.000	653.787.000	663.787.000								404.312.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	455.287.000	653.787.000	663.787.000							100 persen	404.312.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	455.287.000	653.787.000	663.787.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat	100 persen	404.312.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	4 Unit	149.244.000	347.594.000	347.594.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	BPHTB DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Unit	97.525.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	293.543.000	293.693.000	303.693.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		8 Pokmas / Ormas	294.287.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Kelurahan Setono				465.379.000	532.879.000	542.879.000								445.397.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				465.379.000	532.879.000	542.879.000								445.397.000	
KECAMATAN				465.379.000	532.879.000	542.879.000								445.397.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	465.379.000	532.879.000	542.879.000							100 persen	445.397.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	465.379.000	532.879.000	542.879.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat Kelurahan Setono	100 persen	445.397.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	131.882.000	199.382.000	199.382.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Unit	77.638.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	320.997.000	320.997.000	330.997.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		9 Pokmas / Ormas	355.259.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Kelurahan Kalibaros				398.347.000	448.347.000	508.347.000								559.091.000	
UNSUR KEWILAYAHAN				398.347.000	448.347.000	508.347.000								559.091.000	
KECAMATAN				398.347.000	448.347.000	508.347.000								559.091.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	398.347.000	448.347.000	508.347.000							100 persen	559.091.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	398.347.000	448.347.000	508.347.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	Masyarakat, RT, RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu,, Posbindu, PKK, FKSS, Kelompok Tani, Tagana	100 persen	559.091.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	7 Unit	138.366.000	188.366.000	238.366.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	BPHTB DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		7 Unit	270.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	247.481.000	247.481.000	257.481.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Pokmas / Ormas	274.091.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				7.002.296.000	7.997.296.000	8.004.856.000								4.159.757.500	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				7.002.296.000	7.997.296.000	8.004.856.000								4.159.757.500	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.002.296.000	7.997.296.000	8.004.856.000								4.159.757.500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	3.395.796.000	3.445.796.000	3.425.231.000							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	1.985.190.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	19.772.000	19.772.000	19.412.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	100 persen	10.912.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	6.624.000	6.624.000	6.264.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		3 Dokumen	2.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.148.000	1.148.000	1.148.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Dokumen	1.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		15 Laporan	6.912.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.759.774.000	2.759.774.000	2.759.774.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	100 persen	1.748.274.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.722.835.000	2.722.835.000	2.722.835.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		14 Orang/bulan	1.713.774.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	35.875.000	35.875.000	35.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Dokumen	33.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.064.000	1.064.000	1.064.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Laporan	1.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	100 persen	9.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Paket	9.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	139.590.000	139.590.000	128.997.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	100 persen	94.413.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	3.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	48.650.000	48.650.000	60.220.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	4.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	18.500.000	18.500.000	18.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Paket	19.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.060.000	6.060.000	6.060.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		2 Paket	8.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.890.000	1.890.000	990.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Dokumen	2.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	59.340.000	59.340.000	38.227.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		40 Laporan	27.113.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	267.360.000	267.360.000	267.360.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	100 persen	61.561.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	730.000	730.000	730.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		4 Laporan	1.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57.900.000	57.900.000	57.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	29.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	208.730.000	208.730.000	208.730.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		12 Laporan	30.961.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	204.300.000	254.300.000	244.688.000			Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	100 persen	60.530.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	58.410.000	58.410.000	48.798.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		10 Unit	44.530.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	138.140.000	188.140.000	188.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		1 Unit	8.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	17 Unit	7.750.000	7.750.000	7.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-07	Prio Prov-04	Prio Kota-12		17 Unit	8.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen	100 persen	1.946.743.000	2.006.743.000	1.984.808.000							100 persen	874.967.500	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100 persen	100 persen	1.946.743.000	2.006.743.000	1.984.808.000			Prio Nas-01	Prio Prov-04	Prio Kota-11	Masyarakat etnis/suku/agama/ormas/generasi muda	100 persen	874.967.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	268 Orang	0 Orang	19.560.000	19.560.000		Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-01	Prio Prov-04	Prio Kota-11		0 Orang	26.792.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 Orang	1615 Orang	235.900.000	235.900.000	213.525.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-01	Prio Prov-04	Prio Kota-11		1615 Orang	142.056.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	566 Keluarga	1104 Keluarga	1.155.340.000	1.215.340.000	1.235.340.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-01	Prio Prov-04	Prio Kota-11		1104 Keluarga	114.619.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen	535.943.000	535.943.000	535.943.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-01	Prio Prov-04	Prio Kota-11		1 Dokumen	591.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16,00 lembaga	16,00 lembaga	1.052.090.000	1.717.090.000	1.699.290.000							16,00 lembaga	859.496.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100 persen	100 persen	1.052.090.000	1.717.090.000	1.699.290.000			Prio Nas-01	Prio Prov-04	Prio Kota-11	Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	100 persen	859.496.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600 Orang	576 Orang	827.980.000	1.402.980.000	1.400.180.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-01	Prio Prov-04	Prio Kota-11		576 Orang	774.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	630 Orang	224.110.000	314.110.000	299.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-01	Prio Prov-04	Prio Kota-11		630 Orang	84.796.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen	100 persen	220.900.000	440.900.000	570.913.000							100 persen	136.399.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat	7 kali	7 kali	220.900.000	440.900.000	570.913.000			Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11	Organisasi Kemasyarakatan	7 kali	136.399.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	171 Orang	220.900.000	440.900.000	570.913.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		171 Orang	136.399.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 persen	100 persen	97.837.000	97.837.000	67.527.000							100 persen	212.054.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya	1 kali	1 kali	97.837.000	97.837.000	67.527.000			Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11	Masyarakat etnis/ suku/agama/ormas/ generasi muda	1 kali	212.054.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	150 Orang	97.837.000	97.837.000	67.527.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		150 Orang	212.054.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 persen	100 persen	288.930.000	288.930.000	257.087.000							100 persen	91.651.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rencana penanganan konflik sosial yang disusun	1 laporan	1 laporan	288.930.000	288.930.000	257.087.000			Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11	Masyarakat etnis/ suku/agama/ormas/ generasi muda	1 laporan	91.651.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	682 Orang	288.930.000	288.930.000	257.087.000	Kota Pekalongan, Semua Kec. dan Kel.	DAU	Prio Nas-02	Prio Prov-04	Prio Kota-11		682 Orang	91.651.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H				1.013.929.456.000	1.051.367.436.000	1.093.925.560.000								1.034.096.004.250	

Keterangan Kode Prioritas Pembangunan

Prioritas Nasional

Prio Nas-01 = Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Prio Nas-02 = Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Prio Nas-03 = Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Provinsi	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Prio Nas-04 = Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas															
Prio Nas-05 = Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri															
Prio Nas-06 = Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan															
Prio Nas-07 = Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan															
Prio Nas-08 = Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur															
<u>Prioritas Provinsi</u>															
Prio Prov-01 = Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas															
Prio Prov-02 = Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata															
Prio Prov-03 = Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan															
Prio Prov-04 = Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif															
<u>Prioritas Kota Pekalongan</u>															
Prio Kota-01 = Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya															
Prio Kota-02 = Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan															
Prio Kota-03 = Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan															
Prio Kota-04 = Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing															
Prio Kota-05 = Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus															
Prio Kota-06 = Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh															
Prio Kota-07 = Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup															
Prio Kota-08 = Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah															
Prio Kota-09 = Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan															
Prio Kota-10 = Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal															
Prio Kota-11 = Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah															
Prio Kota-12 = Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment															

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

5.3 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Pekalongan bertambah sebesar Rp. 42.558.124.000 dari semula Rp. 1.051.367.436.000 (APBD Penetapan) menjadi Rp. 1.093.925.560.000 (Perubahan RKPD). Kerangka pendanaan untuk tahun 2025 secara lengkap disajikan dalam Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Perubahan Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	1.005.379.456.000	1.042.817.436.000	1.033.940.712.000	28.561.256.000	(8.876.724.000)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	297.670.934.000	304.505.199.000	298.449.591.000	778.657.000	-6.055.608.000
Pendapatan Pajak Daerah	141.900.000.000	148.200.000.000	140.250.255.000	-1.649.745.000	-7.949.745.000
Hasil Retribusi Daerah	145.000.000.000	144.355.743.000	142.179.512.000	-2.820.488.000	-2.176.231.000
Hasil Pengel. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.226.934.000	7.226.934.000	7.400.295.000	173.361.000	173.361.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.544.000.000	4.722.522.000	8.619.529.000	5.075.529.000	3.897.007.000
PENDAPATAN TRANSFER	707.708.522.000	738.312.237.000	734.676.749.000	26.968.227.000	-3.635.488.000
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	656.741.652.000	687.345.367.000	680.037.879.000	23.296.227.000	-7.307.488.000
Bagi Hasil	27.266.333.000	43.618.577.000	43.618.577.000	16.352.244.000	0
Dana Alokasi Umum	478.357.629.000	488.347.066.000	485.041.025.000	6.683.396.000	-3.306.041.000
Dana Alokasi Khusus	147.117.690.000	148.163.226.000	144.161.779.000	-2.955.911.000	-4.001.447.000
Dana Insentif Fiskal	4.000.000.000	7.216.498.000	7.216.498.000	3.216.498.000	0
Transfer Antar Daerah	50.966.870.000	50.966.870.000	54.638.870.000	3.672.000.000	3.672.000.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	50.966.870.000	50.966.870.000	50.966.870.000	0	0
Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	3.672.000.000	3.672.000.000	3.672.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	814.372.000	814.372.000	814.372.000
Pendapatan Hibah			814.372.000	814.372.000	814.372.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0
BELANJA	1.013.929.456.000	1.051.367.436.000	1.093.925.560.000	79.996.104.000	42.558.124.000
BELANJA OPERASI	917.759.098.383	941.824.019.000	955.801.796.000	38.042.697.617	13.977.777.000
Belanja Pegawai	437.583.646.500	436.968.612.000	445.994.388.000	8.410.741.500	9.025.776.000
Belanja Barang dan Jasa	451.848.793.633	460.104.668.000	474.314.308.000	22.465.514.367	14.209.640.000
Belanja Hibah	27.100.804.250	43.286.089.000	33.894.200.000	6.793.395.750	-9.391.889.000
Belanja Bantuan Sosial	1.225.854.000	1.464.650.000	1.598.900.000	373.046.000	134.250.000
BELANJA MODAL	93.686.357.617	107.059.417.000	127.323.764.000	33.637.406.383	20.264.347.000
Belanja Modal Tanah	240.000.000	518.740.000	556.340.000	316.340.000	37.600.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.363.653.050	23.675.679.000	40.444.464.000	27.080.810.950	16.768.785.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.893.233.567	31.290.646.000	30.996.629.000	-1.896.604.567	-294.017.000
Belanja Modal Jalan	47.011.631.000	51.327.557.000	53.927.198.000	6.915.567.000	2.599.641.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.340.000	104.295.000	1.331.167.000	1.250.827.000	1.226.872.000
Belanja Aset Lainnya	97.500.000	142.500.000	67.966.000	-29.534.000	-74.534.000

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5	6
BELANJA TAK TERDUGA	2.484.000.000	2.484.000.000	10.800.000.000	8.316.000.000	8.316.000.000
Belanja Tak Terduga	2.484.000.000	2.484.000.000	10.800.000.000	8.316.000.000	8.316.000.000
TRANSFER	0	0	0	0	0
Transfer Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN	8.550.000.000	8.550.000.000	59.984.848.000	51.434.848.000	51.434.848.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	15.000.000.000	66.434.848.000	51.434.848.000	51.434.848.000
Penggunaan SiLPA	15.000.000.000	15.000.000.000	66.431.393.447	51.431.393.447	51.431.393.447
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	3.454.553	3.454.553	3.454.553
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.450.000.000	6.450.000.000	6.450.000.000	0	0
Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000	0	0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0

Sumber: Bapperida, BPKAD Kota Pekalongan, 2025

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun guna mengakomodir dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, perubahan kebijakan Pusat maupun Provinsi, perkembangan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan ini juga dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta mengintegrasikan program Asta Cita yang merupakan bagian dari dinamika pembangunan yang perlu diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Penyesuaian dilakukan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan Kota Pekalongan. Selanjutnya, Perubahan RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Akhirnya, Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan tentu saja sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Pekalongan, 28 Mei 2025

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025.
- www.pekalongankota.bps.go.id, 2025.
- www.bps.go.id, 2025.



Pekalongan

*City Of Crafts
and Folk Art*



unesco

Member of
Creative Cities Network

